

ANALISIS CSIS

Hubungan Internasional dalam Dasawarsa 1990-an

- Keamanan di Asia Tenggara dalam Dasawarsa 1990-an: Hubungan Amerika Serikat - ASEAN, Suatu Perspektif Indonesia
- Kebijakan Luar Negeri Uni Soviet Memasuki Tahun-tahun 1990-an
- Hubungan ASEAN-Indocina di Tahun 1990-an: Beberapa Skenario
- Peran Internasional Jepang
- Perkembangan Menuju Perdamaian Arab-Israel
- Pangsa Pasar dan Pengembangan Ekspor Non-Migas Indonesia ke Jepang
- Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN



Analisis CSIS

Logo CSIS

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai jurnal berkala untuk menyajikan tulisan-tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. ANALISIS adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri. Tetapi sumbangan tulisan dari luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam ANALISIS sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis masing-masing.



Mulai tahun 1989 CSIS menggunakan logo baru: *Nalar Ajar Terusan Budi*. Logo berbentuk sebuah piringan cekung berukiran bola dunia yang melatarbelakangi gambaran orang tanpa busana duduk memangku buku terbuka beralaskan kain lampin. Tangan kiri menunjuk ke buku dan tangan kanan menunjuk ke atas menggambarkan orang yang sedang menguraikan pengetahuan yang ditimba dari buku. Ketelanjangan gambar orang di tengah piringan melambangkan keterbukaan budi -- tiadanya sikap a priori -- pada warga CSIS, seperti pada para analis umumnya, dalam kegiatan studinya. Gambar ini menunjukkan kegiatan belajar dan mengajar atau menguraikan pikiran, sebagaimana para analis CSIS melakukan studi dan menguraikan pikiran mereka kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sedangkan bola dunia melambangkan alam jagad raya yang menjadi cakrawala dan lingkup CSIS berada dan berkarya. Kalimat *Nalar Ajar Terusan Budi* yang tertera pada lingkaran piringan adalah *surya sengkala*: cara merangkai kata dalam tradisi Jawa untuk menandai suatu tahun penting menurut peredaran matahari dan sekaligus mengemukakan makna yang terkandung dalam peristiwa yang tahunnya ditandai itu. *Nalar* menurut tradisi Jawa itu berwatak 1, *Ajar* berwatak 7, *Terusan* berwatak 9, dan *Budi* berwatak 1. Sebagaimana lazimnya sengkala dibaca dalam urutan terbalik: 1971, tahun CSIS berdiri. *Nalar Ajar Terusan Budi* juga menggambarkan alam pikiran, dan hakikat kegiatan CSIS. CSIS sebagai lembaga profesi keilmuan, yang didukung oleh kreativitas individu, pada hakikatnya mempunyai kegiatan intelektual yang bukan hanya menganalisa kebenaran tetapi juga terpanggil untuk menunaikan kewajiban sosialnya. Makna *Nalar Ajar Terusan Budi* adalah bahwa bagi CSIS, bernalar, belajar serta menguraikan pikiran adalah kelanjutan wajar dari budi yang arif. Logo dibuat oleh G. Sidharta dalam bentuk asli berupa piringan perunggu.

Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab

Rufinus LAHUR

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEF, A.M.W. PRANARKA, J. Soedjati DJIWANDONO,
M. Hadi SOESASTRO, Harry TJAN SILALAH, Jusuf WANANDI,
Clara JOEWONO, Kirdi DIPOYUDO, Djisman S. SIMANDJUNTAK,
A.R. SUTOPO, Onny S. PRIJONO

Redaksi Pelaksana

Bambang WALGITO, Sunarto NDARU MURSITO, Medelina K. HENDYTIO

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

ANALISIS CSIS

TAHUN XVIII, NO. 5, SEPTEMBER-OKTOBER 1989

Daftar Isi

- Pengantar Redaksi 398
- Keamanan di Asia Tenggara dalam Dasawarsa 1990-an: Hubungan Amerika Serikat - ASEAN Suatu Perspektif Indonesia
Jusuf WANANDI 400
- Kebijakan Luar Negeri Uni Soviet Memasuki Tahun-tahun 1990-an
Wiratmo SOEKITO 420
- Hubungan ASEAN-Indocina di Tahun 1990-an: Beberapa Skenario
C.P.F. LUHULIMA 437
- Peran Internasional Jepang
Bantarto BANDORO 449
- Perkembangan Menuju Perdamaian Arab-Israel
Kirdi DIPOYUDO 459
- Pangsa Pasar dan Pengembangan Ekspor Non-Migas Indonesia ke Jepang
Rustian KAMALUDDIN 480
- Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN
SUDIBYO & Yoyok ARIESSUSANTO 490

Pengantar Redaksi

DENGAN MENGUNGKAP LATAR BELAKANG perkembangan Asia-Pasifik di masa depan, *Jusuf Wanandi* melihat pentingnya peranan Amerika Serikat di kawasan Pasifik pada umumnya dan di wilayah Asia Tenggara pada khususnya, termasuk lingkungan ASEAN. Ia mengajukan persoalan-persoalan kritis dewasa ini serta hal-hal yang dapat timbul di masa mendatang yang mungkin menghalangi hubungan antara ASEAN dan Amerika Serikat dan menyarankan cara menangani persoalan itu.

Dari perkembangan Uni Soviet akhir-akhir ini, kita mengharapkan bahwa dalam dasawarsa yang akan datang *perestroika* dan *glasnost* tetap merupakan kebijakan utama Uni Soviet. Dengan demikian kebijakan luar negeri Soviet akan melanjutkan kebijakan luar negerinya seperti yang dapat diamati sekarang. Oleh karena itu, *Wiratmo Soekito* meninjau perkembangan kebijakan luar negeri Soviet sejak Gorbachev mengambil-alih kekuasaan, sehingga dapat dilihat garis-garis besar kebijakan luar negerinya di Asia, Eropa, Dunia Ketiga serta pergeseran strateginya memasuki tahun 1990-an.

Bantarto Bandoro mengemukakan bahwa sebagai kekuatan besar di Asia, Jepang akan mampu menawarkan kepemimpinan, tetapi harus menghilangkan kesan buruk bangsa-bangsa di dunia mengenai tingkah-lakunya di masa lalu dan mengakui bahwa tiada satu kekuatan pun di kawasan Asia yang luas dan beragam mampu membentuk kepemimpinan politik dan ekonomi dalam arti yang eksklusif. Jika Jepang dapat menemukan visi dan kepemimpinan politik ke arah itu, prospek Asia-Pasifik mungkin akan lebih cerah.

Masalah inti dalam hubungan ASEAN dengan Indocina dewasa ini ialah konflik Kamboja. *C.P.F. Luhulima* menguraikan bahwa konflik Kamboja dan upaya penyelesaiannya berputar pada tiga negara besar Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Muangthai dan Vietnam. Ketiga negara ini tidak menghendaki berlanjutnya konfrontasi tentang Kamboja dan telah menyuarakan keinginan untuk mengembangkan hubungan baik antar semua negara di Asia Tenggara. Beberapa kemungkinan perkembangan hubungan antara kedua kelompok negara Asia Tenggara pada tahun 1990-an mungkin dapat memenuhi keinginan tadi.

Kirdi Dipoyudo menguraikan bahwa dengan meningkatnya tekanan dalam dan luar negeri Pemerintah Israel akan memperlunak sikapnya untuk mengadakan perundingan dengan PLO/Palestina dalam konperensi perdamaian internasional seperti diserukan oleh Majelis Umum PBB. Kedua negara adidaya sudah sepakat bahwa sengketa Arab-Israel harus segera

mungkin diselesaikan demi memperlancar hubungan baik antara mereka. Mengingat isu-isunya, perundingan akan alot dan makan waktu tetapi akan mencapai kemajuan berkat momentum yang diciptakannya dan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet di pihak lain, sampai pada akhirnya dicapai suatu penyelesaian yang menyeluruh, termasuk berdirinya negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Rustian Kamaluddin menguraikan beberapa hal mengenai perdagangan ekspor khususnya ekspor non-migas Indonesia ke Jepang. Ia mengemukakan perkembangan, hambatan dan pelbagai masalah serta saran bagaimana meningkatkan ekspor non-migas dan pangsa pasar komoditi kita di pasaran Jepang. Berbagai usaha dan tindakan perlu dilakukan secara terpadu antara departemen terkait dan pihak swasta, mulai dari proses di dalam negeri hingga di tempat pasarnya di luar negeri, khususnya di Jepang.

Kegiatan ASEAN sampai dengan bulan Agustus 1989 disajikan dalam penerbitan ini. Ringkasan Peristiwa kegiatan ASEAN ini diasuh oleh *Sudibyo* dan *Yoyok Ariessusanto* sebagai anggotanya.

September 1989

REDAKSI

Keamanan di Asia Tenggara dalam Dasawarsa 1990-an: Hubungan Amerika Serikat - ASEAN Suatu Perspektif Indonesia*

Jusuf WANANDI

Pendahuluan

AMERIKA SERIKAT memainkan peranan penting di kawasan Asia-Pasifik, termasuk di Asia Tenggara. Tidak diragukan lagi, bahwa wilayah Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Misalnya dalam bidang ekonomi, wilayah ini telah menjadi suatu bagian yang integral dari kawasan pertumbuhan yang amat dinamis dan sangat pesat di dunia. Penyesuaian perubahan-perubahan struktural yang berlanjut dalam perekonomian kawasan akan menciptakan saling ketergantungan yang semakin besar, dan dalam sektor-sektor tertentu bahkan akan mengakibatkan suatu integrasi di antara mereka.

Demikian pula, kaitan-kaitan strategis dan keamanan telah berkembang di antara Asia Timur dan Asia Tenggara sedemikian rupa sehingga dua wilayah ini tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi, kebutuhan strategis dan keamanan dua wilayah ini terus-menerus berbeda, karena intensitas ketegangan-ketegangan dalam hubungan negara-negara adikuasa di Asia Tenggara pada umumnya lebih rendah daripada di Asia Timur. Mendasari perkembangan-perkembangan ini adalah hubungan-hubungan politik yang lebih erat yang berkembang di antara berbagai negara di kawasan dan yang memainkan suatu peranan kunci dalam penciptaan stabilitas kawasan. Hubungan-hubungan politik ASEAN-Amerika Serikat merupakan satu perkembangan yang demikian penting.

Dalam mengulas hubungan tersebut, tulisan ini pertama-tama akan melihat peranan Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik pada umumnya dan di wilayah Asia Tenggara pada khususnya, dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Kemudian, tulisan ini akan menganalisis pentingnya hubungan-

*Diterjemahkan oleh Sunarto nDaru Mursito dari Jusuf WANANDI, "Security in Southeast Asia in 1990s: U.S.-ASEAN Relations, an Indonesian Perspective," yang disampaikan dalam Symposium on Evolving Perspectives for Pacific Basin Strategies in the 1990s and Beyond, Honolulu, Hawaii, 2-3 Maret 1989.

hubungan politik baik bagi ASEAN maupun bagi Amerika Serikat. Dengan menyadari corak asimetris dari hubungan-hubungan tersebut, tekanan akan diberikan pada pentingnya Amerika Serikat bagi ASEAN. Oleh karenanya, tulisan ini akan mendiskusikan persoalan-persoalan kritis dewasa ini dan hal-hal yang dapat timbul di masa mendatang yang mungkin mengganggu hubungan-hubungan antara ASEAN dan Amerika Serikat, dan menyarankan cara-cara bagaimana menangani persoalan-persoalan itu.

Peranan Amerika Serikat di Kawasan

Arti kawasan Asia-Pasifik yang semakin penting dalam perkembangan ekonomi dunia dan masalah-masalah politiknya pastilah akan mempunyai pengaruh yang penting atas kebijakan Amerika Serikat terhadap kawasan ini. Meskipun demikian, sikap Amerika Serikat di kawasan akan tetap ditentukan pertama-tama oleh peranan globalnya sebagai negara adikuasa. Oleh karena itu, pertanyaan yang relevan untuk dipikirkan pertama-tama adalah apakah peranan Amerika Serikat sebagai suatu kekuatan global, atau hegemoni Amerika Serikat, sedang menyusut seperti dikemukakan oleh sejarawan dari Yale, Paul Kennedy, ilmuwan politik dari Princeton, Robert Gilpin, dan banyak lain-lainnya. Perdebatan mengenai isu ini telah menarik banyak perhatian publik Amerika Serikat dan membuat buku Paul Kennedy¹ menjadi *best seller* nasional, khususnya sehubungan dengan kampanye pemilihan presiden tahun 1988 dan datangnya suatu era baru setelah delapan tahun pemerintahan Reagan.

¹Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000* (New York: Random House, 1987).

Kennedy memperingatkan masyarakat Amerika Serikat dan para pemimpinnya bahwa jikalau Amerika Serikat tidak mengambil kebijakan dan pendekatan baru yang mendasar dalam hal pendidikan, teknologi dan produktivitas dan mencari cara baru melalui upaya-upaya diplomatik untuk mengurangi beban pertahanannya, dan jikalau Amerika Serikat tidak dapat merumuskan suatu strategi militer baru yang konsisten dan berjangka panjang, maka peranannya di dunia sungguh-sungguh akan merosot sebagaimana dialami oleh Britania Raya sebagai akibat negeri jajahannya yang terlampaui luas (*her "Imperial Overstretched"*).²

Kritik-kritik menunjukkan bahwa kriteria Kennedy perihal kekuatan hegemonis yang sedang merosot tidak berlaku bagi Amerika Serikat. Kritik-kritik ini berpendapat bahwa Amerika Serikatlah yang telah menciptakan dan mendukung sistem-sistem persekutuan Barat yang telah membuat Jepang dan Eropa Barat menjadi pesaing-pesaing dan menguatkan kedudukan mereka berhadapan dengan Amerika Serikat. Dalam kenyataannya Amerika Serikat tidak pernah bermaksud mendirikan suatu imperium. Sekarang ini, kendatipun pertumbuhan dan perkembangan ekonomi mereka masing-masing, baik Jepang maupun Eropa Barat tidak menjalankan suatu kebijakan untuk menggantikan Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemoni baru. Masyarakat Eropa (ME) tidak berada dalam posisi untuk melakukan itu kecuali mengintegrasikan dirinya dalam suatu persatuan politik, sementara Jepang secara sadar menghindari posisi demikian mengingat kendala-kendala riil

²Paul Kennedy, "Decline -- Not Necessary Fall -- of the American Empire," *Washington Post*, 7 Februari 1988.

yang dihadapinya.³

Brzezinski, misalnya, mengakui manfaat perdebatan tentang posisi global Amerika Serikat, tatkala diadakan perumusan kembali kebijakan-kebijakan Amerika Serikat karena timbulnya keadaan-keadaan baru. Hal-hal ini mestinya meliputi: suatu doktrin strategis tentang bagaimana seharusnya Amerika Serikat mengembangkan dan memperkuat keamanan nasionalnya; suatu pemahaman atas kendala-kendala geopolitiknya yang akan menentukan fokus partisipasi dan keterlibatan Amerika Serikat dalam masalah-masalah kawasan; dan suatu persetujuan mengenai bagaimana seharusnya Amerika Serikat menjalankan peranan globalnya.

Pelajaran-pelajaran yang ditarik dari sejarah oleh Kennedy ketika mengemukakan merosotnya peranan Amerika Serikat juga telah dipertanyakan oleh Charles Wolf Jr. dari Rand Corporation.⁴ Menurut Wolf ada dua sebab yang mendasari alasan kelemahan dan penyusutan Amerika Serikat dewasa ini dan kecenderungan-kecenderungannya di waktu mendatang. Pertama, adalah penyusutan bagian Amerika Serikat dalam GNP dunia secara keseluruhan. Wolf berpendapat bahwa pengamatan ini adalah benar jika penyusutan itu dibandingkan dengan keadaan tahun 1950-an ketika Eropa Barat dan Jepang belum pulih dari kehancuran akibat perang. Tetapi jika perbandingan diambil dengan periode mulai pertengahan tahun 1960-an -- atau bahkan dengan tahun 1938 --

maka bagian Amerika Serikat dalam produksi global hampir tetap sama: yaitu dahulu 22% dan sekarang 24%.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Wolf, Jepang dan negara-negara Pasifik lainnya sungguh-sungguh tumbuh lebih cepat daripada Amerika Serikat, tetapi GNP Amerika Serikat tumbuh lebih cepat daripada GNP Eropa Barat, Uni Soviet dan kebanyakan negara berkembang, dan ini menjelaskan mengapa bagian Amerika Serikat dalam GNP dunia sebenarnya tetap tak berubah. Menurut perkiraan Komisi Strategi dari Rand yang dipimpin oleh Ikle dan Wohlstetter, pada tahun 2010 GNP Amerika Serikat akan mencapai sekitar US\$7,9 trilyun dengan harga konstan tahun 1986 untuk pertumbuhan 2,6% setahun (berdasarkan suatu asumsi konservatif tentang pembentukan modal, perkembangan lapangan kerja, dan perubahan produktivitas). Atas dasar perkiraan itu diramalkan bahwa bagian Amerika Serikat dalam GNP dunia pada tahun 2010 tidak akan berubah.

Kedua, ada pandangan bahwa kekuatan Amerika Serikat sekarang ini telah menjadi tidak efektif lagi. Wolf mengakui bahwa Amerika Serikat dihadapkan pada terlalu banyak permasalahan dan bahwa batas-batas dan kendala-kendala Amerika Serikat dirasakan dalam banyak bidang, apakah itu dalam bidang ekonomi (untuk membuka pasaran Jepang), dalam bidang keamanan (pembagian beban dengan sekutu-sekutu dalam NATO), atau masalah-masalah politik (menggantikan pemerintahan Sandinista di Nicaragua dengan yang lain). Wolf menekankan bahwa seharusnya juga diakui bahwa dalam apa yang disebut era hegemoni Amerika Serikat, Cuba tak dapat dicegah menjadi komunis meskipun jaraknya dari Florida hanya 150 mil; Amerika Serikat juga

³Zbigniew Brzezinski, "America, New Geostrategy," *Foreign Affairs* (Spring 1988): 680-699. Lihat juga, Richard Armitage, "The US Security Role in East Asia -- Not an Outdated Milestone, but a Cornerstone of America's Future," Sambutan disampaikan di National Defence University, 25 Februari 1988.

⁴Charles Wolf Jr., "US Decline, Illusion and Reality," *Asian Wall Street Journal*, 13-14 Mei 1988.

tidak dapat mencegah meluasnya senjata nuklir (di Perancis dalam tahun 1960, RRC dalam tahun 1964, dan India dalam tahun 1974); Amerika Serikat juga tak dapat mencegah Perancis keluar dari NATO (1967) dan Vietnam Selatan jatuh ke tangan komunis (1975). Sebaliknya, hasil-hasil kebijakan dan pendekatan Amerika Serikat selama periode "penyusutan" tahun 1980-an dipandang oleh Wolf mempunyai arti penting; Amerika Serikat telah menolong proses demokratisasi di El Salvador, Filipina, Korea Selatan, dan mungkin Panama; Ia telah menandatangani Persetujuan Kekuatan Nuklir Jarak Sedang (INF) dengan Uni Soviet, yang juga penting untuk keamanan Eropa dan Asia; Amerika Serikat membantu mendorong penarikan tentara Soviet dari Afghanistan; juga membantu mempertahankan kebebasan jalur pelayaran di Teluk Persia. Lebih lanjut, dalam persaingan antara kepercayaan akan ekonomi pasar yang berdasarkan peranan swasta di satu pihak, dan ekonomi kolektif yang tak mementingkan pasar di lain pihak, periode 1980-an juga telah menyaksikan bahwa yang disebut pertama memperoleh keunggulan. Sementara itu, Uni Soviet pesaing terkuat Amerika Serikatlah, yang sedang mengalami suatu kemunduran relatif, tatkala sekutu-sekutu dan teman-teman Amerika Serikat mengalami kemajuan besar.

Secara teoretis, barangkali tinjauan W.W. Rostow⁵ atas buku Kennedy adalah yang paling menarik. Dilihat dari perspektif sejarah, Rostow membedakan antara kekuatan hegemonis demikian seperti pada zaman Philippe II, Louis XIV, Napoleon, Wilhelm II dan Hitler yang mengupayakan pengendalian total atas benua Eropa melalui

pengumpulan kekuatan ekonomi, yaitu suatu kekuatan yang memainkan strategi "imbangan kekuatan" seperti dilakukan Inggris Raya menghadapi kekuatan hegemonis Eropa (Perancis), atau yang dilakukan Amerika Serikat setelah Perang Dunia II baik di Eropa maupun Asia dengan mengadakan sistem persekutuan-persekutuan. Dengan menggunakan cara ini, Amerika Serikat tidak perlu berada dalam posisi kekuatan ekonomi yang mutlak *mendominasi*, dan sistem Bretton Woods yang sudah ketinggalan zaman dapat digantikan oleh suatu sistem ekonomi baru yang dapat diterima oleh kekuatan-kekuatan ekonomi besar.

Kritik-kritik lain, seperti yang diajukan Edward Luttwak, William Pfaff dan George Will⁶ terhadap argumen yang dikemukakan Kennedy, tampak seolah-olah menunjukkan bahwa penyusutan kekuatan Amerika Serikat itu bersifat relatif dan berlangsung dalam periode yang lama, karena akhirnya diakui bahwa Amerika Serikat masih tetap sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Bahkan penyusutan relatif ini terutama disebabkan oleh kemajuan perekonomian sekutu-sekutu dan teman-teman Amerika Serikat, terutama di kawasan Pasifik.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa belum waktunya untuk membicarakan kemerosotan hegemoni Amerika Serikat. Hal ini tidak hanya karena rakyat dan pemerintah Amerika Serikat masih berada dalam posisi untuk secara memadai menjawab setiap tantangan perubahan, melainkan juga karena negara-negara yang sedang menga-

⁵W.W. Rostow, "Book Review Essay," *Foreign Affairs* (Spring 1988): 863; dan juga edisi Summer 1988, hal. 111.

⁶Edward Luttwak, "How and Why are the Mighty Fallen," *Guardian Weekly*, 21 Februari 1988; William Pfaff, "America is Decline if It Chooses to Be," *International Herald Tribune*, 10 Februari 1988; dan George F. Will, "Talk of US Decline Comes too Easily," *International Herald Tribune*, 3 Maret 1988.

laini kemajuan besar terutama adalah sekutu-sekutu dan teman-teman Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Negara-negara ini dengan sengaja sedang membentuk kerjasama untuk memelihara tata internasional yang ada dan karena itu bersedia bekerjasama dan membagi beban dengan Amerika Serikat. Sebaliknya, tak satu pun dari sekutu-sekutu dan teman-teman Amerika Serikat di kawasan berambisi atau mampu menggantikan hegemoni Amerika Serikat.

Peranan Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik dalam Jangka Menengah

Untuk lima tahun mendatang diharapkan tidak ada perubahan mendasar dalam peranan Amerika Serikat di kawasan. Hal ini terutama karena keberhasilan, stabilitas dan konsistensi kebijakan Amerika Serikat terhadap kawasan. Hal ini sebagian besar adalah karena dukungan dua partai atas kebijakan Amerika Serikat terhadap kawasan semenjak akhir perang Vietnam, baik partai dalam pemerintahan maupun dalam Kongres, kecuali untuk periode singkat pada tahun-tahun awal pemerintahan Carter ketika dibuat suatu rencana untuk menarik angkatan darat Amerika Serikat dari Korea Selatan dan untuk mengurangi jumlah pasukan angkatan laut dan angkatan udara yang ditempatkan di Pasifik Barat. Selain itu, pemerintahan Reagan telah memberi perhatian lebih besar kepada kawasan Asia-Pasifik karena kawasan ini dipandang sebagai yang paling dinamis secara ekonomi dan stabil secara politis atau militer di dunia. Stabilitas ini tercapai sebagian berkat kehadiran kekuatan konvensional Amerika Serikat yang cukup, di samping kekuatan senjata nuklir.

Pada gilirannya, lingkungan yang stabil telah menunjang kegiatan usaha-usaha pembangunan nasional banyak negara di kawasan. Dalam rangka memelihara lingkungan yang stabil ini pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang dan Filipina dipandang vital.

Karena peranan yang demikian itu, dikhawatirkan bahwa penghapusan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Subic Bay dan Clark Field akan membuat Amerika Serikat memikirkan strategi penggelarannya ke tempat baru di Pasifik Barat, khususnya di Asia Tenggara. Masalah pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina itu menjadi masalah yang sensitif, terutama sejak perundingan-perundingan perpanjangan waktu persetujuan terlaksana dalam suatu era ketika nasionalisme Filipina berada pada puncaknya.

Sementara itu, kawasan Asia-Pasifik sendiri juga sedang mengalami suatu perubahan mendasar menuju multipolaritas dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan di mana hubungan-hubungan yang sebelumnya berdasarkan suatu sistem persekutuan berubah menuju kerjasama-kerjasama yang coraknya kurang ketat.⁷ Perubahan menuju multipolaritas politik dimulai dengan Doktrin Nixon, yang dicanangkan tahun 1969, yang pada hakikatnya menetapkan bahwa Amerika Serikat menyerahkan tanggung jawab kepada sekutu-sekutu dan teman-teman Asia-nya untuk membela diri sendiri dan untuk mengutamakan strategi penggelaran lebih lanjut Amerika Serikat bekerjasama dengan negara-negara maritim Asia Timur. Kecenderungan menuju suatu dunia yang multipolar menjadi lebih nyata setelah Presiden Nixon mengunjungi Beijing tahun 1972.

⁷Lihat Robert A. Scalapino, "Asia's Future," *Foreign Affairs* 66, No. 1 (Fall, 1987).

Suatu masalah besar yang timbul dari perkembangan demikian adalah sementara perubahan-perubahan strategis ini terjadi di kawasan, pada saat pangkalan-pangkalan militer dirasakan vital untuk pemeliharaan perdamaian dan stabilitas seluruh kawasan Asia-Pasifik, perundingan-perundingan untuk perpanjangan waktu dan peninjauan kembali persetujuan pangkalan-pangkalan militer di Filipina mendapatkan tanggapan-tanggapan yang tidak menguntungkan di Filipina. Akan tetapi, tanggapan-tanggapan ini dapat dimengerti dan perlu dipahami dari sudut latar-belakang perubahan-perubahan politik dalam negeri Filipina.

Pangkalan-pangkalan militer itu sangat penting untuk menunjang kemampuan Amerika Serikat dan Jepang dalam mengimbangi kehadiran Uni Soviet di Laut Okhotz maupun dalam menjaga keamanan jalur-jalur komunikasi laut (SLOC = *Sea Lanes of Communication*) di kawasan Pasifik dan untuk memproyeksikan kekuatan menuju Samudera Hindia dan Teluk Persia. Secara politis pangkalan-pangkalan militer ini mempunyai arti yang penting, karena melambangkan kehadiran Amerika Serikat di kawasan dan komitmennya pada kawasan. Kehadiran Amerika Serikat menjamin adanya suatu keseimbangan kekuatan yang memadai di kawasan menghadapi kemampuan angkatan laut Uni Soviet di Pasifik. Perimbangan yang demikian menciptakan suatu iklim dan lingkungan stabilitas maupun perdamaian yang memungkinkan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk menggiatkan usaha-usaha pembangunan nasional mereka sampai sekuat tenaga.

Tidaklah begitu sederhana untuk memin-dahkan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat dari Filipina. Biaya-biayanya akan menjadi begitu tinggi (antara US\$10

sampai US\$12 milyar) sehingga akan sulit mendapatkan dana-dana yang diperlukan dari Kongres. Alasan-alasan lain adalah letak geografisnya yang strategis, tersedianya tenaga kerja ahli dan biaya operasional yang relatif rendah. Akan tetapi yang paling penting adalah terbukanya implikasi-implikasi politisnya sebagai akibat gangguan keseimbangan kekuatan, penarikan kehadiran Amerika Serikat dari Asia Tenggara, menyebabkan kekosongan yang siap diisi oleh Uni Soviet, RRC atau Jepang. Pada gilirannya ini akan mempunyai konsekuensi-konsekuensi berbahaya bagi kawasan. Suatu kehadiran militer Jepang di kawasan akan menyebabkan kekhawatiran-kekhawatiran besar tidak hanya di antara negara-negara kawasan melainkan juga di dalam badan politik Jepang sendiri yang tidak siap menerima suatu peranan keamanan yang lebih besar lepas dari Amerika Serikat.

Akhirnya, pangkalan-pangkalan militer itu juga penting bagi bangsa Filipina sendiri. Meskipun akhirnya hubungan-hubungan yang normal antara Amerika Serikat dan Filipina hanya akan dicapai jika pangkalan-pangkalan militer itu dihapuskan, untuk sementara waktu kehadirannya tetap vital untuk bangsa Filipina, karena hanya dengan cara itu Filipina akan memperoleh perhatian dan bantuan ekonomi yang cukup untuk pembangunannya kembali. Dengan tidak adanya pangkalan-pangkalan itu bantuan dan hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat, Jepang dan Masyarakat Eropa, termasuk perdagangan dan investasi, tidak akan sebesar seperti yang ada sekarang (sekitar US\$2 milyar setahunnya dalam bentuk ODA (*Official Development Assistance*), sementara investasi-investasi swasta pun makin meningkat). Tambahan pula, pengawasan terhadap penyelundupan senjata ke Filipina di-

jalankan melalui pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat, sementara itu kebutuhan pertahanan keluar Filipina dapat ditunjang oleh Amerika Serikat sehingga mengurangi biaya-biaya militer dan pertahanan Filipina sendiri.

Amerika Serikat dan Filipina telah mencapai kesimpulan yang memuaskan tentang peninjauan persetujuan atas pangkalan-pangkalan militer itu yang terutama menyangkut persoalan kompensasi. Tetap menjadi suatu tanda tanya besar adalah pembauran persetujuan yang hendak dirundingkan dalam tahun 1989 yang akan melibatkan masalah-masalah yang lebih kompleks, termasuk masuknya senjata-senjata nuklir dan akses yang tak terbatas untuk operasi-operasi Armada Ketujuh dari pangkalan-pangkalan itu. Oleh karenanya, kesepakatan yang berhasil dari perundingan-perundingan ini akan membutuhkan perhatian dan keterlibatan negara-negara lain selain Amerika Serikat. Dalam hal ini negara-negara ASEAN, melalui cara-cara yang mereka anggap cocok, hendaknya menunjukkan suatu tanggung jawab yang lebih besar dengan mendukung untuk sementara waktu diteruskannya kehadiran pangkalan-pangkalan itu, walaupun masalah itu pada dasarnya tetap merupakan suatu persoalan bilateral Amerika Serikat-Filipina.

Sekalipun demikian, harus diakui bahwa demi kepentingan pembangunan bangsa Filipina dan guna mengembangkan hubungan yang wajar dengan Amerika Serikat (dan dengan negara-negara lain), dalam jangka panjang (mungkin setelah tahun 2001) pangkalan-pangkalan militer Amerika itu hendaknya dihapuskan atau dimodifikasi sehingga membuat kehadirannya dapat diterima oleh nasionalisme Filipina.

Sesungguhnya pangkalan-pangkalan militer itu merupakan suatu masalah emosional bagi orang Filipina, karena pangkalan-pangkalan itu dipandang sebagai suatu simbol neo-kolonialisme Amerika Serikat. Ini bermula dari sejarah perjuangan bangsa Filipina merebut kemerdekaan melawan penguasa-penguasa Spanyol yang kehilangan kekuasaannya ketika pada tahun 1898 bangsa Amerika Serikat memenangkan perang menghadapi Spanyol dan mendapatkan Filipina. Setelah Perang Dunia II, ketika bangsa-bangsa Asia lain memperoleh kemerdekaannya, bangsa Filipina mempertahankan hubungannya yang baik dengan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa yang baru muncul. Semenjak itu, hubungan ini menjadi sendi dasar kebijakan luar negeri Filipina, meskipun hubungan tersebut sebagai sesuatu yang bercorakkan "cinta-benci."

Oleh karena itu, perbaikan-perbaikan kiranya perlu dilakukan dengan mengakomodasikan perasaan-perasaan bangsa Filipina, tetapi hal-hal ini hendaknya jangan menjadi suatu penghalang untuk kegiatan pangkalan-pangkalan. Suatu perpanjangan waktu 10 tahun tampaknya diperlukan demi mengamankan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Suatu strategi baru kiranya harus dirumuskan guna menanggapi lingkungan yang berubah di mana pangkalan-pangkalan militer diberi arti yang samasekali berbeda dari yang ada sekarang, antara lain karena perkembangan teknologi. Penyesuaian dapat meliputi hanya perawatan fasilitas-fasilitas yang vital seperti pangkalan Subic, sementara ukuran pangkalan Clark dapat dikurangi untuk melayani fungsi-fungsi vital lapangan udara yang ada di pangkalan. Yang penting adalah memberikan akses pada tujuan-tujuan operasional dalam arti luas, tanpa mengkaitkannya dengan persoal-

an senjata nuklir di kapal maupun di pesawat terbang.

Amerika Serikat tidak ingin lagi sendirian menanggung beban pertahanan dan keamanan dunia internasional, dan sekarang ini mengusahakan suatu strategi pembagian beban dengan sekutu-sekutu dan teman-temannya. Dewasa ini dengan bagian sekitar 35% GNP seluruh negara Barat, Amerika Serikat harus menanggung lebih dari 60% biaya pertahanan negara-negara Barat.

Sementara perubahan-perubahan dalam peranan Amerika Serikat di kawasan akan berlangsung selama beberapa tahun mendatang, maka hubungan Amerika Serikat-Jepang akan terus menjadi sendi dasar kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. Kebijakan ini dilanjutkan dalam pemerintahan Reagan. Selama pemerintahan Nixon, Ford dan Carter tekanan diberikan pada hubungan "strategis" dengan RRC untuk mengendalikan Uni Soviet. Di lain pihak, Jepang dipandang tergantung pada Amerika Serikat dan tidak akan mampu secara strategis berjalan sendirian.

Reagan telah mengubah strategi itu karena ia tampaknya merasa bahwa RRC tidak dapat dipercayai secara ideologis, dan karena RRC sendiri mengubah strateginya dalam konteks hubungan segitiga Amerika Serikat-RRC-Uni Soviet dengan mengambil hubungan yang lebih berjarak sama terhadap Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dasar perubahan dalam kebijakan RRC ini adalah kesadaran bahwa sejak awal tahun 1980-an Uni Soviet tidak lagi merupakan suatu ancaman langsung terhadap keamanannya. Sementara itu, Jepang telah menjadi suatu kekuatan ekonomi dan di bawah pemerintahan Nakasone telah melakukan usaha-usaha serius untuk melaksanakan apa yang disebut *Defense Midterm Review* untuk meningkatkan

kemampuan Jepang membagi beban pertahanan dengan Amerika Serikat, di samping meningkatkan "bantuan strategis"-nya dan ODA (Bantuan Pembangunan Resmi).

Dapat diperkirakan bahwa setiap pemerintahan Amerika Serikat di masa mendatang, entah itu Republik atau Demokrat, akan memelihara hubungan strategis dengan Jepang ini. Amerika Serikat akan mengharapkan suatu pembagian beban yang lebih besar dari Jepang tidak hanya di kawasan Asia-Pasifik melainkan juga meluas ke bagian-bagian lain dunia, terutama dalam bentuk "bantuan strategis" dan ODA Jepang kepada negara-negara yang sedang menghadapi masalah ekonomi serius akibat ketidakstabilan dalam negeri atau ancaman-ancaman eksternal, seperti Meksiko atau Amerika Tengah.

Dalam jangka menengah, hubungan Amerika Serikat-Jepang mungkin akan menghadapi banyak kesulitan, karena meningkatnya saling ketergantungan dan bahkan integrasi dalam bidang-bidang ekonomi, politik dan keamanan yang melibatkan dua masyarakat yang secara budaya demikian berlainan. Perselisihan-perselisihan serius khususnya telah timbul dalam bidang ekonomi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan perdagangan bilateral, persaingan yang tak jujur dalam sektor konstruksi Jepang, dan persaingan dalam bidang-bidang *superconductor* dan teknologi tinggi antara perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan Jepang.

Walaupun Jepang telah memberikan tanggapan-tanggapan positif⁸ terhadap tun-

⁸Lihat, Jusuf Wanandi, "Japan's International and Regional Role: A Regional Perspective," makalah diajukan pada Konperensi Indonesia-Jepang XIII di Bali, 5-7 Juni 1988; *Indonesian Quarterly* Vol. XVI, No. 3 (Juli 1988): 329-342.

tutan pembagian beban, penekanan-penekanan yang berkelanjutan diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, khususnya jika masalahnya dikaitkan pada persoalan-persoalan ekonomi Amerika Serikat-Jepang dan ketidakseimbangan perdagangan. Meningkatnya pembagian beban dalam arti meningkatnya ODA dan bantuan strategis Jepang mendapat tanggapan-tanggapan baik di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Jika hal itu diterjemahkan dalam meningkatnya kemampuan-kemampuan militer dan pertahanan, maka masalah-masalah kawasan yang serius diperkirakan akan muncul. Meskipun demikian, orang seharusnya memperhatikan kenyataan semakin diterimanya peningkatan kemampuan-kemampuan pertahanan Jepang jika kemampuan ini berkembang secara bertahap dan dalam kerangka pembagian beban pertahanan dengan Amerika Serikat.

Suatu kesinambungan dalam kebijakan-kebijakan Amerika Serikat terhadap kawasan Asia-Pasifik mungkin dapat lebih diharapkan di bawah pemerintahan Bush, karena di waktu lalu para penasihat politik luar negeri Dukakis lebih berorientasi ke Eropa, Timur Tengah dan Amerika Tengah. Apalagi, biasanya diperlukan waktu sekurang-kurangnya setahun bagi suatu pemerintahan baru Amerika Serikat yang berasal dari partai lain sebelum dapat benar-benar mengelola politik luar negerinya. Sebaliknya, orang dapat berharap Dukakis memberi perhatian yang lebih besar pada diplomasi multilateral daripada yang telah dilakukan pemerintahan Reagan sampai akhir-akhir ini. Apa pun permasalahannya, bagi Amerika Serikat kawasan Asia-Pasifik adalah vital karena perekonomiannya yang dinamis dan karena di situlah berada mitra dagangnya yang terpenting, maupun karena di kawasan

inilah Amerika Serikat menjaga suatu keseimbangan yang baik ketimbang di kawasan-kawasan lain. Oleh karena itu, partai mana pun yang berkuasa, akhirnya akan harus memberi perhatian yang cukup atas kawasan ini.

Meskipun demikian, karena kawasan ini bukan merupakan suatu titik nyala'' (*flash point*) seperti halnya Eropa, Timur Tengah, Teluk Persia atau Amerika Tengah, dan karena secara strategis kawasan ini lebih damai, maka perhatian Amerika Serikat pada kawasan ini tidak akan menonjol tetapi tetap akan secukupnya. Di samping membagi beban dengan Jepang dan sekutu-sekutunya yang lain, Amerika Serikat akan mempertahankan pasukan-pasukannya di Korea Selatan, kendatipun bagian yang terbesar dari beban itu akan harus ditanggung oleh Korea Selatan. Hubungan ekonomi Amerika Serikat-Korea Selatan akan terus meningkat, walaupun masalah-masalah serius mungkin timbul seperti Amerika Serikat terus-menerus menekan Korea Selatan untuk membuka pasarannya (termasuk hasil-hasil pertanian), untuk menaikkan nilai Won terhadap dollar Amerika Serikat, dan untuk memberi perlindungan yang secukupnya terhadap ''hak-hak milik intelektual'' (*intellectual property rights*) Amerika Serikat.

Berkenaan dengan RRC, Amerika Serikat akan lebih memperkuat hubungannya dalam bidang ekonomi dan secara lebih selektif juga dalam bidang keamanan demi menjaga suatu hubungan yang erat. Dengan normalisasi lebih lanjut dalam hubungan Cina-Uni Soviet, maka kebijakan Cina yang sama jarak dalam hubungan segitiga Amerika Serikat-RRC-Uni Soviet, akan menjadi lebih nyata. Maka itu, hubungan Amerika Serikat dengan RRC tak akan dapat berkembang menuju suatu hubungan strategis yang

penuh. Maka kebijakan Amerika Serikat akan lebih bertujuan berperilaku sesuai dengan situasi kawasan dan dunia yang ada, sehingga RRC akan menahan diri dalam menjual senjata-senjatanya kepada negara-negara agresif atau kepada negara yang sekarang terlibat dalam suatu konflik seperti antara Iran dan Irak. Cina seharusnya juga bersedia memberikan tekanan-tekanan yang lebih keras kepada Khmer Merah sedemikian sehingga suatu penyelesaian politik dalam masalah Kamboja dapat dicapai, atau untuk membantu menjamin agar Korea Utara tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan provokatif terhadap Korea Selatan di waktu mendatang. Berkenaan dengan masalah Khmer Merah, telah menjadi jelas bagi Amerika Serikat bahwa ia perlu berhati-hati dalam hubungan militernya dengan RRC sebab pandangan-pandangan Cina atas keamanan, dan strateginya di Asia Tenggara tidak selalu sejalan dengan pandangan dan strategi ASEAN yang dengannya Amerika Serikat sama-sama perlu memelihara hubungan baik.

Hubungan Amerika Serikat-ASEAN mungkin terutama ada pada bidang ekonomi, walaupun dua masalah keamanan, yaitu pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina dan penyelesaian konflik Kamboja, mempunyai arti yang penting. Dalam bidang ekonomi, masalah-masalah akses ke dalam pasaran Amerika Serikat, GSP, dan perlindungan hak-hak milik intelektual merupakan hal-hal yang paling penting. Selanjutnya, alih modal dan teknologi tetap mempunyai arti penting bagi negara-negara ASEAN, dan dalam hal ini Amerika Serikat dipandang sebagai pengimbang terhadap kehadiran Jepang yang menonjol di wilayah ini.

Hubungan politik antara ASEAN dan Amerika Serikat akan berkaitan dengan ke-

hadiran Amerika Serikat dan komitmennya pada keamanan kawasan. Dalam kerangka ini, pangkalan-pangkalan militer di Filipina dipandang telah bermanfaat untuk stabilitas dan suasana damai di kawasan. Kepentingan-kepentingan ASEAN dalam mempertahankan kehadiran Amerika Serikat ini berlandaskan kekhawatiran bahwa kekosongan yang diakibatkan oleh penarikan pasukan-pasukan Amerika Serikat dari kawasan, jika persetujuan pangkalan-pangkalan militer tidak diperpanjang lagi, akan dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan besar yang lain. Kekuatan-kekuatan besar lain ini mempunyai ambisi-ambisinya sendiri di kawasan yang niscaya tidak lebih menguntungkan bagi negara-negara ASEAN.

Hubungan Amerika Serikat dengan Pasifik Selatan akan menjadi lebih penting di masa mendatang karena arti strategis kawasan yang semakin penting bagi Amerika Serikat, sementara kawasan ini mengalami ketidakstabilan politik yang lebih banyak sebagai akibat suatu generasi baru mengambil alih kepemimpinan di berbagai negara, khususnya di bagian Melanesia seperti di Papua New Guinea, Vanuatu, dan Fiji, dan oleh karena itu, sikap-sikap yang lebih nasionalistis sedang berkembang di kawasan ini. Kendatipun kerjasama dalam kerangka ANZUS telah diperlemah oleh ketidaksetujuan terhadap kebijakan nuklir New Zealand, namun kerjasama itu dapat memperoleh kepentingannya lagi di waktu mendatang.

Sekalipun demikian, ANZUS tidak dapat lagi memberikan suatu pengkaitan yang cukup pada negara-negara Pasifik Selatan sebagai akibat meningkatnya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan paternalistik Australia dan New Zealand di kawasan. Oleh karena itu, pembinaan hubungan baik antara ASEAN dan negara-negara Pasifik Selatan dapat menjadi pelengkap dari hu-

hubungan negara-negara ini dengan Amerika Serikat, Australia dan New Zealand.

Akhirnya, hubungan Uni Soviet-Amerika Serikat dalam jangka menengah masih akan diwarnai oleh persaingan dan kerjasama. Mungkin kedua negara adikuasa ini lebih mengutamakan kerjasama yang dianggap diperlukan mengingat masalah kesulitan-kesulitan ekonomi dalam negeri mereka. Oleh sebab itu, mungkin kedua pihak akan melanjutkan usaha-usaha mereka untuk mengurangi ketegangan melalui pengendalian dan perlucutan persenjataan, melalui dialog-dialog mengenai konflik-konflik regional dan persoalan hak-hak asasi manusia.

Dalam hubungan ini, langkah-langkah *Confidence Building Measures* (CBM = usaha-usaha membangun kepercayaan) dan pengurangan persenjataan, termasuk pengurangan senjata-senjata nuklir yang digelar di kawasan Asia-Pasifik secara berangsur-angsur akan terwujud seperti halnya kemajuan yang dicapai dalam keseimbangan sentral antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di Eropa. Pada gilirannya, gagasan menciptakan zone bebas senjata nuklir (NWFZ) di Asia Tenggara dapat dipromosikan lebih lanjut dan menjadi lebih dapat diterima oleh kekuatan-kekuatan besar, khususnya Amerika Serikat. Lebih dari itu, Amerika Serikat juga akan menerima suatu partisipasi dan keterlibatan Uni Soviet yang lebih besar dalam urusan-urusan politik dan ekonomi kawasan.

Peranan Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik dalam Jangka Panjang

Sebagaimana telah dikemukakan, pembagian-beban antara Amerika Serikat dan Jepang di kawasan akan meningkat di waktu mendatang. Sebagai akibatnya, tidak mung-

kin untuk memisahkan kehadiran Amerika Serikat di kawasan dari peranan Jepang di kawasan. Pembagian-beban ini tidak akan lagi menempatkan Jepang melulu dalam peranan ekonomi, sementara peranan Amerika Serikat hanya akan ada dalam bidang keamanan dan pertahanan, seperti yang tampak dewasa ini. Keinginan Jepang untuk mengembangkan kemampuan pertahanan konvensionalnya dalam kerangka persekutuan dengan Amerika Serikat (dan dengan tidak semata-mata menjadi suatu subsistem Amerika Serikat dalam pencegahan perluasan kekuatan Uni Soviet di Laut Okhotz), untuk melindungi pulau-pulaunya dan perairan yang mengelilinginya merupakan sesuatu yang sah dan mungkin akan terwujud dalam jangka agak panjang. Yang penting adalah keterbukaan dari pihak Jepang untuk mendiskusikan dan merundingkan arah dan pelaksanaan strategi demikian dengan teman-temannya. Keterusterangan perdebatan-perdebatan mengenai masalah ini dalam badan-badan politik Jepang adalah juga penting untuk mencegah salah pengertian di antara tetangga-tetangga Jepang.

Di waktu mendatang, pelaksanaan skema pembagian-beban Amerika-Jepang akan bersifat global daripada regional. Misalnya, sudah dipertimbangkan bahwa Jepang seharusnya memberikan bantuan khusus kepada Mexico dan Amerika Tengah dan meningkatkan ODA-nya dalam kerangka apa yang disebut "program bantuan strategis." Ada juga usul-usul untuk mengadakan persetujuan perdagangan bebas antara Jepang dan Amerika Serikat, barangkali juga meliputi Canada dan Mexico.⁹

⁹Lihat misalnya, Ernest H. Preeg, "Weighing a US-Japan Trade Pact," *Wall Street Journal*, 11 Agustus 1988; Clyde H. Farnsworth, "US and Japan, Ponder a Free Proposal," *New York Times*, 12 Agustus 1988, hal. 10.

Jadi seharusnya tidak mengherankan bila melihat proses integrasi antara Jepang dan Amerika Serikat berlangsung sangat cepat dan pembagian-beban dalam semua bidang di antara kedua negara terwujud sesuai dengan itu pula. Meskipun demikian, seharusnya juga diakui bahwa berdasarkan studi Rand seperti dikutip di depan, GNP Amerika Serikat akan tetap sekitar 22% sampai 24% dari keseluruhan GNP dunia di tahun 2010, menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan tetap menjadi kekuatan ekonomi yang terbesar di dunia. Oleh karena itu, kehadiran dan keterlibatan ekonomi Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik akan berlanjut dalam waktu yang masih lama, meskipun titik-beratnya akan tertuju pada kawasan Asia Timur Laut.

Agar kehadiran Amerika Serikat dirasakan di seluruh kawasan, maka gagasan kerjasama ekonomi Pasifik mempunyai arti penting, karena hanya melalui kerjasama demikian Washington dapat memberikan perhatian yang pantas kepada seluruh kawasan Pasifik dengan negara-negara dan sub-sub kawasan yang begitu berbeda-beda. Hal ini akan membantu proses pembuatan keputusan Amerika Serikat, yang biasanya hanya disibukkan dengan satu atau dua persoalan atau kawasan yang kritis, untuk memperhatikan pembangunan-pembangunan di Pasifik dan memfokuskan pada kerjasama di mana semua negara di kawasan terlibat. Lebih dari itu, pendekatan-pendekatan multilateral, seperti kerjasama ekonomi, dapat menolong mencairkan perselisihan bilateral dengan Jepang yang mungkin akan berlanjut. Oleh karenanya, proses pembagian-beban akan lebih dapat dicapai dalam kerangka kerjasama kawasan yang stabil dan efektif di kawasan terpenting dunia di masa datang. Tambahan lagi, ajakan kerjasama ekonomi dalam suatu kawasan yang

begitu dinamis seharusnya cukup berdaya guna untuk menghadapi tantangan-tantangan dari bagian dunia yang lain, seperti integrasi Eropa Barat pada tahun 1992.

Perkembangan jangka panjang dari hubungan Uni Soviet-Amerika Serikat dan hubungan Cina-Amerika Serikat tidak mudah dapat diramalkan. Hubungan-hubungan di antara ketiga negara ini masih mengalami perubahan-perubahan yang membuka beberapa kemungkinan.

Skenario pertama, memperkirakan bahwa masyarakat Amerika Serikat dan Jepang menjadi berintegrasi lebih erat dalam berbagai bidang, yang berakibat bahwa kedudukan mereka lebih berkuasa dan berpengaruh, sehingga akan membuat Uni Soviet dan RRC berhubungan lebih erat untuk mengimbangi dominasi Amerika Serikat dan Jepang. Maka ini akan mengakibatkan munculnya dua blok baru di kawasan yang mungkin menyebabkan ketegangan-ketegangan yang lebih besar, karena mereka mampu melakukan demikian didukung oleh kekuatan militernya yang sangat hebat. Tetap tak jelas ke arah mana hubungan Cina-Uni Soviet akan berkembang, karena RRC khususnya berhati-hati agar tidak menjadi tergantung lagi pada Uni Soviet. Selain itu, RRC berkepentingan untuk bekerjasama ekonomi dengan Jepang dan Amerika Serikat demi modernisasi perekonomiannya. Oleh karena itu, skenario pertama ini bukanlah suatu skenario yang benar-benar mungkin.

Dalam skenario pertama ini, negara-negara berkembang, khususnya negara-negara nonblok di kawasan, akan menghadapi tekanan yang serius untuk memihak kepada salah satu dari dua blok itu. Negara-negara berkembang akan sulit untuk menjadi suatu kekuatan yang tak memihak

dalam suatu sistem internasional yang terbagi dalam dua kekuatan di mana blok-bloknya menjadi begitu jauh lebih besar dan lebih kuat. Meskipun demikian, kerjasama regional di antara negara-negara yang sedang berkembang dapat mengurangi sebagian tekanan yang dilakukan oleh blok-blok itu.

Skenario kedua merupakan suatu era yang samasekali baru, yaitu suatu era ekonomi di kawasan, di mana ketegangan-ketegangan sangat berkurang karena perhatian yang besar dalam pembangunan ekonomi di antara negara-negara di kawasan. Kepentingan-kepentingan ekonomi dilihat merupakan rangsangan bagi usaha-usaha serius guna mengurangi ketegangan-ketegangan dan persaingan-persaingan dalam bidang keamanan di antara Uni Soviet, Amerika Serikat, dan RRC. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa ketegangan-ketegangan ekonomi yang baru akan menggantikan ketegangan-ketegangan lama. Sama-sama tak jelas apakah situasi ini dapat diperkirakan timbul, dalam arti bahwa suatu perasaan saling ketergantungan ekonomi akan begitu kuat, sehingga membuat negara-bangsa menjadi tidak relevan lagi. Tampaknya skenario ini terlalu idealistis untuk terwujud.

Dalam skenario kedua ini, negara-negara sedang berkembang di kawasan harus melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu, menjadi lebih pragmatis, fleksibel dan responsif agar mampu memanfaatkan perkembangan ekonomi dunia yang pesat. Dibandingkan dengan negara-negara berkembang di kawasan lain, negara sedang berkembang di kawasan Asia-Pasifik akan mendapat keuntungan lebih banyak dari suatu perkembangan ekonomi yang demikian. Di sini persoalannya adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan nasional dan re-

gional dengan solidaritas global negara-negara sedang berkembang secara keseluruhan. Pada saat ini tampaknya jelas bahwa pola-pola hubungan yang sudah ketinggalan zaman di antara Utara dan Selatan, maupun hubungan Selatan-Selatan sendiri perlu digantikan oleh sesuatu yang samasekali baru. Barangkali hal ini membutuhkan pengukuhan hubungan di antara subregional, seperti antara ASEAN dan forum Pasifik Selatan, antara ASEAN dan SAARC (Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan) dan Kerjasama Regional Negara-negara Teluk. Saling kerjasama regional ini dapat juga melibatkan negara-negara sedang berkembang dan negara-negara industri, seperti antara ASEAN dan negara-negara industri Pasifik dalam bentuk APC (Konperensi ASEAN-Pasifik). Bentuk dialog yang lain adalah melalui kerjasama regional yang melibatkan negara-negara industri dan negara-negara sedang berkembang seperti terlaksana dalam PECC (Konperensi Kerjasama Ekonomi Pasifik).

Skenario ketiga adalah Amerika Serikat dan Jepang tetap dalam suatu sistem persekutuan, tetapi hubungannya masing-masing dengan Uni Soviet dan RRC dilakukan secara independen, karena masing-masing ingin mempertahankan posisinya yang sekarang. Perbedaan antara skenario ketiga dan skenario pertama terletak dalam persepsi Amerika Serikat dan Jepang yang berlainan mengenai hubungan masing-masing dengan Uni Soviet atau RRC. Perselisihan dan ketegangan antara Amerika Serikat dan Jepang akibat perbedaan dalam nilai-nilai mungkin meningkat di waktu mendatang dan dapat menyebabkan suatu keretakan hubungan Amerika Serikat-Jepang. Hubungan persekutuan secara berangsur-angsur dapat berganti menjadi suatu kerjasama (*alignment*). Skenario yang pertama melihat kebutuhan antara

Jepang dan Amerika Serikat untuk berintegrasi lebih erat demi menjaga ikatan persekutuan mereka.

Pada saat ini sudah dapat dilihat secara jelas nuansa-nuansa yang berbeda dalam hubungan mereka masing-masing dengan Uni Soviet dan RRC. Misalnya hubungan Amerika Serikat dan Cina telah berkembang agak lancar karena kedua negara ini memiliki suatu tujuan strategis bersama -- walaupun terbatas -- untuk mengendalikan Uni Soviet. Di lain pihak, hubungan Jepang dengan Cina, meskipun ada kemajuan-kemajuan yang berarti selama beberapa tahun yang lalu, akan selalu mengandung unsur-unsur persaingan untuk kepemimpinan di kawasan Asia-Pasifik dan secara serius dipengaruhi oleh interpretasi mereka yang berlainan tentang tindakan-tindakan Jepang selama Perang Dunia II dan hubungan historis dan budaya antara Cina dan Jepang pada umumnya. Demikian pula, hubungan Amerika Serikat-Uni Soviet mengalami kemajuan, dan kerjasama dalam berbagai bidang sedang berkembang. Sebaliknya, hubungan Jepang-Uni Soviet tetap pada tingkat rendah karena tuntutan-tuntutan Jepang atas empat pulau di Utara samasekali tak dipedulikan Uni Soviet.

Dalam skenario yang ketiga ini hubungan-hubungan di antara empat negara besar akan sama seperti yang ada pada dewasa ini. Itu berarti suatu pola hubungan berjarak sama di antara Amerika Serikat, RRC dan Uni Soviet, sementara hubungan Amerika Serikat-Jepang masih akan menjadi jauh lebih erat karena pada dasarnya mereka membagi suatu tujuan strategis bersama dalam kebijakan-kebijakan mereka terhadap kawasan Asia-Pasifik.

Agar Amerika Serikat mampu terus memainkan suatu peranan global, seharusnya Amerika Serikat secara efektif menangani masalah-masalahnya yang mendesak sekarang ini: menghapuskan defisit budgeter dan perdagangannya, meningkatkan produktivitas, meningkatkan tabungan, memajukan kualitas pendidikan, dan membagi beban internasional dengan sekutu-sekutu dan kawan-kawannya. Akhirnya, Amerika Serikat pun perlu merumuskan kebijakan-kebijakan jangka panjang tentang bagaimana seharusnya mengupayakan tujuan-tujuan internasionalnya, tentang strategi apa yang perlu diambil, dan tentang pembiayaan yang ingin ditanggungnya baik secara sendirian maupun bekerjasama dengan sekutu-sekutu dan kawan-kawannya dalam mencapai tujuan-tujuan itu.

Penting bagi Amerika Serikat untuk secara tepat menilai pendekatan-pendekatannya pada masalah-masalah internasional dan tantangan-tantangan luar negeri yang dihadapinya. Amerika Serikat kiranya perlu menyusun kembali hubungannya dengan sekutu-sekutu dan kawan-kawannya: untuk membagi beban tanggung jawab internasional dan untuk mengembangkan suatu mekanisme konsultasi dan kesepakatan dengan mereka secara memadai, untuk mencari upaya-upaya mengurangi ketegangan-ketegangan regional dan global, untuk melaksanakan usaha-usaha pengurangan persenjataan di dunia, untuk mempromosikan usaha membangun kepercayaan (*Confidence-Building Measures* - CBM) dengan lawan-lawannya, khususnya Uni Soviet; dan akhirnya, untuk membina hubungan-hubungannya dengan negara-negara sedang berkembang melalui pendekatan-pendekatan multi-lateral.

Pentingnya Amerika Serikat Bagi ASEAN

ASEAN adalah suatu kerjasama regional asli di Asia Tenggara dan bukanlah suatu kerjasama yang disponsori oleh pihak luar (kawasan) seperti ANZUS, SEATO atau FPDA (Persetujuan Pertahanan Lima Negara). Meskipun ASEAN bukan suatu organisasi yang berorientasi militer, namun faktor utama yang memotivasi pendiriannya adalah untuk menyasikan persepsi-persepsi terhadap ancaman-ancaman pada negara-negara anggotanya, sehingga mereka dapat mengembangkan hubungan-hubungan damai dan memajukan kerjasama dalam bidang-bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Karena alasan-alasan historisnya, hubungan Amerika Serikat dengan masing-masing negara ASEAN berbeda dalam jangka waktu dan intensitasnya. Filipina dan Muangthai, melalui suatu persetujuan bilateral dan Pakta Manila, merupakan sekutu-sekutu Amerika Serikat; Malaysia dan Singapura mempunyai orientasi nonblok, tetapi secara tak langsung terkait dengan Amerika Serikat karena keanggotaannya dalam FPDA - di mana anggota lainnya yakni Inggris, Australia dan Selandia Baru adalah sekutu-sekutu Amerika Serikat; Indonesia lebih menyukai orientasi nonblok dan tidak akan melibatkan diri dalam perjanjian pertahanan apa pun dengan negara-negara lain. Brunei mempertahankan hubungan tradisionalnya yang sangat erat dengan Inggris, tetapi sekarang terlibat secara aktif dalam ASEAN.

Kendatipun perbedaan-perbedaan itu, negara-negara ini memiliki kepentingan bersama, yaitu mengembangkan hubungan ekonomi yang erat dengan Amerika Serikat dan negara-negara industri Barat lain, maupun

dengan Jepang dan negara-negara industri baru Asia. Hubungan ekonomi ini mempunyai implikasi politik yang berarti dengan mengkaitkan ASEAN secara politik kepada dunia Barat, atau kepada suatu tatanan internasional yang terutama ditunjang oleh Amerika Serikat.

Pada bagian terdahulu telah dikatakan bahwa dalam jangka pendek, menengah dan panjang mungkin Amerika Serikat akan terus memainkan peranan yang penting dan dominan di kawasan Asia-Pasifik maupun dunia pada umumnya. Walaupun ada kecenderungan untuk pembagian-beban yang makin besar pada peran Amerika Serikat, namun dukungan Amerika Serikat atas tatanan internasional yang ada sejak akhir Perang Dunia II tetap sangat penting. Diharapkan bahwa Amerika Serikat akan terus memainkan suatu peran utama dalam bidang keamanan dan militer, sedangkan dalam bidang ekonomi negara-negara lain, khususnya Jepang, diharapkan akan memikul tanggung jawab yang lebih besar sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

Hubungan politik dengan Amerika Serikat akan tetap penting bagi ASEAN, karena stabilitas kawasan Asia-Pasifik akan lebih terjamin dengan berlanjutnya kehadiran Amerika Serikat di kawasan. Dalam masa yang agak lama, peranan politik Amerika Serikat di kawasan akan terjalin lebih erat dengan peranan Jepang sebagai akibat pembagian-beban yang lebih besar dan integrasi yang makin erat di antara kedua bangsa ini. Oleh karena itu, tugas pokok ASEAN adalah untuk membina hubungan politik dengan Amerika Serikat dan Jepang sedemikian rupa sehingga mereka secara semestinya akan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan ASEAN dalam perumusan kebijakan-kebijakan mereka terhadap kawa-

san Asia-Pasifik.

ASEAN perlu mengembangkan hubungan tidak hanya dengan Pemerintah Amerika Serikat, melainkan juga dengan Kongres. ASEAN seharusnya juga secara lebih kuat menampilkan diri ke hadapan publik Amerika Serikat pada umumnya maupun ke hadapan berbagai kelompok kepentingan dan kelompok profesi di Amerika Serikat. Ini bukan merupakan suatu tugas yang mudah, tetapi ASEAN beruntung bahwa dirinya dipandang sebagai satu-satunya kerjasama regional di antara negara-negara sedang berkembang yang dinilai berhasil dan secara internasional menjalankan sikap politik yang moderat.

Agar mampu mendayagunakan suatu pengaruh politik yang demikian, ASEAN harus mengembangkan diri menjadi suatu kerjasama yang sungguh-sungguh dan efektif, khususnya dalam bidang politik. Dalam analisis akhir kesemuanya ini akan tergantung pada bagaimana serius ASEAN mengembangkan suatu kerjasama regional yang nyata dan sampai sejauh mana ASEAN memandang pentingnya Amerika Serikat bagi ASEAN, dan atas keseluruhan usahanya untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan Amerika Serikat atas ASEAN dan kawasan Asia-Pasifik. Hal ini penting karena hanya ASEAN sebagai suatu kelompok dapat memobilisasi perhatian yang secukupnya pada proses pembuatan keputusan dan pendapat umum di Amerika Serikat. Tak satu pun negara ASEAN, bahkan Filipina pun yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat memiliki pada dirinya suatu kemampuan demikian sendiri.

ASEAN mendapat dukungan dan bahkan telah menjadi favorit Amerika Serikat sebagai akibat arti pentingnya bagi Amerika Serikat. Pentingnya ASEAN bagi Amerika

Serikat berdasarkan kenyataan bahwa ASEAN telah berhasil menyumbangkan terpeliharanya stabilitas, perdamaian, dan pembangunan suatu kawasan yang cukup penting bagi Amerika Serikat. "Teori Domino" yang pernah disukai tidak terwujud di Asia Tenggara. Sebaliknya, pembangunan-pembangunan di kawasan yang promosinya dibantu oleh ASEAN, telah menguntungkan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di kawasan baik secara ekonomi, politik maupun dalam bidang keamanan.

Selain itu, ASEAN bersikap moderat dan memainkan peranan yang positif di berbagai forum internasional seperti di PBB, Gerakan Nonblok, Organisasi Konperensi Islam, perundingan-perundingan UNCTAD dan GATT. Meskipun tidak semua kebijakan negara-negara ASEAN sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat, namun perbedaan yang ada tidak menjurus ke pertentangan atau perselisihan yang serius.

Kepentingan-kepentingan ASEAN dalam memelihara hubungan baik dengan Amerika Serikat bertumpu pada bermacam-macam alasan. Dalam bidang ekonomi kepentingan itu meliputi akses berkesinambungan pada pasaran Amerika Serikat yang sangat besar; suatu peranan aktif Amerika Serikat dalam pemecahan masalah hutang dari sementara negara ASEAN, arus modal dan alih teknologi yang terus-menerus; maupun akses yang lebih baik pada proses pembuatan kebijakan ekonomi Amerika pada umumnya.

Dalam bidang-bidang politik dan keamanan, ASEAN mengusahakan kelanjutan peranan dan kehadiran positif Amerika Serikat di kawasan dan dalam kerjasama yang erat dengan Jepang. ASEAN juga berkepentingan untuk melihat usaha-usaha Amerika

Serikat mengurangi ketegangan-ketegangan dengan Uni Soviet, dengan menguatkan CBM dan menggiatkan upaya-upaya perlucutan senjata; suatu keseimbangan dalam hubungan Amerika Serikat dengan Cina dan ASEAN; pengertian yang lebih baik dari pihak Amerika Serikat atas perkembangan-perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri ASEAN maupun peranan ASEAN di forum internasional, yang tidak selalu dapat sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat.

Dalam hubungan kebudayaan ASEAN mengharapkan peningkatan pengertian, studi-studi dan riset mengenai masing-masing masyarakat secara timbal-balik; akses yang lebih besar untuk pendidikan tinggi di Amerika Serikat bagi mahasiswa ASEAN; penghargaan yang lebih besar pada kedua pihak atas perbedaan taraf perkembangan dan sistem nilai melalui dialog dan pertukaran pemuda, ahli-ahli dan pemimpin secara teratur.

Beberapa Observasi Kesimpulan

Sudah barang tentu terdapat hambatan-hambatan dalam hubungan ASEAN-Amerika Serikat hanya karena corak hubungan yang sifatnya asimetris. Amerika Serikat adalah negara adikuasa dengan kepentingan dan peranan global. Sementara ASEAN terutama menampilkan suatu kepentingan regional. Perbedaan ini menampakkan diri dalam pandangan-pandangan dan tanggapan-tanggapan yang berbeda atas bermacam-macam persoalan internasional.

Yang pertama adalah mengenai penilaian mereka yang berbeda atas ancaman Uni Soviet. Amerika Serikat memandang Uni Soviet dari perspektif persaingan global. Ini membuatnya untuk memikirkan persaingannya dengan Uni Soviet di kawasan sebagai

suatu *zero sum game*. Sebaliknya, negara-negara ASEAN memandang Uni Soviet bukan melulu sebagai ancaman tetapi bahwa Uni Soviet dapat juga memainkan suatu peranan di kawasan, misalnya ia dapat membantu memecahkan masalah Kamboja dengan menekan Vietnam agar menarik diri dari Kamboja. Hubungan ekonomi dengan Uni Soviet -- yang dewasa ini masih diabaikan -- dapat digiatkan lebih jauh di waktu mendatang untuk melengkapi hubungan ekonomi internasional ASEAN. Oleh sebab itu, pada dasarnya ASEAN siap untuk melihat keterlibatan Uni Soviet yang lebih besar dalam perkembangan ekonomi Pasifik, termasuk keanggotaan Uni Soviet dalam PECC.

Persoalan yang kedua adalah mengenai hubungannya dengan RRC. ASEAN tetap curiga bahwa Amerika Serikat lebih menyukai hubungannya dengan RRC daripada dengan ASEAN, baik karena alasan strategis untuk mengendalikan Uni Soviet ataupun karena potensi ekonomi Cina yang amat besar di masa depan. Selain itu, Amerika Serikat memandang Cina dengan romantisme besar. Reagan telah meletakkan hubungan Sino-Amerika dalam tempat yang layak se-rawa sewajarnya mengakui RRC sebagai suatu kekuatan besar di kawasan Asia-Pasifik. Dari penelitian perkembangan hubungan Amerika Serikat-Cina dan hubungan Amerika Serikat-ASEAN dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat dan Kongres menganggap cukup pentingnya hubungan Amerika Serikat-ASEAN.

Persoalan yang ketiga berhubungan dengan gagasan ASEAN tentang apa yang disebut *zone damai*, bebas dan netral (*ZOPFAN*) dan *Zone Bebas Persenjataan Nuklir Asia Tenggara (SEA-NWFZ)*. Gagasan membangun suatu tatanan regional

yang disebut ZOPFAN mengandung keinginan ASEAN agar bangsa-bangsa Asia Tenggara berada dalam kedudukan untuk menentukan nasibnya sendiri di waktu mendatang. Ini tidak ditujukan pada usaha-usaha untuk mengurangi kehadiran negara-negara besar di kawasan, melainkan dimaksudkan untuk mencapai suatu keseimbangan dari kehadiran mereka, dalam arti bahwa tidak satu pun negara besar akan mempunyai pengaruh dominan di kawasan. Amerika Serikat hendaknya tidak memandang gagasan ZOPFAN sebagai maksud ASEAN agar Amerika Serikat menarik diri dari kawasan, karena Amerika Serikat menjadi suatu penimbang terhadap Uni Soviet dan RRC, dan barangkali juga terhadap Jepang di masa depan.

Gagasan SEA-NWFZ mencerminkan pendekatan regional jangka panjang ASEAN mengenai perlucutan senjata nuklir dan pengukuhan NPT (perjanjian larangan penyebaran senjata nuklir). ASEAN memandang usaha-usaha menuju perlucutan senjata nuklir sebagai hak dan kewajiban setiap bangsa. Usaha-usaha ASEAN untuk menciptakan suatu SEA-NWFZ hendaknya dimengerti oleh Amerika Serikat dari perspektif ini. Akan tetapi, negara-negara ASEAN cukup realistis bahwa tujuan regional ini hanya dapat dicapai secara bertahap dan dalam jangka waktu yang cukup lama, karena tercapainya tujuan itu sangat tergantung pada keberhasilan usaha-usaha perlucutan senjata sentral dan global Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Dalam mewujudkan tujuannya ASEAN juga seharusnya mempunyai pengertian yang lebih baik tentang strategi Amerika Serikat yang masih bertumpu pada penangkalan nuklir. Oleh karena itu, usaha ASEAN seharusnya jangan tertuju pada

peningkatan alergi nuklir di Asia Timur yang dapat juga menyebar ke Eropa Barat.

Yang keempat adalah persoalan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina. Persoalan ini yang pada hakikatnya adalah urusan bilateral antara Filipina dan Amerika Serikat, secara tak langsung akan mempengaruhi hubungan antara ASEAN dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN hendaknya membantu Filipina dan Amerika Serikat guna mencapai pemecahan yang memuaskan atas persoalan ini. Pemecahan itu seharusnya mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan yang sah dari rakyat Filipina dalam memperkuat pembangunan kebangsaan mereka, khususnya selama periode sulit dalam proses demokratisasi dan peningkatan nasionalisme sekarang ini. Pemecahan itu juga perlu mengakomodasikan kebutuhan akan berlanjutan kehadiran Amerika Serikat di kawasan yang sifatnya vital bagi kawasan Asia-Pasifik, termasuk ASEAN.

Kehadiran Amerika Serikat di kawasan dewasa ini tampak menjadi lebih penting karena ketidakstabilan yang ada pada konfigurasi negara-negara besar, di mana baik Uni Soviet maupun RRC sedang mengusahakan peranan politik dan ekonomi yang lebih besar di kawasan. Begitu juga, Amerika Serikat dan Jepang sedang mengalami perubahan-perubahan yang fundamental, termasuk dalam hubungan mereka, yang dapat menuju kepada peningkatan ketegangan-ketegangan dan perselisihan-perselisihan dan karena itu menciptakan ketidakpastian-ketidakpastian di seluruh kawasan. Pangkalan-pangkalan militer di Filipina juga menjamin kelanjutan kehadiran ekonomi Amerika Serikat dan Jepang di kawasan yang vital untuk pembangunan ekonomi kawasan. Dinamisme ekonomi kawasan telah memberi-

kan suatu lingkungan yang menguntungkan untuk menggalakkan usaha-usaha pembangunan nasional di seluruh kawasan, dan sangat membantu proses peralihan kepemimpinan di beberapa negara.

Persoalan yang kelima adalah perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai budaya dan politik. Di negara-negara ASEAN ada persepsi bahwa sistem pemerintahan Amerika Serikat tidak menjamin bahwa kebijakan-kebijakan Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia bisa konsisten. Hal ini karena demokrasi Amerika adalah begitu kompleks dalam proses pembuatan keputusannya, yang dicirikan oleh perselisihan dan pertentangan yang terus-menerus di antara Pemerintah dan Kongres, dan di mana pers dan media massa, lembaga-lembaga riset dan para ahli juga memainkan suatu peranan mempengaruhi yang penting.

Pada pihak Amerika Serikat, keinginan agar bentuk demokrasinya juga diambil alih bangsa-bangsa lain telah menyebabkan perumusan kebijakan luar negerinya menjadi sangat moralistik. Hal ini tampak dalam implementasi nilai-nilai tertentu yang tidak membedakan, seperti hak-hak asasi manusia, yang seringkali tidak dapat segera diterima oleh masyarakat dan negara yang sedang berkembang di mana nilai-nilai politik, kebudayaan, dan tahap-tahap pembangunannya demikian berlainan daripada yang ada di Amerika Serikat.

Di kawasan ini, negara-negara ASEAN hendaknya memberi perhatian khusus kepada peranan pers asing dan liputan pers dalam negeri mereka masing-masing. Karena pentingnya hubungan dengan Amerika Serikat, maka negara-negara ASEAN seharusnya memperhitungkan sistem politik Amerika Serikat dan arti pentingnya kebebasan yang diberikan kepada pers. Negara-

negara ASEAN juga perlu mengusahakan prinsip-prinsip kebebasan pers, meskipun dalam kasus-kasus tertentu mereka mempunyai suatu kecondongan yang kuat menentang *establishment* (termasuk bisnis besar), dan kadang-kadang menjadi arogan dan merasa benar sendiri dalam memaksakan pandangan-pandangannya kepada umum.

Akhirnya, ASEAN dan Amerika Serikat cenderung berbeda pandangan dalam hubungan-hubungan ekonomi mereka. Amerika Serikat, yang dipengaruhi kuat oleh filsafat kapitalisme, meletakkan tekanan yang lebih besar pada peranan sektor swasta dalam hubungan-hubungan ekonomi daripada peranan sektor publik. Di negara-negara ASEAN, dan di negara-negara berkembang pada umumnya, pemerintah mengambil peranan yang menonjol dalam keputusan-keputusan kebijakan dan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Walaupun swastanisasi dan kepercayaan yang lebih besar pada kekuatan pasar sekarang sedang ditekankan di negara-negara ASEAN, namun perbedaan yang mendasar akan tetap ada pada peranan pemerintah dalam perekonomian.

Masalah lain yang muncul adalah desakan Kongres untuk tidak membedakan penerapan prinsip resiprositas terhadap negara-negara sedang berkembang dalam bidang-bidang perdagangan, termasuk dalam pelayanan jasa, dan untuk menjalankan preferensi-preferensi dagang dan akses pasar bersyarat pada kebijakan masing-masing pihak yang menyangkut perlindungan hak-hak milik intelektual.

Gagasan untuk membentuk suatu blok perdagangan antara Amerika Serikat dan Jepang telah menimbulkan kekhawatiran tertentu di ASEAN, karena hal ini akan mengakhiri multilateralisme dan akan mem-

bagi dunia ke dalam blok-blok perdagangan, khususnya sehubungan dengan kemungkinan bersatunya pasaran bersama Eropa Barat di tahun 1992 yang sangat proteksionistis. Telah ada usul-usul supaya kesatuan perdagangan bebas dengan Jepang dapat diperluas yang meliputi Meksiko dan Kanada. Akan tetapi, dukungan terhadap gagasan ini banyak tergantung pada keberhasilan perundingan-perundingan Uruguay.

Menghadapi tantangan-tantangan ini ASEAN perlu pertama-tama meningkatkan usaha-usaha bersama untuk menguatkan

kerjasama ekonomi di antara anggota-anggotanya dan untuk mencari sarana-sarana dan cara-cara baru guna mengamankan akses ke pasaran-pasaran besar yang mungkin di waktu mendatang beralih menjadi blok perdagangan yang baru. Oleh sebab itu, gagasan kerjasama ekonomi Pasifik dapat mempunyai arti yang sangat penting bagi ASEAN guna mengukuhkan aksesnya ke dalam pasaran Pasifik (khususnya Jepang dan Amerika Serikat). Hal ini mungkin juga dapat mencegah penciptaan suatu blok perdagangan di kawasan Pasifik yang anggotanya hanya meliputi negara-negara industri.

Kebijakan Luar Negeri Uni Soviet Memasuki Tahun-tahun 1990-an

Wiratmo SOEKITO

I

TIDAK MUDAH untuk berbicara tentang kebijakan luar negeri Uni Soviet yang memasuki tahun-tahun 1990-an, karena masih harus dilihat terlebih dulu apakah Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis dan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev masih akan tetap tinggal di Istana Kremlin dalam tahun 1991 apabila Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) mengadakan Kongresnya yang ke-28.

Boris Yeltsin, yang dalam tahun 1987 dipecat sebagai anggota Biro Politik PKUS karena terlalu radikal dalam mendukung *perestroika* sebagai kebijakan utama Gorbachev tetapi yang dua tahun kemudian direhabilitasi oleh rakyat pemilih yang mendudukkannya sebagai seorang anggota Dewan Rakyat Tertinggi, dalam sebuah wawancaranya dengan "Selamat Pagi, Amerika" ABC pada 11 September 1988 mengatakan bahwa Gorbachev akan menghadapi suatu "revolusi dari bawah" kecuali apabila dalam waktu enam bulan mendatang sanggup

memimpin negerinya ke kemajuan. Ini berarti bahwa Gorbachev akan terhapus (*not to be*) atau terbilang (*to be*) dalam waktu hanya enam sampai 12 bulan mendatang, sedang Kongres ke-28 PKUS akan diadakan 18 bulan lagi. Jika Gorbachev ternyata terhapus, kita tidak akan dapat berbicara sekarang mengenai kebijakan luar negeri Soviet yang memasuki tahun-tahun 1990-an. Menurut Yeltsin -- yang memberikan wawancaranya itu ketika sedang melakukan suatu kunjungan di Amerika Serikat -- apa yang disebutnya suatu "revolusi dari bawah" itu pada hakikatnya sudah dimulai dalam bentuk pemogokan-pemogokan dan demonstrasi-demonstrasi di sekitar Uni Soviet. "Suatu revolusi," kata legislator Soviet itu, "akan terjadi apabila tempat-tempat bergolak itu menyebar dan seluruh negeri terkena."

Pernyataan Yeltsin di atas cukup serius, bahkan sangat serius. Sebab, Gorbachev merasa cemas akan pemogokan-pemogokan kaum buruh pertambangan yang dikhawatirkan akan menjalar ke industri-industri lainnya. Di samping itu Gorbachev masih harus

menghadapi kenyataan berupa kurangnya bahan makanan dan barang-barang keperluan hidup sehari-hari lainnya. Belum lagi permusuhan-permusuhan antara minoritas-minoritas etnis, sedang angka-angka kejahatan meningkat. Selama tahun 1988 saja telah terjadi pembunuhan atau percobaan pembunuhan sebanyak 16.710 kali di samping 17.658 kasus perkosaan. Para pemimpin partai merasa masygul dan banyak di antara mereka cenderung mempersalahkan Gorbachev untuk timbulnya semua kesulitan itu. Bagaimanakah caranya menjatuhkan Gorbachev dari kekuasaannya? Pertama-tama harus diusahakan di Biro Politik dulu penciptaan suatu mayoritas oposisi dan sesudah itu membuat sebuah resolusi untuk diratifikasi oleh Komite Sentral. Proses seperti inilah yang telah menjatuhkan Khrushchev dari kekuasaannya dalam tahun 1964, tetapi Gorbachev, dengan melaksanakan *perestroika*, telah membuat lawan-lawan politiknya di belakang Yegor Ligachev dan Lev Zaikov lebih sulit untuk merebut kekuasaan, karena kini Uni Soviet sudah memiliki Dewan Rakyat Tertinggi yang, sebagai sebuah legislatur, dapat bersidang terus-menerus dari rakyat pemilih massal mencitarasai partisipasi yang sebenarnya. Dengan demikian tak satu pihak pun -- yaitu pihak Gorbachev maupun pihak Ligachev -- akan dapat memastikan bahwa massa rakyat akan turun ke jalan raya untuk mendukung apabila terjadi krisis. Dalam sejarah Uni Soviet, Khrushchev adalah satu-satunya pucuk pimpinan yang diganti selagi masih hidup, tetapi Gorbachev yang masih tergolong muda dan sehat walafiat tidak akan semudah Khrushchev untuk dijatuhkan. Dalam hubungan inilah harus diperhatikan apa yang dikatakan oleh Yeltsin di Philadelphia pada 13 September ketika berbicara di depan Dewan Masalah-masalah Dunia. Me-

nurut Yeltsin yang mengaku sangat mengenal sistem politik Soviet dari dalam, ia tidak yakin akan adanya kemungkinan suatu kudeta militer atau non-militer di Uni Soviet.

Jadi, kita dapat mengharapkan bahwa dalam dasawarsa yang akan datang *perestroika* dan *glasnost* masih akan tetap merupakan kebijakan utama Uni Soviet. Ini berarti bahwa kebijakan luar negeri Soviet masih akan melanjutkan kebijakan luar negerinya seperti yang dapat diamati sekarang. Oleh sebab itu, perlu ditinjau terlebih dulu perkembangan kebijakan luar negeri Soviet sejak Gorbachev mengambil-alih kekuasaan dari Konstantin Chernenko yang meninggal dalam tahun 1985.

Setelah Kongres ke-27 PKUS dalam tahun 1986 menguatkan kembali pengangkatan Gorbachev sebagai Sekjen Komite Sentral barulah dapat dilihat garis-garis besar kebijakan luar negerinya.

II

Pertama-tama adalah pidato Gorbachev di Vladivostok pada 28 Juli 1986. Dengan pidatonya itu, pada hakikatnya, Gorbachev menyampaikan sebuah tantangan dengan menegaskan bahwa Uni Soviet adalah sebuah negara besar di Asia dan tidak akan dapat diingkari tempatnya sebagai peserta aktif di Pasifik. Pidatonya itu menjanjikan perbaikan hubungan-hubungan Sino-Soviet bukan saja pada tingkat pemerintah, tetapi juga pada tingkat partai. Gorbachev ingin meyakinkan bahwa Asia dapat dijadikan tempat yang efektif untuk meluaskan proses Helsinki dan mengusulkan kepada semua negara Pasifik, terutama Amerika Serikat, agar saling membatasi kegiatan angkatan laut.

Pada mulanya usul-usul Gorbachev di atas diterima dengan skeptis, sekali oleh para pendengar pidatonya yang dituju, dan tindakan-tindakan lanjut Moskwa yang setengah hati hanya sedikit saja berhasil menghapuskan kecurigaan-kecurigaan di kalangan negara-negara tetangga Soviet.

Cina, misalnya, ketika itu masih tetap mempertahankan tiga prasyaratnya untuk perbaikan hubungan-hubungannya dengan Uni Soviet, yaitu penarikan semua pasukan Soviet dari Afghanistan, penarikan semua pasukan Vietnam dari Kamboja, dan pengurangan pasukan Soviet yang digelarkan di dekat sepanjang perbatasan Sino-Soviet. Kini memang semua pasukan Soviet -- tetapi sebagai hasil perundingannya dengan Amerika Serikat dan tidak dengan Cina -- dalam tahun 1989 telah ditarik dari Afghanistan, tetapi selepas pidato Gorbachev di Vladivostok itu Moskwa masih menjawab tuntutan Cina itu hanya dengan terlalu sedikit saja menarik pasukannya dalam bulan Oktober (1986), pengurangan sebagian kecil pasukan Soviet di Mongolia, dan konsesi *a la kadarnya* di perbatasan. Mengenai Kamboja, ketika itu orang-orang Soviet menyatakan tak sanggup mempengaruhi Vietnam yang "berdaulat." Ketika itu tak satu pun dari langkah-langkah Moskwa itu memuaskan Beijing. Terutama penolakan Soviet untuk mengendalikan Vietnam, yang tak akan dapat bertahan tanpa uang, minyak dan senjata Soviet, sungguh-sungguh menjengkelkan Cina.

Bagi Jepang, ajakan agar Asia dilibatkan dalam persetujuan tipe Helsinki amat tidak dapat diterima. Sebab, pada hakikatnya, Persetujuan Helsinki telah membekukan perbatasan-perbatasan Eropa dalam lokasinya sekarang, dan dari suatu versi Asia tak akan dapat diharapkan hal yang serupa. Harus diperhatikan bahwa pendudukan Soviet

sejak tahun 1945 atas pulau-pulau Kunashiri, Etorofu, Shikotan, dan Habomai telah merupakan pusat sengketa yang paling parah dalam hubungan-hubungan Soviet-Jepang selama lebih dari 40 tahun. Persengketaan inilah yang menerangkan sebabnya hingga kini Uni Soviet dan Jepang masih tetap belum menandatangani suatu perjanjian perdamaian yang akan mengakhiri Perang Dunia II bagi mereka.

Usul Gorbachev mengenai pembatasan timbal-balik kegiatan angkatan laut di Pasifik masih tetap diabaikan oleh negara-negara di kawasan tersebut. Menurut Yasuhiro Nakasone, bekas Perdana Menteri Jepang, yang mengunjungi Moskwa dalam pertengahan tahun 1987, kurangnya jawaban kepada usul Gorbachev disebabkan oleh kurangnya kondisi-kondisi yang memelihara kepercayaan.

Menyadari hasil-hasilnya yang sangat terbatas itu Gorbachev menambahkan usul-usul baru yang memungkinkan jalan yang lebih lancar ke arah suatu Pertemuan Puncak Sino-Soviet. Ini dapat dilihat dari pidatonya di Krasnoyarsk pada 16 September 1986, yang mengulangi usul-usulnya terdahulu dan menambahkan usul-usulnya yang baru.

Di antaranya adalah tawarannya membongkar pangkalan angkatan laut Soviet di Teluk Cam Ranh, Vietnam, jika Amerika Serikat bersedia menanggalkan fasilitas-fasilitas serupa -- tetapi yang lebih besar -- di Filipina. Tawaran Gorbachev tersebut menyimpulkan pengakuan bahwa Teluk Cam Ranh adalah sebuah pangkalan angkatan laut, yang oleh para juru bicara Soviet telah dengan kuat disangkal selama bertahun-tahun. Namun, tiada jawaban positif dapat diharapkan dari Amerika Serikat yang

melihat pertukaran yang diusulkan oleh Gorbachev itu sebagai suatu konsesi yang tidak seimbang.

Gorbachev juga menganjurkan perundingan-perundingan Sino-Vietnam yang langsung mengenai penarikan semua pasukan Vietnam dari Kamboja, mengusulkan pembekuan atas penggelaran pasukan-pasukan di Pasifik Barat, dan penciptaan "zone-zone ekonomi khusus" di Timur Jauh Soviet untuk memperlancar perkembangan ekonomi. Usul Cina bagi usaha-usaha ekonomi bersama Sino-Jepang-Soviet disepakatinya dan menambahkan variannya sendiri berupa proyek-proyek pertanian bersama Sino-Soviet di sepanjang perbatasan ke dua negara sosialis itu.

Daya upaya Moskwa untuk mengambil hati tetangga-tetangga Timur Jauh-nya telah mengambil langkah lainnya ke muka dalam bulan September dengan pembukaan Olimpiade Internasional di Seoul. Untuk pertama kalinya, pesawat Soviet Aeroflot, yang mengangkut kuda-kuda untuk Olimpiade Internasional, mendarat di bandara Seoul. Selama berlangsungnya Olimpiade Seoul, Korean Airline (KAL) diperbolehkan terbang di wilayah udara Soviet. Sebagai imbalannya, tim Olympic Soviet memperoleh status konsuler.

Dalam pada itu, tampaknya merupakan suatu langkah berhati-hati dan memelopori, yaitu memajukan hubungan-hubungan dengan Hongaria dan Korea Selatan sampai ke titik pertukaran misi permanen, hanya selangkah saja sebelum saling memberikan pengakuan diplomatik penuh. Dalam waktu singkat, duta-duta besar mereka masing-masing akan menempati posnya, dan hubungan-hubungan ilmu, kebudayaan dan perdagangan akan diperbaiki.

Hongaria dan Yugoslavia telah mempunyai kantor-kantor dagang di Korea Selatan, dan dalam tahun 1988 pers Seoul meramalkan bahwa Uni Soviet, Cina, Polandia dan bahkan Cekoslovakia akan segera menyusul. Melalui Hong Kong, Cina telah berdagang dengan Korea Selatan sebesar US\$2 milyar, melampaui Uni Soviet yang hanya US\$150 juta.

Namun, di tengah-tengah alamat-alamat (tanda-tanda yang mencemaskan) dari hubungan-hubungan lebih baik di atas terdengar suara-suara prihatin. Dalam pertengahan tahun 1988 Jepang menerbitkan sebuah Buku Putih yang menyatakan bahwa, kalaupun terdapat persetujuan-persetujuan Soviet-Amerika Serikat untuk mengurangi persenjataan mereka, pembangunan militer Soviet di Timur Jauh masih diteruskan. Diperkirakan bahwa antara seperempat dan sepertiga dari kekuatan-kekuatan nuklir strategis Soviet telah digelarkan di Timur Jauh, dan ini dipandang dengan tanda bahaya tiada henti-hentinya ketegangan antara Korea Utara dan Selatan.

Menjelang Olimpiade Seoul, diperoleh laporan bahwa Pyongyang telah menerima pesawat tempur Soviet yang paling canggih, MiG-29 ketika diperkirakan bahwa Presiden Korea Utara Kim Il Sung merasa sangat sakit hati dengan perkembangan dalam hubungan-hubungan Hongaria dengan Korea Selatan, lebih-lebih karena duta besarnya di Budapest adalah puteranya yang kedua.

Dalam waktu 15 bulan kemudian, Jepang menerbitkan Buku Putih lainnya pada 12 September 1989, yang memberikan rincian kekuatan militer Soviet di Timur Jauh. Bahkan dinyatakan bahwa Moskwa meningkatkan mutu pasukan-pasukan yang digelarkannya di dekat Jepang. Juga,

sebagaimana tahun yang lalu, disebut-sebut hubungan-hubungan militer Soviet dengan Korea Utara. Tanpa memberikan angka-angka, dikatakan bahwa Uni Soviet telah menyuplai Korea Utara dengan MiG-29 dan peluru-peluru kendali darat-ke-udara yang dipercaya sebagai SA-5. Sebagai imbalannya, Pyongyang mengizinkan pesawat-pesawat militer Soviet terbang melalui wilayah udara Korea Utara dalam perjalanan antara Vladivostok dan Teluk Cam Ranh. Juga Uni Soviet dan Korea Utara sudah mengadakan latihan angkatan laut bersama di Laut Jepang, dan yang terakhir dilakukan dalam bulan Oktober 1988.

Tidak dapat diragukan bahwa Moskwa akan berusaha memperbesar peranannya di Timur Jauh. Juga setelah pidato Gorbachev di Krasnoyarsk. Ketika Jepang, menjelang Olimpiade Seoul, memandang dengan tanda bahaya peningkatan kekuatan nuklir strategis Soviet yang digelar di Timur Jauh, Moskwa memang berusaha meyakinkan betapa besar hasratnya akan perdamaian. Ketika itu kepercayaan Jepang masih dibayangi oleh kehadiran militer Soviet di Afghanistan. Kini Moskwa sudah menarik semua pasukannya dari Afghanistan dan bahkan sudah mulai berhasil menekan Vietnam untuk menarik semua pasukannya dari Kamboja. Akan tetapi, dari Buku Putih yang baru saja dikeluarkannya itu Jepang masih memandang dengan prihatin hubungan-hubungan militer Uni Soviet dengan Korea Utara.

III

Jalan pikiran yang mengatakan bahwa -- seperti yang telah dikemukakan di atas -- pembangunan militer Soviet di Timur Jauh masih diteruskan, kendatipun persetujuan-

persetujuan Soviet-Amerika Serikat untuk mengurangi persenjataan mereka perlu diikuti secara kritis. Apakah tidak lebih tepat apabila kata "kandatipun" diganti dengan "justu"?

Pertanyaan ini dipengaruhi oleh strategi Rusia yang secara tradisional selalu mengelakkan pembukaan dua front, strategi yang juga dapat dilihat setelah tahun 1917. Ketika terlibat dalam perang dengan Jepang dalam tahun 1904-1905, Rusia melakukan pendekatan dengan negara-negara Barat. Dalam tahun-tahun 1941-1945, ketika terlibat dalam perang dengan Jerman, Rusia (Soviet) mengelakkan perang dengan Jepang, dan baru membuka front Asia dalam tahun 1945 setelah kapitulasi Jerman di front Eropa. Lain halnya dengan Amerika Serikat yang dalam bulan Desember 1941, tidak lama setelah membuka front Asia, membuka front Eropa. Demikian juga Jerman dalam tahun 1941 membuka front timur untuk berperang dengan Rusia, hanya dua tahun setelah membuka front barat untuk berperang dengan Inggris-Prancis.

Oleh sebab itu, ketika dalam permulaan tahun-tahun 1970-an detente Timur-Barat di Eropa mencapai kemajuan pesat, banyak analisa meramalkan bahwa akan segera terjadi pergeseran pusat konflik Timur-Barat dari Eropa ke Asia, di mana konflik Sino-Soviet, yang baru saja mencapai klimaksnya dengan bentrokan bersenjata di sepanjang perbatasan mereka dalam tahun 1969, tidak menunjukkan tanda-tanda pereadaan. Sebaliknya, tercapainya Persetujuan Helsinki 1975 yang ditandatangani oleh 35 negara Eropa dan Amerika Utara dianggap oleh para analis sebagai klimaks detente Timur-Barat di Eropa. Namun, pergeseran pusat konflik Timur-Barat itu tidak terjadi, karena konflik Timur-Barat di Eropa tidak

berakhir dengan penandatanganan Persetujuan Helsinki, sedang di Asia persetujuan tipe Helsinki itu tidak dapat dilibatkan. Dalam tahun 1972 Persetujuan SALT I, hasil Pertemuan Puncak Soviet-Amerika Serikat di Moskwa, dipandang oleh banyak orang sebagai klimaks dari kemajuan detente Timur-Barat, yang melempangkan jalan ke Helsinki. Sebaliknya, Persetujuan SALT II, hasil Pertemuan Puncak Soviet-Amerika Serikat di Wina dalam tahun 1979, merupakan anti-klimaksnya, karena sejak invasi Soviet ke Afghanistan dalam akhir tahun itu hubungan-hubungan Moskwa-Washington semakin hari semakin memburuk. Jadi, jelaslah bahwa Persetujuan Helsinki tidak dengan sendirinya telah mengakhiri konflik Timur-Barat di Eropa.

Namun, dalam pidatonya di Vladivostok, Gorbachev masih berusaha melibatkan Asia ke dalam tipe Helsinki. Bahwa Asia tidak dapat dilibatkan ke dalam tipe Helsinki merupakan faktor yang menerangkan mengapa, menjelang hari ulang-tahun ke-71 Revolusi Bolshevik tanggal 7 November 1988, Gorbachev menerima kunjungan-kunjungan Kanselir Franz Vranitzky dari Austria, Perdana Menteri Ciriaco de Mita dari Italia, dan Kanselir Helmut Kohl dari Jerman Barat, sedang Presiden Prancis François Mitterand baru kemudian setelah perayaan. Kalau diperhatikan bahwa sejak memangku jabatannya sebagai Sekjen PKUS Gorbachev terlihat sekali memusatkan diplomasinya di Asia -- dengan pidatonya di Vladivostok dan Krasnoyarsk -- maka timbullah pertanyaan mengapa menjelang 7 November 1988 menerima banyak kunjungan dari para pemimpin Eropa Barat, seolah-olah ia kembali memusatkan diplomasinya di Eropa.

Jawaban kepada pertanyaan di atas

dapat ditemukan dalam editorial harian *The New York Times* yang dikutip dalam harian berbahasa Inggris yang berpangkalan di Paris *International Herald Tribune* edisi 24 Oktober (1988) hanya 15 hari sebelum diselenggarakannya pemilihan presiden 4 November di Amerika Serikat. Di bawah judul *Gorbachev Unanswered* (Gorbachev Tak Terjawab), editorial NYT tersebut mengemukakan sebuah pertanyaan: "Calon Presiden Amerika mana yang menawarkan janji lebih banyak dalam hubungan-hubungan luar negeri?"

Menurut NYT, baik George Bush dari Partai Republik maupun Michael Dukakis dari Partai Demokrat tidak menjawab dengan gagasan-gagasan yang berminat dan berbobot tantangan Gorbachev kepada Amerika untuk membentuk kembali politik dunia. Dikatakannya bahwa tanpa suatu strategi Amerika yang terlihat terang, Moskwa akan menyusun agenda diplomasinya, dan suatu kesempatan besar bagi suatu perdamaian dan kerjasama akan dapat dihilangkan. Sebagai contoh dikemukakannya bahwa Gorbachev telah mengusulkan pengurangan senjata nuklir jarak jauh dengan tajam, pemotongan kekuatan konvensional, dan menyerukan dihapuskannya senjata kimiawi. Akan tetapi, baik Bush maupun Dukakis, dalam kampanye mereka tidak memberikan tanda apapun bahwa ia (Bush atau Dukakis) telah memikirkan bagaimana Amerika Serikat harus menjawab pertanyaan mengenai pentingnya berbagai perundingan tentang senjata dan bagaimana persetujuan-persetujuan yang akan dicapai mempunyai pengaruh terhadap anggaran belanja Pentagon (Departemen Pertahanan Amerika Serikat). Dikecamnya Dukakis, karena tidak ragu-ragu mengakui bahwa jalan penyelesaian yang telah dibuka oleh Gorbachev di

Afghanistan, Afrika bagian selatan, dan di kawasan-kawasan lain adalah berkat bantuan militer Amerika Serikat. Diakuinya bahwa Bush memahami peranan kekuatan dalam diplomasi, tetapi dikecamnya karena kurang serius dalam diplomasi di Amerika Tengah. Namun kedua-duanya -- dan tidak hanya Dukakis bahkan terutama Bush -- dikecamnya sebagai kurang tanggap terhadap usul-usul Gorbachev untuk memperluas penggunaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam perundingan-perundingan regional dan pemeliharaan perdamaian.

Apa yang dikatakan oleh NYT di atas dengan editorialnya itu mencerminkan betapa pemilihan presiden di Amerika Serikat yang diselenggarakan pada akhir pemerintahan Presiden Reagan tidak menyambut dengan minat yang cukup besar diplomasi Asia Gorbachev. Hal ini sebenarnya dapat dimengerti, karena diplomasi Asia Gorbachev tidak memberi apapun kepada Amerika Serikat. Pidato Vladivostok ditujukan untuk memperbaiki hubungannya dengan Cina dan Jepang, sedang Amerika Serikat tidak mendapat tawaran apapun. Pidato Krasnoyarsk hanya mengulangi pidato Vladivostok, dengan usul baru yang menawarkan kepada Amerika Serikat penghapusan pangkalan-pangkalan militer kedua belah pihak, pangkalan militer Soviet di Teluk Cam Ranh yang terletak di Vietnam dan pangkalan militer Amerika di Teluk Subic (dan Lapangan Clark) yang terletak di Filipina. Mengingat konsesi yang tak seimbang itu dapat dikatakan bahwa usul baru Gorbachev itu tidak menawarkan sesuatu kepada Amerika Serikat.

Pada hakikatnya, pola gagasan Gorbachev mengenai Asia tidak berbeda dengan pola gagasan Brezhnev mengenai sistem keamanan kolektif di Asia yang didasarkan

atas gagasannya mengenai sistem keamanan kolektif di Eropa. Akan tetapi, Brezhnev tidak berhasil menghilangkan kesan bahwa gagasannya itu bertujuan melakukan pengepungan terhadap Cina, sedang Gorbachev rupanya berhasil. Namun, Gorbachev akan menghadapi kesulitan apabila ingin melibatkan Asia ke dalam suatu persetujuan tipe Helsinki.

IV

Lagipula, hasil yang dicapai oleh Gorbachev itu tidak meniadakan kenyataan bahwa Vietnam merasa kurang senang dengan pidato Krasnoyarsk yang menawarkan pertukaran penghapusan pangkalan militer Soviet di Teluk Cam Ranh dengan pangkalan militer Amerika di Filipina. Sebab, pidato Krasnoyarsk bertentangan dengan pernyataan-pernyataan Moskwa sebelumnya bahwa Uni Soviet tidak dapat menekan Vietnam agar menarik semua pasukannya dari Kamboja sesuai dengan prasyarat Cina, mengingat bahwa Vietnam adalah sebuah negara yang "berdaulat." Dikutip oleh majalah mingguan berbahasa Inggris yang berpangkalan di Hong Kong *Far Eastern Economic Review* edisi 27 Oktober 1987, Menteri Luar Negeri Vietnam Nguyen Co Thach mengatakan kepada surat kabar Jerman Barat *Handelsblatt* edisi 20 September -- hanya empat hari saja setelah pidato Krasnoyarsk -- bahwa Cam Ranh adalah pelabuhan Vietnam dan bahwa orang-orang Soviet hanya akan dapat merundingkan dengan orang-orang Amerika kehadiran mereka sekarang di pelabuhan Vietnam itu, tetapi bukan masa depan fasilitasnya. Dan ketika tak lama kemudian Menteri Luar Negeri Filipina Raul Manglapus dalam kunjungannya di Hanoi menawarkan kepada Vietnam penghapusan pangkalan-

pangkalan militer Amerika di Teluk Subic dan Lapangan Clark sebagai imbalan penarikan semua pasukan Vietnam dari Kamboja Thach menjawab -- seperti dikutip oleh surat kabar *Manila Chronicle* edisi 28 November 1987 -- bahwa tidak ada kaitan antara keduanya dan bahwa sejarah kedua hal ini berbeda. Memang tawaran Menteri Luar Negeri Filipina itu tidak perlu, karena penyelesaian Kamboja akan dapat dilakukan oleh Uni Soviet dan Cina yang dipengaruhi oleh faktor Amerika Serikat. Dengan sendirinya apabila penyelesaian konflik Kamboja itu sudah tuntas, kehadiran militer Soviet di Cam Ranh sudah tidak diperlukan lagi, dan ini lepas dari kehadiran militer Amerika di Filipina. Kehadiran militer Soviet di Cam Ranh merupakan akibat dari ancaman militer Cina terhadap Vietnam sebagai bagian dari konflik Kamboja.

Faktor Vietnam merupakan salah satu contoh yang menerangkan bahwa, sebagai konsekuensi logis dari kebijakan Gorbachev mengadakan perbaikan hubungan Sino-Soviet, komitmen kepemimpinan Soviet pada Dunia Ketiga mulai berkurang. Kesimpulan ini banyak terdapat di kalangan pengamat internasional sejak tahun 1987 yang memperhatikan niat Gorbachev untuk lebih menyesuaikan diri dengan prasyarat-prasyarat Cina. Penarikan semua pasukan Soviet dari Afghanistan dan sebagian pasukannya dari Mongolia adalah di antara petunjuk-petunjuknya. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa penarikan semua pasukan Soviet dari Afghanistan tidak dengan sendirinya berarti akhir komitmen pada Pemerintah Kabul. Demikianlah pula halnya dengan penarikan semua pasukan Kuba dari Angola tidak dengan sendirinya berarti akhir komitmen Soviet pada pemerintah Marxis di Luanda.

Bantuan militer Soviet kepada MPLA (*Movimento Popular para a Libertacao de Angola*) sudah dimulai dalam tahun 1975 ketika pecah perang saudara dalam tahun itu di bekas negeri jajahan Portugal di benua Afrika itu. Ketika itu Uni Soviet berada di bawah pemerintahan Presiden Brezhnev (dalam tahun 1975 masih belum presiden, tetapi, sudah menjadi Sekretaris Pertama -- belum juga Sekretaris Jenderal -- PKUS) yang mengadakan intervensi militer di mana-mana. Di masa Brezhnev terjadi invasi Soviet ke Afghanistan (1979), sedang di masa Gorbachev terdapat hasrat Soviet untuk menarik diri dari negara yang didudukinya itu atau, setidaknya, mengurangi komitmen militernya. Memang dibandingkan dengan apa yang telah dilakukannya di Afghanistan, apa yang telah dilakukannya di Angola lebih bersifat tak langsung, karena tidak menggunakan pasukan-pasukannya sendiri, melainkan, pasukan-pasukan Kuba yang dibiayainya.

Baik intervensi Soviet di Angola (dengan menggunakan pasukan-pasukan Kuba) maupun intervensinya di Afghanistan (dengan menggunakan pasukan-pasukannya sendiri) terjadi tatkala Amerika Serikat berada di bawah pemerintahan Presiden Carter. Di bawah pemerintahan Presiden Reagan, Amerika Serikat memperlakukan Angola serupa dengan Afghanistan, di mana berkobar pemberontakan yang hingga kini belum juga dapat dipadamkan. Pemberontakan di Angola dilakukan oleh UNITA (*Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola*) di bawah pimpinan Jonas Savimbi. Pada mulanya pemberontakan di Angola ini, yang dimulai sejak MPLA menyatakan Kemerdekaan Angola pada 11 November (1975), dibantu oleh Afrika Selatan yang menguasai Namibia di seberang perbatasan

selatan Angola. Di bawah pemerintahan Reagan, Amerika Serikat kemudian mengambil-alih prakarsa Afrika Selatan. Bahkan, kini UNITA hanya berpaling kepada Amerika Serikat dan mengabaikan bantuan Afrika Selatan, seperti terbukti dari Persetujuan Savimbi untuk membuka kembali jalan kereta api yang menghubungkan kota pelabuhan Angola Lobito dengan pusat-pusat pertambangan tembaga di Zambia dan Zaire. Afrika Selatan menaruh keberatan terhadap pembukaan kembali jalan kereta api tersebut, karenanya para pengamat menduga bahwa Amerika Serikat mungkin telah memisahkan Savimbi dari ketergantungannya kepada Pretoria. Untuk itu Savimbi telah menerima bantuan militer Amerika Serikat yang meliputi peluru-peluru kendali darat-ke-udara Stinger yang dikirim melalui bandara Kamina di Zaire. Sejak pecahnya perang saudara 14 tahun yang lalu jalan kereta api yang vital tersebut tidak dapat digunakan selama 12 tahun, karena diganggu oleh kaum pemberontak. Dengan menyetujui pembukaannya kembali, asal tidak akan digunakan bagi tujuan-tujuan militer, Savimbi mengharapkan akan dapat menarik lebih banyak simpati Kongres Amerika Serikat agar memberikan bantuan kepada geraknya.

Selain itu, Savimbi akan dapat mengharapkan dari pemerintah MPLA di Luanda dan negara-negara tetangganya suatu pengakuan kepada status UNITA yang diperjuangkannya. Dalam tahun 1987 majalah mingguan London *The Economist* mengatakan bahwa telah tersiar desas-desus yang mengatakan bahwa di Eropa telah diadakan pertemuan-pertemuan antara wakil-wakil UNITA dan MPLA yang kemudian apabila telah menghasilkan suatu persetujuan yang melibatkan pembangunan jalan kereta api

tersebut mungkin negara-negara Eropa akan bersedia membantu membiayainya.

Persetujuan Savimbi mengenai pembukaan jalan kereta api di atas tersimpul dalam pernyataannya pada 26 Maret 1987. Ketika itu tentunya para pengamat melihat prospek yang menggembirakan mengenai penyelesaian konflik Angola yang selama 12 tahun dilanda oleh perang saudara. Dalam bulan berikutnya, ketika Pemimpin MPLA Jose Eduardo dos Santos melakukan kunjungan ke Korea Utara, tersiarlah berita di Kinshasa, ibukota Zaire, bahwa Kuba akan menarik pasukan-pasukannya dari Angola. Jumlah pasukan Kuba yang digelarkan di Angola adalah sebesar 35 ribu orang, termasuk 8 ribu penasihat sipil. Akan tetapi, hanya dalam bulan berikutnya lagi, seorang pejabat Amerika Serikat, yang dikutip oleh surat kabar *The Washington Post* di Washington, mengatakan bahwa Uni Soviet telah rampung dengan pembangunan militer di Angola dan bahwa, menurut perkiraan pemerintahan Reagan, pemerintah Marxis di Luanda akan segera melancarkan ofensif besar-besaran terhadap kaum pemberontak dalam musim panas tahun 1987. Dikatakannya bahwa, menurut sumber-sumber intelijen Amerika Serikat, selama tahun 1986 Uni Soviet telah mengirim bantuan militer seharga US\$1 milyar kepada Angola. Dengan demikian dalam waktu satu tahun saja Uni Soviet telah memberikan bantuan militer kepada Angola seperempat dari seluruh bantuan militernya kepada MPLA sejak tahun 1975. Dari bantuan militer Soviet kepada Luanda itu dapat disebut peluru-peluru kendali darat-ke-udara yang akan digunakan terhadap serangan-serangan yang mungkin akan dilakukan oleh Afrika Selatan dalam membantu kaum pemberontak. Menurut para penganalisa Amerika yang mengikuti dari

dekat pembangunan militer di Angola tersebut, tujuan Soviet tidak hanya diarahkan kepada kaum pemberontak di Angola, tetapi juga untuk menghadapi Afrika Selatan. Dalam pada itu, selama tahun 1986, jumlah pasukan Kuba yang digelarkan di Angola bukannya dikurangi, melainkan justru bertambah menjadi 37 ribu orang.

Dua tahun yang lalu timbullah pertanyaan, apakah tetap tidak akan ada perubahan setelah Savimbi mengabaikan Afrika Selatan yang selama satu dasawarsa telah membantunya, dan ia kemudian hanya berpaling kepada bantuan militer Amerika Serikat melalui Zaire. Pembangunan militer besar-besaran di Angola telah memperoleh reaksi dalam Kongres Amerika Serikat. Senator Dennis DeConcini, Demokrat dari Arizona dengan 17 ko-sponsornya memajukan sebuah resolusi yang mengutuk pembangunan militer tersebut dan meminta kepada Gedung Putih agar memberlakukan embargo terhadap Angola.

Walaupun hanya disinggung sedikit saja, masalah Dunia Ketiga telah dibicarakan oleh Gorbachev dalam pertemuan mereka di Moskwa dalam tahun 1988, tidak berapa lama setelah tercapainya Persetujuan Jenewa 14 April yang ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri Afghanistan, Pakistan, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Menurut Reagan, Persetujuan Jenewa 14 April tersebut dapat membantu menyelesaikan konflik-konflik regional di muka bumi, termasuk konflik Kamboja.

Penarikan pasukan-pasukan Soviet dari Afghanistan dapat dilihat sebagai suatu petunjuk bahwa, dalam hubungannya dengan sekutu-sekutu komunisnya di Dunia Ketiga, Uni Soviet mendahulukan kepentingan-kepentingannya sendiri. Sebab, Gorbachev

merasa ngeri setelah mengetahui bahwa bantuannya untuk Kuba, Mongolia dan Vietnam saja sudah meliputi sekitar US\$3,5 milyar setahun. Oleh sebab itu, Moskwa ingin mengadakan perubahan-perubahan.

Vietnam, misalnya, telah menerima pesan terang-terangan dari Gorbachev agar menjalankan pembaruan ekonomi dengan gaya Soviet. Partai Komunis dan Pemerintah Vietnam, yang dalam tahun 1986 telah memperoleh pemimpin-pemimpin baru, telah berbicara tentang versi *perestroika* mereka yang dalam bahasa Vietnamnya adalah *doi moi*.

Selama itu yang mengurus bantuan untuk Vietnam adalah Ligachev ketika masih menjadi orang nomor dua dalam hierarki Kremlin. Konon jumlah bantuan Soviet untuk Vietnam meliputi sekitar US\$1,5 milyar setahun. Bahwa bantuan ini tidak mencukupi terbukti dari laporan-laporan mengenai timbulnya ancaman bencana kelaparan di bagian utara Vietnam. Hal ini menyimpulkan bahwa perekonomian Vietnam memerlukan *perestroika* (*doi moi*) seperti yang diharapkan oleh Gorbachev, sedang beberapa orang anggota Kongres Amerika Serikat mengatakan agar Washington memberikan dorongan bagi *doi moi*, dengan mendirikan seksi-seksi kepentingan di Washington dan Hanoi. Jawaban Washington ialah bahwa Vietnam harus menarik semua pasukannya dari Kamboja terlebih dulu.

Jadi, seolah-olah bukan saja semua pasukan Vietnam itu tidak merupakan konsekuensi logis dari pembaruan ekonomi Vietnam, melainkan juga bahkan bertentangan. Ketika mulai menarik pasukannya dari Afghanistan, Moskwa tidak memajukan prasyarat bahwa, misalnya, salah satu kelompok gerilyawan Mujahidin tidak boleh

mengambil-alih pemerintahan di Kabul. Oleh sebab itu, tidak terlalu sulit bagi Moskwa untuk mulai menarik pasukannya dari Afghanistan. Akan tetapi, setelah dalam tahun 1988 mengumumkan akan menarik 50 ribu pasukannya dari Kamboja, Vietnam memajukan prasyarat bahwa Khmer Merah tidak boleh kembali ke Phnom Penh. Prasyarat ini akan mempersulit Vietnam untuk mulai menarik pasukan-pasukannya dari Kamboja.

Bagaimanakah mungkin pola Afghanistan bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah Kamboja apabila Hanoi masih mempersoalkan kelompok gerilyawan Khmer Merah. Sebab, posisi Hanoi ini belum menempatkan pembaruan di atas masalah Kamboja. Sedangkan di Afghanistan sendiri masih banyak masalah, kendatipun telah ada Persetujuan Jenewa 14 April. Uni Soviet yang memiliki perbatasan bersama dengan Afghanistan akan mudah menyuplai Pemerintah Kabul dengan senjata. Lagipula, sebelum pasukan-pasukannya meninggalkan Afghanistan, senjata-senjata dan perlengkapan mereka dapat ditinggalkan di Afghanistan. Agar senjata Amerika Serikat tidak perlu disuplai melalui Pakistan, para gerilyawan Afghan mempunyai rencana untuk merebut Kandahar, kota ketiga terbesar di Afghanistan, sesudah itu mungkin memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintah sementara. Oleh sebab di Kandahar terdapat bandara yang dibangun oleh Amerika Serikat, suplai senjata Amerika Serikat akan dapat dikirim melalui bandara tersebut.

Apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat sebenarnya adalah penghentian bantuan militer kepada kedua belah pihak oleh sekutu-sekutu mereka masing-masing. Artinya, di satu pihak Uni Soviet menghentikan bantuan militernya untuk Pemerintah Kabul, se-

dang di lain pihak Amerika Serikat menghentikan pula bantuan militernya untuk Mujahidin. Akan tetapi, bagi Uni Soviet, menghentikan bantuan militernya untuk Pemerintah Kabul akan sama halnya apabila Amerika Serikat menghentikan bantuan militernya untuk Pakistan. Jalan pikiran Soviet ini tercermin pula dalam masalah Nikaragua, di mana sedang terjadi perang saudara antara kedua belah pihak yang sama-sama penentang rezim Somoza yang mereka jatuhkan dalam tahun 1979. Pihak yang satu disebut kaum Sandinista yang berhasil mengendalikan pemerintahan, sedang pihak yang lain disebut kaum Contra yang mengambil tempat sebagai oposisi militan. Pemerintah Sandinista memperoleh bantuan militer dari Uni Soviet, sedang oposisi Contra mendapat bantuan militer dari Amerika Serikat. Gorbachev pernah mengatakan bahwa Uni Soviet akan menghentikan bantuan militernya untuk Pemerintah Nikaragua apabila Amerika Serikat menghentikan pula bantuan militernya untuk gerilyawan Contra, tetapi tujuan Gorbachev adalah agar Kongres Amerika Serikat menolak setiap permintaan Gedung Putih untuk melanjutkan penyuplaian senjata bagi gerilyawan Contra di Nikaragua. Setelah Kongres mengambil keputusan-keputusan seperti yang diharapkannya, Gorbachev mengambil sikap yang lebih keras. Yaitu, apabila menghendaki penghentian bantuan militer Soviet untuk Pemerintah Nikaragua, Washington bukan saja harus menghentikan bantuan militernya untuk gerilyawan Contra, melainkan juga menghentikan bantuan militernya untuk Honduras, El Salvador dan Guatemala.

Di antara sekutu-sekutu komunisnya di Dunia Ketiga barangkali hanya Nikaragua yang membanggakan, karena posisinya jauh lebih kuat daripada posisi gerilyawan Con-

tra. Memang bantuan militer Soviet mengalir terus, tetapi Gorbachev telah mengingatkan Nikaragua bahwa bantuan ekonominya tidak akan bisa diberikan terus-menerus tanpa negara sekutu Soviet di Amerika Tengah itu berusaha memecahkan masalah-masalah mereka sendiri. Pada umumnya Gorbachev tak merasa gembira dengan sekutu-sekutu komunisnya di Dunia Ketiga, terutama Kuba yang terang-terangan menentang *perestroika*, Korea Utara yang sudah terisolasi dan hampir bangkrut, Ethiopia dan Angola.

Di Kuba, buku karya Gorbachev yang berjudul *Perestroika*, Harper & Row, New York, 1987, memang tidak dilarang, bahkan menurut *The Sunday Times* (London) edisi 26 Juni 1988 telah terjual habis. Namun, Castro telah menolak *perestroika* dan *glasnost* sebagai kebijakan Kremlin.

Penolakan Castro itu ditegaskan di Santiago, ibukota propinsi Oriente yang terletak di pantai selatan 480 mil dari Havana pada hari ulang tahun ke-35 percobaan serangan sekelompok kecil gerilyawan yang dipimpinnya terhadap asrama-asrama militer Moncada di masa pemerintahan rezim Jenderal Batista. Walaupun merupakan suatu kegagalan, serangan 26 Juli 1953 itu telah diperingati sebagai awal serangan dalam suatu pemberontakan yang akhirnya pada tahun baru 1959 berhasil mencapai kemenangan.

Gerakannya dinamakannya Gerakan 26 Juli yang lambat-laun menanggalkan program politik menganjurkan kebebasan, karena banyaknya bekas pengikutnya yang demokratis mencari tempat berlindung di Amerika Serikat. Setelah putusya hubungan-hubungan diplomatik Kuba dengan Amerika Serikat dalam tahun 1961, Castro berpaling ke Uni Soviet yang ketika itu sudah di

bawah pemerintahan rezim Khrushchev. Kegagalan para bekas pengikutnya, yang telah memperoleh tempat berlindung di Amerika Serikat, dalam Invasi Teluk Babi tahun itu mempercepat pendekatan Gerakan 26 Juli ke Partai Rakyat Sosialis, yaitu, Partai Komunis Kuba yang tidak mengambil bagian dalam revolusi anti-kediktatoran Batista. Dalam akhir tahun 1961, justru setelah pulang dari Pertemuan Puncak Pertama Gerakan Non-Blok di Beograd, untuk pertama kalinya Castro menyebut dirinya seorang Marxis-Leninis. Hanya dalam tahun berikutnya terbentuklah Partai Persatuan Revolusi Sosialis hasil fusi Gerakan 26 Juli dengan Partai Rakyat Sosialis yang dalam tahun 1965 mengubah nama menjadi Partai Komunis Kuba. Ketika itu Uni Soviet sudah di bawah pemerintahan rezim Brezhnev, menggantikan pemerintahan rezim Khrushchev yang jatuh dalam tahun 1964.

Dalam pidatonya di depan Kongres XXV PKUS (1976), Castro mengatakan bahwa Uni Soviet telah memberikan model (contoh) yang berlaku secara unik bagi revolusi komunis dan bahwa Kuba telah keliru ketika dalam permulaan tahun-tahun 1960-an mencoba menganut suatu model independen. Perlu diketahui bahwa dalam tahun 1962, justru sesaat setelah Kuba menjadi sebuah negara komunis, Castro sangat kecewa terhadap kapitulasi Khrushchev kepada Amerika Serikat. Kemunduran hubungan-hubungannya dengan Moskwa telah mendorongnya ke Beijing, tetapi mulai pertengahan tahun-tahun 1960-an mencoba menganut garis independen untuk menjadi mercu suar di Amerika Latin. Akan tetapi, kesulitan-kesulitan ekonominya telah memaksanya berpaling kembali ke Moskwa, lebih-lebih setelah ia menyatakan dukungannya bagi invasi Soviet ke Cekoslovakia (1968).

Sebagai sekutu alamiah Moskwa, Kuba telah mengadakan intervensi-intervensi militer di benua Afrika atas nama Uni Soviet. Dengan pemerintahan rezim Gorbachev di Uni Soviet, Castro harus menyesuaikan diri apabila Moskwa kini menghendaki penghentian semua intervensi militer warisan Brezhnev. Kini Kuba memang telah menarik semua pasukannya dari Angola dan negara-negara Marxis lainnya di benua Afrika, tetapi dalam pidatonya di Santiago, meskipun memuji pelaksanaan sistem Soviet, Castro mengatakan bahwa Kuba tidak terletak di Laut Hitam, melainkan di Laut Karibia. Yang ironis ialah bahwa bagian pidatonya yang mengatakan bahwa tiada dua revolusi yang sama dan bahwa Kuba selalu menolak mencontoh resep-resep yang dipakai untuk masalah-masalah orang lain jelas bertentangan dengan pidatonya di depan Kongres XXV PKUS yang telah saya kutip di atas.

Castro memang tak dapat berbuat lain daripada menolak *perestroika*, karena dalam permulaan tahun-tahun 1980-an sudah mempunyai pengalaman ekonomi pasar yang kemudian dihentikan dalam tahun 1986, karena eksperimennya itu telah melahirkan kelas orang kaya baru yang dipersalahkan sebagai sumber timbulnya korupsi yang melibatkan para tokoh terkemuka. Jadi, apabila menganut *perestroika* sebagai kebijakannya sendiri memang absurd, karena ia harus kembali kepada pengalaman ekonomi pasar yang telah dilihatnya sebagai suatu kegagalan. Sungguh ironis bahwa, sebelum Gorbachev mengumumkan gagasan pembaruannya yang disebut *perestroika* itu, Castro sudah memeranginya dengan dogmatisme fundamentalis dan dengan menghidupkan kembali kemartiran Che Guevara, teman seperjuangannya dalam Gerakan 26 Juli, yang dalam tahun 1967 tewas ketika sedang melancarkan kampanye gerilya di Boli-

via, tetapi ia dipuja sebagai Dewa Revolusi.

Itulah sebabnya dalam pidatonya di Santiago itu Castro mengatakan bahwa orang-orang Kuba harus menjaga kemurnian ideologi revolusi mereka dan bahwa orang-orang Kuba tak dapat memakai cara yang berbau kapitalisme.

V

Lebih-kurang tiga pekan sebelum pidato Castro di Santiago itu, pada 3 Juli 1988 seorang ekonom Soviet yang merupakan salah seorang anggota Akademi Ilmu-ilmu Uni Republik Sosialis Soviet, Mikhail Popov, mengadakan sebuah wawancara dengan kantor berita *Associated Press* menjelang keberangkatannya pulang ke tanah airnya setelah selama delapan bulan mempelajari cara kerja sistem perekonomian Amerika Serikat di Lembaga Riset Regional West Virginia University. Popov tinggal di Amerika Serikat sebagai bagian dari program pertukaran internasional yang digunakannya untuk studi mengenai pajak, keuntungan dan cara-cara kapitalis lainnya.

Sebagai pendukung gigih *perestroika*, Popov mengatakan bahwa ia akan menggunakan gagasan-gagasan kaum terpelajar Amerika, karena banyak di antaranya yang baru, yang sesuai dengan zaman dan yang tak tersedia di Uni Soviet. "Jika saya melihat hal-hal baru di Amerika Serikat," kata ekonom Soviet itu, "biasanya saya berpikir bagaimana saya dapat mempergunakannya untuk menyusun kembali perekonomian kami." Dikatakannya lebih jauh bahwa ia ingin sekali membagi pengalamannya dengan para rekannya yang erat sekali terlibat dalam *perestroika*. Menurut pendapatnya, *perestroika* benar-benar merupakan suatu ekspresi masyarakat Soviet dan terjadinya

tidak secara tiba-tiba, melainkan merupakan suatu evolusi alamiah dari sistem sosialis. "Kami tak dapat menghindarinya," kata ahli ekonomi Soviet berusia 36 tahun dari Produksi Industri Soviet itu. Ketika ia memberikan wawancaranya itu, PKUS baru saja mengakhiri konperensi istimewanya di Moskwa yang mendukung sebagian besar kebijakan-kebijakan Gorbachev.

Kesimpulan dari wawancara Popov di atas ialah bahwa Uni Soviet akan menempuh jalan kapitalis, meskipun masih menjadi pertanyaan apakah ia cukup menyadari bahwa yang disebut kapitalisme itu adalah sistem ekonomi, di mana sebagian besar ekonomi dikuasai oleh para pemilik swasta (non-pemerintah) dengan menggantungkan diri kepada penanaman modal yang disediakan oleh pihak swasta sebagai imbalan dari keuntungan-keuntungan yang dibagi-bagikan. Akan tetapi, di dunia komunis dikenal istilah "penempuh jalan kapitalis" yang digunakan oleh Mao Zedong mula-mula terhadap Khrushchev dan kemudian terhadap Liu Shaoqui. Dalam pengertian ini, baik Cina di bawah pimpinan Deng maupun Uni Soviet di bawah pimpinan Gorbachev adalah negara-negara sosialis yang "menempuh jalan kapitalis." Yang terakhir ini merupakan konsekuensi logis dari *perestroika*. Walaupun Popov mengatakan dalam wawancaranya itu bahwa *perestroika* itu tak akan dapat diubah lagi, kebijakan Gorbachev itu masih harus diselamatkan dari ancaman yang ingin menggagalkannya.

Seorang ekonom Soviet lainnya yang juga dengan gigit mendukung *perestroika* adalah Nikolai Shmelev yang menulis sebuah artikel dalam *Moscow News*. Dikutip oleh *The Washington Post* edisi 3 April 1988, Shmelev mengemukakan tiga saran yang mengejutkan mengenai bagaimana menyelamatkan *perestroika*. Pertama-tama disaran-

kannya agar digalakkan penabungan secara sukarela dengan memberikan bunga yang real dan positif. Selanjutnya disarankannya agar saham-saham dalam perusahaan-perusahaan negara dijual kepada umum. Dan kemudian disarankannya agar *perestroika* dibiayai dengan pinjaman-pinjaman dari Barat.

Para pengamat Barat berpendapat bahwa dari ketiga hal yang disarankan oleh ahli ekonomi Soviet itu barangkali dua yang pertama masih terlalu maju bagi Uni Soviet, meskipun Hongaria, salah sebuah negara sosialis juga, mungkin akan segera mencobanya dengan kebijakan seperti itu. Akan tetapi, adalah sangat menarik para pengamat Barat gagasan Shmelev agar *perestroika* dibiayai dengan memperbesar pinjaman-pinjaman Soviet dari Barat. Menurut Jan Vanden dans dalam sebuah artikelnya di *The Washington Post* (3 April), dengan membaiknya iklim politik antara Barat dan Uni Soviet, yang disebabkan oleh penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan dan kemajuan pengawasan senjata, tercapailah tingkat perkembangan, di mana orang-orang Soviet akan dapat memikirkan dengan sungguh-sungguh peminjaman sebesar US\$25 milyar sampai US\$50 milyar dari Barat dalam jangka waktu tiga tahun untuk meningkatkan impor teknologi Barat. Hal ini akan mendukung Gorbachev dalam posisi seorang usahawan Barat yang telah mempunyai gagasan-gagasan usaha yang baik, sebuah rencana ambisius, tetapi kekurangan dana. Tanpa memperbesar pinjaman-pinjaman dari Barat, *perestroika* yang hendak diselenggarakannya itu cukup mengandung risiko dan membawanya ke jurang kebangkrutan.

Namun, untuk menerima dengan baik saran-saran Shmelev, Gorbachev memerlukan

kan keyakinan politik yang sangat besar bahwa pembaruan-pembaruan yang diselenggarakannya berada di jalur yang benar dan bahwa dalam pertengahan tahun-tahun 1990-an nanti industri Soviet akan mampu membawa hasil-hasil yang cukup untuk bersaing secara internasional guna mulai membayar kembali pinjaman-pinjamannya. Sebab, apabila *perestroika* sampai gagal, Uni Soviet akan menemukan dirinya dalam awal tahun-tahun 1990-an sebagai sebuah negara dengan hutang sebesar US\$65 milyar sampai US\$90 milyar tanpa kesanggupan untuk membayar kembali.

Kemungkinan yang terakhir itulah yang menerangkan mengapa dalam kepemimpinan Soviet terdapat seorang Ligachev yang lebih menyukai penangguhan *perestroika* untuk beberapa tahun lagi dan kalau perlu biarlah timpang sekalipun daripada menyeraikan diri kepada "belas-kasihan" pasar-pasar modal Barat dan disiplin keuangan mereka.

Di bidang militer, *perestroika* menimbulkan kesan pergeseran dalam strategi apabila diperhatikan pidato Gorbachev di Majelis Umum PBB pada 7 Desember 1988 yang mengumumkan rencana Moskwa untuk mengurangi pasukannya dengan 500 ribu orang dan 10 ribu tank dalam tahun 1991.

Sebenarnya rencana Moskwa itu sudah dapat diketahui dari kunjungan-kunjungan Marsekal Sergei Akhromeyev, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Soviet, ke Washington dan Stockholm dan kemudian wakilnya, Kolonel-Jenderal Makhmut Gareyev pada 19 oktober (1988) mengunjungi London, di mana ia memberikan ceramah untuk Royal United Institute for Defence Studies mengenai "pemikiran baru" Moskwa tentang persoalan-persoalan militer. Apa yang telah di-

lakukan oleh Akhromeyev dan Gareyev itu, menjelang pidato Gorbachev di Majelis Umum PBB, merupakan serangkaian ofensif ideologis tentara Soviet, yang berhasil mempengaruhi pendapat umum di Barat selama akhir kampanye pemilihan presiden di Amerika Serikat.

Tema sentral dari ofensif ideologis tentara Soviet itu berkisar pada gagasan tentang sebuah doktrin militer non-ofensif sebagai doktrin militer baru yang mengikat pasukan-pasukan dari Organisasi Pakta Warsawa semata-mata untuk lebih membela wilayah mereka sendiri daripada melancarkan gerakan ke depan sampai ke dataran-dataran utara Jerman. Jadi, dengan doktrin militernya yang baru ini, Uni Soviet sudah merasa cukup puas dengan perbatasan-perbatasan ruang pengaruhnya di Eropa Timur.

Menurut kalangan pengamat militer di Libanon, gagasan di atas merupakan bagian dari suatu peninjauan kembali yang lebih luas mengenai kebijakan keamanan dan politik luar negeri Soviet yang timbul dari tahun-tahun pertama naiknya Gorbachev di singgasana kekuasaan. Gorbachev ingin mengubah bentuk hubungan-hubungan Uni Soviet dengan Eropa Barat di satu pihak dan dengan Cina di lain pihak. Akan tetapi, negara-negara yang bertetangga dengan Uni Soviet tersebut masih akan terus mencurigai Moskwa selama angkatan bersenjata berwarna merah itu tetap ditujukan ke suatu strategi ofensif.

Perlu diperhatikan bahwa selama berabad-abad para pemimpin Rusia, termasuk para pemimpin Rusia dewasa ini, menganut pola strategi yang salah satu prinsipnya adalah maju melalui darat, berbeda dengan ekspansi Barat yang meluaskan jajahan dengan menyeberangi laut. Dengan pola strategi ter-

sebut berarti bahwa daratan-daratan Eropa Barat dan Cina akan menjadi sasaran-sasaran strategi berikutnya setelah berhasil memperluas imperiumnya di Eropa Timur dan Asia Timur berkat kemenangan-kemenangan militernya dalam Perang Dunia II. Menurut perkiraan para ahli strategi militer Barat, dalam waktu tujuh hari saja setelah pecahnya Perang Dunia III sisa benua Eropa akan dapat direbut oleh Uni Soviet.

Akan tetapi, menurut hasil penelitian yang dibuat oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) yang berpangkalan di London dalam *Strategic Survey 1986-1987*, dengan Gorbachev duduk di puncak kepemimpinannya di Kremlin, mulailah Uni Soviet mengakui bahwa adalah tidak mencukupi lagi untuk menggantungkan diri kepada kekuatan militer guna memperbesar pengaruh politiknya dan bahwa persaingan secara ekonomis dan teknologis akan diperlukan apabila Moskwa harus mempertahankan statusnya sebagai negara adikuasa.

Bila benar demikian, berarti bahwa Moskwa akan segera melakukan pergeseran dalam strategi militernya. Sebab, sejak kemenangan Uni Soviet dalam Perang Dunia II, para perwira militernya telah dididik untuk percaya bahwa Perang Dunia III akan dapat dimenangkannya dengan ofensif kilat yang cepat sekali oleh pasukan-pasukan tanknya yang digelar di Eropa Timur. Secara turun-temurun dari generasi ke generasi, pemikiran militer Soviet didasarkan atas pengalaman bahwa dalam waktu enam bulan pertama perangnya melawan agresi Jerman tahun 1941 -- yang merupakan bagian Perang Dunia II -- pasukan-pasukan musuh tak dapat ditahan sampai berhasil menghampiri Moskwa karena pasukan-pasukan Soviet telah dapat dipaksa mengambil strategi defensif.

Pemikiran militer di atas diwarisi dengan sadar oleh Marsekal Nikolai Ogarkov yang sampai tahun 1984 adalah kepala staf angkatan bersenjata. Dalam wawancaranya dengan harian *Krasnaya Zvezda*, suara resmi angkatan bersenjata Soviet, edisi 9 Mei 1984 yang memperingati hari ulang tahun kemenangan Soviet dalam Perang Dunia II, Ogarkov mengingatkan pewawancaranya kepada Friedrich Engels mengenai betapa pentingnya teknologi militer. Diperingatkannya bahwa pembaruan-pembaruan teknologi di bidang persenjataan menuntut tindakan Soviet secara mendesak dengan menekankan perlunya disempurnakan alat perusak konvensional yang mau tidak mau pasti akan membawa akibat perubahan (pembaruan) dalam persiapan dan penuntunan operasi-operasi serta pembangunan-pembangunan teknologis lainnya yang tidak dirinci dan yang menciptakan prasyarat-prasyarat nyata bagi munculnya di masa dekat tipe-tipe senjata yang perusak dan yang tidak dikenal sebelumnya berdasarkan prinsip-prinsip fisika baru.

Dengan Ogarkov sebagai kepala staf angkatan bersenjata, Uni Soviet mulai mengarahkan tentaranya ke sebuah doktrin militer yang akan dapat memungkinkan dicapainya suatu kemenangan dengan sangat cepat sedemikian rupa, sehingga Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO) tidak bakal sempat memperdebatkan penggunaan senjata nuklir.

Berdasarkan kepercayaan ini -- yaitu, kepercayaan kepada strategi ofensif -- Uni Soviet telah menggelarkan pasukan dalam jumlah yang amat besar di Eropa Timur, terutama pasukan tank dan meriamnya. Menurut angka-angka yang dimiliki oleh IISS dalam *The Military Balance 1988-1989*, Uni Soviet mempunyai 1,9 juta pasukan darat

(1,3 juta di antaranya mungkin wajib militer) dan jumlah pasukan tanknya terdiri dari 52 divisi. Baik pasukan daratnya maupun pasukan tanknya dalam waktu dua tahun mendatang akan berkurang sekitar 11%, jumlah yang masih terlalu kecil dilihat dari sudut kekuatan militer.

Namun yang menarik perhatian adalah bahwa dalam ofensif ideologis tentaranya itu Uni Soviet ingin meyakinkan Barat bahwa suatu pergeseran sedang dilakukan dalam strategi militernya dari ofensif ke defensif. Menurut para perwira militer, kini kurikulum-kurikulum di akademi-akademi militer mereka sedang mengalami perubahan. Para komandan tidak lagi diberikan doktrin militer ofensif, karena doktrin militer defensif adalah yang paling baik bagi Uni Soviet. Strategi militer baru ini untuk pertama kalinya diuji dalam latihan perang-perangan di Ukraina dengan nama sandi *Musim Gugur 88*, yang dipimpin sendiri oleh Jenderal Dmitri Yazov pribadi dan yang melibatkan unsur-unsur markas besar dari beberapa divisi. Yazov adalah bekas bawahan Akhromeyev, tetapi sejak tahun 1987 menjadi menteri pertahanan menggantikan Sergei Sokolov yang dipecat sebagai ekor peristiwa Matthias Rust, pemuda Jerman Barat yang mendaratkan pesawat terbangnya di

Lapangan Merah yang terhampar di depan Istana Kremlin.

Para perwira militer Soviet ingin meyakinkan Barat bahwa pergeseran dalam strategi militer Moskwa dari ofensif ke defensif itu bersungguh-sungguh. Dikemukakan oleh mereka bahwa dalam Perang Napoleon awal abad yang lalu tentara Rusia paling sukses ketika mengambil posisi defensif sampai jauh di daerah pedalaman wilayah mereka sendiri. Posisi defensif serupa adalah juga posisi Tentara Merah ketika menghadapi invasi pasukan Jerman dalam tahun 1941. Akan tetapi, kemudian Tentara Merah melakukan serangan balik sampai ke jantung Eropa, sehingga berubahlah strategi militer defensifnya menjadi strategi militer ofensif. Pola baru ini terus dianut oleh kaum militer Soviet selama 40 tahun terakhir ini sampai dilancarkannya ofensif ideologis tentara Soviet dari Akhromeyev sampai Gorbachev. Namun pergeseran dalam strategi militer Moskwa baru merupakan rencana yang masih harus diterjemahkan ke dalam kenyataan, yang mungkin akan dapat diharapkan apabila Gorbachev berhasil terpilih kembali tidak hanya sebagai Sekjen Komite Sentral PKUS tetapi juga sebagai Presiden Uni Soviet dalam pertengahan pertama dasawarsa yang akan datang.

Hubungan ASEAN-Indocina di Tahun 1990-an: Beberapa Skenario

C.P.F. LUHULIMA

I

MASALAH INTI dalam hubungan ASEAN dan Indocina dewasa ini ialah konflik Kamboja. Hal ini tidaklah berarti bahwa hubungan antara kedua besaran regional ini mulai ketika angkatan bersenjata Vietnam menyerbu masuk ke dalam wilayah Kamboja di akhir tahun 1978. Pada saat pembentukannya saja sudah jelas bahwa ASEAN merupakan suatu organisasi regional yang mencakup semua negara di Asia Tenggara. Dalam Deklarasi pembentukan ASEAN tercantum bahwa "Asosiasi ini terbuka bagi semua negara di Asia Tenggara yang menganut sasaran, prinsip dan tujuan yang sama."

Menjelang pembentukan ASEAN, Indonesia, sebagai pengambil inisiatif pembentukan perhimpunan regional ini,¹ mendekati Myanmar dan Kamboja. Indonesia melihat

¹Bandingkan Thanat Khoman, "Reminiscences," dalam *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 10, No. 2 (September 1988), hal. 211-217.

bahwa secara geografis, Myanmar dan negara-negara Indocina (Kamboja, Laos dan Vietnam) termasuk Asia Tenggara. Sudah sejak awal Myanmar dan Kamboja, yang netral di bawah pimpinan Pangeran Norodom Sihanouk, termasuk dalam daftar negara-negara yang perlu diikutsertakan dalam usaha pembentukan asosiasi regional itu. Demikian pula halnya dengan Laos dan Vietnam, yang pada waktu itu masih terpecah dua. Konsep kerjasama regional yang ditawarkan Adam Malik bukanlah terbatas pada pertimbangan geografis saja. Lebih penting kiranya bahwa Myanmar dan negara-negara Indocina merupakan negara-negara yang *non-aligned*. Dukungan *non-aligned* amat perlu pada waktu itu, karena Indonesia ingin mendapat dukungan kembali sebagai negara *non-aligned* setelah sekian lamanya dianggap sebagai negara yang berkiblat ke kiri, khususnya di akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Untuk menghindari kesan bahwa dengan pemerintah Orde Baru Indonesia tidak bergeser ke kanan, ke pihak Amerika Serikat, terlebih-lebih karena Filipina dan Muangthai terlibat

bersama Amerika Serikat dalam perang melawan Vietnam Utara, dan Malaysia dan Singapura tergabung dalam suatu persekutuan pertahanan dengan Australia, Inggris dan Selandia Baru (*Anglo-Malaysian Defence Agreement*), maka Indonesia mendekati Myanmar dan Kamboja.² Tetapi baik Jenderal Ne Win, maupun Pangeran Norodom Sihanouk dan Perdana Menteri Son Sann belum bersedia untuk berpartisipasi dalam rencana kerjasama regional ini karena masalah dalam negeri mereka masing-masing. Akan tetapi, mereka tidak akan menghalangi usaha ini dan menganjurkan agar upaya itu dilanjutkan. Dinasti Luang Prabang di Laos sedang menghadapi pemberontakan komunis, sedangkan Vietnam terlibat dalam perang dengan Amerika Serikat, sehingga dianggap belum waktunya untuk ikutsertakan dalam pembicaraan tentang pembentukan ASEAN.

Sejak 1969, Sidang Menteri Luar Negeri ASEAN diikuti delegasi dari Kamboja, Laos dan Republik Vietnam, sebagai pengamat. Tetapi status pengamat itu bukan diberikan ASEAN atas dasar suatu permufakatan, melainkan oleh pemerintah-pemerintah negara di mana sidang itu diadakan, oleh pemerintah Malaysia (1969), pemerintah Filipina (1971), pemerintah Muangthai (1973), dan pemerintah Indonesia (1974). Ketika pemerintah Malaysia mengundang pemerintah Republik Vietnam, menteri luar negeri Indonesia dan Singapura tidak senang dengan keputusan Malaysia itu, karena mereka berpendapat bahwa undangan yang sama seharusnya dikirimkan pula kepada Republik Sosialis Vietnam. Pemerintah Filipina di ta-

hun 1971 masih mengundang pemerintah Kamboja dan Republik Vietnam, "yang secara formal meminta untuk menghadiri pertemuan itu."³ Pemerintah Muangthai tidak mengundang Republik Vietnam, hanya pemerintah Kamboja dan Laos saja; demikian pula Indonesia di tahun berikutnya.

Sejak Republik Sosialis Vietnam memasuki Saigon pada tanggal 30 April 1975 dan sejak Norodom Sihanouk didesak untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Negara Kamboja oleh Khmer Merah di tahun berikutnya (April 1976), sidang-sidang menteri-menteri luar negeri ASEAN tidak lagi diikuti wakil-wakil pemerintah Indocina. Hal ini tidaklah berarti bahwa ASEAN lalu menutup diri terhadap Indocina. Konperensi Tingkat Tinggi Bali yang melahirkan *Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara* ini merupakan jawaban atas keberhasilan Hanoi mengkomunikasikan seluruh Vietnam. ASEAN yang tidak menginginkan agar proses pengkomunisan dilanjutkan ke luar Vietnam memutuskan supaya perkembangan lanjut Asia Tenggara dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip: saling menghormati kedaulatan, integritas teritorial dan identitas semua bangsa di Asia Tenggara; hak setiap negara untuk melaksanakan kehidupan nasionalnya bebas dari intervensi dari luar, subversi dan pemaksaan; tidak campurtangan dalam masalah-masalah dalam negeri masing-masing negara; penyelesaian perbedaan atau persengketaan dengan cara-cara damai; menolak penggunaan kekuatan dan kerjasama efektif antara negara-negara Asia Tenggara (Artikel 2). Persetujuan ini secara tidak langsung ditawarkan kepada Vietnam untuk mendasari hubungan antar-bangsa negara itu pula, disertai ajakan untuk ikutserta

²Lebih lanjut tentang Malaysia dan Singapura lihat Chin Kin-Wah, *The Defence of Malaysia and Singapore. The Transformation of a Security System 1957-1971* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).

³Joint Communique of the Fourth ASEAN Ministerial Meeting, Manila, 12-13 March 1971.

dalam Perhimpunan Asia Tenggara: ASEAN "terbuka bagi negara-negara lain di Asia Tenggara" (Artikel 18).

II

Dua kekuatan eksternal yang paling langsung terlibat dalam konflik Kamboja ialah Muangthai dan Vietnam. Karena Muangthai merupakan anggota ASEAN, dan negara garis paling depan dalam masalah Kamboja, maka negara-negara anggota lain mempunyai kepentingan langsung pula dalam penyelesaian masalah Kamboja. Dengan demikian, masalah Kamboja, maupun masa depan hubungan ASEAN dan Vietnam, lebih banyak merupakan fungsi hubungan Muangthai-Vietnam daripada hubungan negara anggota lainnya dengan Vietnam.

Kepentingan-kepentingan utama Muangthai yang dapat disimpulkan dari berbagai komentar tentang masalah Kamboja dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, menegaskan prinsip perilaku internasional yang dapat diterima secara umum, yang berarti bahwa agresi tidak dapat dibenarkan. Hal ini dianggap sebagai dasar politik penggrogotan posisi Vietnam di Kamboja dan pengerahan oposisi internasional terhadap Vietnam. Kedua, membantu pembentukan suatu Kamboja yang berdaulat dan netral kembali sebagai penyangga antara Muangthai dan Vietnam dan dengan demikian, menysihkan kemungkinan terbentuknya suatu Kamboja yang didominasi Vietnam dan yang akan menciptakan suatu perimbangan kekuatan regional yang merugikan Muangthai. Ketiga, pembentukan suatu tatanan Asia Tenggara yang akan melindungi Muangthai dari keterlibatan dalam konflik-konflik di luar Asia Tenggara. Ke-

empat, mengisolasi tantangan dari dalam terhadap pemerintah Muangthai dari dukungan dari luar.

Namun di babak pertama tahun-tahun 1980-an itu Muangthai sudah memperlihatkan suatu fleksibilitas dalam sikapnya terhadap Vietnam. Di permulaan tahun 1983 Siddhi Savetsila sudah mengatakan bahwa negaranya "akan memperluas kebijaksananya mengenai perdagangan. ... Kita tidak memandang Indocina sebagai musuh kita." Muangthai juga berkepentingan dengan suatu Zona damai, bebas dan netral. "Konflik Kamboja merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan untuk dapat mewujudkan zona damai, bebas dan netral itu. ... Kita tidak ingin wilayah kita menjadi konflik antar adikuasa. ... Kita akan mempertahankan kepentingan kita. Kita akan berdagang dengan semua negara. Kita akan memisahkan perdagangan dari politik."⁴ Stabilitas regional sangat ditekankan Siddhi. Lagipula, bagi Muangthai, Kamboja merupakan unsur yang paling utama dalam suatu blok yang secara potensial mengganggu kestabilan Asia Tenggara, yaitu "Konfederasi Indocina," yang menempatkan Kamboja dan Laos di bawah dominasi Vietnam dan merupakan jalur masuk bagi kekuatan-kekuatan besar di Asia Tenggara.

Dengan terpilihnya Chatichai Choonhavan sebagai perdana menteri menggantikan Prem Tinsulanonde di bulan Agustus 1988, sikap keras terhadap Vietnam terus mengendur. Chatichai yakin bahwa ekonomi merupakan penyembuh "lara," bahwa hubungan ekonomi akan amat membantu dalam mendekatkan dua lawan, bahwa hu-

⁴David W.P. Elliott, "Deadlock Diplomacy: Thai and Vietnamese Interests in Kampuchea," dalam *The Cambodian Agony*, Ed. David A. Ablin & Marlowe Hood (New York: Armonk, 1987), hal. 81.

bugan ekonomi akan membantu usaha mengelola konflik dan memperkuat jaringan perdamaian.⁵ Karena itu Muangthai akan terus berusaha mencari penyelesaian masalah Kamboja, melalui jalur ekonomi dan jalur politik. Yang terpenting ialah "menghindarkan pecahnya perang saudara yang lebih luas di Kamboja sesudah angkatan bersenjata Vietnam mengundurkan diri." Selanjutnya, Chatichai menggariskan bahwa "sesudah masalah Kamboja terselesaikan, Muangthai harus membantu dalam membangun suatu struktur hubungan yang baru dan lebih konstruktif antara kedua Asia Tenggara, yang harus tertuju pada pengelolaan hubungan Muangthai dan Vietnam. Dalam rangka ini Vietnam harus diajak untuk menyetujui dan menghormati prinsip, norma dan peraturan permainan mengenai hidup bersama secara damai dan penyelesaian persengketaan secara damai. Lagipula harus dicari cara-cara institusional untuk mengelola hubungan antara Hanoi dan negara-negara Asia Tenggara lainnya." Muangthai selanjutnya "harus berusaha membuka kesempatan bagi semua negara kawasan untuk ikutserta sepenuhnya dalam proses pengembangan ekonomi global."⁶ Akan tetapi, hubungan ekonomi Muangthai dengan Vietnam sudah berkembang dan tampaknya akan berkembang terus kendati belum ada penyelesaian yang menyeluruh dari konflik Kamboja.

Muangthai memang tidak akan menerima suatu pengaturan yang melembagakan dominasi Vietnam atas Kamboja, tetapi sela-

ma tentara Vietnam berada di luar Kamboja, dan dengan demikian tidak mengancam Muangthai, maka negara itu akan terus mengembangkan hubungan ekonomi dengan Vietnam. "Kita akan menghentikan bantuan Muangthai bagi perlawanan Kamboja. Seperti yang sudah saya usulkan: pertama-tama suatu gencatan senjata antara keempat fraksi politik Kamboja, kemudian suatu ICM (*International Control Mechanism*). Penarikan mundur tentara Vietnam tidak mungkin dilakukan tanpa gencatan senjata."⁷ Kecenderungan terhadap hidup berdampingan secara damai dan hubungan *business-as-usual* antara Muangthai dan Vietnam ini akan menyulitkan tercapainya apa yang senantiasa disebut "penyelesaian komprehensif" masalah Kamboja, yaitu suatu penyelesaian yang "adil dan langgeng," suatu penyelesaian yang membebaskan Kamboja sepenuhnya dari pengaruh Vietnam, serta menjadi negara yang demokratis. Akan tetapi, kiranya kecenderungan untuk melalui jalur ekonomi ini sudah menyumbang dan akan terus menyumbang proses pendekatan antara kedua lawan. Bahkan di Bandar Seri Begawan, di mana para Menlu ASEAN berkumpul untuk Sidang Menteri ASEAN, Siddhi Savetsila mengatakan bahwa Muangthai "akan menerima masuknya Vietnam, Laos, Burma dan "suatu Kamboja yang independen dan berdaulat" ke dalam *Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara*.⁸

Apabila kecenderungan ini berjalan terus, maka Muangthai dapat mengembangkan kepentingan nasionalnya dengan memainkan peran sebagai penyedia dan sebagai jalur investasi, teknologi, dan jasa, tidak sa-

⁵Sukhumband Paribatra, "Economics Takes the Lead in Global Relations," dalam *Jakarta Post*, 27 Juni 1989.

⁶Chatichai Choonhavan, "Southeast Asia is in a Process of Change," dalam *Jakarta Post*, 7 Juli 1989. 1989.

⁷Interview with Chatichai, *Far Eastern Economic Review*, 8 Juli 1989, hal. 24.

⁸*Asia Week*, 21 Juli 1989, hal. 26.

ja bagi negara-negara Indocina, melainkan juga Myanmar, sehingga makin mendekatkan Muangthai dengan negara-negara Asia Tenggara daratan lainnya, tanpa meninggalkan ASEAN: "Komitmen Muangthai kepada ASEAN adalah mutlak. ASEAN adalah dan akan terus merupakan *cornerstone* diplomasi internasional kita."⁹

III

Berbeda dengan kepentingan Muangthai, kepentingan yang dinyatakan Vietnam ialah, pertama, mengakhiri ancaman bantuan dan usaha RRC untuk menjadi suatu faktor kekuatan yang penting di Asia Tenggara. Kedua, ialah konsolidasi kekuatan di Kamboja oleh suatu rezim yang bersahabat dan dapat diandalkan; ketiga, konsolidasi Indocina di bawah kepemimpinan Vietnam, terutama dalam politik luar negeri; keempat, netralisasi seluruh Asia Tenggara; kelima, menghindarkan ketergantungan mutlak kepada salah satu kekuatan luar serta mengakhiri isolasi diplomatiknya. Bagi Vietnam, masalah yang paling hakiki dalam masalah Kamboja ialah intervensi RRC. Hal ini senantiasa ditonjolkan Vietnam dalam setiap pertemuan bilateral dengan Muangthai mengenai masalah-masalah keamanan, maka tidaklah mengherankan bahwa sasaran-sasaran Vietnam di Kamboja ialah menjamin bahwa tetangganya ini merupakan suatu penyangga yang dapat diandalkan terhadap pengaruh yang tidak bersahabat dari pihak ketiga, dan bahwa Kamboja sendiri tidak berbalik terhadap Vietnam seperti ketika Pol Pot berkuasa sebagai perdana menteri di Kamboja.

Sementara itu, Vietnam juga menyatakan kepentingan ekonominya. Nguyen Co Thach, dalam menghadapi tahun baru 1989, mengatakan bahwa bagi Vietnam hanya ada dua pilihan: atau melanjutkan kebijaksanaan ekonomi yang swa-sembada, tertutup dan tidak ikutserta dalam pembagian kerja internasional atau mengintegrasikan ekonomi Vietnam ke dalam ekonomi dunia dan mendapatkan atau merebut posisi yang optimal dalam pembagian kerja internasional. Bagi Vietnam dewasa ini tampaknya melanjutkan kebijaksanaan ekonomi yang swa-sembada akan menuju ke arah kemiskinan dan keterbelakangan. Agar supaya Vietnam dapat "menghadapi tantangan-tantangan sejarah, maka satu-satunya jalan ialah mengaitkan ekonomi Vietnam dengan ekonomi dunia." Selain itu ia bersedia untuk ikutserta dalam pembagian kerja internasional, yang berarti "menerima persaingan dan hukum pertukaran bebas." Suatu kondisi mutlak untuk ikutserta ini ialah "menghapus segera mekanisme pengelolaan ekonomi yang birokratis dan terpusat berdasarkan subsidi negara, dan segera pindah ke mekanisme ekonomi *cost-accounting* dan menstabilisasi setiap aspek kehidupan sosial dan ekonomi."

Sampai kini masih banyak pengusaha luar negeri dan badan internasional menjauhkan diri dari Vietnam. Amerika Serikat dan Jepang tidak mempunyai investasi langsung (*direct investment*) di Vietnam. *Bank Dunia* dan *Bank Pembangunan Asia* masih menjauhkan diri. Tahun yang lalu Vietnam sudah berhasil menarik penanaman modal asing sebesar US\$400 juta, suatu jumlah yang cukup besar bagi negara ini. Tiga perempat dari jumlah ini masuk ke dalam eksplorasi minyak, harapan utamanya. Suatu perusahaan Australia, OTC, akan memperbaiki telekomunikasi. Ada proyek untuk me-

⁹Chatichai Choonhavan, *Jakarta Post*, 7 Juli 1989.

tingkatkan mutu dan pembangunan hotel. Tetapi hanya sedikit dana ditawarkan untuk manufaktur. Sembilanpuluh pengusaha Muangthai, di bulan Mei lalu, berada di Hanoi untuk melihat kesempatan untuk berusaha, khususnya untuk kayu gelondongan, tetapi juga untuk manufaktur.¹⁰

Dengan sendirinya kepentingan-kepentingan ekonomi yang baru ini harus tercermin dalam politik luar negeri Vietnam. Tugas-tugas pemerintah Vietnam dalam keadaan yang berubah ini ialah: "memelihara perdamaian dengan determinasi -- hal ini ialah suatu tugas strategis; memanfaatkan secara maksimal kondisi eksternal yang menguntungkan; memusatkan usaha-usaha kita pada tingkat yang paling tinggi, dan ... menstabilisasi ekonomi langkah demi langkah dan menciptakan suatu dasar bagi pembangunan ekonomi dalam 20-25 tahun mendatang; membangun sosialisme dan mengamankan kemerdekaan tanah air kita; dan sekaligus menyumbang secara aktif ke arah perjuangan bersama bagi perdamaian, kemerdekaan nasional, demokrasi dan sosialisme. Inilah sasaran-sasaran obyektif dan kepentingan rakyat kita yang paling tinggi. Dan politik luar negeri kita harus menjalankan sasaran-sasaran yang fundamental dan jangka panjang ini."

Penekanan atas kebijaksanaan ekonomi tidaklah berarti bahwa penyelesaian masalah Kamboja tidak diusahakan terus dengan sungguh-sungguh. Bagi Vietnam, JIM I (1988) menyepakati dua masalah paling utama masalah Kamboja, yaitu penarikan mundur tentara Vietnam yang dikaitkan dengan usaha menghindarkan kembalinya rezim Pol Pot yang *genocidal*. Hasil HIM

merupakan "suatu terobosan dalam jalan buntu 10 tahun terakhir dalam masalah Kamboja dan membuka penyelesaian politik masalah itu."¹¹

IV

Dengan menyebut JIM sebagai suatu terobosan, maka Indonesia merupakan suatu faktor yang amat berpengaruh dalam penyelesaian masalah Kamboja. Sudah sejak permulaan tahun 1980 Indonesia mengambil inisiatif untuk mencari terobosan dalam usaha-usaha penyelesaian ASEAN, dan tidak membiarkan hubungan ASEAN-Vietnam sebagai fungsi hubungan Muangthai-Vietnam. Presiden Soeharto, bersama-sama dengan mantan Perdana Menteri Hussein Onn bertemu di Kuantan, Malaysia untuk mengupayakan peredaan ketegangan antara Muangthai dan Vietnam, kepentingan keamanan Vietnam di Kamboja serta pengurangan bobot Muangthai sebagai *front-line-state*. Pada pertemuan Kuantan itu tercapai persetujuan antara kedua pimpinan bahwa penyelesaian masalah Kamboja hanya akan tercapai apabila Vietnam bebas dari ketergantungannya kepada Uni Soviet dan dari pengaruh dan tekanan RRC. Selanjutnya, penyelesaian politik Kamboja harus sekaligus mengakui kepentingan Vietnam di Kamboja. Pada dasarnya, prinsip Kuantan merupakan suatu penerapan konsep ZOPFAN atas konflik Kamboja untuk mencapai perdamaian di Asia Tenggara. Baik Uni Soviet, maupun RRC harus menjauhkan diri dari Indocina, atau lebih tepat lagi, menghimbau Vietnam untuk bergerak ke arah suatu posisi yang berimbang antara Uni Soviet dan RRC.

¹¹Interview with Minister Nguyen Co Thach, dalam *Warta Berkala Vietnam*, Kedutaan Besar Republik Sosialis Vietnam di Indonesia, 13 Januari 1989.

¹⁰"Vietnam: The Slow Road to Doi Moi," dalam *Economist*, 29 Juli 1989, hal. 20.

Prinsip Kuantan tidak pernah menjadi sikap resmi ASEAN, tetapi sikap Indonesia tentang penyelesaian masalah Kamboja tidak berubah secara substansial. Juga Vietnam menolak prinsip Kuantan ini. Nguyen Co Thach menyatakan bahwa saran agar Vietnam menjadi lebih berdaulat dan bebas dari pengaruh Uni Soviet dan RRC pada dasarnya merupakan suatu penghinaan. Dan tuntutan ASEAN agar angkatan bersenjata Vietnam menarik diri dari Kamboja tidak akan diperhatikan sampai "ancaman Cina" terhadap Indocina dan terhadap seluruh Asia Tenggara ditiadakan.

Indonesia, seperti juga halnya dengan Malaysia, memang melihat Vietnam sebagai bagian integral dari strategi pembendungan RRC. Dialog Indonesia dengan Vietnam dan sikap moderat Indonesia terhadap penyerbuan Vietnam ke dalam wilayah Muangthai dapat dipandang sebagai pertanda "ketidaksenangan" terhadap pemaksaan strategi *front-line* Muangthai atas negara-negara ASEAN lainnya. Demikian pula, apabila Indonesia memperlihatkan kecenderungan untuk menekankan terus kepentingan keamanannya sendiri, maka berlarutnya krisis Kamboja dapat memperbesar pertentangan di dalam ASEAN, dan terus meningkatkan keterlibatan RRC dan Uni Soviet, melampaui kepentingan mereka yang wajar.

Kunjungan Jenderal Moerdani ke Vietnam di bulan Februari 1984 mencerminkan usaha Indonesia untuk mencari jalan keluar yang lain bagi penyelesaian masalah Kamboja. Ia merupakan suatu usaha untuk menstrukturkan kembali hubungan ASEAN dan Vietnam untuk menjembatani perbedaan politik yang tajam dan membuka jalan ke arah suatu tatanan regional yang bebas dari setiap bentuk intervensi dari luar. CSIS mengikuti langkah Moerdani dengan

Seminar Indonesia-Vietnam di Hanoi (26-28 Februari 1984). Pada bulan Mei 1984, Indonesia ditunjuk sebagai rekan bicara ASEAN dengan Vietnam. Tiga usaha dapat dicatat sebagai upaya Indonesia untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Usaha pertama ialah usaha Indonesia untuk menengahi konflik Amerika Serikat-Vietnam sebagai salah satu cara untuk mencari terobosan dalam jalan buntu penyelesaian masalah Kamboja. Usaha kedua ialah "Usul 12 Pasal" untuk menjadi landasan penyelesaian politik masalah Kamboja, yaitu, antara lain, penyusunan kerangka pikir strategis, sasaran strategis, format konferensi terbatas, pembicaraan antara pelaku utama, kerujukan nasional, penarikan pasukan Vietnam, pembentukan komisi pengawasan internasional, pemilihan umum atau referendum dan pemerintah kerujukan nasional.

"Usul 12 Pasal" ini sebenarnya merupakan penghimpunan dari usaha-usaha penyelesaian yang dilakukan berbagai pihak untuk mendapatkan suatu kerangka pemikiran yang menyeluruh untuk menyelesaikan konflik Kamboja itu. Menteri Mochtar Kusumaatmadja berhasil menatanya sehingga semua pemikiran ke arah penyelesaian terwakili di dalamnya. Konsep ketiga ialah "Pembicaraan Tidak Resmi" (*Cocktail Party*), yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja di bulan November 1985, yang semula dilancarkan Norodom Sihanouk. Terobosan terjadi ketika di tahun 1987 Vietnam amat tertarik dengan konsep *Cocktail Party* ini. Pernyataan bersama yang dikeluarkan Mochtar Kusumaatmadja dan Nguyen Co Thach setelah pertemuan mereka di Hanoi (27-29 Juli 1989), mengandung kesepakatan keduanya bahwa "suatu pertemuan informal antara kedua pihak Kamboja dapat diadakan tanpa syarat dan atribut politik,"

dan atas dasar persamaan derajat. Suatu pertemuan kedua, pada waktu yang berbeda akan dihadiri Vietnam dan negara-negara lain yang berkepentingan. Kesepakatan ini kemudian dikenal dengan kesepakatan Ho Chi Minh City. Setelah Menteri Mochtar diganti oleh Menteri Ali Alatas, ide *Cocktail Party* itu dituangkan ke dalam bentuk Pertemuan Informal Jakarta (JIM).

JIM memang tidak berhasil mencapai persetujuan. Pernyataan yang dikeluarkan sesudah JIM I dan JIM II merupakan suatu konsensus yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan Ketua Pertemuan Informal Jakarta.

Dua masalah utama yang saling berkaitan yang dapat diraih JIM ialah pengunduran tentara Vietnam dari Kamboja dalam konteks suatu penyelesaian politik yang komprehensif, di bawah pengawasan efektif suatu *International Control Commission*, dan tidak terulangnya kebijaksanaan dan praktek-praktek *genocidal* rezim Pol Pot serta dihentikannya semua intervensi asing dan pemasokan senjata kepada pihak-pihak Kamboja yang saling berhadapan. Para peserta juga mencapai konsensus untuk mengadakan suatu konferensi internasional untuk memperoleh pengakuan internasional atas status Kamboja sebagai suatu negara yang berdaulat, independen, damai, netral dan non-blok; diadakannya program pembangunan internasional bagi Kamboja dan dana untuk membiayai proses perdamaian. Yang teramat penting dari usaha ini ialah suatu kemufakatan bahwa penyelesaian masalah Kamboja "harus membantu ke arah tercapainya perdamaian, stabilitas dan kerjasama di Asia Tenggara" atas dasar Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara. Para peserta juga berpendapat bahwa suatu penyelesaian politik yang kom-

prehensif atas masalah Kamboja akan mempercepat perwujudan Zone Damai, Bebas dan Netral (ZOPFAN) di Asia Tenggara.

Indonesia juga mempunyai peranan yang besar dalam Konperensi Paris tentang Kamboja. Juga Indonesia berusaha meningkatkan hubungan ekonomi dengan Vietnam dengan membuka penerbangan langsung Garuda Indonesia dari Jakarta ke Ho Chi Minh City.

V

Konflik Kamboja dan upaya penyelesaiannya berputar pada tiga negara besar Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Muangthai dan Vietnam. Ketiga negara ini juga tidak menghendaki berlanjutnya konfrontasi tentang Kamboja. Ketiga pemimpin negara-negara ini juga sudah menyuarakan keinginannya untuk mengembangkan hubungan baik antara semua negara di Asia Tenggara. Yang menjadi masalah ialah bagaimana mencapai keinginan itu.

Pada dasarnya ada empat kemungkinan perkembangan hubungan antara kedua kelompok negara Asia Tenggara di tahun 1990-an. Kemungkinan pertama ialah perluasan ASEAN dengan ketiga negara Indocina, sehingga kesembilan negara ini berada dalam suatu kerangka regional. Kemungkinan kedua ialah perluasan kerjasama fungsional. Kemungkinan ketiga ialah pembagian Asia Tenggara ke dalam dua konfigurasi ekonomi. Dan kemungkinan keempat ialah negara-negara ASEAN dan Indocina menempuh jalannya sendiri-sendiri, seperti yang sudah terjadi sampai kini.¹²

¹²Bandingkan Muthiah Alagappa, "Bringing Indochina into ASEAN," *FEER*, 29 Juli 1989, hal. 21-22. Sukhumband Paribatra, *Jakarta Post*, 7 Juli 1989.

Kemungkinan pertama terdapat dalam Deklarasi ASEAN yang ditandatangani di Bangkok bulan Agustus 1967 yang menyatakan bahwa ASEAN "terbuka bagi semua negara di wilayah Asia Tenggara yang menganut sasaran, prinsip dan tujuan" ASEAN. Hal ini diulangi kembali sembilan tahun kemudian, dalam *Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara*.

Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang sudah menyatakan tidak berkeberatan apabila Vietnam menjadi anggota ASEAN, asalkan negara itu mematuhi Dasasila Bandung, yang berprinsip hidup berdampingan secara damai. Dasasila Bandung, yang dihasilkan Konferensi Asia-Afrika dan Amerika Latin di tahun 1955 itu, menyuratkan bahwa negara-negara yang berbeda ideologi serta sistem politiknya dapat hidup berdampingan secara damai. Dasasila Bandung merupakan suatu tahap antara menuju pematuhan *Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara*, yang lebih menekankan "saling menghargai kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas teritorial dan identitas nasional semua bangsa" di Asia Tenggara; hak setiap negara untuk menjalankan eksistensi nasionalnya bebas dari intervensi eksternal, subversi dan pemaksaan; tidak campur-tangan dalam masalah-masalah dalam negeri negara lain; penyelesaian perbedaan atau persengketaan melalui cara-cara damai; penolakan ancaman atau penggunaan kekerasan; kerjasama yang efektif. Kebiasaan berkonsultasi dan bekerjasama dalam kerangka regional ASEAN memodifikasi orientasi internasional dan pola perilaku politik dan ekonomi negara-negara Indocina.

Memang, sampai kini, dengan keanggotaan negara-negara yang sehaluan, yang non-komunis, ASEAN belum dapat sepe-

nuhnya melaksanakan persetujuan-persetujuan bagi perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Fasilitas angkatan laut dan udara Amerika Serikat masih saja terdapat di Filipina, kendati dalam *Deklarasi Bangkok* dinyatakan bahwa pangkalan asing hanya sementara sifatnya. Bahkan pemerintah Singapura melalui menteri negaranya untuk masalah luar negeri, George Yeo, baru-baru ini menyatakan bahwa negaranya bersedia untuk menampung bagian-bagian dari fasilitas angkatan perang Amerika Serikat di wilayahnya, sekalipun hanya untuk tujuan-tujuan komersial. Pernyataan ini menuju ke pencairan kembali Deklarasi Bangkok dan Deklarasi Kuala Lumpur. Masuknya Vietnam dengan fasilitas militer Uni Soviet di wilayahnya lebih mempersulit lagi pelaksanaan Deklarasi Kuala Lumpur itu.

Kemungkinan bahwa baik Filipina, maupun Vietnam akan meminta Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk menarik fasilitas-fasilitas militer mereka dari kedua negara itu memang besar. Apabila hal itu terjadi, maka pendekatan terhadap perdamaian dan sekuriti melalui ZOPFAN dan Zona Bebas Senjata Nuklir akan lebih mendekati kenyataan. ASEAN dapat mewujudkan ZOPFAN dan Zona Bebas Senjata Nuklir, mengembangkan sikap imbang jarak dengan negara-negara besar di luar Asia Tenggara. Negara-negara Indocina lalu melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisir kepentingan dan kebijaksanaan mereka dengan kepentingan dan kebijaksanaan negara-negara ASEAN pertama, untuk mengembangkan ketahanan nasional dan regional.

Apakah langkah kedua negara besar ini akan diikuti oleh Singapura masih merupakan pertanyaan. Masuknya Vietnam ke dalam ASEAN, dapat menjurus ke arah

suatu persepsi di Singapura bahwa kepentingannya akan dikorbankan oleh ketiga negara besar Asia Tenggara itu, sehingga ia justru memerlukan kehadiran militer Amerika Serikat di negaranya sebagai perisai terhadap negara-negara itu.

Gagasan *ASEAN Security Arrangement*, yaitu suatu kerjasama militer ASEAN untuk mengatasi kerjasama-kerjasama militer yang melibatkan negara-negara luar wilayah, seperti diusulkan Mochtar Kusumaatmadja,¹³ dapat merupakan terobosan bagi penyelesaian masalah itu. Tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa kehadiran negara-negara besar dapat ditiadakan. Kesatuan dan kohesi yang lebih besar antara kesembilan negara tersebut akan menjamin berkurangnya kesempatan atau alasan bagi intervensi negara-negara besar dan bahwa kehadiran mereka merupakan peluang besar bagi pencapaian perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara.

Hubungan Vietnam dengan RRC, kendati kemungkinan perbaikannya cukup besar, masih dihindangi banyak masalah, seperti masalah perbatasan dan masalah klaim yang saling bertentangan di Laut Cina Selatan. Untuk menghindari suatu konflik antara Vietnam dan RRC, ASEAN melakukan pendekatan terhadap RRC. Dari segi ekonomi, masuknya Vietnam dan kedua negara Indocina lainnya, yang berlandaskan ekonomi sosialis dan masih rendah pendapatan per kapitanya, membebaskan pola kerjasama ekonomi ASEAN yang dikembangkan untuk negara-negara anggota terdahulu. Perluasan ASEAN mempersulit hubungan dialog dengan mitra dialognya di kawasan Pasifik dan Eropa, di bidang ekonomi, perdagangan dan bantuan pembangun-

an. Tidak saja agenda dialognya menjadi lebih besar, tetapi perluasan ASEAN dengan negara-negara Indocina (dengan Vietnam sebagai anggota COMECON) menimbulkan berbagai masalah baru, seperti memperbesar permintaan jatah dana pembangunan dan spektrum akses ke pasar negara-negara itu, baik di bidang komoditi, maupun di bidang manufaktur. Masalah baru akan muncul pula atas pelaksanaan *Tata Perdagangan Preferensial ASEAN* dan atas pelaksanaan *Usaha Patungan Industri ASEAN (AIJV)*, yang diperbaiki KTT Manila.

Vietnam yang kini sibuk mempopulerkan *doi moi* (renovasi), yang memuat unsur-unsur *perestroika* dan *glasnost*, memang memerlukan investasi secara besar-besaran. Dan ambisi ekonomi Vietnam merupakan alasan utama bagi janjinya untuk menarik semua tentaranya keluar dari Kamboja pada bulan September, sehingga "September" muncul sebagai kata sakti dalam setiap diskusi mengenai pembangunan ekonomi negara itu. Pemerintah Amerika Serikat kini memang belum terlalu tertarik pada Vietnam, tetapi hal ini dapat saja berubah di tahun 1990-an. Pejabat *Bank Pembangunan Asia*, yang berkantor pusat di Manila, dan beberapa pejabat yang mempunyai hubungan dengan *Bank Dunia* sudah mulai mengkaji peluang-peluang bagi investasi di Vietnam sesudah bulan September ini. Mereka optimis mengenai prospek pembangunan ekonomi Vietnam, kendati dari dasar yang masih amat rendah sekarang.¹⁴ Jadi ada kemungkinan bahwa dalam dasawarsa 1990-an bantuan dan investasi asing yang memasuki Vietnam, Kamboja dan Laos mengurangi arus dana ke negara anggota ASEAN lainnya. Di samping injeksi modal, ketiga negara Indocina juga akan mengupayakan in-

¹³*Kompas*, 9 Agustus 1989.

¹⁴*Economist*, 29 Juli 1989, hal. 20.

jeksi teknologi dan akses ke pasar luar negeri. Perbedaan tingkat ekonomi ini akan mendesak ASEAN untuk mengembangkan pola pembangunan ekonomi dua tingkat: tingkat pertama bagi negara-negara anggota semula, sedangkan tingkat kedua dari negara-negara Indocina, yang memerlukan lebih banyak dana, alih teknologi dan pengembangan sumber daya manusia untuk dapat menyusul negara-negara tingkat pertama.

Kemungkinan kedua ialah kemungkinan yang dibuka Muangthai, yaitu perbaikan hubungan ekonomi dengan negara-negara Indocina. Pengembangan hubungan ini diusulkan supaya bertumpu pada hubungan Muangthai dan Vietnam, yang kini sedang dibina Chatichai Choonhavan. Dinamika yang dicetuskan Chatichai sebagai "arsitek gagasan pendekatan Muangthai terhadap wilayah Indocina," kata Hun Sen, "sudah sempat bergerak pesat, sehingga siapapun menjadi kepala pemerintahan di Bangkok, sepanjang pengembangan hubungan dengan wilayah Indocina, roda itu tidak dapat diputar kembali."¹⁵ Dalam kemungkinan ini ketiga negara Indocina berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam perkembangan ekonomi dunia, dan Muangthai akan bertindak sebagai pembangun jembatan antara Asia Tenggara yang non-komunis dan yang komunis. Muangthai sudah mengulurkan tangannya ke Laos untuk mengikutsertakannya dalam ekonomi internasional. Penguluran tangan sepenuhnya ke Vietnam dan Kamboja dilakukan segera setelah Vietnam menarik tentaranya dan setelah masalah Kamboja terselesaikan. Hubungan ekonomi bilateral antara ASEAN dan negara-negara Indocina akan berkembang pula. Dengan cara demikian, negara-

negara Indocina melibatkan secara sektoral dalam kegiatan ekonomi dengan negara-negara ASEAN. Muangthai, bersama-sama dengan Filipina, Singapura dan Indonesia sudah membuka penerbangan langsung ke Vietnam, baik untuk tujuan dagang, maupun pariwisata, dan hubungan udara ini mempertinggi interaksi fisik antara kedua Asia Tenggara.

Vietnam, seperti juga halnya dengan Kamboja dan Laos, terus melaksanakan *doi moi* secara konsisten. ASEAN membantu negara-negara ini mempertumbuhkan ekonominya, mendatangkan bantuan pembangunan internasional, investasi dan perdagangan, sehingga negara-negara itu berhasil mengembangkan ekonomi pasar dan sektor swasta. Dalam usaha ini Vietnam kemudian menghentikan keanggotaannya di COMECON.

Di bidang politik, negara-negara Indocina diajak untuk menandatangani *Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama* sebagai instrumen penyelesaian masalah dan konflik antarnegara Asia Tenggara dan mendukung Deklarasi Kuala Lumpur untuk membatasi keterlibatan atau mengelola kepentingan wajar negara-negara luar wilayah. Partisipasi negara-negara Indocina dalam usaha menerapkan kedua instrumen politik untuk seluruh Asia Tenggara akan mengurangi ketegangan antarnegara Asia Tenggara.

Pendekatan ini memang tidak sekomprehensif pendekatan penawaran keanggotaan, tetapi kemungkinan ini lebih fleksibel dan memberikan cukup waktu kepada negara-negara ASEAN dan Indocina untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan bagi pengembangan hubungan kerjasama antara dua kelompok negara yang berbeda sistem politik dan ekonominya dan

¹⁵Dikutip Sabam Siagian, "Hun Sen," dalam *Tempo*, 12 Agustus 1989, hal. 79.

yang bersikap bermusuhan selama dua dasawarsa.

Kemungkinan ketiga merupakan perluasan dari satu dimensi dalam kemungkinan pertama dan kedua dan berputar sekitar Muangthai dan Indocina. Muangthai memainkan peranannya sebagai penyedia atau penengah bagi penyediaan dana investasi, teknologi dan jasa, tidak saja bagi negara-negara Indocina, melainkan juga bagi Myanmar dan sebagai akibatnya berkembanglah hubungan ekonomi yang lebih erat antara negara-negara Asia Tenggara daratan. Apabila perkembangan ini terjadi, maka Asia Tenggara akan terbagi dalam dua konfigurasi ekonomi yang longgar. Konfigurasi pertama ialah Asia Tenggara daratan dengan Bangkok sebagai pusatnya, sedangkan konfigurasi kedua ialah Asia Tenggara maritim dengan Singapura sebagai pusatnya, dengan lembaga-lembaga perbankan dan jasa keuangan yang unggul, sistem komunikasinya yang efisien, sistem informasinya dan fasilitas bandara udara dan laut yang sangat baik pula. Ekonomi Indonesia dalam konfigurasi ini dikoordinasi dari Singapura.

Kemungkinan keempat ialah berlanjutnya eksistensi dua kelompok negara Asia Tenggara dengan tingkat interaksi yang rendah seperti sekarang ini. Vietnam akan terus berupaya untuk mempertahankan dominasinya atas Indocina, menuju suatu konfederasi Indocina, karena dominasi ini merupa-

kan suatu *sine qua non* bagi keamanannya. Kebijakan *doi moi* tidak mampu berkembang. Di lain pihak Muangthai sulit menerima institusionalisasi dominasi Vietnam atas Laos dan Kamboja, tetapi apabila angkatan bersenjata Vietnam berada di luar Kamboja dan tidak langsung mengancam Muangthai, maka negara ini bersedia melakukan hubungan dagang dengan Vietnam. Lagipula, Muangthai tertarik untuk melakukan hubungan dengan Laos dan Kamboja, tidak saja karena daya tarik bahan baku dan peluang bagi investasi, melainkan juga karena dengan pendekatan-pendekatan ini diharapkan bahwa Laos dan Kamboja akan "melepaskan" diri dari Vietnam. Hubungan baik antara Indonesia dan Vietnam akan terus berpola pada "ikatan historis," karena hanya kedua negara ini di antara negara-negara Asia Tenggara yang memproklamasikan kemerdekaannya di tahun 1945, segera setelah Perang Dunia II berakhir. Dan Indonesia akan tetap melihat Vietnam sebagai negara penyangga terhadap ancaman RRC ke Asia Tenggara.

Dalam semua kemungkinan ini ekonomi negara-negara ASEAN dan Indocina akan didominasi Jepang, dan usaha-usaha untuk mengimbangnya dengan pengembangan hubungan dengan wilayah pasar bebas Amerika Serikat-Kanada-(Meksiko) dan Pasar Tunggal Eropa akan dilanjutkan.

Peran Internasional Jepang

Bantarto BANDORO

Pendahuluan

DEWASA INI kita melihat bahwa Jepang berada dalam suatu keadaan di mana kekuatan relatifnya (dilihat dari segi kemakmuran, teknologi dan pembangunan kekuatan militer) benar-benar sedang disorot. Ini dapat diartikan bahwa ada suatu pengakuan yang luas dalam masyarakat internasional maupun di dalam negeri Jepang sendiri bahwa Jepang, karena kekuatan relatifnya itu, harus memainkan peran internasional yang lebih besar.

Meskipun Jepang secara politik dan ekonomi kuat dan memiliki kemampuan teknologi dan saintifik yang tinggi ia cenderung untuk menahan diri dari peran internasional. Status dan orientasi seperti itu sebenarnya bertentangan dengan klasifikasi yang didasarkan atas taksonomi tradisional negara dalam sistem internasional. Istilah-istilah baru seperti *international state*, *superstate*, *economic superpower*, atau *fragile super-*

*power*¹ dewasa ini malahan digunakan untuk menggambarkan posisi internasional Jepang.

Tetapi beberapa tahun belakangan ini ada petunjuk bahwa Jepang mulai tanggap terhadap seruan-seruan internasional dan mulai memikirkan apa yang ia dapat lakukan. Beberapa studi telah dihasilkan mengenai bagaimana seharusnya peran internasional Jepang.² Ada kesan bahwa Jepang memang didorong untuk memainkan peranan dan mengambil sikap yang lebih aktif dalam percaturan politik internasional. Dapat diperkirakan bahwa dorongan itu timbul sebagai reaksi terhadap lingkungan internasional yang berubah. Dalam konteks inilah banyak

¹Muthiah Alagappa, "Japan's Political and Security Role in the Asia Pacific Region," *Contemporary South-east Asia*, Vol. 10, No. 1 (Juni 1983): hal. 18.

²Yasusuke Murakami dan Yutaka Kosai, *Japan in the Global Community. Its Role and Contribution on the Eve of the 21st Century* (Tokyo: Tokyo University Press, 1986). Lihat juga Takahashi Sakuma, "How Strong a Japan," *Journal of Japanese Trade and Industries*, No. 6 (1987).

pengamat maupun elit politik Jepang sendiri termasuk bekas Perdana Menteri Nakasone telah mulai memahami alasan-alasan mengapa Jepang perlu mengambil prakarsa-prakarsa baru.

Namun di balik keharusan Jepang untuk mengambil langkah-langkah yang berani, terdapat kekhawatiran mengenai hasil akhir dari prakarsa baru itu. Ada pendapat bahwa berdasarkan tentang kebolehan bangsa Jepang mengadakan penyesuaian-penyesuaian, maka kemungkinan keberhasilan dalam penyesuaian itu cukup tinggi. Tetapi belum jelas apakah penyesuaian yang dilakukan Jepang akan merupakan perubahan fundamental atau sekedar memungkinkan koeksistensi antara penampilan dengan penghayatan yang secara diametral berbeda. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah dapatkah "Orde Baru" Jepang, yang melibatkan "internasionalisasi" Jepang, didasarkan atas perubahan seperti yang disebut terakhir? Jelasnya, meskipun Jepang telah mengambil beberapa inisiatif baru, dewasa ini ia berada dalam suatu periode transisi yang sulit menuju suatu kepemimpinan internasional yang otonom. Seperti yang akan kita lihat nanti, pemimpin Jepang menghadapi berbagai kendala yang sulit dihindari.

Inisiatif-inisiatif Ekonomi Baru Jepang

Jepang memang berusaha memberikan sumbangan yang lebih besar pada tingkat global, misalnya mengurangi surplus perdagangan, meningkatkan bantuan-bantuan untuk pembangunan (*Official Development Assistance* - ODA). Sebagai pengeksport kapital terbesar di dunia, Jepang memainkan peranan yang sangat bermanfaat untuk

mengatasi krisis hutang. Dalam bulan April 1989, misalnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Nicholas Brady memuji kesediaan Jepang untuk memberikan pinjaman sekitar US\$4,5 milyar kepada negara-negara penghutang melalui Bank Exim.

Di tingkat regional Jepang berusaha membantu ASEAN melembagakan usaha-usaha kooperatif mereka melalui sarana Dana Jepang-ASEAN (*Japan-ASEAN Fund*) dan membantu mempertahankan stabilitas politik negara berkembang di kawasan melalui ODA. Misalnya, Jepang, melalui Bank Exim, memberi pinjaman kepada Indonesia sebesar US\$900 juta.

Mungkin, inisiatif regional Jepang yang dapat dianggap paling serius adalah pemanfaatan terpadu ODA, perdagangan dan investasi untuk membangun ekonomi Asia melalui Rencana Pembangunan Industri Asia Baru (*New Asian Industrial Development Plan* - AID Plan). Rencana AID inilah yang mendasari kerjasama ekonomi Asia-Pasifik yang dipromosikan oleh kunjungan Menteri Industri dan Perdagangan (MITI) Jepang ke negara-negara ASEAN awal tahun 1987, dan yang akan mendukung persetujuan kerjasama ekonomi Asia-Pasifik yang dirancang oleh MITI atas instruksi Perdana Menteri Takeshita tanggal 22 Maret 1989.³

Rencana AID Baru merupakan produk pembicaraan yang dilakukan oleh MITI pada musim panas 1986 dan kemudian diumumkan oleh Menteri MITI Jepang di Bangkok bulan Januari 1987. Pada dasarnya, kebijakan itu bertujuan untuk "mengawinkan" surplus dana Jepang dengan kekuatan Jepang sebagai pengeksport barang-barang

³*Japan Times Weekly*, 8 April 1989.

modal dan mencangkoknya ke dalam ASEAN.

Tidak seperti rencana pelipatgandaan *ODA* atau rencana penjadwalan kembali, rencana *AID* Baru tidak mengandung sasaran-sasaran atau agenda yang spesifik. Lagipula, rencana itu lebih berarti daripada rencana-rencana lainnya karena tidak hanya me-*recast* strategi *ODA* Jepang, tetapi juga ditujukan secara langsung untuk pembangunan ekonomi Asia-Pasifik.

Pejabat JETRO Jepang menjelaskan bagaimana Rencana *AID* Baru berbeda dari kerjasama ekonomi tipe tradisional. Pejabat itu menjelaskan bahwa Rencana *AID* Baru merupakan kerjasama langsung dalam bidang industri dan ini yang dianggap "baru" dalam rencana itu. Hal lain yang dianggap "baru" adalah kegiatan kerjasama pemerintah dengan swasta dalam bidang investasi. Meskipun tidak mengubah orientasi geografi tradisional *ODA* terhadap Asia, *ODA* mencoba mengembangkan ekonomi regional yang lebih aktif dengan mencangkokkan produk manufaktur yang padat karya ke Asia Tenggara untuk diimpor kembali ke Jepang. Pola *ODA* ini berbeda dari kebijakan *ODA* yang lama karena *ODA* yang baru mencoba mengembangkan produksi dan perdagangan dalam kawasan Asia-Pasifik sesuai dengan konsep peranan ekonomi regional dan global Jepang.

Rencana *AID* Baru merupakan awal dari perubahan besar dalam kerjasama ekonomi Jepang. Slogan yang digunakan oleh *Buku Putih 1988* mengenai kerjasama ekonomi adalah *three ranks - one body*. Kerjasama ekonomi konprehensif tipe *three ranks - one body* ini terdiri dari *ODA*, investasi langsung dan impor untuk memajukan industrialisasi negara-negara berkembang. *Buku Putih*

1988 mengenai Perdagangan Internasional juga mencerminkan perubahan orientasi dalam kebijakan ekonomi internasional. Untuk pertama kali Buku Putih MITI menyerukan agar Jepang tidak hanya mengekspor surplusnya ke negara-negara berkembang Asia, membuka pasarnya untuk ekspor Asia, tetapi juga memperluas bantuan dan kerjasama teknik ke negara tetangga.⁴

Pemikiran baru mengenai hubungan ekonomi luar negeri Jepang dinyatakan dalam semua dokumen kebijakan mengenai kerjasama ekonomi mulai tahun 1988 yang lalu. Misalnya, dalam Rencana *ODA* keempat (yang menjanjikan sekitar US\$50 milyar *ODA* untuk periode 1988-1992), pemerintah Jepang menjanjikan untuk meningkatkan kerjasama teknik dan memperdalam studi-studi regional dan mengintensifkan kegiatan-kegiatan evaluasi serta pemanfaatan konsultasi-konsultasi. Koordinasi dengan kegiatan-kegiatan sektor swasta juga akan diperkuat.⁵

Dari observasi di atas jelas bahwa pentingnya *ODA* Jepang tidak dapat dipahami hanya dengan melihat angka-angka. Jepang sesungguhnya menggunakan *ODA* sebagai alat untuk memajukan tujuan-tujuan strategis baru, termasuk di dalamnya usaha mengintegrasikan ekonomi Asia-Pasifik. Pemikiran seperti ini secara implisit tercermin dalam pola pembangunan *flying geese*,⁶ dan dalam ide membangun *Asian Brain* dengan menggunakan dana Jepang, teknologi dan perdagangan untuk membangun semacam pem-

⁴*Japan Times*, 8 Juni 1988.

⁵Rencana *ODA* Keempat yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang, Juni 1988.

⁶Saburo Okita, "The Outlook for Pacific Cooperation and the Role of Japan," *Japan Review of International Affairs*, Vol. 1, No. 1 (Spring-Summer 1987).

bagian kerja yang baru. Hal itu secara eksplisit tercermin dari studi-studi kebijakan Badan Perencanaan Ekonomi Jepang.

Arah Baru Kebijakan Keamanan Jepang

Jepang menghadapi tugas yang peka dalam bidang keamanan. Sekarang ini Jepang harus melakukan hal yang lebih banyak untuk keamanannya. Jepang kini telah meningkatkan anggaran pertahanannya melebihi 1% dari GNP. Pembatasan pengeluaran anggaran di bawah 1% itu ditetapkan pada tahun 1976 oleh PM Miki sebagai *political expediency* bagi pengesahan Garis Besar Program Pertahanan Nasional (*National Defense Program Outline* - NDPO).⁷ *Outline* ini kemudian menjadi dasar dari kebijakan keamanan Jepang dan menyerukan peningkatan kualitatif persenjataan dan organisasi yang cukup untuk menghadapi ancaman invasi Soviet terbatas.

Sementara Jepang merumuskan *Outline* baru untuk 1990-an, terdapat tanda-tanda bahwa Jepang menginginkan kapabilitas militer yang lebih besar dan postur keamanan yang lebih otonom. Pernyataan Takeshita tanggal 21 Maret 1988 di muka Akademi Pertahanan Jepang bahwa Jepang harus memiliki kapabilitas pertahanan sesuai dengan kekuatan ekonominya merupakan petunjuk ke arah itu.⁸ Selain itu, anggaran untuk tahun fiskal 1988 yang dirancang oleh Kementerian Keuangan pada mulanya mengusulkan anggaran pertahanan berada di bawah 1%, tetapi kemudian ditinjau kem-

bali oleh Kabinet dan dinaikkan menjadi lebih dari 1%. Ini menunjukkan kemauan politik pemimpin Jepang untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan.

Dipandang dari sudut keinginan Jepang untuk menciptakan identitas politik yang independen, kecenderungan-kecenderungan Jepang seperti disebutkan di atas merupakan tanda-tanda yang dapat dimengerti, tetapi hal itu justru penyebab timbulnya kekhawatiran karena Amerika Serikat sendiri mengakui kenyataan akan kemampuan militer Jepang sekarang ini. Seringkali dianggap bahwa anggaran militer Jepang sekarang menduduki peringkat ketiga di dunia, dan pada akhir rencana pertahanan yang berlaku sekarang ini, Jepang akan memiliki kekuatan laut dan udara yang cukup untuk menghadapi kemungkinan keadaan darurat di dalam negeri. Pada waktu yang sama, ancaman Soviet dapat dinetralisir oleh eksistensi penggelaran militer Jepang dan Amerika Serikat. Faktor-faktor inilah yang menimbulkan masalah mengenai intensi Jepang. Tetapi karena tiadanya penjelasan yang memadai dari Jepang, pembangunan militer Jepang akan melahirkan unsur-unsur baru ketegangan di kawasan.

Masalah lainnya yang mungkin tidak dapat diselesaikan adalah hubungan keamanan Jepang-Amerika Serikat yang telah menimbulkan persoalan. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh tindakan Jepang dalam pembangunan militernya lebih jauh dapat dilihat dari kontroversi mengenai pesawat tempur jenis baru, *FSX*.⁹ Oleh karena tidak puas dengan ketergantungan terus-menerus pada pembuat senjata di Amerika Serikat dan kekhawatirannya akan prospek keamanan

⁷Taketsugu Tsurutani, *Japanese Policy and the East Asian Security* (New York: Praeger Publisher, 1981), hal. 73-75.

⁸*Japan Times*, 23 Maret 1988.

⁹Barbara Wanner, "The FSX Project: Changing the Nature of Defense Technology Transfer," *JEI*, No. 21A (26 Mei 1989).

jangka panjang Jepang, Jepang berminat untuk menciptakan semacam *state-of-the-art weapon*. Tetapi upaya Jepang untuk menciptakan dasar industri-militer yang superior dari Uni Soviet dan menyaingi Amerika Serikat akan mempunyai implikasi yang luas. Paradoks yang muncul adalah jika Jepang mengembangkan kemampuan militernya secara otonom dalam usahanya meningkatkan keamanannya, hal itu dapat merongrong dasar-dasar dari hubungan keamanan dengan Amerika Serikat.

Peran Politik dan Keamanan Jepang

Dengan munculnya kembali nasionalisme Jepang, dan meningkatnya friksi dalam hubungan Amerika Serikat-Jepang, gagasan mengenai peranan independen akan memperoleh dasar tetapi akan terdapat kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diatasi seperti *nuclear threshold*.¹⁰ Observasi ini cukup valid seperti halnya paradoks yang inheren, yaitu bagaimana Jepang dapat mewujudkan identitas politik yang independen jika ia terus mengandalkan ketergantungan ekonomi dan keamanan pada Amerika Serikat? Ini berarti bahwa jalan keluarnya adalah mengurangi dependensi, tetapi hal itu hanya akan terjadi sebelum pengurangan itu menjadi *counter productive* bagi Jepang dan negara tetangganya. Dilihat dari kecenderungan kejadian-kejadian dan kepentingan Jepang yang abadi, jawaban yang paling masuk akal terhadap kebutuhan Jepang akan peranan politik yang independen adalah menempatkan Jepang dalam posisi pemimpin dalam bidang kerjasama.

Baik Amerika Serikat maupun ASEAN, masing-masing sebagai partner pertahanan

¹⁰Alagappa, "Japan's Political and Security Role," hal. 26.

dan partner ekonomi Jepang, akan sependapat bahwa dilihat dari perkembangan akhir-akhir ini, kemampuan militer Jepang dewasa ini dianggap cukup untuk menghadapi kemungkinan keadaan darurat. Karena alasan ini, kebutuhan akan pembangunan yang terus-menerus dalam kapabilitas militer Jepang akan banyak dipersoalkan. Sesungguhnya pembangunan militer yang lebih jauh dapat menimbulkan kekhawatiran dan usaha melibatkan Jepang dalam diskusi mengenai intensinya di masa depan dalam bidang itu akan berlangsung dengan hati-hati guna mencegah timbulnya salah paham.

Meskipun demikian, Jepang tetap mempunyai kepentingan keamanan yang sah dan peranan yang lebih besar dalam masalah-masalah keamanan regional. Sehubungan dengan penyesuaian hubungan dengan Amerika Serikat dalam bidang itu, Jepang dapat mengatasi masalah pembagian beban dengan memberikan lebih banyak dana untuk membiayai biaya pemeliharaan pasukan-pasukan Amerika Serikat yang digelar di Jepang.

Jika Jepang prihatin atas keamanan jalur lautnya melalui Asia Tenggara, Jepang dapat melibatkan diri ke dalam semacam pengaturan *role-sharing* secara formal ataupun informal dengan negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat. Lau Teik Soon, berpendapat bahwa sangat berguna bagi ASEAN untuk meningkatkan kerjasama militernya dan bagi ASEAN, Korea dan Jepang untuk mempola semacam pengaturan keamanan yang longgar dengan Amerika Serikat.¹¹

¹¹Lau Teik Soon, "The New Strategic Environment in the Asia Pacific Region," makalah disampaikan pada Konvensi Gabungan British International Studies Association dan International Studies Association, 28 Maret - 1 April 1989.

Keamanan di kawasan bukan semata-mata soal anggaran militer dan perimbangan kekuatan. Jepang memiliki peluang untuk memainkan peranan politik regional yang akan mempunyai dampak besar bagi lingkungan keamanan dan ekonomi regional. Amerika Serikat, ASEAN dan Jepang sendiri mempunyai persepsi yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil merupakan faktor penting untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan di kawasan. Oleh sebab itu kemampuan Jepang untuk menyediakan pasar bagi ekspor Asia, dan untuk memberi bantuan dan investasi ke Filipina dan tempat-tempat bergolak lain di kawasan akan semakin penting. Selanjutnya, usaha-usaha Jepang untuk meningkatkan kekuatan ASEAN melalui kerjasama ekonomi dan politik dalam bidang-bidang yang saling menguntungkan akan sangat bermanfaat bagi stabilitas regional.

Tetapi stabilitas kawasan ini sesungguhnya sangat tergantung pada proses penyatuan antara Amerika Serikat dan Jepang dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik dan keamanan. Untuk jangka pendek prospek penyatuan tidak begitu baik karena emosi yang tinggi di kedua pihak menyebabkan saling menyalahkan pihak lain sebagai sumber ketimpangan. Dalam proses pengambilan keputusan di kedua negara memang tidak ada aparat koordinasi dan tidak terdapat konsistensi dalam menentukan maupun melaksanakan kebijakan tentang hubungan tersebut, sehingga hubungan itu dapat rusak, padahal hubungan itu sangat vital tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga kawasan secara keseluruhan.

Sehubungan dengan itu, Lee Kuan Yew khawatir bahwa Jepang akan dirangsang untuk berjalan sendiri di segala bidang, termasuk di bidang keamanan, dan ini merupakan

mimpi buruk bagi kawasan.¹² Menurut Lee alasan Jepang untuk bertindak sendiri di masa depan adalah jika Amerika Serikat meninggalkan kawasan secara sepihak karena opini rakyat Amerika Serikat tidak lagi mendukung kehadiran pasukan-pasukannya di kawasan Asia-Pasifik.

Alasan lain adalah jika rakyat Jepang, terutama generasi mudanya di masa depan, tidak lagi dapat menerima tuduhan-tuduhan bahwa mereka disalahkan setiap kali terjadi ketegangan ekonomi dengan Amerika Serikat atau MEE. Mereka akan melihat alasan tuduhan itu sebagai suatu yang dasarnya realistik, yaitu bahwa pada dasarnya orang-orang Amerika atau Eropa yang berkulit putih tidak dapat menerima kenyataan bahwa bangsa Jepang yang berkulit kuning bisa menjadi bangsa nomor satu di dunia dalam berbagai bidang ekonomi.

Kemungkinan terjadinya tindakan sepihak dari Jepang memang tidak dapat diabaikan karena hubungan Jepang dengan Amerika Serikat sedang menghadapi krisis yang cukup mendalam. Tantangan paling besar yang dihadapi Jepang adalah mengatasi hubungan-hubungan yang penuh persoalan dengan Amerika Serikat.¹³ Seorang pengamat berpendapat bahwa tugas diplomatik dan politik Jepang adalah menstabilkan hubungannya dengan Amerika Serikat karena hubungan itu merupakan hubungan yang paling penting di kawasan dan dasar bagi stabilitas dan perdamaian regional.¹⁴

¹²George Packard, "The Comming US - Japan Crisis," *Foreign Affairs* (Winter 1987/1988).

¹³William Watts, *The United States and Japan: The Troubled Partnership* (Cambridge: Harper and Row Publisher, 1984).

¹⁴Jusuf Wanandi, "The Strategic Outlook for the Asia Pacific Region Toward the 21st Century: A Re-

Agar kerjasama Jepang-Amerika Serikat menjadi efektif dan positif bagi kawasan Asia-Pasifik di masa depan, Jepang harus membuka diri bagi negara-negara berkembang di kawasan, karena di samping Amerika Serikat, Jepang merupakan salah satu dari dua tonggak bagi kemajuan ekonomi dan bagi stabilitas politik negara tersebut. Untuk itu Jepang harus menginternasionalisasikan dirinya dalam arti harus membuka dirinya demi kewajiban-kewajibannya sebagai negara besar di masa mendatang. Jepang merupakan partner ekonomi terpenting bagi negara-negara berkembang di kawasan, dan karenanya kebijakan dan peranannya sebagai negara besar makin diharapkan di masa mendatang. Pertanyaan fundamental yang perlu diajukan di sini adalah apakah Jepang dengan cepat dapat menginternasionalisasikan diri dan mencapai titik temu dengan Amerika Serikat mengenai peranan yang saling menguntungkan dalam periode post-perang dingin?

Kontribusi Jepang Kepada Periode Post-Perang Dingin

Peran internasional Jepang akan ditentukan oleh bagaimana kekuatan dan kelemahan-kelemahan relatifnya dalam pola hubungan internasional yang sedang muncul.¹⁵ Berbicara dalam konteks yang lebih luas, kepentingan jangka panjang Jepang adalah kerjasama dalam konstruksi sistem hubung-

gional Perspective," makalah disampaikan pada Konferensi mengenai Southeast Asia and Pacific Asia Security in the Final Decade of the 21st Century, Malaysia, Maret 1988.

¹⁵Shumpei Kumon, "The Evolving International System and Its Ramification for Japan," *Japan Review of International Affairs*, Vol. 1, No. 1 (Spring-Summer 1987).

an ekonomi dan politik yang lebih luas, yang dapat memenuhi tujuan-tujuan sebagai berikut.

Pertama, sistem yang baru harus memperkenalkan unsur-unsur baru kerjasama dengan memajukan integrasi negara-negara sosialis ke dalam suatu hubungan ekonomi dan politik global yang normal. Dalam hubungan ini Jepang dapat bekerjasama dengan dunia non-komunis untuk menciptakan insentif bagi dunia sosialis agar tetap berada dalam jalur pembaruan.

Kedua, sistem paska-perang dingin harus mencari upaya atau jalan keluar untuk mengatasi semakin meningkatnya konflik ekonomi di antara sekutu-sekutu Barat. Konflik seperti itu merupakan produk sampingan dari integrasi ekonomi yang semakin meningkat, dan masalah yang muncul adalah bahwa proses integrasi ekonomi global tidak akan terwujud, kecuali jika konflik ekonomi itu dapat diatasi. Oleh sebab itu Jepang mempunyai tanggung jawab untuk memainkan peranan positif dalam menyingkirkan penyebab-penyebab konflik itu. Kemungkinan tindakan Jepang mempunyai konsekuensi terhadap perilaku Amerika Serikat dan Eropa, dan usaha-usaha positif Jepang untuk menyesuaikan hubungan dengan Amerika Serikat dan Eropa akan sangat membantu tidak hanya Jepang, tetapi juga negara-negara yang tergantung pada hubungan ekonomi global.

Ketiga, orde yang baru harus memberikan pengakuan yang lebih besar kepada kebutuhan akan kerjasama internasional untuk menangani masalah-masalah pembangunan di Dunia Ketiga. Di sini Jepang sebenarnya telah mengambil langkah positif misalnya dengan meningkatnya ODA-nya dan kontribusinya kepada berbagai organisasi internasional.

Peranan yang harus dihindari oleh Jepang adalah peranan-peranan yang bertentangan dengan kebutuhan akan dukungan bagi hubungan ekonomi dan politik global yang terbuka. Setiap usaha Jepang untuk menciptakan orde internasional yang menyimpang dari kecenderungan global dalam hubungan internasional akan menimbulkan kerugian bagi Jepang sendiri dan tetangga-tetangganya. Misalnya, usaha Jepang menciptakan peranan keamanan yang otonom dapat menimbulkan ketidakstabilan karena persyaratan kemampuan memproyeksikan kekuatan militer akan menimbulkan ancaman-ancaman baru terhadap negara-negara tetangga Jepang. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan kondisi-kondisi yang merugikan kepentingan-kepentingan Jepang sendiri sebab hubungan ekonominya tentu akan dipengaruhi oleh ketegangan-ketegangan yang timbul, dan Jepang mungkin akan terisolasi secara politik dan menjadi lebih rawan daripada jika ia membatasi diri pada peranan-peranan yang lebih *modest*.

Bahaya lain dari kemungkinan peranan Jepang yang otonom adalah jika Jepang dengan sadar mencoba menjadi pemimpin wilayah-wilayah eksklusif di Asia-Pasifik. Apakah dipandu oleh konsep pan-Asianisme atau pembagian kerja otonomi yang dirancang dan dikoordinasikan dari Tokyo, suatu usaha Jepang yang mengesampingkan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat atau Eropa dan menciptakan orde ekonomi dan politik semacam piramida jelas akan memperbesar konflik dan dapat mendorong dunia ke arah pembentukan blok regional yang eksklusif. Tindakan-tindakan Jepang ke arah itu jelas tidak akan menguntungkan Jepang dan negara-negara yang mengidentifikasikan diri dengan kepentingan-kepentingan Jepang.

Jadi dalam periode post-perang dingin, kepentingan Jepang yang sejati adalah memberikan prioritas kepada hubungan kooperatif secara global untuk menciptakan kondisi-kondisi yang paling baik bagi pertumbuhan ekonomi regional maupun bagi stabilitas politik.

Hambatan Internasionalisasi Jepang

Meskipun terdapat kesadaran mengenai kebutuhan akan perubahan dalam sikap dan perilaku Jepang,¹⁶ masih terdapat kepentingan-kepentingan institusional dan politik yang mencegah penyesuaian-penyesuaian tepat bagi Jepang. Peranan "sindikat *vested interest*" (*zoku*) yang terdiri dari kepentingan sektor swasta, birokrasi dan LDP yang mempunyai yurisdiksi yang sama atas bidang-bidang kebijakan seringkali disinggung. Yang menjadi dasar dari kuatnya peranan mereka adalah kepentingan yang luas dan birokrasi Jepang yang berorientasi pada pembangunan untuk mempertahankan kekuatan tradisional dan statusnya dalam menghadapi kecenderungan yang membalik.

Kecenderungan-kecenderungan itu dewasa ini mulai terlihat dan sektor swasta Jepang semakin menjadi gelisah di bawah "panduan" birokrasi Jepang. Untuk melindungi kewenangan dan kekuatan tradisionalnya, birokrasi mencoba membuat dirinya berguna bagi sektor swasta. Di lain pihak, birokrasi melindungi sektor swastanya dari kemungkinan kompetisi asing di dalam negeri, dan melalui sarana *ODA*, birokrasi mencoba mengarahkan dan mempromosikan kegiatan sektor swasta di luar negeri. Pengaturan semacam ini menguntungkan

¹⁶Inao Nakatomi, "Japan's Choice: Toward a World Role," *Look Japan* (Januari 1988), hal. 11.

sektor swasta, melindungi kekuatan birokratik dan sesuai dengan sikap tradisional nasionalisme ekonomi Jepang. Tetapi seperti yang sering kita amati tuntutan liberalisasi ekonomi Jepang berarti perombakan sistem kekuatan birokratik yang intrusif, dan oleh sebab itu, liberalisasi dalam perspektif Barat melanggar kepentingan dan tradisi birokrasi Jepang.

Di samping kekakuan institusional ini, terdapat faktor-faktor kultural dan sikap-sikap tertentu yang menghambat prospek bagi kepemimpinan politik internasional Jepang. Dengan meningkatnya status ekonomi Jepang, timbul semacam ketegasan baru yang mencampuradukkan kebanggaan nasional dengan kesombongan dan kepekaan terhadap dunia luar. Pernyataan-pernyataan ofensif anggota senior LDP bahwa orang hitam Amerika tidak memiliki tanggung jawab finansial dan kasus buku sejarah Jepang, yang meskipun lolos skrining di Kementerian Pendidikan, berhasil disensor oleh anggota muda parlemen dari LDP yang konservatif, adalah contohnya.

Jika eksklusivisme dan perasaan keunikan Jepang mencegah Jepang menghilangkan sejarah imperialisme dan militerismenya, hal itu akan menghambat diplomasinya. Selanjutnya, karena kebrutalannya dalam masa perang, Jepang dianggap tidak memiliki dasar moral yang tinggi untuk bertindak sebagai pemimpin bangsa-bangsa yang bebas. Bangsa-bangsa di dunia, terutama di Asia, tidak menganggap Jepang sebagai pemimpin, karena masih banyak kecurigaan yang besar mengenai intensi-intensi Jepang terutama di kawasan Asia.

Seorang akademisi Jepang, Prof. Tanaka Akihiko dari Universitas Tokyo, berpendapat bahwa bagi Jepang demokrasi adalah

konsep pinjaman dan oleh sebab itu ia segan untuk bertindak sebagai "penjelajah" dalam percaturan politik internasional. Jepang harus memiliki pandangan dan visi sendiri jika ingin dianggap sebagai negara pemimpin yang berpengaruh.¹⁷

Jadi, jelas bahwa ingatan bangsa-bangsa di dunia mengenai tingkah laku Jepang dalam masa perang, kecurigaan yang masih kuat mengenai intensi-intensi Jepang dan faktor-faktor lainnya adalah kendala-kendala konstan bagi kemungkinan tindakan-tindakan baru Jepang. Hal itu sudah tentu membatasi sejauh mana Jepang dapat mengembangkan identitas politik yang independen dan mengambil peranan internasional yang otonom. Tampaknya belum banyak negara-negara yang bersedia melihat Jepang memainkan peran ekonomi, politik, apalagi militer yang lebih besar daripada apa yang ia bisa lakukan sekarang. Sebab hal itu hanya akan membangkitkan kembali ketakutan dan mungkin juga antagonisme bangsa-bangsa di dunia.

Penutup

Telah kita lihat perubahan-perubahan di Jepang maupun di dunia secara keseluruhan. Meskipun hasil interaksi antara kedua gejala itu sulit untuk diramalkan, suatu hal yang jelas adalah bahwa Jepang dewasa ini menghadapi suatu periode transisi cepat yang sulit menuju suatu kepemimpinan dan tanggung jawab internasional yang otonom. Sebagai salah satu kekuatan dalam sistem multipolar, kepentingan Jepang adalah mencari partner aliansi yang stabil untuk menjamin keamanannya dan stabilitas kawasan secara

¹⁷"Which Way Japan," *South* (Oktober 1988).

keseluruhan. Jepang juga akan mempunyai kepentingan membangun sistem kerjasama global guna menangani konflik regional, pengawasan senjata dan pembangunan ekonomi.

Sebagai kekuatan besar di Asia, Jepang akan mampu menawarkan kepemimpinan, tetapi harus lebih dahulu menghilangkan kesan buruk bangsa-bangsa di dunia mengenai tingkah lakunya di masa lalu, dan ia juga harus mengakui bahwa tiada satu kekuatan pun di kawasan yang luas dan beragam seperti Asia akan mampu membentuk kepemimpinan politik dan ekonomi dalam arti yang eksklusif. Jika Jepang dapat menemukan visi dan kepemimpinan politik yang ber-

gerak ke arah itu, prospek Asia-Pasifik mungkin akan lebih cerah.

Harus diakui bahwa karena kekuatan-kekuatan relatifnya, Jepang dianggap potensial untuk memainkan peran internasional yang otonom. Tetapi mengingat pengalaman Jepang dalam politik internasional masih minimal, kemungkinan membuat kesalahan diperkirakan cukup besar. Dalam keadaan dunia seperti dewasa ini suatu kegagalan diplomasi politik bisa mempunyai akibat yang parah bagi perekonomian Jepang. Jadi, dalam rencana maupun pemikiran untuk memainkan peran internasional yang otonom, jika memang ada, terkandung suatu dilemma.

Perkembangan Menuju Perdamaian Arab-Israel

Kirdi DIPOYUDO

TAHUN-TAHUN belakangan ini terjadi serangkaian perkembangan di Timur Tengah menuju penyelesaian sengketa Arab-Israel secara damai. Setelah Mesir mengadakan perdamaian dengan Israel pada tahun 1979 dan negara-negara Arab membiarkan PLO sendirian menghadapi tentara Israel yang menyerbu Libanon pada tahun 1982 untuk menghancurkannya sebagai kekuatan militer, sengketa itu menyusut ke inti semulanya, yaitu *sengketa komunal Israel-Palestina*. Hal itu menyadarkan para pemimpin Palestina bahwa mereka tidak dapat mengandalkan tentara-tentara Arab untuk membebaskan tanah air mereka dari pendudukan Israel, sehingga harus ditempuh jalan lain.

Karena PLO tak berhasil membebaskan sejangkal pun wilayah Palestina, rakyat Palestina Tepi Barat dan Jalur Gaza mengambil inisiatif sendiri untuk mengakhiri pendudukan itu. Pada 8 Desember 1987 mereka bangkit dan melancarkan suatu *intifadah* atau pemberontakan yang berlangsung sampai sekarang biarpun Israel menggunakan

tangan besi untuk menumpasnya. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pendudukan tidak dapat dipertahankan untuk selamanya dan bahwa masalah Palestina harus diselesaikan secara politik.

Pada gilirannya, hal itu memperkuat kelompok moderat pimpinan Yasser Arafat dalam tubuh PLO yang ingin mencari suatu penyelesaian politik. Berkat perjuangan kelompok ini, Dewan Nasional Palestina dalam sidangnya di Aljir pada 12-15 November 1988 menerima suatu *siasat politik baru yang mengakui Israel dan mengutuk terorisme*. Sesuai dengan itu, Dewan atas nama bangsa Arab dan bangsa Palestina menyatakan pada 15 November berdirinya Negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibukota yang akan hidup berdampingan dengan Israel secara damai. Bulan berikutnya Yasser Arafat maju selangkah lagi dengan secara tegas mengakui Israel, menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 388 sebagai landasan untuk menyelesaikan sengketa Arab-Israel dan menolak terorisme seperti diminta oleh Amerika Serikat.

Sebagai tanggapan, *Amerika Serikat membuka dialog dengan PLO* sebagai langkah dalam proses perdamaian dan mulai mendesak Israel untuk berbuat yang sama. Sejak itu semakin banyak warga Israel menekan Pemerintah Shamir untuk berunding dengan PLO. Secara demikian, cepat atau lambat Israel akan mengadakan perundingan dengan Palestina menuju perdamaian. Perkembangan menuju perdamaian Arab-Israel itulah tema karangan ini.

Sengketa Arab-Israel Telah Menyusut ke Inti Semulanya

Pandangan umum bahwa sengketa Arab-Israel adalah masalah inti Timur Tengah tidak lagi tepat sesudah Camp David, Perjanjian Perdamaian Mesir-Israel (1979), dan invasi Israel ke Libanon (1982). Sengketa itu telah menyusut kembali menjadi sengketa Israel-Palestina dan untuk menyelesaikannya perlu ditempuh pendekatan baru.

Kembali ke Inti Semulanya

Kejadian-kejadian itu membuka suatu era baru bagi Israel dan negara-negara tetangganya, yang bisa disebut era *keseimbangan tak mantap*. Keadaan ini dipertahankan oleh Suriah dan Israel, masing-masing dengan maksudnya sendiri. Kedua pihak membutuhkan agar sengketa itu berlanjut tetapi tidak meningkat menjadi perang. Keseimbangan itu dipermudah oleh perdamaian Mesir-Israel, kerawanan rezim Raja Hussein di Yordania dan dampak mendalam perang Irak-Iran. Gagasan bahwa perjuangan Palestina bisa berfungsi sebagai seruan tempur yang akan menghancurkan keseimbangan tak mantap itu hanya dipertahankan

suatu minoritas pengamat yang bermotivasi ideologi di Israel dan di negara-negara Barat, yang dalam keputusan mereka mengira bahwa ada semacam bim salabim yang mampu menyelesaikan sengketa Arab-Yahudi yang telah lebih dari seabad.

Bangsa Palestina itu sendiri telah melepaskan harapan itu karena menyadari bahwa negara-negara Arab tidak lagi memperhatikan mereka seperti jelas terlihat selama invasi Israel ke Libanon dan sesudahnya. Mereka merasa telah melakukan apa yang dapat mereka lakukan untuk bangsa Palestina dan hanya melibatkan diri dalam perjuangan Palestina bila kepentingan nasional mereka menuntutnya. Dengan demikian sengketa Arab-Israel yang selama 40 tahun merupakan suatu sengketa regional antar negara telah menyusut ke inti semulanya, yaitu *sengketa komunal Israel-Palestina*. Titik balik ini menuntut perumusan kembali opsi-opsi dan pilihan-pilihan, tetapi belum diakui oleh kebanyakan pengamat.

Pemberontakan Arab 1936

Untuk memahami tahap baru dalam hubungan Israel-Palestina ini kita harus kembali ke tahap formatif sengketa yang tragis itu. Kita bisa menetapkan titik awalnya pada akhir Perang Dunia I atau bahkan lebih awal pada 1882 ketika pemukiman Zionis pertama dibangun. Akan tetapi pertengahan dasawarsa 1930-an dan lebih spesifik *pemberontakan Arab* tahun 1936 dan ekornya telah membentuk sengketa yang merupakan titik di mana kita dapat melacak hubungan, persepsi-persepsi dan strategi-strategi sekarang ini.

Pada pertengahan 1930-an masyarakat Yahudi dan Palestina telah berkembang

menjadi masyarakat-masyarakat yang kohe-sif dan berdiri atas kaki sendiri dan bergerak menuju konfrontasi total secara sadar. Bangsa Palestina, yang menyadari meningkatnya kekuatan nasionalnya, mendukung perjuangan bersenjata sebagai strategi mereka dan melancarkan Pemberontakan Arab -- suatu usaha kuat untuk menggulingkan Mandat Inggris dan menghancurkan usaha Zionis untuk membangun negara mereka di Palestina.

Sasaran pertama mereka adalah orang-orang Inggris karena menganggap kaum Zionis sebagai kolonis-kolonis kulit putih yang samasekali bergantung pada Inggris, suatu masyarakat yang pasti akan musnah setelah kekuasaan kolonial diusir.

Reaksi Zionis

Reaksi Zionis terhadap bahaya maut itu juga kuat. Bahkan yang paling moderat di antara mereka pun menyadari bahwa suatu pertempuran berdarah tak dapat dihindari. Mereka harus melepaskan persepsi naif mereka bahwa sengketa itu suatu pertarungan kelas internasional atau suatu salah paham tragis, karena mereka kurang mengenal penduduk asli yang pada waktunya akan dapat menerima orang-orang Yahudi demi keuntungan-keuntungan materiil yang mereka datangkan.

Kaum Zionis menyadari bahwa mereka menghadapi suatu gerakan nasional, tetapi tidak dapat memberinya legitimasi. Oleh sebab itu mereka menggambarkan orang-orang Palestina sebagai suatu kawanan pembunuh-fasis dan reaksioner. Kaum Zionis, sebagai lawan mereka, menganggap orang-orang Palestina sebagai suatu masyarakat yang tidak *viabel* (dapat hidup), suatu ca-

bang dunia Arab dan bukannya suatu faktor independen.

Sikap Eksklusif

Sejak 1936 persepsi orang-orang Palestina maupun Yahudi bercirikan eksklusivisme dan sengketa itu dilihat sebagai suatu *zero sum game* dan suatu sengketa yang disulut dari luar negeri. Kedua pihak mengabaikan atau meremehkan pihak lain dan melihatnya sebagai suatu sasaran yang dimanipulasi kekuatan-kekuatan asing. Sebagai akibatnya mereka tidak melihat gunanya untuk saling berhubungan.

Kekalahan orang-orang Palestina tahun 1937-1938 mendorong negara-negara Arab untuk mengambil-alih perjuangan mereka dan hanya memperkuat persepsi Yahudi bahwa orang-orang Palestina adalah suatu kekuatan yang berasal dari luar. Perang 1948 memperkuat persepsi itu lagi. Dengan buyar dan hancurnya masyarakat Palestina maka sengketa komunal menjadi sengketa antar negara, sengketa Arab-Israel.

Bangsa Palestina itu sendiri membantu bangsa Israel untuk membatasi kembali sengketanya. Pada zaman Pan-Arab dan Nasser para aktivis Palestina menggambarkan perjuangan mereka dalam konteks anti imperialis yang lebih luas. Mereka berpegangan pada konsepsi lama mereka bahwa entitas Zionis adalah suatu gejala neo-kolonial yang tidak viabel, yang mengandalkan kekuatan imperialis untuk bertahan.

Perang 1967, pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza dan perang 1973 tidak mengubah persepsi itu. Persepsi ini bahkan bertahan sesudah Perjanjian Mesir-Israel ditandatangani. Ia tidak berubah biarpun seng-

keta komunal antara orang-orang Yahudi dan Arab di wilayah-wilayah pendudukan meningkat, karena persepsi itu memenuhi kebutuhan psikologis yang mendalam dan memungkinkan kedua pihak untuk percaya akan sifat eksklusif klaim-klaim mereka.

Kegagalan Diplomasi

Ketidakmampuan masing-masing untuk menerima pihak lain bahkan sebagai lawan, jangkakan sebagai peserta dalam perundingan perdamaian, adalah kunci untuk memahami kegagalan diplomasi tradisional dalam usahanya untuk menyelesaikan sengketa Israel-Palestina. Diplomasi tidak dirancang untuk mengatasi isu-isu dasar identitas, ungkapan diri, ketakutan anihilasi, benturan kepentingan simbolis dan keadilan mutlak. Sengketa komunal semacam itu di luar jangkauan diplomasi. Oleh sebab itu usaha-usaha untuk menyelesaikannya melalui proses perdamaian konvensional pasti gagal.

Proses perdamaian adalah suatu usaha sarana-tujuan yang *linear* (membujur) untuk mengubah situasi perang menjadi keadaan damai. Ia dimaksud untuk merumuskan jawaban-jawaban bagi masalah-masalah akibat benturan kepentingan nasional di arena internasional. Agar proses perdamaian bisa efektif, harus dipenuhi beberapa syarat. Pertama, ia harus berlangsung dalam konteks sistem internasional berdasarkan pengakuan para peserta sebagai entitas yang mengacu kepada rakyat merdeka. Hak dasar lawan atas suatu entitas otonom yang sah itu sendiri tidak dipersoalkan, tetapi merupakan premis atas mana perundingan bisa dimulai. Hanya dalam konteks prosedural ini proses perdamaian bisa berjalan. Proses itu harus berjalan atas asumsi bahwa sengketa-nya bukan suatu *zero sum game* dan pihak-

pihak harus bersedia ikut dalam perundingan-perundingan di mana konsesi dan kompromi bisa diadakan; isu-isu harus diterjemahkan dalam pilihan-pilihan yang dibatasi dengan jelas.

Hanya karena syarat-syarat itu dipenuhi, proses perdamaian antara Israel dan Mesir bisa berhasil. Karena syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka sengketa Israel-Palestina tidak diselesaikan melalui proses semacam itu.

Dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 338, Mesir maupun Israel setuju atas suatu usaha sarana-tujuan untuk mengubah permusuhan menjadi hubungan damai, dalam konteks sistem internasional. Kunjungan Presiden Sadat ke Yerusalem melambangkan pengakuan terhadap Israel sebagai suatu aktor sah dan masyarakat Israel sebagai rakyat otonom dan merdeka. Pertemuan-pertemuan rahasia antara Israel dan Mesir -- sebelum perundingan-perundingan resmi -- menciptakan suatu *sum game*: pengembalian Sinai dan pengakuan kedaulatan Mesir sebagai imbalan pengaturan-pengaturan keamanan. Isyu-isu yang dipersoalkan bisa dijadikan hal-hal konkrit atas mana dapat diadakan konsesi dan kompromi.

Macet pada Tahap Prosedural

Sengketa Israel-Palestina macet pada tahap prosedural yang sangat penting. Walaupun pengamat-pengamat obyektif suka membatasi sengketa itu sebagai suatu benturan entitas-entitas nasional yang menginginkan satu negeri yang sama, kedua pihak tidak menerima definisi itu. Menurut mereka inti sengketa ini adalah kelangsungan hidup (*survival*). Pertarungan bukan saja mengenai survival fisik tetapi juga soal-soal

dasar identitas dan keutuhan.

Inti sengketa tidak dapat dirundingkan karena isu-isu identitas adalah suatu *zero sum game*. Tidak ada pihak yang bisa mengambil risiko untuk mengakui lawannya sebagai sah karena hal itu akan membahayakan klaimnya sendiri. Bagi Israel, pengakuan klaim bangsa Palestina itu saja akan menyanggah legitimasi dan eksistensinya sendiri. Bagi bangsa Palestina, pengakuan terhadap Israel berarti memudahkan klaim mereka dan penyerahan kartu truf mereka.

Di atas dikemukakan bahwa proses perdamaian harus berlangsung dalam sistem internasional. Agar ini terjadi, kedua pihak harus menjadi anggota penuh sistem itu. Perundingan-perundingan harus berlangsung di seputar meja dan wakil-wakil pihak-pihak dilengkapi dengan lambang-lambang legitimasi mereka seperti surat kepercayaan diplomasi, bendera dan lagu kebangsaan.

Tetapi inti sengketa Israel-Palestina melibatkan legitimasi lambang-lambang itu. Partisipasi itu saja berarti suatu konsesi simbolis terlalu besar bagi lawan. Dalam proses perdamaian normal, pihak-pihak mengakui legitimasi keberadaan lawan sebagai suatu entitas, sekali pun bermusuhan. Dalam sengketa Israel-Palestina eksistensi itu sendiri dipersoalkan.

Hambatan Veto Israel dan Penolakan PLO

Memang, status Israel dan bangsa Palestina itu asimetris. Israel diakui sebagai suatu negara berdaulat dan legitimasinya tidak dipersoalkan oleh kebanyakan negara, termasuk sejumlah negara-negara Arab. Bangsa Palestina diakui secara internasional sebagai

suatu entitas kuasi-nasional, tetapi status itu terlalu *ambiguus* untuk mengizinkan partisipasi mereka dalam sistem internasional sebagai peserta yang sama kedudukannya. Mereka tidak diberi pengakuan penuh karena status merdeka yang sama berarti pengakuan hak mereka atas penentuan-diri dan eksistensi rakyat terpisah yang otonom yang diwakili oleh pimpinan yang diakui. Penolakan pengakuan dasar bangsa Palestina ini datang dari ketiga faktor dalam proses, yaitu Amerika Serikat, Yordania dan Israel. Di pihak mereka, bangsa Palestina tidak mau mengakui Israel. Dengan demikian pada dasarnya adalah *veto Israel* dan *penolakan Palestina* yang selama ini mencegah segala kemajuan.

Semua Usaha Gagal

Namun prosesnya harus jalan terus. Oleh sebab itu dilakukan usaha-usaha untuk mengatasi rintangan itu. Pengertian rakyat artifisial Yordania-Palestina ditemukan oleh Israel untuk mengeksternalisasikan bangsa Palestina dan mengikat mereka dengan suatu rakyat yang sah (Yordania). Juga dicari pimpinan alternatif Palestina yang "otentik." Lagipula, dicari suatu payung internasional untuk menghindari keharusan saling mengakui. Pendekatan Amerika Serikat-Palestina dilakukan sebagai tekanan tak langsung atas Israel. Akan tetapi semua usaha itu gagal karena masalah intinya tidak dapat diselesaikan. Prakarsa-prakarsa perdamaian berulang kali gagal karena sengketa Israel-Palestina tidak dapat diperas dalam *jargon* (bahasa khusus) itu.

Pihak-pihak itu sendiri melihat sengketa mereka dalam konteks lain, yaitu *sengketa komunal*. Ini berlangsung di tanah Arab

yang direbut dan diambil-alih orang-orang Yahudi yang mencari suatu negeri impian. Sengketa itu diperjuangkan kaum muda Palestina yang lahir selama pendudukan, oleh orang-orang Yahudi ekstremis yang percaya akan bimbingan Tuhan dan oleh rekrut-rekrut Israel yang menembaki orang-orang muda Palestina karena diberitahu bahwa mereka berjuang untuk *survival*, dan oleh kaum teroris yang menempatkan bom-bom di pesawat-pesawat sipil.

Bangsa Palestina diminta bicara dalam bahasa diplomasi biarpun bahasa mereka berkaitan dengan hak-hak dasar dan komunal, pengakuan dan legitimasi. Israel diminta mundur, tetapi baginya penarikan berarti anihilasi.

Memantapkan Status Quo

Karena tidak dapat menyelesaikan sengketa komunal, proses diplomasi itu berusaha mengendalikannya untuk memantapkan *status quo* sambil mempertahankan retorika proses perdamaian. Negara-negara yang langsung terlibat dalam proses perdamaian, yaitu Amerika Serikat, Yordania dan Israel, sadar akan adanya kontradiksi antara dipertahankannya *status quo* pendudukan dan suatu proses perdamaian berdasarkan formula perdamaian-untuk-tanah.

Akan tetapi mereka khawatir bahwa meningkatnya ketegangan komunal bisa mengancam keseimbangan tak mantab itu. Ini bisa terjadi bila ketegangan Israel-Palestina menjadi tak tertahankan akibat aksi-aksi teroris dan pembalasan serta pelanggaran-pelanggaran Israel. Kaum ekstremis di Israel bisa berusaha mengubah *status quo* dengan mengusir ratusan aktivis Palestina ke Yordania dan secara demikian mengganggu stabi-

tas rezimnya dan, dengan persetujuan diam-diam Suriah, menciptakan suatu entitas Palestina di Yordania. Untuk menghadapi kemungkinan semacam itu, dilakukan usaha-usaha untuk memantapkan stabilitas intern melalui bantuan ekonomi dan pengaturan-pengaturan mikro lain.

Kebijaksanaan pasifikasi itu -- dilihat secara keliru sebagai identik dengan proses perdamaian -- untuk jangka pendek bisa berhasil. Pihak-pihak yang terlibat mampu mempertahankannya melalui suatu kombinasi metode *carrot-and-stick* (bujukan dan ancaman).

Adalah ironis bahwa orang-orang Palestina sasaran kebijaksanaan pengendalian dan pasifikasi itu menunjang dipertahankannya *status quo*. Kebijakan-kebijaksanaan negatavis mereka tidak membiarkan opsi selain dipertahankannya *status quo*. Secara demikian *status quo* itu bukan saja diperkuat tetapi juga diberi legitimasi. Sebagai akibatnya, formula perdamaian-untuk-tanah kehilangan relevansinya dan proses perdamaian kehilangan artinya.

Untuk menekan kontradiksi itu, dilakukan usaha untuk menggambarkan *status quo* sebagai suatu situasi statis, yang dibekukan pada suatu tahap yang membiarkan semua opsi terbuka. Data dan fakta-fakta di medan diabaikan atau ditafsirkan secara salah. Keputusan-keputusan mengenai isu-isu mikro, seperti pembukaan sebuah bank atau pengangkatan seorang pejabat, diambil pada pertemuan rahasia para diplomat, yang ikut mempertahankan ilusi proses perdamaian dan fiksi momentum. Perbaikan keadaan ekonomi sebagai sarana perubahan politik (suatu konsep Marxis yang anehnya digunakan oleh negara-negara kapitalis) mendapat prioritas tinggi.

Namun usaha menipu diri itu tidak dapat mempengaruhi kenyataan dan bahkan tidak didukung semua pihak yang terlibat. Mereka memahami kebijaksanaan itu dalam rangka perjuangan di mana mereka terlibat. Orang-orang Israel menafsirkannya sebagai ijin untuk melakukan aneksasi mereka; orang-orang Palestina menfasirkan sebagai usaha untuk menyuap dan memecah mereka. Akibatnya ketegangan komunal meningkat.

Nation-Building Palestina

Dua puluh tahun dominasi Israel telah menciptakan suatu *proses nation-building Palestina yang kuat*. Ironisnya, hal itu hanya dapat terjadi di bawah pendudukan Israel yang merupakan suatu tantangan besar, ancaman sungguh-sungguh terhadap kohesi masyarakat Palestina dan identitas nasional Palestina. Tetapi tanggapannya juga kuat. Perbaikan taraf hidup, proletarisasi petani dan urbanisasi menciptakan mobilitas sosial, kehausan akan pendidikan dan investasi dalam sumber daya manusia. Kesadaran sosial dan politik berkembang. Jaringan-jaringan dan lembaga-lembaga masyarakat yang otonom dan sukarela berkembang untuk menghadapi usaha Israel memecah masyarakat Palestina.

Pendudukan telah menghasilkan paradoks suatu masyarakat yang tak berdaya tetapi penuh vitalitas. Orang-orang Palestina yang lahir selama pendudukan kurang bersedia untuk menerima *status quo* dan menunjukkan perlawanan yang lebih kuat terhadap pendudukan. Proses ini tidak boleh dilihat sebagai dukungan untuk PLO sebagai suatu lembaga politik yang efektif. Memang, kebanyakan orang Palestina mendukung PLO sebagai lambang nasionalisme Palestina, tetapi orang semakin kecewa dengan ga-

gasan bahwa PLO bisa bertindak efektif untuk membebaskan mereka dari kesengsaraan.

Bangsa Palestina di bawah dominasi Israel tidak mampu merumuskan suatu strategi politik yang *konstruktif*. Larangan total terhadap kegiatan politik regional dan penggangguan serta deportasi pemimpin-pemimpin Palestina secara serius menghambat diskusi politik di muka umum. Di lain pihak, ancaman pembalasan, intimidasi dan pembunuhan orang-orang Palestina yang berani menyatakan pendapat yang menyimpang dari posisi resmi PLO menjerat semua orang kecuali beberapa.

Akan tetapi hambatan utama lebih mendasar. Menurut penilaian optimistik, orang-orang Palestina akan dapat bertahan di wilayah pendudukan. Tetapi ini bukan penyelesaian bagi dua juta orang Palestina di negara-negara lain yang aspirasinya terungkap dalam credo fundamental PLO - *al-awda* (kembali) ke Palestina.

Strategi Realistik

Merumuskan suatu *strategi realistik* berarti bahwa orang-orang Palestina harus diberitahu agar melepaskan harapan itu. Para pemimpin Palestina sampai November 1988 takut memberitahukan kebenaran obyektif ini kepada saudara-saudaranya di pengungsian. Mereka akan memperlakukannya sebagai pengkhianat dan dari sudut pandangan mereka itu tepat. Seorang pemimpin Palestina harus mampu menantang *status quo* sambil mengakui kendala-kendala obyektif yang tidak dapat diubah secara realistik. Tetapi pendekatan konstruktif yang berangsur-angsur semacam itu akan dinilai sebagai sikap mengalah dan bahkan pengkhianatan.

Karena tiada tantangan semacam itu bagi rakyat Israel, mereka tetap melihat diri mereka terlibat dalam suatu perjuangan untuk *survival* dan percaya akan keadilan posisi mereka terhadap bangsa Palestina. Kebanyakan tidak melihat adanya suatu alternatif *status quo* pendudukan. Hal ini tidak mengusik katahati mereka karena sistem ganda atasan dan bawahan dilihat sebagai suatu keharusan politik demi keamanan nasional. Mereka tidak dipaksa memilih antara nilai-nilai patriotik dan nilai-nilai liberal demokrasi. Dihadapkan pada negativisme Palestina, segala alternatif penguasaan total tampak tak dapat diterima sampai rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza bangkit dan melancarkan suatu *intifadah* atau pemberontakan untuk melawan pendudukan. Dalam rangka itu pada 8 Desember 1987 mereka memulai suatu gelombang kerusuhan yang melumpuhkan kehidupan.

Tahap Baru Perlawanan Palestina

Gelombang kerusuhan yang melanda Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel itu merupakan suatu *tahap baru* dalam gerakan perlawanan Palestina. Kerusuhan itu mulai dengan reaksi berantai seperti biasanya. Pada hari itu sebuah truk militer menewaskan empat orang Arab di kota Gaza. Menurut tentara Israel itu adalah suatu kecelakaan di jalanan, tetapi orang-orang Palestina mengatakan bahwa hal itu disengaja, mungkin sebagai pembalasan penusukan seorang warga sipil Israel oleh seorang Arab. Demonstrasi-demonstrasi protes dilancarkan di Gaza maupun di Tepi Barat dan terjadilah bentrokan dengan pasukan-pasukan Israel yang berusaha membubarkannya. Maka jatuhlah banyak kor-

ban dan hal itu semakin mengobarkan perlawanan Palestina terhadap pendudukan Israel. Anak-anak belasan tahun keluar dari kamp-kamp pengungsi untuk menghadapi pasukan Israel. Mereka membuat rintangan-rintangan jalan dengan membakar ban-ban mobil dan melempari tentara Israel dengan batu. Mereka tidak takut mati.

Israel Menganggap Enteng

Beberapa hari setelah gelombang kekerasan itu mulai, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel, Jenderal Dan Shomron berusaha menenangkan rakyat Israel dengan mengatakan bahwa huru-hara itu akan berakhir dalam waktu beberapa hari. Kata-kata itu diulangi oleh PM Shamir dan Wakil PM Simon Peres dan sebulan kemudian oleh Menteri Pertahanan Yitzhak Rabin. Mereka semua ternyata salah. Mereka menganggap enteng apa yang berlangsung di kedua wilayah pendudukan itu. Sejak 1967 pendapat umum di Israel ialah bahwa perlawanan Palestina di wilayah-wilayah itu akan datang dalam gelombang-gelombang pendek dan bahwa Israel dapat menguasai wilayah-wilayah itu selama menginginkannya. Kerusuhan-kerusuhan sekarang ini dilihat sebagai akibat hasutan dari luar oleh pimpinan PLO atau agitasi dalam negeri oleh para aktivis PLO. Dengan menangkap para agitator dan mengusir beberapa di antara mereka dan dengan melaksanakan kebijaksanaan tangan besi untuk sementara waktu, kerusuhan dan demonstrasi-demonstrasi itu lambat-laun akan berakhir. Itulah perhitungan para penguasa Israel.

Kerusuhan Belum Berakhir

Akan tetapi kini setelah satu tahun lebih kerusuhan itu belum juga berakhir. Selain

itu beberapa orang pemimpin di Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang terkenal sebagai moderat di kalangan pendukung PLO berusaha melancarkan suatu kampanye *pembangkangan sipil* untuk memaksa Israel mengakhiri pendudukan atau memberi penduduk Arab-nya persamaan hak-hak politik dengan warga Israel. Dan kampanye yang dipimpin oleh wartawan senior Hanna Sini-ora itu tidak main-main.

Sementara itu Tentara Israel mengubah kebijaksanaannya menghadapi para perusuh. Mereka berusaha mengurung orang-orang Palestina di kamp-kamp dan kota-kota mereka dan memotong aliran air dan listrik dan pemasokan bahan makanan. Mereka juga mengenakan jam malam di tempat-tempat itu. Akan tetapi diragukan apakah tindakan-tindakan itu akan berhasil mematahkan perlawanan Palestina.

Pernyataan Perang

Gelombang kerusuhan itu adalah pernyataan simbolis perang saudara Israel-Palestina. Seharusnya para pemimpin Israel siap untuk menghadapinya. Para jenderal Israel memantau datangnya taufan itu. Seharusnya mereka sampai pada kesimpulan yang sama seperti para peneliti independen yang memperingatkan bahwa telah mulai suatu *tahap baru perlawanan Palestina*, suatu tahap yang bercirikan prakarsa rakyat setempat tanpa koordinasi yang diambil oleh orang-orang mudah marah yang tidak takut mati.

Tetapi jenderal-jenderal Israel itu menjadi tawanan gagasan usang bahwa sengketa Arab-Israel adalah suatu sengketa yang disulut dari luar. Secara demikian gelombang kerusuhan itu merupakan sesuatu yang *men-*

dadak bagi mereka. Desember 1987 merupakan Yom Kipur Israel yang kedua. Pada tahun 1973 mereka tidak mengira bahwa Mesir dan Suriah akan menyerang Israel. Demikian pun pada tahun 1987 mereka mengabaikan tanda-tanda bahwa akan terjadi suatu pemberontakan. Tetapi mereka belajar dengan cepat dan mengerahkan tentara sebagai pasukan keamanan dalam negeri untuk menumpas pemberontakan itu.

Unjuk Kekuatan Warga Arab-Israel

Kebijaksanaan tangan besi Israel itu membangkitkan rasa kesetiakawanan yang kuat di kalangan warga Arab-Israel. Pemogokan umum yang mereka lancarkan sebagai tanda simpati dengan saudara-saudara mereka di Tepi Barat dan Jalur Gaza adalah manifestasi impresif kekuatan masyarakat mereka yang berkembang selama 40 tahun hidup dalam negara Yahudi. Kekuatan itu tidak diarahkan untuk menghancurkan Israel tetapi untuk menuntut tempat mereka di dalamnya sebagai suatu minoritas nasional. Rakyat Arab-Israel menentukan 12 kursi dalam parlemen. Mereka memegang balans antara kedua partai politik Yahudi utama dan secara demikian mereka menentukan siapa akan membentuk kabinet. Dalam pemogokan bulan Desember itu mereka mengisyratkan kepada rakyat Yahudi Israel, bahwa Israel telah merupakan suatu negara *binasional* (dua bangsa), dan bahwa masalahnya tidak terbatas pada penentuan wilayah-wilayah yang diduduki Israel, tetapi melibatkan interaksi komunal Arab-Yahudi di seluruh negeri. Kombinasi tantangan para pengungsi dan rakyat Arab-Israel itu menunjukkan kepada mereka yang ingin melihat bahwa suatu minoritas tak berdaya bisa me-

upakan suatu tantangan bagi mayoritas yang kuat dan bahkan menentukan pilihannya.

Israel Menghindar

Para pemimpin dan masyarakat Israel lebih senang menganggap sepi tantangan itu dan menghindari soal yang sebenarnya dengan membatasi pemberontakan itu sebagai soal hukum dan tertib. Dan memang, pilihan Israel tak tertahankan. Mengakui legitimasi perjuangan Palestina dan melepaskan Tepi Barat serta Jalur Gaza akan membahayakan eksistensinya sendiri, sedangkan mengakui tuntutan Arab akan persamaan total akan berarti merongrong dasarnya sebagai suatu negara Yahudi.

Akan tetapi menghindar bukanlah suatu penyelesaian. Kedua masyarakat itu terlibat dalam suatu pertarungan sengit. Tantangan terhadap *status quo* pendudukan akan berlanjut dan keputusan-keputusan akan diambil karena Israel tidak berbuat apa-apa. Jika sengketa komunal Israel-Palestina itu menjadi tak tertahankan bagi rakyat Israel, mereka akan memilih pemerintah garis keras yang akan mengusir ratusan aktivis Palestina ke seberang Sungai Yordan dan hal itu akan mengganggu kestabilan pemerintah Yordania dan menciptakan Palestina di Yordania dan secara demikian menghidupkan kembali sengketa antar negaranya. Jika Israel, dengan kedok "pendudukan sementara," untuk waktu tak terbatas menolak hak-hak politik bagi rakyat Palestina, ia bukan lagi suatu negara demokrasi. Sekarang juga Israel harus memilih: mempertahankan sifat Yahudinya dengan melepaskan Tepi Barat dan Jalur Gaza atau melepaskan sifat demokrasi.

Titik-titik Terang

Beberapa pejabat dan ahli Amerika Serikat tentang Timur Tengah menemukan alasan untuk optimis dalam huru-hara sekarang ini. Sengketa Arab-Israel sejak lama mengalami jalan buntu. Boleh jadi huru-hara itu akan menerobos kemacetan itu. Paling tidak gelombang kerusuhan yang setelah satu tahun lebih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir menyadarkan semua pihak bahwa pendudukan Israel itu tidak dapat dipertahankan untuk selama-lamanya dan bahwa masalah Palestina harus sesegera mungkin diselesaikan secara politik. Pada gilirannya, hal itu memperkuat kelompok moderat pimpinan Yasser Arafat dalam tubuh PLO yang ingin mencari suatu penyelesaian politik dan dalam rangka itu bersedia untuk memperlunak tuntutan mereka dengan menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 yang secara tersirat mengakui hak hidup Israel.

Pada sidang Dewan Nasional Palestina -- yang berfungsi sebagai parlemen dalam pengasingan -- di Aljir pada 12-15 November 1988, kelompok moderat itu memperjuangkan suatu *siasat politik baru* yang menerima Resolusi 242 itu dan mengutuk terorisme. Terjadi perdebatan seru dengan kelompok radikal yang mempertahankan tujuan gerakan semula, yaitu membebaskan seluruh Palestina dengan meniadakan Israel. Akan tetapi sidang akhirnya menerima siasat politik baru itu. Diputuskan untuk memproklamasikan Negara Palestina yang akan hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Proklamasi Negara Palestina

Berdasarkan keputusan itu, pada 15 November 1988 Dewan Nasional Palestina me-

nyatakan berdirinya Negara Palestina di Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza dengan Yerusalem sebagai ibukota. Kejadian ini kita sambut dengan gembira, bukan saja karena kita menjunjung tinggi asas bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, tetapi juga karena hal itu merupakan suatu langkah menuju penyelesaian sengketa Arab-Israel secara damai berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338.

Hasil Sidang PNC

Proklamasi Kemerdekaan Palestina itu merupakan pelaksanaan salah satu Resolusi Sidang Dewan Nasional Palestina yang diadakan untuk membicarakan *intifadah* atau pemberontakan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang mulai pada 8 Desember 1987 dan masih berlangsung biarpun Israel berusaha keras untuk menumpasnya, dan apa yang perlu dilakukan untuk memantapkan hasilnya.

Siasat politik baru itu dituangkan dalam suatu *deklarasi politik* yang juga memuat *Naskah Proklamasi Negara Palestina* berikut: "Dengan ini Dewan Nasional Palestina atas nama Tuhan, atas nama bangsa Palestina dan atas nama bangsa Arab menyatakan berdirinya Negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibukotanya untuk semua orang Palestina di mana pun mereka berada." Selanjutnya dikatakan bahwa negara yang baru itu akan diperintah "dengan sistem demokrasi parlementer berdasarkan kebebasan pendapat, banyak partai, kebebasan beribadah dan hak-hak yang sama antara wanita dan pria."

Konperensi juga menyerukan diadanya konperensi internasional di bawah

naungan PBB untuk mengusahakan perdamaian Arab-Israel dengan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam sengketa termasuk PLO dengan kedudukan yang sama berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338 dan Resolusi-resolusi PBB yang berkaitan lainnya. Dalam konperensi itu juga akan dibicarakan dan ditetapkan perbatasan Negara Palestina.

Maksud Proklamasi

Proklamasi Kemerdekaan itu dimaksudkan sebagai suatu langkah menuju perdamaian, untuk memperbaiki citra PLO di Dunia Barat dan mendapatkan keuntungan politik yang baru. Negara Palestina yang diproklamasikan itu tidak lagi menuntut seluruh Palestina seperti ditegaskan dalam Piagam Nasional Palestina tahun 1964, melainkan sebuah negara yang bermaksud hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Hal itu berarti bahwa Negara Palestina bukanlah ancaman bagi Israel seperti dikatakan Israel dan negara-negara Barat pendukungnya. Pada gilirannya itu berarti bahwa PLO telah menjadi *moderat* dan oleh sebab itu perjuangannya untuk mendapatkan hak-hak nasional bangsa Palestina perlu mendapat simpati dan dukungan semua negara termasuk negara-negara yang mendukung Israel.

Realisme Positif

Dengan demikian tindakan PNC itu adalah suatu tindakan yang mencerminkan sikap moderat yang *realistis* dalam arti bahwa PNC menerima kenyataan-kenyataan dan berusaha mengkomodasinya. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan mampu

mendapatkan kembali seluruh Palestina dan dalam rangka itu menghancurkan Israel, bukan saja karena keunggulan militernya melainkan juga karena komitmen Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Baratnya akan keamanan negara itu. Mereka juga menyadari bahwa Israel adalah sebuah negara anggota PBB. Berdasarkan kesadaran itu PNC tidak lagi bermaksud mewujudkan suatu Negara Palestina yang *menggantikan* Israel, tetapi suatu negara yang lebih kecil di samping Israel.

Mereka juga menyadari bahwa hanya Amerika Serikat mampu membuat Israel angkat kaki dari wilayah-wilayah Arab yang didudukinya sejak 1967, apalagi Amerika telah menegaskan tidak akan membiarkan Israel mencaplok wilayah-wilayah itu. Lebih dari itu Amerika Serikat telah berjanji lewat Raja Hussein bahwa "bila telah jelas diumumkan bahwa PLO telah menerima Resolusi No. 242 dan 338, bersedia berunding dengan Israel dan menolak terorisme, Amerika Serikat menerima fakta bahwa sebuah undangan akan disampaikan kepada PLO untuk menghadiri suatu konperensi internasional." Janji itu diberikan dalam sebuah jawaban tertulis tanggal 25 Januari 1986. Hal itu ikut mempengaruhi keputusan PNC untuk menerima Resolusi-resolusi PBB itu dan mengutuk terorisme.

Uni Soviet juga ikut memainkan perannya. Sesuai dengan garis baru yang dianut negara itu dalam politik luar negerinya di bawah Gorbachev, para pemimpin Soviet berulang kali memberi nasihat kepada Yasser Arafat agar memperlunak sikapnya dan mengakui Israel dengan menerima Resolusi No. 242 tersebut.¹ Karena bergantung pada Uni Soviet untuk persenjataan dan dukung-

an politik, PLO tidak dapat mengabaikan nasihat Soviet itu.

Tindakan Bijaksana

Proklamasi Negara Palestina di samping Israel itu juga merupakan suatu tindakan *bijaksana* karena dapat menggerakkan suatu perkembangan menuju perwujudan cita-cita bangsa Palestina untuk menguasai sebagian tanah airnya dan hidup sebagai suatu bangsa yang merdeka, biarpun hal itu masih memerlukan perjuangan yang lama. Berdirinya Negara Palestina di sebagian wilayah Palestina akan mengakhiri *keadaan tak punya negara (stateless)* jutaan warga Palestina yang tersebar di banyak negara. Hanya di Yordania rakyat Palestina diberi kewarganegaraan. Di negara-negara lainnya mereka adalah orang asing tanpa negara. Diperkirakan bahwa hanya sebagian kecil akan kembali ke tanah air mereka. Kebanyakan akan tetap tinggal di negara-negara di mana mereka telah berhasil membangun kehidupan yang baik sebagai guru, perawat, dokter, pengacara, konsultan atau pegawai negeri. Seperti kita ketahui, tingkat pendidikan warga Palestina termasuk yang paling tinggi di dunia Arab.

Negara Palestina

Wilayah Negara Palestina adalah sebagian Palestina yang meliputi Tepi Barat dan Jalur Gaza, tetapi belumlah jelas berapa luasnya karena soal perbatasan akan dibicarakan dan ditetapkan dalam konperensi perdamaian kelak. Kedua wilayah itu sendiri adalah seluas 5.808 km² dan penduduknya sekitar 1.320.000 jiwa, yaitu 800.000 di Tepi Barat dan 532.000 di Jalur Gaza. Tetapi negara itu dimaksud untuk semua orang Palestina di mana pun mereka berada. Se-

¹Lihat karangan dalam *Suara Karya*, 12 Juli 1988.

perti dapat dilihat pada Tabel, bangsa Palestina kini hampir lima juta orang dan tersebar di banyak negara.

BANGSA PALESTINA TERSEBAR

Negeri	Jumlah
Yordania	1.200.000
Israel	620.000
Tepi Barat	800.000
Jalur Gaza	520.000
Kuwait	400.000
Libanon	350.000
Arab Saudi	250.000
Suriah	210.000
Irak	95.000
Mesir	60.000
Libia	60.000
Negeri-negeri Lain	120.000
Jumlah	4.700.000

Sumber: *The Economist*, 21 Februari 1987.

Untuk sementara waktu sampai diadakan pemilihan umum, PNC berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, Komite Sentral sebagai Senat dan Komite Eksekutif sebagai pemerintah, sedangkan Aljir dipilih sebagai pusat pemerintahan. Komite Eksekutif di bawah pimpinan Yasser Arafat dikuasakan untuk ikut dalam perundingan-perundingan dalam konperensi perdamaian internasional. Perwakilan PLO di luar negeri akan ditingkatkan menjadi kedutaan besar.

Masalah-masalah

Proklamasi Kemerdekaan Palestina itu disambut dengan gembira bukan saja oleh

warga Palestina di mana pun mereka berada tetapi juga oleh kebanyakan negara Arab dan negara-negara lain termasuk Indonesia, India, Bangladesh dan Malaysia. Tetapi negara-negara Barat umumnya tidak begitu senang. Inggris misalnya menganggapnya prematur atau belum waktunya. Demikianpun Amerika Serikat belum bersedia untuk mengakuinya biarpun melihat banyak segi positif dalam Deklarasi Politik tersebut. Washington baru akan mengambil sikap yang tegas setelah mempelajari dokumen itu dengan seksama. Sebelumnya PLO sudah berulang kali mengatakan menerima Resolusi No. 242 dan 338, tetapi menambahkan resolusi-resolusi lain sehingga tidaklah jelas apa yang dimaksud.

Lebih buruk lagi, Israel dengan tegas menolaknya dan mengerahkan lebih banyak tentara untuk menegaskan kekuasaannya atas kedua wilayah itu. Israel tidak akan memberikan kemerdekaan kepadanya dan menyerahkannya kepada PLO kecuali kalau mendapat tekanan seperlunya dari Amerika Serikat. Perlawanan Israel itulah kiranya hambatan utama terhadap berfungsinya Negara Palestina. Tidak peduli pengakuan banyak negara, kalau Israel menolaknya ia tidak lengkap. Menurut hukum internasional, suatu negara bukan saja memerlukan wilayah dan penduduk serta pemerintah, melainkan juga kekuasaan atas wilayah itu dan kedaulatan.

Amerika Serikat Memegang Kuncinya

Amerika Serikat satu-satunya negara yang dapat membuat Israel angkat kaki dari wilayah-wilayah yang didudukinya itu. Hal ini disadari oleh negara-negara Arab dan PLO itu sendiri. Kenyataannya, Deklarasi

Politik PNC tersebut di atas juga dimaksud untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Amerika Serikat untuk mengakui PLO sebagai pihak sengketa Arab-Israel dan mengikutsertakannya dalam konperensi perdamaian. Dalam Deklarasi itu PNC menyatakan menerima Resolusi No. 242 dan 338 sebagai landasan perundingan perdamaian dan mengutuk terorisme baik perorangan maupun negara. Seperti kita lihat di atas, Amerika Serikat telah berjanji secara tertulis akan mengakui PLO dan mengikutsertakannya dalam perundingan perdamaian bila PLO melakukan kedua hal itu. Sekarang PLO menagih janji itu.

Hal itu menempatkan Amerika Serikat dalam kesulitan. Pada saat itu Amerika Serikat belum tahu apa yang harus dilakukannya dan oleh sebab itu belum dapat mengambil sikap yang tegas. Di satu pihak ia mengatakan bahwa Deklarasi Politik PNC itu mengandung *segi-segi positif*, tetapi di lain pihak ia memandang Proklamasi Kemerdekaan Palestina itu sebagai suatu aksi *sepihak* padahal itu menyangkut dua pihak dan oleh sebab itu harus dibicarakan lebih dahulu. Karena tidak dapat mengabaikan segi-segi positif itu, ia mengatakan baru akan mengambil sikap yang tegas setelah mempelajari dokumennya. Ternyata bahwa dalam dokumen itu PLO belum memenuhi syarat-syarat yang diajukan Amerika Serikat. Amerika Serikat khususnya berkeberatan dengan resolusi yang menyamakan zionisme dengan rasialisme. Pernyataan Yasser Arafat pada sidang Majelis Umum di Jenewa pada 13 Desember juga dianggapnya kurang memadai. Untuk diakui sebagai pihak sengketa dan peserta dalam perundingan perdamaian Arab-Israel, PLO harus maju selangkah lagi dengan mengakui Israel secara eksplisit dan menolak terorisme.

Belajar dari penolakan Amerika Serikat itu, Yasser Arafat pada 14 Desember membuat pernyataan yang *eksplisit* seperti diminta oleh Washington. Ia menegaskan bahwa ia "secara total dan mutlak menolak terorisme kelompok maupun individual" dan bahwa "penentuan nasib sendiri Palestina tidak berarti penghancuran Israel." Hal itu dilakukannya dalam suatu konperensi pers yang dipantau Amerika Serikat dengan cermat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat George Shultz akhirnya menganggap pernyataan itu memadai dan Presiden Reagan membuat pernyataan sebagai berikut:

Ketiga hal itulah yang telah lama menjadi syarat yang kami ajukan. Dan mereka (PLO) telah memenuhinya. Oleh karena itu saya telah memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk bersiap mengadakan dialog langsung dengan para wakil PLO.

Amerika Serikat Membuka Dialog dengan PLO

Akhirnya terjadi juga perubahan dalam kebijaksanaan Amerika Serikat terhadap PLO. Pada 14 Desember 1988 Presiden Reagan memutuskan bahwa Amerika Serikat akan memulai dialog yang sungguh-sungguh dengan PLO sebagai langkah penting dalam proses perdamaian. Keputusan itu merupakan jawaban atas pernyataan Pemimpin PLO Yasser Arafat beberapa saat sebelumnya yang dengan tegas mengakui eksistensi Israel, menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338 dan menolak terorisme secara total dan mutlak. Keputusan itu dapat disambut dengan gembira karena merupakan suatu titik-balik dalam usaha perdamaian Arab-Israel.

Amerika Serikat Memenuhi Janjinya

Keputusan Presiden Reagan untuk membuka suatu dialog yang sungguh-sungguh dengan PLO itu berarti bahwa Amerika Serikat memegang janji yang telah diberikan kepadanya, guna mencari suatu penyelesaian yang menyeluruh bagi sengketa Arab-Israel.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keputusan Amerika Serikat itu merupakan suatu *tanggapan positif atas perubahan sikap PLO dari keras menjadi moderat*. Perubahan sikap itu terjadi secara berangsur-angsur.

Seperti ditegaskan oleh Menlu Amerika Serikat George Shultz dalam konperensi pers yang diadakannya untuk mengumumkan keputusan Amerika Serikat, dialog yang akan diadakan dengan PLO itu dimaksud sebagai langkah menuju perdamaian Arab-Israel yang menyeluruh. Dengan kata lain, Amerika Serikat bersedia membuka dialog itu dalam rangka usaha perdamaian. Sehubungan dengan itu ia mengatakan bahwa hal itu tidak berarti bahwa Amerika Serikat mengakui Negara Palestina yang berdirinya dinyatakan PNC pada 16 November yang lalu. Baginya status Tepi Barat dan Jalur Gaza merupakan soal bilateral yang harus dibicarakan dan diputuskan dalam perundingan perdamaian. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa dialog Amerika Serikat-PLO itu akan disusul langkah-langkah menuju diadakannya konperensi perdamaian di mana Israel dan negara-negara Arab yang bersangkutan dan PLO akan mengadakan perundingan menuju penyelesaian sengketa Arab-Israel yang menyeluruh.

Memperkuat Kelompok Moderat PLO

Keputusan Amerika Serikat untuk membuka dialog dengan PLO itu memperkuat kelompok moderat pimpinan Yasser Arafat, khususnya karena membuktikan bahwa garis moderat yang dianutnya adalah tepat dan akan mendatangkan hasil yang diharapkan berupa pengembalian wilayah-wilayah Arab yang diduduki Israel sejak 1967 sehingga Negara Palestina dapat menguasainya dan menegaskan kedaulatannya. Secara demikian Yasser Arafat mendapat dukungan kuat untuk meneruskan kebijaksanaannya sampai tujuannya tercapai, yaitu Negara Palestina di samping Israel.

Tindakan Yasser Arafat untuk mengakui Israel dan menolak terorisme memang ditentang beberapa kelompok radikal yang kecil dalam tubuh PLO, termasuk PFLP pimpinan George Habash, PFLP-General Command pimpinan Ahmed Jibril, Al-Saiqa, kelompok Abu Nidal dan kelompok Abu Mussa, tetapi mereka merupakan minoritas, sedangkan mayoritas dan rakyat Palestina terutama di Tepi Barat dan Jalur Gaza menyambutnya dengan baik, terutama setelah Amerika Serikat mengakui PLO dan membuka dialog dengannya.

Mengamankan Kepentingan Amerika Serikat

Kebanyakan negara Arab juga menyambut keputusan Amerika Serikat itu dengan gembira, terutama negara-negara moderat yang sejak lama mendesak Amerika Serikat untuk mengakui PLO seperti Mesir, Yordania, Maroko, Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Mereka percaya bahwa de-

ngan keputusan itu salah satu hambatan pokok usaha perdamaian Arab-Israel disingkirkan. Mereka yakin ikut memainkan peranan dalam pengambilan keputusan itu. Khususnya Presiden Hosni Mubarak telah banyak berjasa untuk membujuk Yasser Arafat untuk mengambil sikap lunak dalam rangka mendapatkan pengakuan Amerika Serikat. Sebelum sidang Majelis Umum di Jenewa, ia mendesaknya agar tetap moderat dan tidak terpancing oleh tindakan Amerika Serikat menolak memberikan visa kepadanya. Sebagai akibat keputusan Amerika Serikat itu, kedudukan Amerika Serikat di Dunia Arab menjadi lebih baik dan kepentingan-kepentingannya di kawasan itu lebih terjamin. Pada gilirannya hal itu akan mendorong Amerika Serikat untuk meneruskan usaha perdamaannya.

Momentum Usaha Perdamaian

Dengan dibukanya dialog antara Amerika Serikat dan PLO itu, usaha perdamaian Arab-Israel yang sejak beberapa waktu mengalami kemacetan mendapat *momentum baru*. Majelis Umum PBB yang sedang mengadakan sidang khusus di Jenewa untuk membicarakan masalah Palestina menyambut baik keputusan Amerika Serikat itu dan mengambil langkah-langkah untuk memperlancar proses perdamaannya. Sekjen PBB menilainya sebagai *titik balik yang bersejarah* dan mengusahakan agar tindakan itu disusul dengan diadakannya suatu konferensi perdamaian internasional di bawah naungan PBB.

Pada 15 Desember 1988 Majelis Umum menerima dua resolusi mengenai masalah Palestina. Yang pertama menyerukan diadakannya konferensi perdamaian interna-

sional di bawah naungan PBB dengan partisipasi semua pihak sengketa, termasuk PLO, berdasarkan persamaan dan kelima anggota tetap Dewan Keamanan atas dasar Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338 dan hak-hak nasional bangsa Palestina yang sah, terutama hak atas penentuan nasib sendiri. Resolusi yang kedua mengakui Proklamasi Negara Palestina oleh PNC pada 15 November 1988, mengukuhkan perlunya memungkinkan bangsa Palestina melaksanakan kedaulatannya atas wilayah mereka yang diduduki sejak 1967 dan memutuskan bahwa mulai 15 Desember 1988 sebutan "Palestina" harus digunakan sebagai ganti sebutan "PLO" dalam sistem PBB tanpa mengubah status dan fungsi peninjau PLO dalam sistem PBB. Sekjen PBB diminta untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melaksanakan resolusi-resolusi itu.

Konferensi Perdamaian

Sesuai dengan itu, Sekjen PBB kiranya akan segera mulai usahanya mempersiapkan konferensi perdamaian internasional mengenai Timur Tengah dan dalam rangka itu membentuk suatu komite persiapan serta memikirkan jaminan-jaminan keamanan bagi negara-negara kawasan dengan mengadakan konsultasi dengan Dewan Keamanan. Ia akan menetapkan tempat dan tanggalnya dan menyampaikan undangan kepada pihak-pihak dan kelima anggota tetap Dewan Keamanan.

Dalam usahanya itu ia kiranya tidak akan menemui kesulitan dari PLO dan negara-negara Arab yang bersangkutan karena konferensi perdamaian internasional semacam itu adalah tuntutan mereka. Israel-lah yang akan menghambatnya. PM Shamir telah berulang kali menentang gagasan itu.

Pemimpin itu juga mengecam keputusan Amerika Serikat untuk membuka dialog dengan PLO sebagai suatu kesalahan besar. Menurut pendapatnya Amerika Serikat tidak mengenal siapa PLO itu sebenarnya. Baginya pernyataan Yasser Arafat itu suatu penipuan yang monumental. Kenyataannya Dewan Nasional Palestina tetap berpegangan pada Piagam Nasional Palestina tahun 1964 yang bertekad untuk melenyapkan Israel. Oleh sebab itu pemerintah Israel tidak percaya bahwa PLO telah menjadi moderat dan puas dengan sebuah negara di samping Israel.

Akan tetapi Israel akan mendapat tekanan yang semakin berat bukan saja dari PBB dan banyak negara anggotanya, melainkan juga dari negara-negara pendukungnya termasuk Amerika Serikat. Setelah membuka dialog dengan PLO, Amerika Serikat akan menggunakan segala cara untuk meyakinkan Israel agar juga mengakui PLO dan ikutserta dalam konperensi perdamaian internasional yang disponsori PBB di mana ia dapat mengadakan perundingan-perundingan bilateral dengan negara-negara Arab yang bersangkutan dan PLO. Negara adidaya itu mempunyai kemampuan untuk membuat Israel menerima konperensi perdamaian internasional semacam itu dan bila perlu akan menggunakannya karena yakin bahwa perdamaian Arab-Israel yang menyeluruh akan menjamin keamanan eksistensi Israel maupun kepentingan-kepentingannya sendiri.

Menuju Perundingan Perdamaian Israel-Palestina

Seperti telah dikemukakan sebelumnya pemerintah Israel yang dibentuk PM Shamir pada 22 Desember 1988 sejauh ini menolak

ajakan pemimpin PLO Yasser Arafat untuk merundingkan perdamaian di bawah naungan PBB, akan tetapi di bawah tekanan dalam dan luar negeri yang semakin meningkat, cepat atau lambat Israel akan mengubah sikapnya dan bersedia untuk menerima konperensi perdamaian internasional seperti diserukan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusinya tanggal 15 Desember 1988.

Pemerintah Baru Israel

Keputusan Amerika Serikat membuka dialog dengan PLO bukan saja mengejutkan para pemimpin Israel tetapi juga mendorong PM Shamir, yang ditunjuk untuk membentuk pemerintah baru berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1 November 1988, untuk memberikan konsesi-konsesi yang dituntut Partai Buruh pimpinan Shimon Peres sebagai syarat untuk berkoalisi. Pada 21 Desember 1988 Partai Likud dan Partai Buruh menandatangani suatu *perjanjian koalisi* dan hari berikutnya parlemen mengesahkan kabinet persatuan nasional yang dibentuk PM Shamir.

Berbeda dengan kabinet sebelumnya, jabatan perdana menteri tidak digilir antara Peres dan Shamir, tetapi dipegang oleh Shamir selama 4 tahun. Akan tetapi selebihnya kedua partai itu mempunyai *kedudukan yang sama* seperti dituntut oleh Partai Buruh. Masing-masing mempunyai 11 menteri termasuk 2 menteri tanpa portofolio, sedangkan Partai Shas mempunyai 2 menteri. Simon Peres menjadi Wakil PM dan merangkap sebagai menteri keuangan, sedangkan David Levy (Likud) menjadi Wakil PM yang lain. Yitzhak Rabin tetap sebagai Menteri Pertahanan dan Moshe Arens (Likud) mengambilah kementerian luar ne-

geri menggantikan Simon Peres. Yang pantas dicatat ialah duduknya dua tokoh Partai Buruh yang sebelumnya telah mendesak pemerintah agar mengadakan perundingan dengan PLO setelah AS mengambil keputusan tersebut di atas.

Dua Usul Perundingan Perdamaian

Pemerintah baru ini dapat disebut pemerintah persatuan nasional seperti pemerintah sebelumnya, tetapi jelas condong ke kanan. Dalam perjanjian koalisi dibatasi langkah-langkah Israel menuju perdamaian. Kedua partai dengan tegas *menolak usul perundingan* perdamaian yang disampaikan Yasser Arafat dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada 12 Desember 1988 dan menandakan bahwa pemerintah Israel tidak akan berunding dengan PLO. Sebagai gantinya, perjanjian itu mengulangi seruan lama Likud agar diadakan perundingan dengan negara-negara tetangga Israel seperti Yordania, Suriah dan Mesir, dan mengambilalih tawaran Partai Buruh untuk mengikutsertakan orang-orang Palestina non-PLO yang tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza. "Kita harus berbuat segala sesuatu untuk mengatakan kepada Amerika Serikat, Uni Soviet, Eropa dan negara-negara Arab bahwa dalam saat sulit ini rakyat Israel bersatu dan membentuk satu pemerintah," kata PM Shamir.²

Dengan demikian Pemerintah Baru Israel juga menginginkan perdamaian, tetapi mengusahakan agar usaha perdamaiannya dilakukan dalam rangka *pelaksanaan Perse-tujuan Camp David*. Sebagai transisi, rakyat Tepi Barat dan Jalur Gaza akan diberi otonomi selama 5 tahun dan dalam kurun waktu itu diadakan perundingan mengenai

status final kedua wilayah pendudukan itu. Akan tetapi Israel menolak PLO sebagai peserta. Rakyat kedua wilayah pendudukan itu dapat diwakili oleh orang-orang Palestina yang bukan PLO. Baik PLO maupun negara-negara yang bersangkutan langsung menolak *usul tandingan Israel* itu. Mereka tetap menuntut agar diadakan konperensi perdamaian internasional dengan peserta pihak-pihak sengketa termasuk PLO dan kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti diserukan Resolusi Majelis Umum tersebut di atas.

Tekanan Atas Israel Meningkat

Sepintas lalu semuanya itu berarti bahwa usaha perdamaian Arab-Israel akan tetap macet. Akan tetapi terjadi suatu perkembangan yang memberikan harapan. Israel mendapat *tekanan dalam maupun luar negeri yang semakin meningkat* agar mengadakan perundingan dengan PLO setelah organisasi ini memperlunak sikapnya dan secara tegas menerima hak hidup Israel, menolak terorisme dan menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338 sebagai dasar perundingan untuk menyelesaikan sengketa Arab-Israel secara menyeluruh. Pemerintah Israel mendapat tekanan itu bukan saja dari PBB, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konperensi Islam dan Liga Arab, melainkan juga dari negara-negara yang selama ini dengan gigih mendukung Israel, khususnya Amerika Serikat yang selalu di pihaknya dan memberikan bantuan sekitar US\$3 milyar per tahun. Desakan itu juga datang dari para pemimpin Yahudi di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Dalih Israel bahwa PLO dan Negara Palestina merupakan ancaman bagi eksistensi dan keamanannya telah gugur.

²*Newsweek*, 2 Januari 1989.

Tekanan Dalam Negeri

Lebih penting lagi, tekanan itu juga datang dari *dalam negeri Israel sendiri*. Semakin banyak warga Israel mendesak pemerintah mereka agar mengadakan perundingan dengan PLO menuju perdamaian. Menurut pengumpulan pendapat yang dilakukan oleh Institut Dahaf yang diterbitkan dalam koran terbesar Israel *Yedioth Ahronoth*, 54% warga Israel Yahudi mendukung perundingan Israel-PLO semacam itu, 44% menentangnya dan 2% tidak mempunyai pendapat. Dengan demikian mayoritas rakyat Israel mendukung perundingan itu.³

Di antara para pendukung perundingan dengan PLO itu terdapat *orang-orang yang berpengaruh*. Lebih dari 100 jenderal cadangan Israel yang tergabung dalam *Dewan Perdamaian dan Keamanan*, suatu kelompok jenderal purnawirawan Israel, berpendapat bahwa perdamaian adalah aset keamanan yang besar dan pantas dibeli dengan tanah. Mereka menolak pandangan pemerintah bahwa wilayah-wilayah pendudukan diperlukan untuk menopang keamanan Israel. Kata mereka, wilayah-wilayah itu kini justru merupakan hal yang merugikan dan oleh sebab itu *sebaiknya dilepaskan demi perdamaian*.

Jenderal purnawirawan Ori Orr, yang pada tahun 1985 memimpin penarikan pasukan Israel dari Beirut menegaskan: "Masalah strategi pokok kita adalah bahwa rakyat Palestina yang diduduki -- dalam waktu dua tahun mereka akan berjumlah 2 juta orang -- tidak mau diperintah oleh kita." Ia memperingatkan bahwa "jika kita meneruskan pendudukan, negara-negara Arab sepuluh tahun lagi akan mulai perang baru melawan kita. Tetapi terlepas dari apa

yang bisa dilakukan orang-orang Arab, tugas menguasai wilayah-wilayah itu begitu berat dan mengalihkan perhatian sehingga kita tidak mampu memusatkan perhatian kita pada masalah-masalah kita yang lebih serius. Kita cenderung melupakan bahwa kita hanya suatu negara Dunia Ketiga yang kecil dalam proses pembangunan. Kalau kita melakukan tekanan terlalu berat pada 3,5 juta orang Yahudi Israel, sistem demokrasi kita akan runtuh."

Di kalangan militer Israel, pandangan Ori Orr itu dianut banyak perwira senior yang masih aktif dalam tingkat yang berbeda-beda. Menurut Brigjen (purnawirawan) Ephraim Sneh, mantan Administrator Tepi Barat, "Kebanyakan perwira senior, dari (Kastaf Dan) Shomron ke bawah, akan lebih senang dengan penarikan parsial dari Tepi Barat yang bebas militer daripada dengan gagasan Israel Raya (PM) Shamir. Ini adalah soal analisis keamanan yang jujur. ... Tiga pesawat intai AWACS akan memberi kita peringatan awal yang lebih baik daripada posisi-posisi kita di pegunungan Tepi Barat."⁴

Mengenai hal itu seorang komentator militer terkemuka Israel mengatakan: "Para politisi bertindak seolah-olah IDF (Angkatan Pertahanan Israel) bisa menyelesaikan semua masalah Israel. Sekarang para jenderal purnawirawan kita secara terang-terangan memperingatkan mereka: "Jangan menipu diri anda sendiri. Masalah-masalahnya lebih buruk dari perkiraan anda, dan anda harus melakukan bagian anda."

Lebih dari itu *dua orang tokoh Partai Buruh* yang duduk dalam kabinet sekarang ini maupun sebelumnya, yaitu Ezer Weismann dan Jenderal Purnawirawan Motta

³Lihat *Jakarta Post*, 23 Desember 1988.

⁴*Newsweek*, 6 Juni 1988.

Gur, telah mendesak PM Shamir untuk berunding dengan PLO. Mereka menyuarakan pendapat mereka itu setiap kali ada kesempatan. Kehadiran mereka dalam kabinet pasti akan mempunyai *pengaruh yang positif*. Walaupun PM Shamir sejauh ini dengan tegas menolak PLO, di bawah tekanan-tekanan itu ia kiranya akan berubah jika PLO bisa mendukung pernyataan komprominya dengan tindakan-tindakan nyata. Bila PLO memenuhi janjinya untuk *menghentikan terorismenya* selama katakan 6 bulan, hal itu bisa meyakinkan Pemerintah Israel bahwa Yasser Arafat *jujur* dalam pernyataannya bahwa PLO mengakui hak hidup Israel dan bisa diajak berunding. Pada saat itu Amerika Serikat bisa menggunakan pengaruhnya untuk mendorong Israel ke meja perundingan dalam konferensi perdamaian internasional yang disponsori PBB.

Pemilihan Umum Baru

Kalau PM Shamir dan partainya tetap pada sikap kerasnya itu, maka akan terjadi perpecahan parah dalam kabinetnya. Partai Buruh akan keluar dari pemerintah sehingga harus diadakan *pemilihan umum baru* sesuai dengan salah satu perjanjian koalisi. Dapat dipastikan bahwa partai itu akan keluar sebagai pemenang karena, seperti kita lihat di atas, mayoritas 54% rakyat Israel mendukung perundingan perdamaian dengan PLO yang telah menjadi moderat itu. Pemerintah baru yang akan dibentuk Partai Buruh sendiri atau dengan partai-partai kecil lain yang sealian akan menerima konferensi internasional yang disponsori PBB dan mengadakan perundingan perdamaian dengan negara-negara Arab tetangganya dan PLO/Palestina menuju penyelesaian sengketa Arab-Israel secara menyeluruh.

Mungkin pemilihan umum yang baru itu tidak perlu diadakan karena Partai Likud juga tahu bahwa Partai Buruh akan menang. Prospek itu mungkin sudah cukup untuk membuat PM Shamir dan partainya memperlunak sikapnya dan bersedia untuk berunding dengan PLO/Palestina dalam konferensi internasional tersebut dan secara demikian ikut menentukan hasilnya.

Penutup

Bagaimana pun, dengan atau tanpa pemilihan umum yang baru, di bawah meningkatnya tekanan dalam dan luar negeri Pemerintah Israel akan memperlunak sikapnya dan mengadakan perundingan dengan PLO/Palestina dalam konferensi perdamaian internasional seperti diserukan oleh Majelis Umum PBB tersebut. Kemungkinan besar konferensi itu akan dibuka tahun ini.

Kedua negara adidaya sudah sepakat bahwa sengketa Arab-Israel harus sesegera mungkin diselesaikan karena berlanjutnya sengketa itu mempersulit usaha untuk memperbaiki hubungan antara mereka. Mengingat isu-isunya, perundingan akan alot dan makan waktu tetapi akan mencapai kemajuan-kemajuan berkat momentum yang diciptakannya dan pengaruh Amerika Serikat di satu pihak dan Uni Soviet di pihak lain, sampai pada akhirnya dicapai suatu penyelesaian yang menyeluruh, termasuk berdirinya Negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

DAFTAR BACAAN

- "Arafat's Peace Offensive." *Newsweek*, 19 Desember 1988.
- "Arafat Waits for Take Off." *Economist*, 3 Desember 1988. Karena Amerika Serikat menolak visa baginya, Arafat mendapat lebih banyak dukungan di PBB dan Eropa Barat.
- Binder, Leonard. "The Changing American Role in the Middle East." *Current History* (Februari 1989).
- "Dealing with Arafat." *Newsweek*, 2 Januari 1989. Menlu Shultz membuat Arafat menerima syarat Amerika Serikat dan Amerika Serikat membuka dialog dengan PLO.
- "One Step Closer to a Homeland?" *Newsweek*, 2 Januari 1989.
- "A Generals' Revolt. Israeli Officers Argue, the West Bank is a Liability." *Newsweek*, 6 Juni 1988. Sebaiknya Tepi Barat dilepaskan.
- Gilmour, David and Harper, Paul. "The Arab-Israeli Confrontation 1967-1984." *The Middle East and North Africa* (London, 1984).
- Dipoyudo, Kirdi. *Timur Tengah dalam Pergolakan* (Jakarta: CSIS, 1982).
- Dipoyudo, Kirdi. *Timur Tengah Pusaran Strategis Dunia* (Jakarta: CSIS, 1981).
- Hudson, Michael C. "The Palestinians after Lebanon." *Current History* (Januari 1989).
- Hunter, Robert A. "Seeking Middle East Peace." *Foreign Policy*, No. 73 (Winter 1988-1989).
- "Israeli Leaders React with Anger and Dismay to US' Decision." *Indonesia Times*, 17 Desember 1988.
- "Israeli's No the PLO." *Time*, 2 Januari 1989.
- Khalidi, Walid. "The Palestinian Dilemma after Lebanon." *Journal of Palestine Studies* (Summer 1985).
- Lederman, Jim. "Dateline West Bank: Interpreting the Intifada." *Foreign Policy*, No. 72 (Fall 1988).
- "Mengapa Arafat Mengakui Israel?" *Tempo*, 17 Desember 1988.
- Miller, Aaron David. "Palestinians and the Intifada: One Year Later." *Current History* (Februari 1989).
- "Palestine. The Birth of a Phantom State." *Economist*, 19 November 1988.
- Peretz, Don. "The Intifadeh: The Palestinian Uprising." *Foreign Affairs* (Summer 1988).
- Plascov, Avi. "The Palestinian Predicament after Camp David." *The World Today* (Desember 1978).
- "The Religious Right." *Newsweek*, 14 November 1988. Tentang hasil Pemilu di Israel pada 1 November 1988.
- "Three Who Played Crucial Role of Middlemen." *Sunday Times*, 18 Desember 1988. Yang dimaksud adalah Raja Fahd, Presiden Mubarak dan Menlu Swedia Andersson.

Pangsa Pasar dan Pengembangan Ekspor Non-Migas Indonesia ke Jepang

Rustian KAMALUDDIN

SEJAK PELITA IV, sebagai akibat kemerosotan harga migas, kesulitan dana pembangunan dan masalah beban utang luar negeri, pemerintah telah mengambil berbagai kebijaksanaan penyesuaian ekonomi.

Berbagai kebijaksanaan penyesuaian itu terutama bertujuan meningkatkan daya saing komoditi ekspor non-migas dan peningkatan devisa hasil ekspor, di samping merangsang penanaman modal, khususnya modal asing. Dengan demikian terdapat kecenderungan pemerintah untuk menempuh arah strategi dan kebijaksanaan industrialisasi yang lebih berorientasi ke luar (*outward looking*). Namun demikian, kebijaksanaan orientasi ekspor, khususnya ekspor non-migas, seringkali mengalami berbagai hambatan dan kesulitan di pasar luar negeri. Hal ini antara lain disebabkan lemahnya daya saing komoditi kita, kelesuan ekonomi dunia dan melemahnya harga komoditi ekspor, kebijaksanaan protektif negara-negara industri dan sebagainya.

Dalam perdagangan luar negeri, mitra

dagang Indonesia yang utama dari yang terbesar berturut-turut adalah Jepang, Amerika Serikat, Jerman Barat, Perancis, Inggris, dan seterusnya. Sebagai ilustrasi nilai ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 1986 adalah US\$6.644,1 juta atau 44,9% dan pada tahun 1987 meningkat menjadi US\$7.373,3 juta atau 43,1% dari jumlah seluruh ekspor Indonesia. Namun demikian pada tahun 1986 dari total ekspor ke Jepang itu hanya sebesar 18,7% saja yang merupakan ekspor non-migas. Pada tahun 1987 ekspor non-migas itu meningkat menjadi 24,7% dari total ekspor ke Jepang. Dengan demikian peranan ekspor non-migas Indonesia ke Jepang relatif masih rendah, sungguhpun telah ada kecenderungan peningkatannya.

Dari data-data IMF, *Direction of Trade Statistics Yearbook 1988*, dapat diketahui bahwa secara totalitas pangsa pasar (*market share*) dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang dalam periode 1981-1987 rata-rata hanya sebesar 2,02% dari nilai impor Jepang.

Karena relatif masih rendahnya nilai ekspor non-migas Indonesia ke Jepang, walau-

Tabel 1

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA-JEPANG, 1981-1987
(Nilai US\$ Juta)

Tahun	Ekspor ke Jepang (X) ^a	Impor dari Jepang (M) ^b	Neraca Perdagangan (X-M)	Transaksi Perdagangan (X + M)
1981	13.305,3	4.122,8	+ 9.182,5	17.428,1
1982	12.005,0	4.260,6	+ 7.744,4	16.265,6
1983	10.432,3	3.552,1	+ 6.880,2	13.984,4
1984	11.161,8	3.073,4	+ 8.088,4	14.235,2
1985	10.119,0	2.172,5	+ 7.946,5	12.291,5
1986	7.310,5	2.660,9	+ 4.649,6	9.971,4
1987	8.427,3	2.990,0	+ 5.437,3	11.417,3
Jumlah	72.761,2	22.832,3	+ 49.928,9	95.593,5

^aEkspor: FOB
^bImpor: C & F

Sumber: Kedutaan Besar RI di Tokyo, Laporan Tahunan (dikutip dan dihitung dari beberapa tahun penerbitan).

pun ada kecenderungan meningkat, serta pangsa pasar yang masih kecil, maka ekspor non-migas Indonesia ke Jepang mempunyai potensi dan prospek yang cukup baik dan menguntungkan untuk dikembangkan lebih lanjut di masa-masa mendatang.

Neraca Perdagangan Indonesia-Jepang

Transaksi perdagangan Indonesia dengan Jepang menunjukkan kecenderungan yang menurun terus-menerus dari tahun 1981 hingga 1986, tetapi tahun 1987 meningkat kembali. Kecenderungan ini terjadi baik dari segi impor maupun dari segi ekspor. Demikian pula, surplus perdagangan bilateral selalu berada di pihak Indonesia, tetapi ne-

raca perdagangan itu cenderung menurun pada tahun 1981 hingga 1986, dan kemudian pada tahun 1987 agak meningkat kembali. Perkembangan ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Jika dihitung dan dianalisa dari Tabel 1 tersebut di atas ternyata bahwa dari tahun 1981 hingga 1986 ekspor Indonesia ke Jepang menurun dengan laju pertumbuhan -11,29% rata-rata per tahun. Demikian pula impor menurun -8,38%; neraca perdagangan menurun -12,72% dan transaksi perdagangan menurun -10,57% rata-rata per tahun. Sedangkan pada tahun 1987 terjadi kenaikan kembali dibandingkan dengan tahun 1986, yaitu ekspor meningkat 15,28%; impor meningkat 12,37%; neraca perdagangan meningkat 16,94% dan tran-

saksi perdagangan meningkat 14,50%.

Terlihat pula bahwa ekspor Indonesia ke Jepang selama periode 1981-1987 berjumlah US\$72.761,2 juta dan jumlah impor selama periode yang sama berjumlah US\$22.832,3 juta. Dengan demikian jumlah surplus neraca perdagangan untuk Indonesia adalah sebanyak US\$95.593,5 juta dan jumlah transaksi perdagangan mencapai US\$95.593,5 juta pada periode yang bersangkutan. Jika dibandingkan dengan data IMF ternyata posisi dan peranan perdagangan dengan Jepang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi antara Indonesia dengan AS dan Indonesia dengan negara-negara MEE dalam periode yang sama. Dalam hubungan ini neraca perdagangan Indonesia dengan AS mengalami defisit sebesar US\$26.255 juta dan dengan MEE mengalami surplus sebesar US\$4.932 juta. Sedangkan transaksi perdagangan Indonesia dengan AS berjumlah US\$43.291 juta dan dengan MEE sebesar US\$24.938 juta. Dari data-data tersebut ternyata bahwa ketergantungan perdagangan ekspor dan impor Indonesia dengan Jepang jauh lebih besar dibandingkan dengan AS atau MEE.

Komposisi Ekspor Indonesia ke Jepang: Migas dan Non-Migas

Merosotnya ekspor Indonesia ke Jepang sebagaimana dikemukakan di atas, di samping sebab-sebab lainnya, terutama terjadi karena merosotnya harga minyak bumi yang menurun dengan tajam pada tahun 1986. Namun pada tahun 1987 harga minyak mulai meningkat kembali dan menjadi agak stabil. Tambahan pula perkembangan ekspor yang demikian itu terjadi karena ekspor mi-

gas Indonesia ke Jepang meliputi kira-kira 85% dari nilai total ekspor Indonesia ke sana. Sehingga perubahan harga dan nilai ekspor migas Indonesia ke Jepang sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan ekspor secara keseluruhannya.

Perkembangan komposisi ekspor Indonesia ke Jepang menurut kelompok migas dan non-migas dapat dilihat dalam Tabel 2.

Dalam periode 1981-1987 terlihat penurunan ekspor migas Indonesia ke Jepang yaitu dari US\$11.844,4 juta (1981) menjadi US\$6.313,7 juta (1987). Ini berarti terjadi penurunan, dengan laju rata-rata -9,95% per tahun. Sebaliknya ekspor non-migas Indonesia ke sana mula-mula cenderung agak menurun atau tetap saja, tetapi kemudian meningkat sehingga mencapai US\$2.113,6 juta (1987), yang berarti secara keseluruhannya meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata 6,35% per tahun.

Stuktur ekspor Indonesia ke Jepang telah mengalami pergeseran: pada tahun 1981 ekspor migas mencapai sebesar 89,0% dan ekspor non-migas 11,0%, sedangkan pada tahun 1987 peranan ekspor migas telah menurun menjadi sebesar 74,9% dan ekspor non-migas meningkat menjadi 25,1%. Namun demikian selama periode tersebut peranan atau persentase bagian ekspor migas tetap tinggi yaitu rata-rata 85,0% per tahun dan ekspor non-migas rata-rata 15,0% per tahun.

Komposisi Ekspor Non-Migas Indonesia ke Jepang Terinci Menurut Jenis Komoditi

Ekspor non-migas Indonesia ke Jepang telah mengalami pergeseran dalam kompo-

Tabel 2

KOMPOSISI EKSPOR INDONESIA KE JEPANG, 1981-1987
(Dalam US\$ Juta)

Tahun	Nilai		Jumlah	Persentase Bagian	
	Migas	Non-Migas		Migas	Non-Migas
1981	11.844,4	1.460,9	13.305,3	89,0	11,0
1982	10.724,0	1.281,0	12.005,0	89,3	10,7
1983	9.056,3	1.376,0	10.432,3	86,8	13,2
1984	9.786,1	1.375,7	11.161,8	87,7	12,3
1985	8.820,3	1.298,7	10,119,0	87,2	12,8
1986	5.858,4	1.452,1	7.310,5	80,1	19,9
1987	6.313,7	2.113,6	8.427,3	74,9	25,1

Sumber: Kedutaan Besar RI di Tokyo, Laporan Tahunan (dikutip dan dihitung dari beberapa tahun penerbitan).

Tabel 3

KOMPOSISI EKSPOR NON-MIGAS INDONESIA KE JEPANG
MENURUT KELOMPOK KOMODITI

Kelompok Komoditi	1981		1984		1987	
	Nilai (\$'000)	% Bgn	Nilai (\$'000)	% Bgn	Nilai (\$'000)	% Bgn
Bahan Pangan	302.423	20,70	368.552	26,76	535.087	25,32
Bahan Tekstil	471	0,03	1.156	0,08	670	0,03
Metal & Besi Bekas	259.765	17,78	257.293	18,68	284.746	13,47
Bahan Mentah	724.628	49,60	356.612	25,90	298,022	14,10
Bahan Baku Tambang (Batu Bara)	2.625	0,18	14.803	1,08	13.692	0,65
Produk Kimia	10.086	1,69	8.926	0,65	35.302	1,67
Mesin & Peralatan	1.911	0,13	492	0,04	1.770	0,09
Lain-lain	159.007	10,89	369.227	26,81	944.148	44,67
Jumlah	1.460.916	100,00	1.377.031	100,00	2.113.437	100,00

Sumber: Kedutaan Besar RI di Tokyo, Laporan Tahunan (dikutip dan dihitung dari beberapa tahun penerbitan).

sisinya dari tahun ke tahun. Perkembangan nilai dan peranan ekspor non-migas Indonesia ke Jepang menurut kelompok jenis komoditi pada tahun 1981 dan tahun 1987 dapat dilihat secara terinci dalam Tabel 3.

Secara total jumlah ekspor non-migas Indonesia ke Jepang telah meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata 6,35% per tahun. Kelompok komoditi ekspor non-migas yang cenderung meningkat dari yang tertinggi peningkatannya adalah kelompok komoditi lain-lain dengan laju pertumbuhan rata-rata 34,57% per tahun, disusul oleh bahan bakar tambang 31,69%, produk kimia 23,22%, bahan pangan 9,98%; bahan tekstil 6,05% dan metal & besi bekas 1,54% rata-rata per tahun. Sedangkan yang mengalami kecenderungan penurunan dari tahun ke

tahun adalah bahan mentah dengan laju pertumbuhan -13,76% dan mesin & peralatan -1,27% rata-rata per tahun.

Pangsa Pasar Ekspor Non-Migas Indonesia di Jepang

Pangsa pasar ekspor non-migas Indonesia di Jepang secara total mengalami sedikit perubahan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 1,92% pada tahun 1981 dan 1,84% pada tahun 1987 dari keseluruhan impor non-migas Jepang. Pangsa pasar ekspor non-migas Indonesia di pasaran Jepang dari tahun 1981 hingga tahun 1987 terinci menurut kelompok jenis komoditi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4

KOMPOSISI DAN PANGSA PASAR EKSPOR NON-MIGAS INDONESIA DI JEPANG

Kelompok Komoditi	1981			1987		
	Ekspor ke Jepang	Impor Jepang Seluruhnya	Pangsa Pasar	Ekspor ke Jepang	Impor Jepang Seluruhnya	Pangsa Pasar
	(\$'000)	(\$'000)	(%)	(\$'000)	(\$'000)	(%)
Bahan Pangan	302.403	15.913.446	1,90	535.087	22.395.198	1,58
Bahan Tekstil	471	2.403.660	0,02	670	2.702.012	0,02
Mesin & Besi Bekas	259.765	7.284.355	3,57	284.746	6.120.078	4,65
Bahan Mentah	724.628	10.347.075	7,00	289.022	13.199.788	2,26
Bahan Baku Tambang (Batu Bara)	2.625	5.520.909	0,05	13.692	4.633.464	0,30
Produk Kimia	10.086	6.486.686	0,16	35.302	11.844.857	0,30
Mesin & Peralatan	1.911	10.240.060	0,02	1.770	19.123.093	0,01
Lain-lain	159.007	18.051.673	0,88	944.148	34.993.282	2,70
Jumlah	1.460.916	76.247.864	1,92	2.113.437	115.011.772	1,84

Sumber: Kedutaan Besar RI di Tokyo, Laporan Tahunan (dikutip dan dihitung dari beberapa tahun penerbitan).

Tabel 4 menunjukkan kelompok komoditi ekspor non-migas yang mengalami kenaikan pangsa pasarnya, yang tetap dan yang menurun. Khusus untuk tahun 1987 dibandingkan dengan tahun 1981, kelompok komoditi yang mengalami kenaikan pangsa pasarnya adalah berturut-turut metal & besi bekas (naik 1,08%), kelompok lain-lain (0,7%), bahan bakar tambang (0,25%) dan produk kimia (0,14%). Yang tetap pangsa pasarnya adalah bahan tekstil, yaitu hanya sekitar 0,03%. Sebaliknya ada beberapa kelompok komoditi yang mengalami penurunan pangsa pasarnya yaitu bahan mentah (-3,26%), bahan pangan (-0,32%) dan mesin & peralatan (-0,01%).

Secara rata-rata, pangsa pasar kelompok komoditi Indonesia di Jepang dari yang terbesar berturut-turut adalah metal & besi bekas 4,23%; bahan mentah 3,74%; bahan pangan 2,17%; kelompok lain-lain 1,66%; bahan baku tambang 0,22%; produk kimia 0,01%. Secara keseluruhan pangsa pasar ekspor non-migas Indonesia di Jepang selama periode tersebut hanyalah sebesar 1,78% dari total impor komoditi non-migas.

Hambatan dan Usaha Pengembangan Perdagangan Indonesia dengan Jepang

Dalam usaha untuk tetap memperkuat atau mempertahankan posisi neraca pembayarannya dengan negara-negara lain termasuk negara-negara berkembang, maka Jepang telah mengambil berbagai kebijaksanaan perdagangan luar negeri, khususnya dalam kaitan dengan impornya. Pemerintah Jepang juga telah melakukan berbagai kebijaksanaan protektif terhadap pasar dalam negeri. Bentuk-bentuk kebijaksanaan atau

hambatan atas impor ke negaranya itu bersangkutan dengan surat izin kesehatan dan keselamatan, ketentuan standar teknis, otorisasi impor, kuota global, biaya impor disertai pelayanan impor atas kesehatan dan keselamatan, pajak spesifikasi produk, dan bea impor khusus disertai kuota. Kebijakan dan hambatan perdagangan yang dilakukan oleh Jepang tersebut cukup besar pengaruhnya (bersifat negatif) atas perdagangan ekspor Indonesia di pasaran Jepang.

Menurut Direktorat Jenderal HELN Deplu (Hubungan Ekonomi Bilateral RI-Jepang, 1988) tarif-tarif impor Jepang pada umumnya relatif masih tinggi. Dalam hubungan ini memang pemerintah Jepang telah membuka pasarnya dengan penurunan tarif untuk barang-barang pertanian, pertambangan dan industri, tetapi ternyata hal itu lebih menguntungkan negara-negara maju dibandingkan dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Penurunan tarif impornya hanya 6,15% atas komoditi pertanian yang merupakan komoditi ekspor utama negara-negara berkembang (termasuk Indonesia).

Di samping itu pemerintah Jepang sangat membatasi impor hasil-hasil pertanian tertentu terutama yang telah dapat dihasilkan sendiri seperti beras, yang hampir bersifat larangan impor. Demikian pula terhadap mata dagangan tertentu lainnya yang tidak tersedia atau tidak dapat dihasilkan sendiri dikenakan restriksi kuantitatif bersamaan dengan tarif impor yang relatif lebih tinggi, seperti terhadap cumi-cumi. Dan cara lain adalah dengan hambatan non-tarif seperti karantina terhadap produksi makanan impor dengan alasan untuk terhindar dari kemungkinan lalat dan bakteri lainnya.

Suatu hal lainnya yang menjadikan hambatan khusus dalam ekspor Indonesia ke Je-

pang adalah di mana Jepang mendirikan *Import Plywood Council* yang menangani masalah impor kayu lapis dari Indonesia. Dewan inilah yang mengusulkan kepada Departemen Keuangan untuk mengenakan pajak impor khusus terhadap plywood Indonesia atau mengenakan *countervailing duties* atas dasar tingkat bea masuk yang berlaku. Hal ini dilakukan karena pihak Jepang menganggap APKINDO memberikan insentif yang terlalu besar kepada eksportir plywood Indonesia.

Di samping hal-hal tersebut di atas, komoditi ekspor non-migas Indonesia di pasaran Jepang menghadapi saingan yang cukup kuat dari komoditi yang sejenis yang dihasilkan oleh negara-negara pengekspor lainnya. Saingan yang dihadapi ini bersangkutan dengan berbagai hal, baik ketepatan waktu penyerahan dan harga maupun segi standar mutu komoditi yang bersangkutan.

Berbagai usaha peningkatan dan pengembangan telah dilakukan oleh pihak pemerintah dan/atau pihak swasta Indonesia, seperti pameran dagang, misi kunjungan, penyelidikan dan informasi, pembukaan/legalisasi perwakilan dagang, keagenan, dan sebagainya.

Dalam hal pameran dagang, Indonesia dengan koordinasi Badan Pengembangan Ekspor Nasional Departemen Perdagangan, antara lain telah ikutserta dalam *Osaka International Trade Fair*, Osaka April 1986, *Indonesian Solo Exhibition '86* di Osaka November 1986, *International Gift Show* di Tokyo Februari 1984 (Lihat Kedutaan Besar RI di Tokyo, *op.cit.*). Selain itu telah dilakukan berbagai misi dagang dan peningkatan kerjasama ekonomi, seperti kunjungan Menteri Pertambangan dan Energi, Prof. Soebroto (Januari 1986); kunjungan Ketua Bap-

penas, Prof. J.B. Sumarlin (Agustus 1986); kunjungan Misi Ekonomi KADIN yang dipimpin Ketua Umumnya Sukamdani S. Gitosardjono (November 1986); kunjungan Delegasi HIPMI (Oktober 1987), dan lain-lain.

Selain daripada usaha-usaha peningkatan ekspor, khususnya ekspor non-migas, melalui tahap-tahap dan rangkaian kebijaksanaan makro yang dilakukan pemerintah RI beberapa tahun belakangan ini, masih banyak permasalahan dan usaha-usaha pengembangan ekspor yang perlu diadakan atau dilanjutkan terus dimasa-masa mendatang, baik dari segi makro maupun dari segi mikro:

Pertama-tama sebagaimana dikemukakan pada tabel-tabel sebelumnya ternyata bahwa bagian terbesar dari ekspor Indonesia masih tertuju pada negara-negara industri, khususnya negara industri terkemuka, seperti Amerika Serikat, Jepang dan MEE. Bahkan ketergantungan ekspor Indonesia ke pasar "tradisional" itu semakin meningkat pada tahun-tahun belakangan ini. Dalam rangka penerobosan ke pasar negara-negara tersebut perlu selalu diperhatikan masalah dan perubahan kebijaksanaan bea masuk dan kuota, aspek fasilitas GSP, masalah biaya angkutan laut dan udara, dan berbagai kebijaksanaan atau tindakan lainnya yang menyangkut perdagangan ekspor ke pasaran tersebut. Dalam hubungan ini, perhatian dan antisipasi Indonesia atas perkembangan internasional, khususnya dalam hal pertumbuhan ekonomi dan perdagangan negara-negara industri tersebut, perlu mendapat sorotan dan pengkajian terus. Sehingga dengan demikian tindakan-tindakan penyelesaian seperlunya akan dapat dilakukan untuk itu sehingga akan dapat meningkatkan atau sekurang-kurangnya mempertahankan

pangsa pasar Indonesia pada negara-negara industri, khususnya di pasar Jepang.

Masalah selanjutnya adalah bahwa jenis komoditi ekspor Indonesia masih tetap didominasi oleh komoditi tertentu yang bersifat bahan mentah. Baru pada tahun-tahun belakangan ini terjadi perubahan pola komposisi ekspor Indonesia: ekspor non-migas yang utama bukan lagi produk primer (bahan mentah) saja tetapi juga terdiri dari barang hasil industri olahan. Misalnya nilai ekspor kayu lapis secara keseluruhannya (termasuk terutama ke Jepang) sudah menempati kedudukan utama (nomor satu) menggantikan ekspor karet alam, sedangkan tekstil sudah menempati kedudukan ketiga pada tahun 1987/1988 di mana pada tahun 1983/1984 masih menduduki urutan ketujuh sebagai komoditi ekspor andalan Indonesia. Sehubungan dengan itu usaha-usaha diversifikasi ekspor Indonesia perlu ditingkatkan lagi, khususnya produksi dan ekspor hasil industri olahan, sehingga ketergantungan pada jenis komoditi ekspor tertentu saja akan semakin berkurang.

Ditinjau dari segi mikro dan teknis operasional, berkurangnya permintaan luar negeri, khususnya dari Jepang, atas komoditi ekspor tradisional antara lain disebabkan oleh mutu barang yang seringkali tidak tetap dan tidak terpelihara, waktu penyerahan barang seringkali tidak pada waktunya dan terbatasnya kemampuan bersaing dari banyak komoditi Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikehendukakan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan ekspor non-migas itu perlu mencakup berbagai aspek yang saling menunjang dan karena itu perlu ditangani secara terpadu yang mencakup berbagai hal yang penting di antaranya adalah keterpa-

duan dalam hal-hal: (a) peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan penurunan biaya produksi; (b) perbaikan transportasi dan arus lalu-lintas antar pulau dan pelayanan samudera; (c) peningkatan mutu hasil produksi untuk ekspor, khususnya dalam ekspor pertanian dan industri; (d) perluasan kapasitas produksi, khususnya untuk ekspor, sehingga kontinuitas dan perluasan permintaan luar negeri dapat terlayani dengan tepat-waktu; (e) perbaikan sistem dan efisiensi dalam pembiayaan ekspor yang akan dapat lebih menggairahkan ekspor; (f) peningkatan usaha pemasaran secara lebih agresif dan terprogram melalui usaha-usaha promosi, pendekatan langsung atau *lobbying* dan sebagainya.

Pengamatan dan pengkajian secara kontinyu atas pola dan kebijaksanaan perdagangan Jepang dalam hubungannya dengan Indonesia sangat penting artinya. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena tingkat perekonomiannya yang sudah maju dan potensi pasarnya sangat luas, selain karena pangsa pasar berbagai jenis komoditi Indonesia terutama yang non-migas, masih kecil. Berbagai upaya perlu ditingkatkan untuk lebih mengembangkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Jepang.

Kesimpulan dan Saran

Karena Jepang tidak dikaruniai kekayaan alam yang besar tetapi sebaliknya mempunyai kemampuan permodalan dan teknologi yang tinggi, maka kebijaksanaan perdagangan Jepang pada dasarnya adalah mengimpor bahan baku dan mengekspor barang jadi.

Untuk tetap memperkuat dan mempertahankan posisi neraca perdagangannya, Je-

pang telah mengambil berbagai kebijaksanaan perdagangan luar negerinya, terutama dengan melakukan berbagai kebijaksanaan proteksi terhadap pasar dalam negeri. Bentuk-bentuk kebijaksanaan atau hambatan impor ke negaranya itu adalah yang bersangkutan dengan surat izin kesehatan dan keselamatan, ketentuan standar teknis, otorisasi impor, kuota global, bea impor disertai pelayanan impor atas dasar kesehatan dan keselamatan, pajak spesifikasi produk dan bea impor khusus disertai kuota.

Namun demikian, dengan adanya tekanan-tekanan dari pihak mitra dagang utama Jepang (Amerika Serikat dan MEE) dan atas berbagai pertimbangan/kepentingannya sendiri, maka pemerintahnya telah berusaha menjalankan berbagai kebijaksanaan mengurangi proteksi dan lebih membuka pasarnya ke arah terciptanya perdagangan yang "agak bebas." Meskipun demikian efek dari berbagai kebijaksanaan yang memberikan kelonggaran yang lebih baik itu masih belum menampakkan hasil yang berarti bagi ekspor negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam memasuki pasaran Jepang. Untuk masa depan pengembangan ekspor ke Jepang itu oleh negara-negara berkembang diharapkan akan lebih berhasil dengan adanya perubahan kebijaksanaannya yang menyangkut perbaikan sistem GSP-nya, yang mencakup: (1) pembebasan atau peningkatan jumlah *ceiling* komoditi; (2) penambahan/perluasan produk dan penentuan tarif; dan (3) pemerataan pemanfaatan GSP.

Ekspor Indonesia ke Jepang pada periode 1981-1987 mula-mula cenderung menurun, tetapi pada tahun 1987 mulai meningkat kembali. Hal ini terutama disebabkan oleh kemerosotan harga migas yang merupakan bagian besar ekspor kita ke sana, di samping beberapa kendala lainnya. Dalam

periode yang sama ekspor migas Indonesia ke Jepang rata-rata 85% per tahun dan ekspor non-migas ke sana rata-rata 15% per tahun. Tetapi ekspor non-migas telah meningkat yaitu 11,0% (1981) hingga mencapai 25,1% (1987).

Dari ekspor non-migas Indonesia ke Jepang sekitar 52,5% adalah bahan pangan dan bahan mentah, sedangkan sisanya sekitar 47,5% adalah metal & besi bekas, produk kimia, bahan tekstil, mesin & peralatan dan lain-lain. Dalam hubungan ini pangsa pasar ekspor non-migas Indonesia di Jepang masih rendah sekali. Dalam periode tahun 1981-1987 tersebut rata-rata pangsa pasar ekspor non-migas Indonesia secara total adalah sebesar 1,78%, yaitu telah menurun dari 1,92% (1981) hingga menjadi 1,39% (1986) dan naik kembali menjadi 1,84% (1987).

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah bersama swasta Indonesia dalam meningkatkan perdagangan ekspor, khususnya ekspor non-migas ke Jepang, namun demikian hasilnya belum menggembirakan. Jepang tetap akan merupakan pasar ekspor yang penting, jika bukan yang terpenting, untuk Indonesia. Oleh karenanya diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan ekspor non-migas dan pangsa pasar komoditi kita di pasaran Jepang. Tentu saja hal ini menyangkut peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi kita dalam memproduksi. Demikian pula perlu selalu diusahakan peningkatan mutu hasil produksi dan penelitian pasar disertai dengan usaha promosi. Berbagai usaha dan tindakan ini perlu dilakukan secara terpadu antar departemen yang terkait dan dengan pihak swasta, mulai dari proses di dalam negeri hingga di tempat pasarnya di luar negeri, khususnya di Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- BNI 1946. "Peluang Ekspor Indonesia Setelah Pencabutan Fasilitas GSP Empat Macam Asia." *Tinjauan Ekonomi* No. 139 (Juli-Agustus 1988).
- Direktorat Jenderal HELN Departemen Luar Negeri. *Hubungan Ekonomi Bilateral RI-Jepang*. Jakarta, 1988.
- IMF. *Direction of Trade Statistics: Yearbook 1988*. Washington, D.C.
- Kedutaan Besar RI di Tokyo. *Jepang: Sebuah Pedoman Saku 1985*.
- Kedutaan Besar RI di Tokyo. *Laporan Tahunan 1984/1985 dan 1987/1988*.
- Mangkusuwondo, Suhadi. "Beberapa Trend Ekspor dalam Repelita V." *Tinjauan Ekonomi* No. 137 (Maret-April 1988).
- "Merebut Pranata Pendukung Strategi Menerobos Pasar Ekspor Baru." Dalam *Management & Usahawan Indonesia* No. 12 Tahun XVII, Desember 1988.
- The World Bank. *World Development Report, Beberapa Tahun Penerbitan*. Washington, D.C.: Oxford University Press.
- U.N. Industrial Development Organization, *Changing Patterns of Trade in World Industry*. New York: United Nations Publication, 1982.
- Wirakartakusumah, M. Djuhari. "Barriers to Indonesia Access to American, Japanese and EEC Markets." Dalam Eleventh Annual Conference of Federation of Asian Economic Association, Bangkok, November 1986.

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:
SUDIBYO (Editor),
Yoyok ARIESSUSANTO

- I. PERTEMUAN KEPALA PEMERINTAHAN ASEAN DI BRUNEI
- II. SIDANG PARA MENLU ASEAN
- III. KERJASAMA ASEAN
 - A. Kerjasama Energi ASEAN
 - 1. Kerjasama Kelistrikan ASEAN
 - 2. Pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-8
 - 3. Pasar Industri Peralatan Listrik
 - B. Kerjasama Kebudayaan dan Informasi
 - 1. Konperensi Para Redaktur ASEAN
 - 2. Pertukaran Kunjungan Wartawan ASEAN
 - C. Kerjasama Hukum ASEAN
 - 1. Konperensi Mahasiswa Hukum ASEAN (ALSC) ke-1
 - 2. Kerjasama Penegakan Hukum
- IV. MASALAH KEAMANAN
 - A. Stabilitas dan Kemajuan ASEAN
 - B. Masalah Pangkalan Militer AS
 - 1. Kesiadaan Singapura Menampung Fasilitas Militer AS
 - 2. Reaksi dan Komentar
 - a. Sikap Malaysia
 - b. Sikap Muangthai
 - c. Sikap Indonesia
 - d. Sikap Filipina
 - e. Sikap Singapura
 - f. Sikap AS
- V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA-MITRANYA
 - A. Pertemuan ASEAN dengan Mitra Dialognya (PMC)
 - B. Hubungan Perdagangan ASEAN-AS
 - C. Hubungan ASEAN-Kanada
 - 1. Kerjasama Telekomunikasi Angkasa Luar ASEAN-Kanada
 - 2. Peresmian Pusat ASEAN-Kanada
 - D. Hubungan ASEAN-Selandia Baru
 - 1. Kunjungan Misi Perdagangan Selandia Baru ke Indonesia
 - 2. Kunjungan Ali Alatas ke Selandia Baru
 - E. Hubungan ASEAN-Australia
 - 1. Pertemuan Panitia Kerja Kelautan ASEAN-Australia ke-7
 - 2. Masalah Kerjasama Ekonomi Pasifik
 - F. Hubungan ASEAN-Korea Selatan
 - 1. Tawaran Korea Selatan Sebagai Mitra Dialog
 - 2. Pertemuan Komite Kerjasama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan
 - 3. Sistem Kerjasama ASEAN-Korea Selatan
 - G. Hubungan ASEAN-MEE
 - 1. Seminar ASEAN-Eropa
 - 2. Kunjungan Parlemen Eropa ke Indonesia
 - 3. Implikasi Pasar Tunggal Eropa Terhadap ASEAN
 - H. Hubungan ASEAN-Asia Pasifik
 - 1. Posisi ASEAN dalam Percaturan Politik Asia-Pasifik
 - 2. Pertemuan Meja Bundar Asia-Pasifik ke-3
 - 3. Jepang dan Masa Depan Asia Tenggara
- VI. ICK BELUM BERHASIL MENYELESAIKAN KONFLIK KAMBOJA

I. PERTEMUAN KEPALA PEMERINTAHAN ASEAN DI BRUNEI

Dalam rangka kunjungan ke Brunei Darussalam tanggal 2 Agustus 1989 untuk memenuhi undangan Sultan Hassanal Bolkiah guna menghadiri acara khitanan putra pertamanya, para Kepala Pemerintahan negara anggota ASEAN mengadakan pertemuan tidak resmi. Pertemuan semacam ini sering dilakukan oleh para Kepala Pemerintahan negara anggota ASEAN untuk saling memberikan informasi, tukar-menukar pandangan dan pendapat mengenai berbagai persoalan yang menyangkut hubungan bilateral, regional dan internasional.

Menteri Sekretaris Negara RI, Moerdiono, mengatakan kepada pers di Bandar Seri Begawan tanggal 3 Agustus 1989 bahwa: (1) Presiden Soeharto berturut-turut menerima Presiden Filipina, Corazon Aquino; PM Singapura, Lee Kuan Yew dan PM Malaysia, Mahathir Mohamad, di Istana Darut Taqwa tanggal 2 Agustus 1989, masing-masing berlangsung satu jam; (2) mereka membicarakan prospek perundingan Kamboja yang berlangsung di Paris; (3) penyelesaian perundingan Kamboja di Paris merupakan bagian dari usaha ASEAN melalui JIM I dan JIM II; (4) Presiden Soeharto dan PM Lee Kuan Yew sepakat untuk bertemu kembali di Bali pada akhir tahun 1989; (5) PM Mahathir Mohamad menyatakan keinginannya untuk melihat perkembangan Pulau Batam; (6) Indonesia dan Malaysia sepakat mengembangkan kerjasama untuk menangani tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Masalah itu diharapkan dapat ditangani antar pemerintahan, sehingga jumlah dan pembinaannya dapat dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik; (7) Malaysia dan Indonesia sepakat untuk mengambil langkah-langkah bersama guna mengamankan produk-produk pertanian yang dihasilkan kedua negara; (8) Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengembangkan kerjasama energi nuklir, karena hal ini penting di masa depan; (9) Malaysia dan Indonesia sepakat untuk segera mengadakan pertemuan di Batam (*Suara Pembaruan*, 4 Agustus 1989).

II. SIDANG PARA MENLU ASEAN

Sidang ke-22 para Menlu ASEAN berlangsung di Bandar Seri Begawan tanggal 3-4 Juli 1989. Sidang ini dihadiri oleh Menlu Ali Alatas (Indonesia), Siddhi Savetsila (Muangthai), Wong Kan Seng (Singapura), Abu

Hasan Omar (Malaysia), Raul Manglapus (Filipina) dan Mohamed Bolkiah (Brunei Darussalam) selaku pimpinan sidang untuk membahas: (1) merumuskan sikap bersama ASEAN menghadapi Konperensi Internasional tentang Kamboja (ICK); (2) peningkatan kerjasama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik; (3) hubungan dengan Korea Selatan; (4) perbaikan efisiensi dan struktur Sekretariat ASEAN; (5) pengungsi Vietnam; (6) masalah ZOPFAN; (7) bantuan ekonomi untuk Filipina; (8) pemberantasan obat bius; (9) kerjasama dengan mitra dialog; (10) masalah ekonomi dunia dan beberapa masalah politik dunia, seperti perjuangan rakyat Palestina, perang Afghanistan, Afrika Selatan dan pengurangan senjata.

Sidang ini juga dihadiri oleh utusan khusus Sekjen PBB, Rafeeudin Ahmed, Ketua Komisi Ad Hoc ICK, Ny. Claude Absa Diallo, serta Dubes Sebulon Kulu mewakili Menlu PNG, Michael Somare (sebagai peninjau).

Sebelum sidang dimulai, suasana telah dihangatkan oleh pertanyaan para wartawan mengenai sikap PM Muangthai, Chatichai Choonhavan, yang telah mengadakan pertemuan dengan PM Hun Sen di Bangkok awal tahun 1989 ini. Menjawab masalah ini, Menlu Siddhi Savetsila mengatakan kepada para wartawan di Bandar Seri Begawan tanggal 2 Juli 1989 bahwa berlangsungnya pembicaraan antara PM Chatichai Choonhavan dengan PM Hun Sen tidak berarti bahwa Muangthai mengakui pemerintahan Kamboja di bawah pimpinan Hun Sen, hanya mendengarkan secara tidak resmi. Di samping itu, Muangthai tetap menolak usul agar kursi CGDK di PBB dikosongkan, karena pengosongan itu berarti kekalahan. Tetapi apabila pemerintah Hun Sen menyetujui pemerintah sementara rujukan nasional, maka pemerintah sementara itu akan segera menggantikan CGDK. Sementara itu sehubungan dengan bantuan senjata kepada faksi-faksi yang bertikai, Menlu Siddhi Savetsila juga menegaskan bahwa sebelum tercapai gencatan senjata, penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan terlaksananya mekanisme pengawasan internasional, siapa saja dapat terus memberi bantuan kepada faksi-faksi Kamboja yang bertikai (*Antara*, 3 Juli 1989).

Berkaitan dengan hal itu, setibanya di Bandar Seri Begawan tanggal 2 Juli 1989, Menlu Singapura, Wong Kan Seng, mengatakan bahwa negaranya dan negara-negara ASEAN yang lain merasa prihatin dengan meluasnya kontak hubungan antara Muangthai dan pemerintah Hun Sen. Pemerintah Hun Sen sebaiknya tidak

dipandang sebagai pemerintah yang sah. Meskipun hubungan Bangkok-Phnom Penh meluas, ASEAN tetap konsekuen dengan tujuan yang telah dinyatakannya untuk menolak keabsahan pemerintah Hun Sen. Di samping itu, ASEAN tetap menghendaki tercapainya penyelesaian politik di Kamboja secara menyeluruh (*Antara*, 3 Juli 1989).

Sementara itu, Menlu Ali Alatas mengatakan di Bandar Seri Begawan tanggal 2 Juli 1989 bahwa Indonesia mengharapkan Pangeran Norodom Sihanouk untuk tetap hadir dalam ICK. Penegasan Menlu Ali Alatas ini dilontarkan sehubungan dengan munculnya pernyataan Pangeran Norodom Sihanouk untuk memboikot ICK jika tiga syarat yang dituntutnya tidak dipenuhi. Tiga syarat itu adalah: (1) agar dunia internasional mengecam Vietnam sebagai agresor; (2) tidak diikutsertakannya negara-negara blok Soviet dalam pasukan pengawas perdamaian itu (*Kompas*, 3 Juli 1989). Sikap Norodom Sihanouk ini tampaknya juga tidak disetujui oleh Menlu Siddhi Savetsila.

Menlu Singapura, Malaysia dan Filipina mendukung Indonesia duduk bersama Perancis mengetahui ICK.

Komunike bersama pada akhir sidang menyebutkan bahwa: (1) Vietnam dan kelompok-kelompok yang bertikai di Kamboja agar lebih luwes dan akomodatif untuk segera mencapai suatu penyelesaian politik di Kamboja secara menyeluruh; (2) pertemuan antara Pangeran Norodom Sihanouk dan PM Hun Sen di Paris, 24 Juli 1989, merupakan hal yang penting untuk membuka jalan menuju kerukunan nasional di Kamboja; (3) ASEAN menghargai usaha Indonesia yang telah menjadi tuan rumah JIM I dan JIM II, dan ICK harus merupakan upaya pelengkap atas prakarsa ASEAN selama 10 tahun ini; (4) ASEAN menghargai usaha Sekjen PBB Javier Perez de Cuellar yang telah membantu usaha-usaha menyelesaikan masalah Kamboja; (5) ASEAN menghargai prakarsa Perancis untuk mengadakan konferensi internasional mengenai Kamboja (ICK), guna mencapai penyelesaian politik secara menyeluruh di Kamboja; (6) penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja pada akhir September 1989 merupakan suatu usaha yang positif tetapi harus tetap berkaitan dengan penyelesaian politik di Kamboja secara menyeluruh, baik aspek internal maupun aspek eksternal; (7) perlu dibentuk suatu mekanisme pengawasan internasional di bawah naungan PBB (*Kompas*, 5 Juli 1989); (8) Vietnam harus bertanggung jawab atas pengungsi yang berasal dari negaranya serta harus bersedia mene-

rima kembali para pengungsi yang dikategorikan bukan pengungsi dan tidak dapat dikirim ke negara ketiga; (9) tercapainya penyelesaian masalah pengungsi secara langgeng memerlukan langkah-langkah efektif dan bijaksana dari Vietnam. Penyelesaian masalah pengungsi akan langsung mendorong tercapainya stabilitas, kerjasama dan saling pengertian antara Vietnam dan ASEAN; (10) ASEAN menyambut baik kesimpulan konferensi internasional mengenai pengungsi di Jenewa tanggal 13-14 Juni 1989; (11) pemukiman kembali kaum pengungsi di kamp-kamp ASEAN dengan segera, pengurangan arus pencari suaka secara nyata dan penanganan secara aktif para pengungsi yang tidak memenuhi syarat untuk dimukimkan kembali merupakan bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah pengungsi Indocina secara langgeng; (12) para pejabat senior ASEAN agar mempertimbangkan konsep Zone Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (SEANWFZ) sebagai bagian dari ZOPFAN; (13) ASEAN akan menjalin hubungan dialog sektoral dengan Korea Selatan, yang pada awal-awalnya akan memusatkan perhatian pada perdagangan, penanaman modal dan pariwisata; (14) ASEAN menyambut baik pembicaraan para negara maju di Tokyo dewasa ini untuk memberi bantuan ekonomi kepada Filipina; (15) kerjasama penanggulangan pelanggaran obat bius akan ditingkatkan, antara lain melalui pendidikan preventif, pengobatan, rehabilitasi pecandu obat bius dan penanggulangan penyelundupan obat bius; (16) ASEAN merasa prihatin dengan meluasnya penyakit AIDs, yang merupakan ancaman besar bagi kesejahteraan masyarakat dunia; (17) ASEAN merasa puas atas kelangsungan kerjasama dengan mitra-mitra dialog; (18) kerjasama komoditi dengan Australia agar ditingkatkan untuk mempermudah komoditi-komoditi ASEAN masuk pasar Australia; (19) hubungan ASEAN-Kanada dalam bidang perdagangan dan investasi perlu diperbaiki lebih lanjut; (20) ASEAN merasa prihatin atas kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh persetujuan AS-MEE mengenai subsidi pertanian dan kampanye anti kayu tropis di negara-negara maju. ASEAN mengharapkan fasilitas keuangan MEE yang baru akan mendorong minat Eropa Barat untuk mengadakan kerjasama industri di negara-negara ASEAN; (21) ASEAN merasa prihatin atas kebijaksanaan graduasi Selandia Baru yang telah mempengaruhi negara-negara ASEAN. Diharapkan Selandia Baru bersedia menanggapi permintaan ASEAN mengenai rencana GSP-nya; (22) AS agar berperan secara aktif dalam perundingan perdagangan multilateral di Uruguay (*Uruguay Round*). Di samping itu, ASEAN juga mendesak agar pengaruh-pengaruh buruk dari perang subsi-

di pertanian dan kampanye anti minyak nabati diakhiri secara baik; (23) ASEAN merasa prihatin atas berlangsungnya saling ketergantungan asimetris yang berlanjut antara negara-negara berkembang dan negara maju, serta pengaruh-pengaruh yang merugikan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi makro beberapa negara maju atas negara-negara berkembang; (24) defisit anggaran dan perdagangan AS terus mengancam stabilitas ekonomi internasional, sebagaimana halnya dengan perubahan nilai tukar mata-mata uang penting; (25) ASEAN akan mengambil bagian secara konstruktif dalam perundingan perdagangan internasional; (26) untuk memecahkan masalah-masalah perdagangan, negara-negara anggota ASEAN jangan mengambil langkah-langkah bilateral; (27) kreditor-kreditor resmi agar mempertimbangkan pengurangan beban hutang bagi negara-negara yang banyak hutangnya; (28) ASEAN merasa prihatin atas peningkatan perlombaan senjata di seluruh dunia; (29) negara-negara adikuasa agar mulai mengadakan perundingan untuk menghapuskan kekuatan nuklir jarak dekat dan melanjutkan usaha-usaha menuju pakta pelarangan uji-coba nuklir secara menyeluruh; (30) ASEAN mendukung perjuangan sah rakyat Palestina; (31) Iran dan Irak agar mematuhi syarat-syarat persetujuan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik mereka; (32) ASEAN menyambut baik penarikan total pasukan Uni Soviet dari Afghanistan; (33) untuk memungkinkan para pengungsi Afghanistan kembali secara selamat ke kampung halamannya, diperlukan penyelesaian politik secara menyeluruh di Afghanistan; (34) sanksi ekonomi dan sanksi-sanksi lain atas Afrika Selatan mempunyai dampak yang berarti, oleh sebab itu perlu diperhebat, diperketat dan diperluas; (35) ASEAN memperhatikan perkembangan dan kecenderungan baru di kawasan Asia-Pasifik, khususnya mengenai usul-usul dari negara-negara mitra dialognya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi; (36) sidang ke-23 para Menlu ASEAN tahun 1990 akan berlangsung di Jakarta (*Antara*, 4 Juli 1989); (37) struktur organisasi Sekretariat ASEAN disempurnakan dengan pembentukan suatu Deputy Sekjen ASEAN. Wakil Singapura akan menjadi deputy yang pertama selama 3 tahun sejak pertengahan 1990 (*Kompas*, 5 Juli 1989).

Seusai sidang para Menlu ASEAN itu, Menlu Ali Alatas menegaskan bahwa: (1) setelah masalah Kamboja selesai ASEAN tidak akan bubar, justru sebaliknya akan memainkan peranan yang lebih besar, terutama di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara; (2) pandangan Indonesia mengenai faktor pemersatu ASEAN sangat

berbeda dengan pandangan para analis Barat; (3) sejak semula Indonesia menganggap bahwa faktor-faktor yang mendekatkan ASEAN bukan disebabkan oleh suatu persepsi mengenai ancaman dari luar atau suatu masalah politik tertentu. Faktor yang mendekatkan ASEAN adalah sejumlah kepentingan dan persepsi bersama untuk memajukan pembangunan, kesejahteraan rakyat maupun keamanan dalam arti luas, bukan militer semata. Kepentingan bersama itu akan tetap menjadi faktor pemersatu.

Penegasan Menlu Ali Alatas ini dilontarkan sehubungan dengan munculnya pendapat analis-analis Barat, yang mengatakan bahwa faktor pemersatu ASEAN bukan masalah kepentingan ekonomi, tetapi munculnya perasaan takut atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik Kamboja dan keberanian Vietnam untuk melakukan agresi ke negara-negara tetangganya. Oleh sebab itu tercapainya penyelesaian konflik Kamboja, memaksa ASEAN untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan perekat baru (*Antara*, 5 Juli 1989).

Sementara itu masalah rencana pembentukan forum Asia-Pasifik cukup pula mendapat perhatian, dan tampaknya ASEAN juga tidak memperlihatkan dukungan yang penuh atas pembentukan forum itu. ASEAN berpendapat bahwa lebih baik memanfaatkan wadah yang sudah ada daripada harus membangun forum yang baru. Dalam kaitan ini Menlu Ali Alatas secara diplomatik mengatakan bahwa Indonesia seperti negara-negara anggota ASEAN lainnya menganggap usul PM Bob Hawke itu relevan, tetapi sebaiknya jangan membentuk suatu badan baru untuk mewujudkan kerjasama, lebih baik sepenuhnya memanfaatkan mekanisme yang telah ada seperti ASEAN di Asia Tenggara (*Kompas*, 5 Juli 1989).

Kalangan diplomat di Asia, sebagaimana dikutip oleh *The Asian Wall Street Journal* tanggal 4 Juli 1989, menyatakan antara lain bahwa: (1) usul pembentukan forum Asia-Pasifik dapat mengganggu hubungan baik antara negara-negara ASEAN dan negara-negara yang disebut-sebut akan menjadi anggota forum itu. Hal ini disebabkan oleh sikap ASEAN yang mungkin melihat rencana pembentukan forum itu pada dasarnya merupakan prakarsa negara kaya, seperti AS, Jepang dan Australia, yang ingin menyeret mereka bergabung ke dalam forum baru itu; (2) kehadiran forum baru itu juga dapat menggeser pengaruh ASEAN yang telah banyak berperanan selama ini; (3) sementara itu beberapa negara calon anggota forum itu juga merasa

cemas, karena pembentukan forum itu dapat dianggap sebagai benih pembentukan sebuah kartel oleh organisasi-organisasi perdagangan yang telah ada seperti MEE (*Kompas*, 5 Juli 1989).

III. KERJASAMA ASEAN

A. KERJASAMA ENERGI ASEAN

1. *Kerjasama Kelistrikan ASEAN*

Pertemuan Pimpinan Perusahaan Listrik ASEAN ke-6 berlangsung di Jakarta tanggal 7-8 Juni 1989 untuk membahas: (1) pelaksanaan intern-koneksi jaringan listrik ASEAN, khususnya di antara negara terdekat, seperti Indonesia-Malaysia, Singapura-Thailand; (2) kemajuan pelaksanaan 9 proyek kerjasama dan tiga studi intensif yang sudah berjalan beberapa tahun lalu.

Direktur Utama Perum Listrik Negara (PLN) Ermansyah Yamin mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) kerjasama kelistrikan ASEAN yang sudah digalang beberapa tahun lalu di antaranya bidang manajemen, komputerisasi, pengembangan mikro hidro dan penelitian, pengembangan enjinering; (2) kerjasama ini mencerminkan itikad baik masing-masing negara untuk maju bersama; (3) di antara negara anggota ASEAN sendiri terdapat beberapa keahlian yang dapat saling mengisi, khususnya di bidang pengoperasian jenis pembangkit; (4) bila pengamalan masing-masing negara anggota ASEAN itu dapat dihipunkan, akan merupakan kekuatan besar; (5) keahlian di masing-masing negara ASEAN dapat saling ditukar, sehingga biaya untuk menimba pengalaman ke negara maju dapat ditekan sesuai dengan prinsip ASEAN; (6) dalam Pelita V PLN bertekad memacu perkembangan geothermal di Kamojang, Gunung Salak, Dieng dan Lathendong (Sulawesi Utara), karena dianggap potensial dan mampu menghasilkan tenaga ribuan mega watt (MW); (7) tenaga ahli geothermal Indonesia belum banyak dan untuk mengatasi hal ini akan dikirimkan beberapa personilnya ke Filipina untuk mempelajari mekanisme dan operasional sebuah geothermal; (8) untuk mempersiapkan tenaga ahli proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), Indonesia mengirim personilnya ke Malaysia dan Muangthai untuk memperdalam dan mempelajari pengetahuan tentang hal itu (*Merdeka*, 7 Juni 1989).

Sementara itu Pimpinan Perusahaan Listrik Malaysia, Dato Mohammad Jalaludin bin Zainudin, menga-

takan: (1) selain panas bumi dan sumber tenaga air, di kawasan ASEAN terdapat sumber energi potensial yang belum dikembangkan secara maksimal; (2) karena pertumbuhan kebutuhan energi listrik yang pesat, khususnya untuk kebutuhan industri dan rumah tangga sebagai realisasi peningkatan taraf hidup masyarakat di negara-negara ASEAN, setelah tahun 2000 ASEAN mungkin menggunakan energi nuklir; (3) penggunaan energi nuklir memerlukan pengkajian yang matang dan teliti, khususnya dilihat dari segi keselamatan rakyat; (4) penggunaan energi nuklir di Malaysia telah lama dipikirkan, tetapi hingga kini belum direalisasikan karena persediaan energi sumber daya alam belum cukup tersedia (*Merdeka*, 8 Juni 1989).

Pimpinan Perusahaan Listrik Muangthai, Paopat Javanalikoan, mengatakan: (1) penelitian energi nuklir di negaranya telah dilakukan sejak 20 tahun lalu dan hingga saat ini masih dianggap rawan untuk dikembangkan; (2) penggunaan energi nuklir risikonya terlalu tinggi, terutama terhadap lingkungan.

Kepala Perusahaan Listrik Filipina, Ernesto M. Abolitz, mengatakan bahwa: (1) penggunaan energi panas bumi di ASEAN merupakan salah satu alternatif yang sangat efisien; (2) penggunaan panas bumi di Filipina saat ini mencapai 850 MW atau 21% dari total sumber energi yang ada dan dua tahun mendatang akan ditingkatkan menjadi 38% (*Merdeka*, 8 Juni 1989).

Para Dirut Perusahaan Listrik ASEAN menyatakan bahwa: (1) belum saatnya ASEAN menggunakan tenaga nuklir sebagai sumber pembangkit listrik (PLTN) pada tahun 2000, karena pada tahun itu ASEAN masih memiliki sumber pembangkit listrik lainnya; (2) suatu jaringan listrik ASEAN perlu dibangun sebagai tindak lanjut pengembangan kerjasama kelistrikan yang dewasa ini baru sampai tahap bilateral (*Antara*, 8 Juni 1989).

Seusai pertemuan, Dirut PLN Ermansyah Yamin mengatakan kepada pers: (1) tingkat kesusutan listrik di Indonesia dan Filipina menempati tingkat terbawah, sekitar 19%, sedangkan Singapura menempati tingkat tertinggi hanya 4%; (2) Singapura memiliki jaringan listrik terpendek di antara negara ASEAN lainnya, dan risiko susutnya paling kecil. Sebaliknya Indonesia dan Filipina memiliki jaringan terpanjang dan terbesar, oleh sebab itu risiko susutnya sangat tinggi; (3) masalah-masalah yang ada akan dibahas dan dimatangkan lagi pada pertemuan para Menteri Ekonomi dan para pejabat senior ASEAN di Kuala Lumpur, di antaranya tiga studi intensif yakni: (a) konsep pembangunan,

pengoperasian dan pengalihan guna membiayai pembangkit tenaga listrik; (b) konsep standardisasi pembangkit tenaga panas bumi ukuran kecil; (c) konsep pembangkit listrik putaran kombinasi (*Antara*, 8 Juni 1989).

2. Pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-8

Pertemuan para Menteri Energi ASEAN ke-8 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 22 Juni 1989 dihadiri oleh 70 peserta, termasuk 16 pejabat Malaysia, untuk membahas: (1) kemajuan proyek-proyek energi di kawasan ASEAN; (2) standardisasi peralatan listrik sehingga dapat digunakan oleh semua anggota ASEAN; (3) pengembangan mini hidro dan mikro hidro, pelatihan dan penelitian pengembangan energi; (4) kemungkinan pemasangan kabel transmisi Brunei-Sabah dan Serawak, dua negara bagian Malaysia Timur, dan Malaysia-Indonesia serta Malaysia-Muangthai maupun Malaysia-Singapura.

Pertemuan itu didahului dengan pertemuan para pejabat tinggi Departemen Energi ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 19-20 Juni 1989, dipimpin oleh Sekjen Departemen Energi, Pos dan Telekomunikasi Malaysia, Dr. Othman Yeop Abdullah, untuk membahas: (1) agenda sidang para Menteri Energi ASEAN ke-8; (2) pengembangan mini hidro dan mikro hidro, pelatihan, standardisasi serta penelitian dan pengembangan energi; (3) kembali proyek-proyek yang sedang dibangun dan kemungkinan menggalang kerjasama di bidang-bidang baru; (4) pencarian sumber dana tambahan bagi pusat riset, manajemen dan pelatihan energi ASEAN-MEE yang dibentuk di Jakarta, November 1988 (*Antara*, 20 Juni 1989).

Para Menteri Energi ASEAN sepakat untuk: (1) melaksanakan program aksi persetujuan keamanan bahan bakar minyak ASEAN (ASPA atau *ASEAN Petroleum Security Agreement*); (2) menerima syarat baru yang akan mendukung kegiatan kelompok ahli batu bara ASEAN yang mencakup: (a) peningkatan kerjasama dengan Negara-negara Ketiga; (b) penggalakan hubungan antara kelompok ahli dan sektor swasta; (3) menangani rencana aksi aplikasi komersial dari teknologi di kawasan ASEAN di bidang sumber energi baru dan yang dapat diperbarui. Di samping itu, negara-negara ASEAN non-OPEC mengharapkan agar kestabilan harga minyak OPEC dapat tetap terjamin (*Antara*, 24 Juni 1989).

3. Pasar Industri Peralatan Listrik

Dirjen Listrik dan Energi Baru Indonesia, Arismunandar, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 29 Juli 1989 bahwa: (1) kerjasama perusahaan listrik ASEAN merupakan salah satu pasar yang potensial bagi industri peralatan listrik Indonesia; (2) dengan memanfaatkan kerjasama perusahaan listrik ASEAN, hasil industri peralatan listrik Indonesia yang bermutu tinggi harus dapat merebut pasaran ASEAN; (3) transformator merupakan salah satu industri peralatan listrik Indonesia yang dapat berperan sebagai komoditi ekspor non-migas, terutama untuk melayani kebutuhan perusahaan listrik di ASEAN (*Merdeka*, 31 Juli 1989).

B. KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMASI

1. Konperensi Para Redaktur ASEAN

Konperensi Para Redaktur ASEAN ke-4 berlangsung di Pulau Langkawi, Malaysia, tanggal 14-18 Agustus 1989, dihadiri oleh 70 orang yang terdiri dari para redaktur dan ahli di berbagai bidang untuk membahas: (1) pertukaran berita ASEAN; (2) perluasan peliputan media ASEAN; (3) promosi pariwisata ASEAN melalui media; (4) latihan kewartawanan ASEAN (*Suara Pembaruan*, 12 Agustus 1989).

Sambutan tertulis Menteri Penerangan Malaysia, Mohamed Rahmat, pada pembukaan pertemuan itu sebagai berikut: (1) ia menantang kantor-kantor berita ASEAN untuk menyajikan laporan-laporan yang luas, tepat pada waktunya dan baik mengenai pembangunan yang berlangsung di negara-negara ASEAN; (2) kantor-kantor berita ASEAN agar menyediakan berita-berita yang dibutuhkan pelanggan, seperti surat kabar dan media elektronik; (3) laporan-laporan agar mencakup profil para tokoh utama politik dan usaha di wilayah ASEAN; (4) laporan agar lebih banyak berupa liputan film, buku, kesusastraan dan kebudayaan; (5) hanya dengan mengambil satu langkah yang lebih berani, media itu dapat memainkan peranan penting dalam pemupukan hubungan yang lebih erat mengenai basis antar bangsa di wilayah ASEAN; (6) komite kebudayaan dan informasi ASEAN (COCI) yang merupakan mekanisme kelompok itu harus lebih meningkatkan hubungan dua bidang yang ditanganinya, sedangkan para profesional di bidang media hendaknya membantu meningkatkan hubungan pada tingkat yang mendasar; (7) COCI agar memperluas liputan kegiatan-kegiatan seni,

musik dan informasi yang memungkinkan kehidupan sehari-hari penduduk kawasan ASEAN dapat dilaporkan secara meluas dalam pers ASEAN; (8) media mempunyai peranan dalam pemeliharaan stabilitas politik, percepatan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, peningkatan kesatuan regional dan mempertinggi pengembangan sumber daya manusia (*Antara*, 15 Agustus 1989); (9) banyak sukses yang diraih ASEAN selama ini disebabkan oleh peranan positif dan aktif medianya, terutama dalam hal pengakuan dunia tentang stabilitas dan dinamika ASEAN; (10) redaktur maupun wartawan adalah pembuat kejadian, karenanya agar membuat liputan-liputan ASEAN yang berguna bagi dunia; (11) kecuali Brunei dan Singapura, kantor-kantor berita ASEAN selama ini sudah menjalin kerjasama pertukaran berita dalam ANEX (*ASEAN News Agency Exchanges*) (*Suara Pembaruan*, 18 Agustus 1989).

Hasil pertemuan itu antara lain: (1) Singapura dan Brunei Darussalam yang belum mempunyai kantor berita sendiri bersedia untuk ikut serta dalam pertukaran berita ASEAN; (2) kedua negara itu akan menunjuk organisasi pers di negaranya untuk melakukan pertukaran berita. Di samping itu hasil-hasil lainnya yang berupa rekomendasi dan resolusi adalah sebagai berikut: (1) mengusulkan agar kantor-kantor berita ASEAN menyetujui strategi bersama membentuk suatu kader wartawan yang mahir dalam berbahasa Inggris untuk menangani berita-berita ASEAN; (2) mengusulkan agar lebih banyak laporan-laporan analisa dan latar-belakang, karangan khas dan artikel-artikel mengenai ekonomi dikirimkan melalui ANEX; (3) menganjurkan semua media ASEAN melakukan koordinasi dan pendekatan terintegrasi dalam bidang pendidikan dan latihan, untuk menghasilkan wartawan yang sadar akan kepentingan dan kebutuhan nasional maupun regional; (4) menyerukan pembentukan laboratorium jurnalistik untuk mendidik para wartawan ASEAN dalam penulisan berita; (5) mengusulkan agar dibentuk suatu komisi untuk menjajaki kemungkinan pembiayaan penerbitan buku-buku mengenai penulisan berita dan buku-buku referensi; (6) mengusulkan agar dilakukan pertukaran kunjungan penulis pariwisata sebelum *Visit ASEAN Year 1992*; (7) mendesak kantor-kantor berita ASEAN membuat suatu kesepakatan untuk mengangkat ataupun mengutip berita atau artikel surat kabar, khusus mengenai berbagai masalah untuk memenuhi kepentingan para pemakai akhir; (8) sepakat untuk menyelenggarakan konperensi Redaktur ASEAN ke-5 di Muangthai tahun 1991 (*Suara Pembaruan*, 19 Agustus 1989).

2. Pertukaran Kunjungan Wartawan ASEAN

Ketika menerima kunjungan wartawan dari Muangthai, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina, tanggal 15 Agustus 1989, Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Indonesia, Dr. Janner Sinaga, mengatakan: (1) pertukaran kunjungan wartawan antar negara anggota ASEAN perlu ditingkatkan; (2) kerjasama ASEAN, khususnya di bidang pers, baik media cetak maupun elektronika, sangat penting untuk meningkatkan pertukaran kunjungan wartawan ASEAN; (3) kerjasama pers ASEAN penting untuk memperkokoh dan meningkatkan pengetahuan masyarakat kawasan ini tentang proses dan kemajuan pembangunan di negara-negara anggota ASEAN; (4) para wartawan itu diharapkan dapat menulis di media mereka tentang pelaksanaan pembangunan dan berbagai perkembangan yang dilihat di Indonesia (*Antara*, 16 Agustus 1989).

C. KERJASAMA HUKUM ASEAN

1. Konperensi Mahasiswa Hukum ASEAN (ALSC) ke-1

Konperensi Mahasiswa Hukum ASEAN (*ASEAN Law Students Conference* atau ALSC) yang dihadiri oleh delegasi Mahasiswa Malaysia (5 orang), Indonesia (5 orang), Singapura (5 orang) dan Filipina serta Muangthai (masing-masing 2 orang), ke-1 berlangsung di Jakarta tanggal 15-20 Mei 1989, untuk: (1) meningkatkan kerjasama hukum melalui sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan serta pengembangan pendidikan hukum di negara-negara ASEAN; (2) memilih pengurus dan menetapkan pelaksanaan pertemuan rutin organisasi.

Brunei tidak mengirimkan delegasinya karena belum ada fakultas hukum di negara itu.

Hasil konperensi antara lain: (1) mengangkat Ketua Ikatan Mahasiswa Hukum Indonesia, Firoso Gaffar, sebagai Sekjen ALSC periode 1989-1991; (2) menetapkan pertemuan organisasi ini setiap dua tahun sekali dan pertemuan ke-2 akan diselenggarakan di Kuala Lumpur tahun 1991; (3) sepakat untuk meningkatkan kerjasama hukum secara bilateral, karena masih ada perbedaan hukum di setiap negara anggota; (4) sepakat mengadakan pertukaran mahasiswa hukum antar negara-negara anggota ASEAN (*Angkatan Bersenjata*, 22 Mei 1989).

2. *Kerjasama Penegakan Hukum*

Jaksa Agung Indonesia, Soekarton Marmosoedjono SH, mengatakan kepada *Antara* di Kuala Lumpur tanggal 1 Juli 1989 bahwa: (1) para Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman negara anggota ASEAN sepakat untuk mengadakan kerjasama penegakan hukum, walaupun terdapat perbedaan dalam sistem hukumnya; (2) mereka menyarankan agar diselenggarakan konperensi para Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman se-ASEAN ke-1 (kemungkinan akan diadakan di Jakarta, tahun 1990). Konperensi itu akan didahului oleh pertemuan para pejabat tinggi Kementerian Kehakiman dan Kejaksaan Agung untuk mempersiapkan materi pembicaraan; (3) masalah spesifik tentang inventarisasi istilah hukum yang mungkin dapat dicocokkan antara Indonesia, Malaysia dan Brunei yang menggunakan bahasa Melayu akan dibicarakan dalam pertemuan itu, hal ini diperlukan untuk menghindari salah tafsir, misalnya hukuman seumur hidup di Malaysia hanya sampai 20 tahun sedangkan di Indonesia benar-benar dilaksanakan sampai mati; (4) Jaksa Agung Brunei dan Jaksa Agung serta Menteri Kehakiman Malaysia sepakat untuk mencocokkan istilah-istilah hukum kedua negara; (6) Indonesia, Brunei dan Malaysia dapat mengadakan kerjasama dalam peristilahan hukum; (7) pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara negara-negara ASEAN tidak menemui kesulitan dan berjalan lancar; (8) Indonesia sudah mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, Muangthai dan Filipina, sementara itu dengan Brunei Darussalam dan Singapura belum ada; (9) meskipun belum ada perjanjian ekstradisi dengan kedua negara itu, bukan berarti menutup kemungkinan untuk melakukan kerjasama di bidang ini; (10) Jaksa Agung Singapura menyatakan bersedia membantu menangkap penyelundup atau buron dari Indonesia yang berada di negaranya dengan cara menyatakan mereka sebagai pendatang haram; (11) Indonesia baru mengadakan tukar-menukar pengalaman di bidang pendidikan hukum dengan Muangthai melalui perjanjian yang konkrit, dan pada bulan Juli 1989 Muangthai akan mengirimkan 4 orang jaksa untuk mengikuti pendidikan jaksa anti korupsi di Jakarta; (12) tindakan keras Pemerintah Indonesia terhadap tindak pidana ekonomi seperti penyelundupan, korupsi, asuransi dan perbankan telah terdengar di dunia internasional; (13) Indonesia mendapat pengakuan internasional dalam pelaksanaan penegakan hukum secara konsekuen untuk melindungi kepentingan rakyat, hal ini terbukti dengan banyaknya undangan untuk mengikuti konperensi internasional tentang tindak pidana ekonomi; (14) kerjasama dan penegakan hukum

secara internasional sangat dibutuhkan, terutama untuk menanggulangi kejahatan perbankan, maritim, penyelundupan, narkoba dan kejahatan ekonomi lainnya (*Angkatan Bersenjata*, 14 Juli 1989).

IV. MASALAH KEAMANAN

A. STABILITAS DAN KEMAJUAN ASEAN

PM Singapura, Lee Kuan Yew, mengatakan dalam pidato tahunan Hari Nasional Singapura tanggal 20 Agustus 1989 bahwa: (1) Presiden Soeharto merupakan faktor paling penting yang menentukan stabilitas dan kemajuan di seluruh kawasan ASEAN; (2) Presiden Indonesia mendatang harus seperti Presiden Soeharto terutama dalam prinsip-prinsip dasar dan kebijaksanaan, yang semua ini akan membuat ASEAN tumbuh pesat, makmur dan damai; (3) Presiden Soeharto merupakan seorang pemimpin yang mempunyai sikap dan sifat yang menekankan pembangunan ekonomi dan mendorong hubungan kerjasama dengan menciptakan saling percaya, sehingga ASEAN menarik para investor dan pemerintah di luar kawasan ini; (4) jika pengganti Soeharto nanti seorang yang sama dalam prinsip dasar dan kebijaksanaan, ASEAN akan tumbuh, makmur dan damai dan tidak hanya sekedar ZOPFAN; (5) Presiden Soeharto menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan sejumlah upaya untuk melembagakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya. ASEAN akan tumbuh dan menjadi makmur jika semua upaya ini terjamin sebelum Presiden Soeharto mengundurkan diri; (6) Presiden Soeharto tidak memperlihatkan keprihatinannya ketika dia mengemukakan rencana Singapura menyediakan fasilitas militer bagi AS dalam pertemuan di Brunei Darussalam tanggal 2 Agustus 1989; (7) ia tidak pernah melihat Presiden Soeharto bimbang dan selalu menunjukkan posisinya (*Kompas*, 22 Agustus 1989).

B. MASALAH PANGKALAN MILITER AS

1. *Kesediaan Singapura Menampung Fasilitas Militer AS*

Menteri Negara Urusan Luar Negeri Singapura, Brigjen George Yeo, mengatakan kepada Parlemen tanggal 4 Agustus 1989 bahwa: (1) negaranya bersedia menampung fasilitas-fasilitas AS untuk mempermudah Filipina mempertahankan pangkalan-pangkalan militer AS; (2) Filipina menginginkan agar negara-negara ang-

gota ASEAN lainnya menampung fasilitas-fasilitas militer AS; (3) setiap peningkatan kehadiran militer AS di Singapura akan mendorong stabilitas regional dan bukan untuk meningkatkan permusuhan antara negara-negara adikuasa; (4) kunjungan tim survei AS ke Singapura pada bulan Juni 1989 untuk mempelajari fasilitas AL dan AU serta menentukan sesuatu yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh militer AS. Hasil survei itu menunjukkan, Singapura mungkin tidak dapat memberikan ruang dan lokasi strategis bagi kompleks pangkalan angkatan udara dan laut AS; (5) kunjungan itu pun hanya bersifat penjajakan dan tidak menyiratkan komitmen kedua pihak atas penempatan pangkalan AS di Singapura. Selain itu juga tidak mengurangi keterikatan negaranya pada pengaturan pertahanan lima negara dan Singapura tetap konsisten dengan prinsip-prinsip gerakan nonblok; (6) negaranya mendukung tujuan ASEAN untuk menciptakan kawasan damai, bebas dan netral (ZOPFAN) dalam jangka panjang; (7) untuk mencapai tujuan ZOPFAN, suatu kehadiran AS yang berkesinambungan di Asia Tenggara diperlukan. Hal ini juga perlu untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan (*Antara*, 5 Agustus 1989).

2. Reaksi dan Komentar

Menanggapi tawaran Singapura itu, setidaknya-tidaknya ada dua sikap utama, yakni menolak dan menyetujuinya. Malaysia tampaknya cenderung untuk menolak gagasan Singapura itu, apabila Singapura akan dijadikan pangkalan militer AS. Sebaliknya Muangthai cenderung untuk menyetujuinya. Sementara itu, Indonesia masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

Secara rinci sikap-sikap itu tergambar dalam pernyataan berikut ini:

a. Sikap Malaysia

Menteri Pertahanan Malaysia, Tengku Ahmad Rithauden, mengatakan kepada *The Straits Time* tanggal 6 Agustus 1989 bahwa: (1) negaranya akan tetap setia dengan prinsip ZOPFAN dan mengharapkan anggota-anggota ASEAN lainnya tetap setia dengan komitmen itu; (2) proses menuju ZOPFAN harus sejalan dengan proses berakhirnya pangkalan-pangkalan militer asing di kawasan ini; (3) Menlu Singapura, Wong Kan Seng, telah memberitahu Menlu Malaysia, Abu Hasan Omar, tentang tawaran itu ketika berkunjung ke Kuala Lumpur, Juli 1989 (*Pelita*, 8 Agustus 1989).

Sekjen Deplu Malaysia, Kamil Jaafar, juga mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 8 Agustus 1989 bahwa: (1) Malaysia menentang setiap kehadiran militer AS di Singapura, karena selain bertentangan dengan upaya peredaan Timur-Barat, juga bertentangan dengan prinsip ZOPFAN; (2) Malaysia tidak melihat alasan untuk memperkenankan suatu pangkalan militer lain setelah di Filipina dan di Vietnam (*Suara Pembauran*, 9 Agustus 1989).

Deputy Menlu Malaysia, dr. Abdullah Fadzil Che Wan, mengatakan kepada pers di Ipoh, tanggal 9 Agustus 1989 bahwa: (1) anggota-anggota ASEAN agar menyatakan pendiriannya atas keinginan Singapura itu; (2) negaranya telah memperingatkan implikasi-implikasi yang mungkin timbul; (3) sejauh ini Singapura belum memberikan tanggapan atas pendirian Malaysia; (4) keinginan Singapura itu akan mengganggu konsep ZOPFAN dan cita-cita ASEAN untuk membebaskan senjata nuklir dari kawasan ini seperti yang dinyatakan oleh KTT ASEAN di Manila 1987 (*Antara*, 11 Agustus 1989).

PM Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan kepada *Washington Post* di Washington tanggal 8 Agustus 1989 bahwa: (1) belum waktunya bagi AS untuk menarik diri dari wilayah Asia Tenggara meskipun ketegangan wilayah tampaknya mulai mereda sebagai akibat dari usaha-usaha perdamaian Uni Soviet serta prospek penyelesaian Kamboja; (2) pengurangan apa pun dari kehadiran militer AS agar dilakukan sejalan dengan langkah-langkah tertentu Uni Soviet, seperti penarikan pasukan Soviet dari Cam Ranh di Vietnam; (3) sekarang belum saatnya membicarakan pengosongan pangkalan-pangkalan AS dari Filipina; (4) Malaysia berkeberatan bila tujuan Singapura itu untuk menempatkan pasukan AS di negara itu. Malaysia tidak senang melihat pesawat-pesawat AS berpangkalan di Singapura atau sebagian Singapura berubah menjadi pangkalan angkatan laut AS. Tetapi negaranya tidak keberatan jika Singapura menyediakan fasilitas untuk perbaikan dan pelayanan lain bagi pasukan AS (*Antara*, 14 Agustus 1989).

Menlu Malaysia, Abu Hassan Omar, mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 12 Agustus 1989 bahwa: (1) ASEAN seharusnya bertemu untuk membicarakan kemungkinan kehadiran pangkalan AS di Singapura. Pertemuan itu wajar karena mereka terikat pada konsep ZOPFAN agar wilayah ini tetap bebas dari persaingan negara adikuasa; (2) Menlu Singapura, Wong Kan Seng, telah memberitahu tentang usul itu

dan akan menjelaskan kepada Malaysia segera sesudah AS membuat keputusan; (3) Malaysia keberatan atas sikap Singapura itu karena kehadiran militer AS itu merupakan pelanggaran atas konsep ZOPFAN dan akan menimbulkan masalah pada wilayah udara Malaysia; (4) negaranya akan menyatakan pendiriannya setelah secara teknis AS selesai melakukan penelitian dan membuat keputusan, karena sampai sejauh ini belum ada kepastian apakah AS setuju menerima tawaran Singapura (*Antara*, 14 Agustus 1989).

b. Sikap Muangthai

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Muangthai, Jent Stcaritkul, mengatakan kepada pers di Bangkok tanggal 12 Agustus 1989 bahwa: (1) usul Singapura untuk menyediakan tempat bagi fasilitas militer AS merupakan masalah bilateral yang tidak memerlukan suatu pendirian regional; (2) usul Singapura itu bukan hal yang baru dan setiap negara anggota ASEAN memiliki hak kedaulatan untuk memutuskan sikapnya; (3) Singapura sudah lama memperoleh devisa dari galangan kapal modernnya dan kapal-kapal dari semua bangsa, termasuk kapal dari AS dan Uni Soviet, telah singgah di dok daratnya untuk melakukan perbaikan dan perawatan; (4) meskipun Muangthai tidak berkeberatan atas usul itu, tetapi pangkalan AS itu dapat menjadi masalah yang sangat peka; (5) sejauh ini fasilitas-fasilitas yang ditawarkan Singapura itu bukan merupakan pangkalan militer sepenuhnya, tetapi hanya fasilitas perawatan kapal dan pelabuhan; (6) Malaysia hendaknya menyusun suatu kerangka bilateral dengan Singapura untuk menjernihkan kekisruhan mengenai sifat jangkauan dan perincian reneana yang diusulkan itu; (7) ASEAN seharusnya mendengarkan Filipina yang secara langsung terlibat dalam masalah ini (*Kompas*, 13 Agustus 1989).

Ketua Badan Keamanan Nasional Muangthai, Suvit Suthanukul, mengatakan: (1) usul Singapura itu akan membantu meredakan ketegangan politik di Filipina; (2) secara global, pangkalan militer AS beserta kekuatan udara, laut, daratnya di wilayah Asia Tenggara dan Asia-Pasifik perlu dipertahankan; (3) kepergian kekuatan AS akan menimbulkan kekosongan kekuatan yang membahayakan Asia-Pasifik; (4) meskipun reneana untuk memindahkan sebagian pangkalan AS ke Singapura masih dipelajari, namun Muangthai tidak menentang perpindahan itu (*Antara*, 13 Agustus 1989).

c. Sikap Indonesia

Sekembalinya dari menghadiri Konperensi Internasional tentang Kamboja, Menlu Ali Alatas mengatakan kepada pers di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 6 Agustus bahwa: (1) sikap Indonesia terhadap usul Singapura untuk menjadi tempat fasilitas militer AS masih menunggu perkembangan lebih lanjut; (2) sejauh ini usul itu baru memasuki tahap survei dan belum ada komitmen antara kedua pihak; (3) sebelumnya Singapura sudah menjelaskan kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk tetap mendukung konsep ZOPFAN. Di samping itu Singapura juga akan memperhatikan pandangan-pandangan anggota ASEAN lainnya, jika tawaran itu harus direalisasikan; (4) mungkin yang dikehendaki kedua pihak adalah untuk meningkatkan penggunaan fasilitas militer yang sudah ada di Singapura (*Angkatan Bersenjata*, 8 Agustus 1989).

Mantan Menlu Mochtar Kusumaatmadja mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 8 Agustus 1989 bahwa: (1) tawaran Singapura itu mengandung hikmah bagi para pemikir strategi militer ASEAN untuk memikirkan kemungkinan menggalang suatu kerjasama militer ASEAN yang konsepsional, karena minimal sudah ada dua Menlu ASEAN yaitu Singapura dan Malaysia mengungkapkan nada yang serupa; (2) kerjasama militer ASEAN sebenarnya sudah ada yaitu berupa pertukaran informasi dan intelijen, upaya menggunakan alat militer yang sama, penyediaan fasilitas latihan dan bentuk kerjasama militer lainnya, kerjasama militer yang didasarkan pemikiran konsepsional dari ASEAN belum ada; (3) sikap hati-hati Indonesia tentang kerjasama militer dapat dimengerti, tetapi keinginan anggota-anggota ASEAN lainnya untuk mengadakan kerjasama semacam itu perlu dipikirkan secara serius; (4) kerjasama semacam itu jangan berupa pakta militer, karena hal itu mengandung pengertian dibentuk untuk menghadapi lawan; (5) pemikiran ini dilandaskan pada kenyataan mengenai beberapa bentuk kerjasama militer di kawasan ASEAN yang melibatkan pihak luar; (6) sebagian dari bentuk kerjasama militer itu merupakan peninggalan sejarah yang diteruskan karena tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu, sudah waktunya bagi ASEAN untuk memikirkan suatu pilihan yang didasarkan pada konsepsi sendiri; (7) ada tiga hal yang mungkin menjadi motivasi Singapura: (a) negara itu ingin memperoleh lebih banyak keuntungan dari jasa perbaikan atau perawatan kapal-kapal AS yang selama ini sudah dilakukannya; (b) ia merasa baliwa berkurangnya kehadiran AS di kawasan ini, akan mengurangi kescim-

bangun kekuatan militer di kawasan ASEAN; (c) ia ingin membantah argumenasi bahwa di antara ASEAN, hanya Filipina yang mengandung beban menjadi tuan rumah kehadiran AS; (8) Singapura akan memegang teguh pada pernyataannya, yaitu mengundang AS hanya untuk memanfaatkan fasilitas militer dan bukan untuk menempatkan pangkalan militer (*Antara*, 9 Agustus 1989).

Pangab Jenderal TNI Try Sutrisno mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 10 Agustus 1989 bahwa: (1) semua negara ASEAN masih tetap memegang teguh dan menghormati kesepakatannya mengenai ZOPFAN; (2) di kawasan ASEAN telah timbul ketahanan regional yang berasal dari ketahanan nasional masing-masing anggotanya dan persahabatan ASEAN juga semakin kuat; (3) kerjasama militer ASEAN saat ini telah baik dan tidak memerlukan latihan bersama enam negara sekaligus (*Antara*, 10 Agustus 1989).

Menteri Polkam RI, Sudomo, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 14 Agustus 1989 bahwa: (1) terlalu pagi untuk memberikan pendapat mengenai tawaran Singapura itu, selain karena pokok permasalahan belum jelas juga perlu mengumpulkan keterangan yang lengkap dan menyeluruh tentang maksud Singapura. Indonesia tetap belum dapat memberikan komentar lebih jauh, menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah Singapura; (2) pernyataan pemerintah Singapura itu ibarat balon yang dilemparkan untuk memancing reaksi (*Suara Pembaruan*, 15 Agustus 1989).

Menlu Ali Alatas mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 15 Agustus 1989 bahwa: (1) persatuan dan solidaritas ASEAN cukup kuat dan telah berkembang cukup mantap untuk membedakan antara masalah pokok dan sampingan; (2) keinginan dan pernyataan Singapura belum jelas, karena masih dalam taraf penja-jakan; (3) untuk menghadapi setiap perkembangan di ASEAN, kita tetap berpegang pada landasan pokok yang telah disepakati bersama; (4) prinsip kerjasama ASEAN mengenai sikap dasar untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas bersama di kawasan ini sudah jelas sekali (*Pelita*, 16 Agustus 1989).

d. Sikap Filipina

Presiden Corazon Aquino mengatakan di Manila tanggal 8 Agustus 1989 bahwa: (1) tawaran Singapura sebagai tuan rumah fasilitas militer AS tidak akan merupakan suatu faktor penting dalam penentuan masa depan pangkalan Subic dan Clark di Filipina; (2) yang

menjadi dasar pertimbangan paling utama untuk mengambil keputusan adalah kemampuan pangkalan-pangkalan itu untuk mendukung kepentingan nasionalnya; (3) pada bulan Desember 1989, negaranya akan menyelenggarakan perundingan-perundingan dengan AS mengenai masalah itu (*Suara Pembaruan*, 9 Agustus 1989).

Ketua Dewan Keamanan Nasional Filipina, Rafael Ileto, mengatakan kepada pers di Manila tanggal 7 Agustus 1989: (1) Presiden Corazon Aquino akan berkunjung ke Washington tanggal 8 November 1989 untuk membahas masalah masa depan pangkalan AS di Filipina; (2) Dewan Keamanan Nasional negaranya telah mengkaji pengaturan keamanan dengan Washington, termasuk persetujuan pangkalan yang akan berakhir masa berlakunya bulan September 1991; (3) Dewan Keamanan Nasional Filipina menyadari pentingnya mencari pemecahan lebih awal mengenai masalah pangkalan militer itu dan memutuskan untuk mempercepat penyelesaian rencana penggunaan alternatif fasilitas-fasilitas militer AS serta memodernkan Angkatan Bersenjata Filipina; (4) Presiden Aquino telah memerintahkan untuk mengkaji penggunaan bekas pangkalan itu, setelah AS menarik diri secara sebagian atau secara keseluruhan (*Pelita*, 8 Agustus 1989).

Pada saat yang sama, Menlu Manglapus mengatakan kepada Harian *Straits Times* bahwa: (1) tawaran itu akan mempunyai implikasi cukup besar pada pembicaraan mengenai masa depan kedua pangkalan AS tersebut; (2) tawaran Singapura itu sungguh-sungguh, karena Filipina sudah diberitahu secara formal (*Pelita*, 8 Agustus 1989).

Menlu Filipina, Raul Manglapus, mengatakan kepada pers di Manila tanggal 16 Agustus 1989 bahwa: (1) negaranya mendukung penyelenggaraan suatu konsultasi regional tingkat tinggi mengenai tawaran Singapura untuk menampung pangkalan militer AS; (2) Malaysia telah memberitahukan kepada Dubes Filipina di Kuala Lumpur bahwa seharusnya Singapura berkonsultasi terlebih dahulu dengan Malaysia karena penggunaan fasilitas seperti itu akan melibatkan penggunaan wilayah udara dan laut Malaysia; (3) kepentingan dalam negeri adalah lebih penting daripada kepentingan regional, tetapi kepentingan regional hendaknya juga mendapat pertimbangan yang serius; (4) Filipina ingin mengetahui sikap Singapura sesungguhnya tentang kelanjutan kehadiran AS di Filipina dan di Asia Tenggara pada umumnya (*Antara*, 17 Agustus 1989).

e. Sikap Singapura

Dalam siaran persnya tanggal 7 Agustus 1989 Partai Demokrasi Singapura (SDP) mengatakan bahwa: (1) SDP menentang pembangunan fasilitas militer AS di Singapura karena akan meningkatkan ancaman perang bagi negaranya; (2) SDP tidak dapat memahami pergeseran kebijaksanaan luar negeri negaranya dari netralitas tradisional menjadi kebijaksanaan yang memiliki pakta de facto dengan sebuah negara adikuasa; (3) walaupun berterima kasih kepada AS atas perlindungan strategisnya sehingga memungkinkan negara-negara anggota ASEAN berkembang tanpa gangguan, tetapi SDP tidak begitu setuju pada sikap AS untuk menggunakan fasilitas Singapura; (4) SDP tidak dapat mengerti bagaimana kehadiran pasukan AS di Singapura tidak akan mengganggu konsensus ASEAN tentang ZOPFAN; (5) pembangunan fasilitas penyimpanan persenjataan AS akan sangat meningkatkan ancaman perang di Singapura, karena jika AS membangun sebuah pusat elektronik dan komunikasi rahasia, maka Soviet akan merasa berkewajiban menetralkan (Antara, 9 Agustus 1989).

Di pihak lain, Menlu Singapura, Wong Kan Seng, mengatakan di Singapura tanggal 12 Agustus 1989: (1) bila AS menarik kekuatan militernya dari Asia Tenggara akan terjadi suatu pergulatan di kalangan negara-negara besar yang sedang menanti di garis pinggir; (2) kekosongan yang ditimbulkan oleh penarikan pasukan AS itu dapat diisi oleh Uni Soviet, Jepang, Cina ataupun India; (3) negara-negara non-komunis agar membantu mempertahankan kehadiran AS, karena kepergiannya akan mengganggu stabilitas kawasan; (4) ia percaya, tidak satu pun negara ASEAN menginginkan penarikan pasukan AS dalam waktu dekat, karena mundurnya satu kekuatan militer dari sebuah daerah, selalu akan diisi oleh suatu kekuatan atau kekuatan-kekuatan besar yang lain; (5) tawaran negaranya dibuat untuk menunjukkan kepada Filipina bahwa negara-negara lain bersedia berbagi beban politik atas keberadaan pangkalan AS di Asia Tenggara (Antara, 14 Agustus 1989). Lebih lanjut ia mengatakan: (1) AS kini memiliki dua fasilitas militer di Filipina, tetapi kehadirannya menimbulkan polemik; (2) Singapura mempunyai hak berdaulat untuk membuat keputusan-keputusan sendiri mengenai masa depannya tanpa campur-tangan pihak luar; (3) Singapura memang tidak mengharapkan para tetangga sepenuhnya menyetujui sikapnya; (4) masalah-masalah dalam negeri yang menyangkut defisit

anggaran dan perdagangan, barangkali merupakan sebab utama AS untuk menarik kehadirannya; (5) Jepang, Cina dan India semakin kuat untuk mengimbangi angkatan laut AS dan Uni Soviet; (6) pemerintahnya telah berpikir dengan hati-hati mengenai konsekuensi penarikan pasukan AS dari kawasan ini secara mendadak. Tetapi tidak bijaksana, mendorong penarikan kekuatan AS dari kawasan ini secara tergesa-gesa; (7) kehadiran AS sangat bermanfaat bagi ASEAN, karena dapat menyediakan lingkungan yang damai sehingga negara-negara non-komunis dapat melaksanakan pembangunan (Suara Karya, 14 Agustus 1989).

Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, mengatakan dalam rapat umum Hari Nasional tanggal 13 Agustus 1989 bahwa: (1) Asia Tenggara tidak dapat mengharapkan terbentuknya ZOPFAN di wilayah itu, kecuali jika negara-negara besar siap menyetujui dan menjaminkannya. Sejauh ini Washington, Moskow dan Beijing belum menyetujui konsep tersebut; (2) India sebagai suatu kekuatan militer yang semakin menanjak di wilayah ini harus diminta untuk menyetujui konsep ZOPFAN agar konsep ini berhasil; (3) ia sudah menjelaskan kepada negara-negara ASEAN lainnya mengenai maksud Singapura untuk menyediakan fasilitas AS itu; (4) ia telah meyakinkan PM Mahathir Mohamad bahwa negaranya tidak bermaksud menampung ribuan pasukan AS dan penjelasan itu diterima baik; (5) tawaran negaranya itu untuk meringankan beban Filipina dalam penyediaan tempat bagi pangkalan militer AS; (6) jika tawaran itu tidak banyak membantu Filipina maka tawaran itu tidak akan dibuat karena Singapura ingin membantu rekannya dan mempertahankan keseimbangan stabilitas di seluruh wilayah ini; (7) konsep ZOPFAN serupa dengan Zona Damai di Samudra Hindia (IOZOP atau *Indian Ocean Zone of Peace*) yang diusulkan Sri Lanka dan didukung AS, tetapi tetap tidak dapat mencegah terjadinya ketegangan-ketegangan di anak benua itu; (8) Presiden Soeharto tidak berkeberatan atas maksud Singapura itu; (9) dalam satu dasawarsa mendatang tidak ada satu pun kekuatan yang dapat menggantikan AS di kawasan ini, tetapi dalam 20-30 tahun mendatang situasi strategis di kawasan Pasifik Barat akan menjadi rumit setelah negara-negara di kawasan ini mendapat tekanan militer yang lebih besar; (10) sambil menunggu gagasan ZOPFAN mendapat jaminan, Singapura akan membuat rencana-rencana lainnya (Suara Pembaruan, 22 Agustus 1989).

f. Sikap AS

Juru bicara Deparlu AS, Adam Shub, mengatakan kepada pers di Washington tanggal 9 Agustus 1989 bahwa: (1) pembicaraan mengenai kemungkinan pembukaan pangkalan militer AS di Singapura tidak ada kaitannya dengan masa depan pangkalan-pangkalan AS di Filipina; (2) ide memperluas kehadiran AS di Singapura sangat menarik, mengingat lokasinya yang strategis; (3) AS tetap optimis dapat mencapai persetujuan dengan Filipina secara memuaskan; (4) AS belum membuat komitmen ataupun keputusan mengenai kemungkinan pembukaan fasilitas di Singapura dan kedua pihak masih membahas kemungkinan kerjasama keamanan yang lebih kuat untuk beberapa waktu. Di samping itu kunjungan tim teknis militer AS ke Singapura bulan Juni 1989 hanya untuk mengamati fasilitas yang dapat disediakan Singapura (*Antara*, 10 Agustus 1989).

Duta Besar AS untuk Filipina, Nicholas Plat, mengatakan kepada pers di Manila tanggal 10 Agustus 1989: (1) ia yakin negaranya dan Filipina mampu membentuk suatu persetujuan pangkalan yang cukup memuaskan; (2) negara-negara di wilayah ini ingin melihat fasilitas AS di Filipina tetap dipakai; (3) pembangunan yang sedang dilaksanakan di pangkalan Clark akan diperlambat segera setelah pembicaraan masa depan pangkalan militer AS dimulai; (4) kehadiran militer AS di wilayah ini merupakan faktor stabilitas dan telah menimbulkan dampak penting pada perkembangan ekonomi kawasan selama dua dekade; (5) tawaran Uni Soviet untuk menarik pasukannya dari Cam Ranh sebagai pertukaran atas penarikan AS dari Filipina tidak ditanggapi oleh AS (*Antara*, 10 Agustus 1989).

Ketua Sub-komisi DPR AS Bidang Militer Urusan Instalasi Militer, Patricia Schroeder, mengatakan kepada pers di Manila tanggal 14 Agustus 1989 bahwa: (1) AS tidak dapat membayar lebih tinggi lagi untuk mempertahankan basis militer di Filipina; (2) tuntutan Filipina yang mencapai US\$1 lebih untuk sewa pangkalan terlalu tinggi karena AS hanya dapat menyetujui US\$481; (3) AS tidak hanya melindungi Filipina, tetapi juga melindungi jalur laut bagi Jepang, Korea Selatan, Muangthai, Singapura dan seluruh negara kecil di Asia Tenggara; (3) pemerintahnya membutuhkan banyak dana untuk berbagai proyek di dalam negerinya sendiri dan hendaknya negara-negara yang mengambil keuntungan dari kehadiran instalasi militer AS itu bersedia memikul beban keuangan; (4) kehadiran pangkalan AS di Filipina dapat menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan bahkan perbelanjaan personil militer AS memberi-

kan keuntungan tersendiri bagi perekonomian Filipina; (5) keprihatinan kongres AS semakin tinggi karena ketidakpastian mengenai masa depan pangkalan-pangkalan itu; (6) menurut ketentuan, perpanjangan perjanjian pemakaian pangkalan harus disetujui oleh dua pertiga dari 23 anggota Senat Filipina (*Kompas*, 15 Agustus 1989).

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Richard Boucher, mengatakan kepada pers di Washington tanggal 21 Agustus 1989 bahwa: (1) pemerintahnya masih terus mempelajari suatu laporan rahasia mengenai kemungkinan pendirian pangkalan AS di Singapura; (2) AS dan Singapura telah membicarakan kemungkinan kerjasama keamanan yang lebih besar untuk masa mendatang; (3) AS belum membuat keputusan atau komitmen apa pun sehubungan dengan tawaran Singapura itu, karena Singapura hanya menarik sehubungan dengan letaknya yang strategis di Pasifik (*Angkatan Bersenjata*, 24 Agustus 1989).

Komite Hubungan Luar Negeri AS, Dante Fascell, yang sedang berada di Muangthai, mengatakan kepada pers di Bangkok tanggal 24 Agustus 1989 bahwa: (1) kesediaan Singapura itu menunjukkan bahwa negara-negara non-komunis di Asia Tenggara membutuhkan kehadiran AS; (2) kesediaan Singapura itu diperkuat dengan pertemuan negara-negara anggota ASEAN tanggal 4 Agustus 1989; (3) kendatipun menjadi sahabat, anggota ASEAN mempunyai opini yang berbeda mengenai suatu masalah. Tetapi perbedaan itu jangan menghancurkan kerjasama ASEAN yang telah berlangsung lama; (4) AS memberikan penghargaan besar kepada Singapura yang telah bersedia memberikan keleluasaan negaranya untuk mengamankan kawasan ASEAN; (5) AS masih mengharapkan Filipina untuk memperpanjang kontrak pangkalan AS; (6) AS telah tiga kali mengirimkan delegasinya ke Filipina dan telah memperoleh tanda-tanda mengenai keinginan Filipina untuk memperpanjang kontrak itu (*Merdeka*, 24 Agustus 1989).

V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA-MITRANYA

A. PERTEMUAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOGNYA (PMC)

Seusai mengadakan sidang tahunan, para Menlu ASEAN mengadakan pembicaraan dengan mitra dialognya yang juga disebut PMC (*Post Ministerial Conference*) yang diwakili oleh Menlu AS, James Baker; Menlu Jepang, Hiroshi Mitsuzuka; Menlu Australia, Gareth Evans; Menlu Selandia Baru, Russel Marshall; Menlu Kanada, Joe Clark. dan Komisioner

Masyarakat Eropa, Juan Abel Matutes, di Bandar Seri Begawan, tanggal 6-8 Juli 1989, mengenai pembentukan forum kerjasama ekonomi Asia-Pasifik (usul PM Australia, Bob Hawke yang disampaikan di Seoul 31 Januari 1989), masalah Kamboja, hubungan ekonomi khusus AS-ASEAN, yang disebut sebagai inisiatif AS-ASEAN, hubungan ekonomi MEE-ASEAN sehubungan akan dibentuknya pasar tunggal di Eropa Barat, bantuan ekonomi Jepang kepada ASEAN, pengungsi Vietnam dan beberapa masalah politik, seperti konperensi internasional di Paris, situasi di RRC, hubungan Timur-Barat, Afghanistan, Afrika Selatan dan Timur Tengah.

Pertemuan itu akan dilangsungkan secara 6+6 (ASEAN dan enam negara mitra dialog) atau 6+5+1 (ASEAN, lima negara mitra dialog dan MEE) atau 6+1 (ASEAN dan satu persatu negara mitra dialog).

Dalam kesempatan itu, Wakil Menlu Perancis, Ny. Edwige Avice, hadir pula di Bandar Seri Begawan untuk mengadakan pembicaraan dengan para Menlu ASEAN mengenai persiapan konperensi internasional mengenai Kamboja di Paris.

Tema yang dibawa Menlu James Baker adalah *creative responsibility sharing*. Beberapa pengamat berpendapat bahwa tema ini, yang diartikan sebagai kemitraan global, sebenarnya ditujukan kepada Jepang yang perekonomiannya demikian maju agar mengambil-alih tanggung jawab global yang selama ini dipikul AS (*Suara Pembaruan*, 8 Juli 1989).

Mengenai rencana pembentukan Forum Perdagangan Asia-Pasifik, baru mencapai tahap penjajagan. Masalah ini akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan Canberra, bulan November 1989. Pada pembicaraan tentang masalah ini sebenarnya terjadi perdebatan sengit antara Australia dan MEE. Australia bersikeras menghalangi usaha MEE untuk memberikan suaranya dalam pertemuan yang sedang membahas kerjasama Asia-Pasifik itu. Apa yang sedang berlangsung ini dikatakan sebagai proses yang secara geografis bersifat regional. Sedangkan MEE menegaskan agar kawasan itu tidak diubah menjadi sebuah blok perdagangan baru. Dikatakan bahwa usul Australia itu bertentangan dengan semangat dan ketentuan GATT. MEE tidak dapat menerima kenyataan bahwa 50% dari cakupan perdagangannya sedang dibahas pihak lain tanpa dirinya terwakili untuk menyampaikan suaranya. Bila usul kerjasama itu mencapai kemajuan maka telah semestinya juga terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan. Kerangka yang paling tepat untuk membahas usul Australia itu adalah semacam PMC, yang juga mengikutsertakan MEE dan Australia (*Antara*, 10 Juli 1989).

Tentang masalah Kamboja, mereka memuji usaha Indonesia yang telah berusaha mengupayakan tercapai-

nya penyelesaian konflik Kamboja secara menyeluruh. Mereka menyambut baik rencana ICK di Paris yang akan datang.

Mengenai pengungsi Vietnam dikatakan bahwa beberapa negara di antara mereka menyanggupi untuk memberi bantuan, baik berupa dana keuangan maupun pemukiman kembali para pengungsi di negaranya.

Sedangkan mengenai pasar tunggal Eropa dijelaskan bahwa pembentukannya itu tidak akan membahayakan ASEAN, justru sebaliknya dapat memberi kemungkinan peningkatan hubungan kerjasama ASEAN-MEE.

Tentang hubungan ekonomi ASEAN dengan mitra-mitra dialognya itu dikatakan terus meningkat dan diharapkan akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Sidang itu juga ditandai dengan penyerahan instrumen tambahan (*Instruments of Accession*) pada Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation*) di Asia Tenggara dari Menlu PNG, Michael Somare, kepada Menlu Mohammed Bolkiah selaku Ketua Komite Tetap ASEAN dalam AMM ke-22 ini. Penyerahan yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 1989 itu berarti bahwa kini PNG merupakan negara bukan ASEAN pertama yang ikutserta dalam Perjanjian *Treaty of Amity and Cooperation* itu. Kerjasama yang ditandatangani di Bali tanggal 24 Februari 1976 itu diadakan untuk meningkatkan perdamaian, persahabatan dan kerjasama di antara rakyat-rakyat di Asia Tenggara.

Secara terinci pembahasan tentang masalah-masalah itu adalah sebagai berikut:

1. Hubungan ASEAN-Mitra Dialog

Wakil MEE, Juan Abel Matutes, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) langkah-langkah pencapaian pasaran bersama Eropa telah pasti. Pasaran ini justru menawarkan begitu banyak kesempatan bagi kompetisi, baik di Eropa maupun di kawasan dunia lainnya, termasuk kawasan Asia dan Amerika; (2) Eropa Barat merupakan pasaran kedua terbesar setelah AS dan kedua terbesar sebagai donor setelah Jepang. Investasi langsung Eropa Barat di kawasan Asia-Pasifik juga menunjukkan peningkatan dan 65 buah bank Eropa misalnya memiliki cabangnya di Singapura jumlah yang sama dengan di Tokyo; (3) pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran di Eropa benar-benar tergantung pada perdagangan internasional, baik dalam barang maupun jasa. Oleh sebab itu MEE mempunyai alasan kuat untuk mendukung pemecahan masalah perdagangan dan ekonomi global secara multilateral (*Antara*, 6 Juli 1989). Selanjutnya pada pembukaan dialog tanggal 6

Juli 1989, dia menjelaskan bahwa: (1) pembentukan pasaran tunggal Eropa mulai tahun 1992 akan menawarkan peluang-peluang baru bagi pertumbuhan negara-negara Asia Tenggara, masyarakat Eropa telah menawarkan suatu potensi pertumbuhan yang lebih kuat bagi ekspor-impor ASEAN bila dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh pasar Jepang dan AS dari tahun 1983 sampai 1987; (2) pasar tunggal Eropa itu juga akan mempermudah tugas pemilik industri dan para pedagang (*Antara*, 7 Juli 1989).

Pernyataan wakil MEE ini tampaknya untuk meyakinkan ASEAN dan negara-negara berkembang lainnya bahwa pasar tunggal Eropa bukan merupakan kawasan perdagangan yang tertutup. Kekhawatiran itu muncul di kalangan negara-negara berkembang, seperti beberapa negara ASEAN, yang mengandalkan ekspor sebagai basis ekonominya.

Dalam pertemuan 6+1 tanggal 7 Juli 1989, Menlu AS, James Baker, mengatakan bahwa: (1) pemerintahnya menyediakan bantuan US\$13 juta bagi Program Investasi dan Perdagangan untuk mempererat hubungan AS-ASEAN. Dana ini akan disalurkan melalui Badan Bagi Pembangunan Internasional AS (AID); (2) bantuan itu disediakan untuk sektor swasta ASEAN guna mendorong terbukanya peluang pasar bagi produk-produk bersama perusahaan AS-ASEAN (*Kompas*, 8 Juli 1989); (3) untuk jangka pendek maupun panjang, ASEAN dan kawasan Asia Tenggara sangat penting bagi AS (*Suara Pembaruan*, 8 Juli 1989).

Kerjasama swasta AS dan ASEAN diadakan untuk menangani beberapa kepentingan di AS dan ASEAN guna meningkatkan: (1) kerjasama perdagangan dan investasi di antara negara-negara ASEAN sendiri maupun antara AS dan ASEAN; (2) kerjasama antara pemerintah AS dan pemerintah-pemerintah di negara-negara ASEAN; (3) kerjasama pemerintah-pemerintah ASEAN untuk mempermudah bisnis dan investasi AS, mempermudah pelimpahan teknologi, terutama aplikasi perdagangan di ASEAN; (4) kerjasama di OPIC (*Overseas Private Investment Corporation*) untuk mendirikan lembaga penyebaran dana guna membiayai usaha-usaha bersama AS-ASEAN (*Suara Pembaruan*, 8 Juli 1989).

Pada pertemuan 6+1 tanggal itu juga, Menlu Australia, Gareth Evans, menegaskan bahwa: (1) pada masa-masa mendatang Australia bertekad untuk meningkatkan hubungan dagang dengan ASEAN; (2) dalam dua tahun terakhir ini perdagangan Australia-ASEAN meningkat 6% menjadi US\$5,9 milyar (*Kompas*, 8 Juli 1989).

Pada pertemuan 6+1 tanggal 7 Juli 1989, Menlu Kanada, Joe Clark, mengemukakan bahwa: (1) angka

perdagangan antara Kanada dan ASEAN dalam tahun 1988 mencapai US\$2,6 milyar. Ini berarti meningkat 75% bila dibandingkan dengan angka perdagangan tahun 1986; (2) angka perdagangan sebesar itu menghasilkan keuntungan US\$300 juta bagi ASEAN; (3) pada tahun 1989 angka perdagangan itu diharapkan mencapai US\$3 milyar (*Kompas*, 8 Juli 1989); (4) untuk meningkatkan saling pengertian antara ASEAN dan Kanada maka pada tanggal 10 Juli 1989 akan diresmikan Pusat ASEAN-Kanada, yang pada tahun pertamanya akan dijadikan tempat pelaksanaan kerjasama pembangunan ASEAN-Kanada dan lembaga-lembaga regional, setelah itu akan dikembangkan lebih jauh; (5) pendidikan dan kepelatihan, terutama untuk para profesional dan generasi muda ASEAN dan Kanada, akan merupakan bagian terbesar dari program pusat itu; (6) kerjasama lain yang sangat penting adalah bidang lingkungan hidup, karena masalah ini sulit dan kompleks, termasuk iklim global, polusi air dan tanah, penciptaan hutan tropis dunia dan kemampuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi tanpa harus merusak lingkungan alam; (7) Kanada merupakan salah satu pendukung pembangunan berkelanjutan, oleh sebab itu menyambut baik rencana ASEAN untuk menyelenggarakan pertemuan regional sebagai tindak lanjut dari Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan; (8) Kanada mengundang ASEAN untuk mengikuti Global 90, suatu konperensi lingkungan dan pameran perdagangan di Vancouver Mart. Global 90 dirancang untuk menunjukkan kepada dunia bahwa melindungi lingkungan dan meningkatkan pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang bersaing, namun demikian ada sejumlah produk, jasa dan teknologi yang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan itu; (9) Kanada juga mengundang ASEAN untuk menghadiri pertemuan khusus ASEAN-Kanada di Kanada, musim gugur 1990 (*Antara*, 7 Juli 1989).

Dalam pertemuannya dengan para Menlu ASEAN tanggal 8 Juli 1989, Menlu Jepang, Hiroshi Mitsuzuki, mengatakan bahwa: (1) Jepang menolak usul ASEAN untuk mengurangi tingkat suku bunga pinjaman yang diakibatkan oleh apresiasi nilai mata uang Yen. Tetapi pemerintahnya berjanji akan memberi pinjaman lunak yang baru sebagai salah satu cara untuk mengatasi beban hutang itu; (2) Jepang menyediakan bantuan US\$30 milyar dengan bunga lunak bagi negara-negara berkembang, termasuk ASEAN. Tetapi pinjaman baru ini tidak boleh untuk membayar hutang lama; (3) hutang tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, tetapi juga merupakan an-

caman bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan (*Merdeka*, 10 Juli 1989).

2. Rencana Pembentukan Forum Asia-Pasifik

Para Menlu ASEAN masih bersikap dingin atas usul Australia mengenai pembentukan Forum Ekonomi Asia-Pasifik. Beberapa negara anggota ASEAN mengkhawatirkan munculnya suatu entitas baru, yang juga didukung Jepang dan Australia dapat menggantikan ASEAN sehingga memudahkan Tokyo maupun Washington untuk mendominasi perekonomian kawasan Pasifik. Hal ini antara lain ditunjukkan dalam sikap Menlu Indonesia, Ali Alatas, yang pada tanggal 5 Juli 1989 menegaskan bahwa ASEAN telah memiliki forum sendiri, suatu forum dialog tahunan dengan mitra dagangnya yang cakupannya dapat diperluas sampai meliputi kawasan Asia-Pasifik. Sikap ASEAN yang demikian itu disebabkan oleh masih belum siapnya beberapa negara ASEAN untuk menanggapi usul itu. Indonesia mengharapkan agar usaha peningkatan kerjasama perdagangan Asia-Pasifik dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme yang telah ada, bukan dengan pembentukan lembaga baru. Penegasan Menlu Ali Alatas itu juga disampaikan lagi pada konferensi pers akhir PMC (*Antara*, 6 Juli 1989). Hal senada disampaikan oleh Menlu Malaysia, Abu Hassan Omar, yang menegaskan bahwa ASEAN harus hati-hati untuk menerima setiap usulan baru. Hal ini perlu diingat karena masih terdapat ketidakseimbangan perdagangan dan fiskal antara kekuatan ekonomi besar dunia, kecenderungan pembentukan blok-blok perdagangan dan semakin meningkatnya proteksionisme (*Antara*, 6 Juli 1989). Sementara itu, Menlu Singapura, Wong Kan Seng, sebaliknya justru menanggapi secara antusias. Dikatakannya bahwa setiap gagasan yang akan memperluas hubungan ASEAN dengan negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik patut dipertimbangkan. Apalagi usul Australia itu sebenarnya bertitik-tolak pada ASEAN sebagai intinya (*Antara*, 6 Juli 1989).

Dalam konferensi pers di Bandar Seri Begawan tanggal 5 Juli 1989, Menlu Australia, Gareth Evans, menegaskan bahwa gagasan negaranya itu relevan dengan keadaan sekarang, mengingat perdagangan antar negara-negara Asia dalam tahun 1988 telah mencapai sekitar US\$200 milyar. Dia tidak merasa khawatir atas sikap ASEAN itu. Usulnya itu memiliki aspek yang sangat sensitif, karena itu untuk mencapai konsensus membutuhkan waktu yang panjang. Ia tidak membawa cetak biru mengenai Forum Perdagangan Asia-Pasifik, ia hanya akan mendengarkan pemikiran-pemikiran

yang muncul (*Antara*, 6 Juli 1989). Biarkanlah forum itu terbentuk secara alamiah (*Kompas*, 6 Juli 1989). Selanjutnya pada pembukaan dialog itu, dia menegaskan bahwa: kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan ekonomi regional dengan pertumbuhan paling cepat di dunia dengan mencatat sekitar 40% volume perdagangan dunia, meskipun terdapat sejumlah ketidakpastian yang dapat mempengaruhi prospek-prospek kawasan itu. Ketidakpastian itu antara lain berupa rintangan-rintangan non-tarif dalam perekonomian dunia dan neraca perdagangan yang demikian tidak berimbang di kawasan itu (*Antara*, 7 Juli 1989).

Seusai mengadakan pembicaraan dengan Menlu Hiroshi Mitsuzuka tanggal 5 Juli 1989 mengenai Forum Perdagangan Asia-Pasifik, Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa Jepang berpendapat, saat ini yang penting adalah mendengarkan pemikiran yang berkembang di sejumlah negara kawasan Pasifik, termasuk ASEAN. Jepang tidak berkeberatan menghadiri pertemuan pertama di Canberra bulan November 1989, asal didahului dengan pertemuan para pejabat tinggi negara-negara kawasan Pasifik (*Antara*, 6 Juli 1989).

Tanggal 5 Juli 1989, Menlu AS, James Baker, menegaskan bahwa ia akan meminta negara-negara anggota ASEAN agar pada prinsip-prinsipnya menyepakati suatu kerangka baru bagi kerjasama ekonomi di Pasifik untuk mencegah pertikaian perdagangan (*Antara*, 6 Juli 1989). Selanjutnya pada pembukaan pertemuan itu, Menlu James Baker mengatakan: (1) dua masalah yang harus dibahas dalam pertemuan ini adalah peningkatan kerjasama kawasan Pasifik dan keamanan Asia Tenggara, namun demikian masih banyak masalah masih memerlukan konsensus agar gagasan menjadi kenyataan; (2) kerjasama ekonomi kawasan Pasifik merupakan sesuatu yang penting karena percepatan pertumbuhan dan saling ketergantungan di antara negara-negara di kawasan itu telah melampaui kemampuan lembaga-lembaga organisasi untuk menangani dampak-dampaknya; (3) ia tidak membawa cetak biru mengenai cara apa dan mekanisme mana yang harus dilakukan demi terwujudnya kerjasama di kawasan itu. Yang perlu kini adalah dialog untuk mencari kesamaan pandangan mengenai prinsip-prinsip dan struktur mekanisme itu; (4) kawasan Asia-Pasifik merupakan bagian integral dari masa depan AS, oleh karena itu kehadirannya di kawasan itu berguna untuk memperkuat kemampuan menghadapi tantangan di masa depan; (5) terdapat 7 pokok persoalan awal yang harus diatasi demi terbentuknya mekanisme kerjasama ekonomi di kawasan itu, yakni: (a) masalah penting yang harus dibahas adalah

perdagangan, investasi dan infrastruktur ekonomi regional, termasuk transportasi dan komunikasi serta perlindungan sumber alam; (b) keseluruhan negara Pasifik harus mengakui perbedaan sistem ekonomi, sosial dan perbedaan tingkat pembangunan di setiap negara; (c) prakarsa swasta dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pasar bebas harus diakui sebagai usaha untuk menawarkan tingkat hidup warganya; (d) mereka harus mempunyai persamaan komitmen mengenai ekonomi pasar untuk mendukung arus barang jasa, modal, teknologi dan gagasan-gagasan secara bebas; (e) setiap lembaga di Pasifik harus merupakan suatu bagian yang integral untuk mengembangkan perdagangan dan investasi, tetapi lembaga-lembaga itu jangan sampai mengganggu upaya-upaya yang telah ada, seperti *Uruguay Round* dan OECD; (f) setiap usaha harus menghormati, menjaga dan bahkan meningkatkan kontribusi ASEAN pada kawasan Pasifik; (g) dukungan pemerintah dalam bentuk apa pun harus luwes agar mekanisme yang baru nanti dapat berjalan (*Antara*, 6 Juli 1989).

Menlu Australia berpendapat, kerjasama regional yang efektif dapat menjamin momentum pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Menlu Selandia Baru juga senada, namun demikian dia menambahkan bahwa banyak forum yang dapat dimanfaatkan dan bukan hanya seperti forum yang diusulkan oleh Australia (*Antara*, 6 Juli 1989). Selandia Baru akan menentang setiap blok perdagangan dan sebaliknya akan terus mengupayakan perdagangan bebas (*Kompas*, 6 September 1989).

Pada pertemuan 6 + 5 + 1 tanggal 6 Juli 1989, Menlu Australia, Gareth Evans, mengatakan bahwa suatu kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia-Pasifik penting untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi di kawasan itu, sekaligus untuk mendukung sistem perdagangan multilateral (*Kompas*, 7 Juli 1989). Dalam penjelasan selanjutnya pada pertemuan 6 + 1 tanggal 7 Juli 1989, Menlu Gareth Evans menegaskan bahwa: (1) *South Pacific Forum* juga akan mengadakan semacam dialog seperti halnya dilakukan ASEAN dengan negara-negara lain, tetapi berbeda dengan dialog ASEAN - mitra-mitra wicaranya; (2) dia akan meminta PM Bob Hawke untuk segera memberitahu kepala-kepala negara yang akan diundang menghadiri pertemuan di Australia, bulan November 1989, agar mengirimkan Menteri-menteri mereka untuk meneruskan proses dialog (*Suara Pembaruan*, 8 Juli 1989).

Selanjutnya pada pertemuan 6 + 1 tanggal 7 Juli 1989 itu juga Menlu AS, James Baker, mengatakan pula

bahwa: (1) cukup alasan bagi suksesnya ide tersebut. ASEAN mempunyai bentuk, basis dan fundasi bagi usaha semacam itu, yang bukan saja menguntungkan dirinya tetapi juga mitra wicaranya. Kiranya ASEAN cenderung untuk mengembangkan badan yang telah ada, seperti *ASEAN Pacific Cooperation* dengan menyertakan para Menteri Perekonomiannya; (2) untuk waktu ini Cina sebaiknya tidak diikutsertakan karena akan menimbulkan masalah, cukup kelompok inti saja, yakni seluruh anggota ASEAN, para mitra wicara dan Korea Selatan; (3) Jepang sangat mendukung ide itu dan memberi pandangan konstruktif, karena pada suatu ketika hal itu juga akan menjadi idenya. Namun demikian menurut jubir delegasi Jepang, Seiichi Kondo, Jepang masih akan mengikuti konsensus apa pun yang dicapai ASEAN; (4) kerjasama yang diprakarsai oleh PM Australia dengan nama "Kerjasama Ekonomi Tepasian Pasifik" itu dibawa ke Bandar Seri Begawan tanpa ide spesifik. Banyak ide yang mirip dan AS hanya menjadi katalis agar ide itu dapat terwujud (*Suara Pembaruan*, 8 Juli 1989).

Senada dengan hal itu, Menlu Selandia Baru, Russel Marshall, menilai adanya peningkatan perhatian atas kerjasama ekonomi Asia-Pasifik. Usulan PM Bob Hawke itu sangat membantu untuk memfokuskan perhatian akan pentingnya kerjasama semacam itu (*Kompas*, 7 Juli 1989).

Sementara itu Menlu Kanada, Joe Clark, menegaskan bahwa Asia-Pasifik merupakan mitra dagang Kanada yang terbesar setelah AS.

Sedangkan Menlu James Baker menegaskan bahwa: (1) pertumbuhan perdagangan di Pasifik amat pesat, yang pada tahun 1988 mencapai US\$271 milyar; (2) perdagangan antar negara Asia mencapai US\$200 milyar, dan investasi AS di Asia meningkat dua kali lipat bila dibandingkan tahun 1982, mencapai US\$10 milyar; (3) kerjasama ekonomi Asia-Pasifik merupakan salah satu agenda utama AS (*Kompas*, 7 Juli 1989).

3. Masalah Kamboja

Berbagai pidato pada pembukaan dialog itu mendukung Indonesia dan Perancis sebagai Ketua Bersama (*co Chairman*) ICK. Pada umumnya mereka mengakui peranan Indonesia untuk membantu menyelesaikan masalah Kamboja, baik melalui JIM maupun sebagai tuan rumah pertemuan Hun Sen dan Norodom Sihanouk, Mei 1989 (*Antara*, 7 Juli 1989).

ASEAN dan seluruh mitra dialognya menyambut baik berlangsungnya ICK dan mengharapkan agar konferensi itu menghasilkan suatu penyelesaian yang menyeluruh di Kamboja, baik yang menyangkut aspek internal maupun aspek eksternal (*Kompas*, 8 Juli 1989).

Dalam pertemuan 6+1 tanggal 7 Juli 1989, Menlu AS, James Baker, menegaskan bahwa: (1) pemerintahnya tetap mendukung sikap AS untuk menyelesaikan konflik Kamboja secara menyeluruh; (2) ASEAN dan negara-negara Barat harus menjamin terciptanya suatu Kamboja yang merdeka dan stabil. Negara Kamboja yang baru harus bebas menentukan masa depannya sendiri dan tidak akan didominasi oleh Khmer Merah yang kejam itu. Walaupun AS mempunyai preferensi agar Khmer Merah tidak diikutsertakan dalam pemerintahan *kuadripartit*, tetapi AS juga realistis untuk melihat fakta-fakta yang ada. Lagipula Pangeran Norodom Sihanouk berpendapat, lebih baik Khmer Merah ikut dalam pemerintahan sementara daripada berada di hutan untuk mengobarkan perang saudara. Tetapi AS tetap menyatakan tidak membantu siapa-siapa (*Suara Pembaruan*, 8 Juli 1989); (3) untuk menghindari terjadinya dominasi itu diperlukan sejumlah prinsip dasar yang menjamin suatu penyelesaian masalah Kamboja secara menyeluruh, dan prinsip-prinsip dasar itu di antaranya adalah gencatan senjata, langkah efektif untuk mencegah berkuasanya kembali Khmer Merah, aturan pembagian kekuasaan, dan pemilihan umum yang bebas bagi rakyat Kamboja. Hal ini penting karena sangat membantu tercapainya suatu penyelesaian internal di Kamboja; (4) suatu pemerintahan sementara di Kamboja di bawah pimpinan Pangeran Norodom Sihanouk merupakan suatu hal yang realistis bagi tercapainya suatu pembagian kekuasaan dengan kekuatan non-komunis di Kamboja; (5) merupakan hal yang tepat jika ICM diorganisasikan oleh PBB, ICM sebaiknya dibentuk di bawah panji-panji PBB; (6) ICM bertugas mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja, membantu dan melindungi pengaturan peralihan kekuasaan serta memantau pemilihan umum dan stabilitas perdamaian di Kamboja; (7) JIM telah memberikan semua prinsip dasar yang diperlukan bagi penyelesaian konflik Kamboja (*Kompas*, 8 Juli 1989).

Dalam suatu jumpa pers tanggal 7 Juli 1989, Menlu James Baker juga menandakan bahwa selama beberapa kali mengadakan pembicaraan dengan AS, Uni Soviet tidak pernah menolak pembentukan ICM di bawah panji-panji PBB (*Suara Pembaruan*, 8 Juli 1989).

Pernyataan Menlu James Baker itu dianggap pen-

ting, karena selama ini ICM dikecam keras oleh Vietnam dan rezim Phnom Penh dukungan Vietnam yang dikatakan tidak pantas untuk melakukan hal itu, karena PBB tidak pernah mengakui rezim Phnom Penh. Sikap Uni Soviet itu diperkirakan dapat mengubah sikap Vietnam, karena selama ini Moskow dikenal sebagai pendukung utama Vietnam di bidang dana dan persenjataan.

Dalam pertemuan-pertemuan, Jepang menyatakan kesediaannya untuk berperanserta dalam ICM, dan mengusulkan pembentukan suatu badan (komite) internasional bagi rekonstruksi Kamboja. Tetapi Vietnam menolak keinginan itu, karena Jepang merupakan satu-satunya negara industri maju yang telah secara resmi mengakui kelompok perlawanan Kamboja (*Antara*, 6 Juli 1989). Jepang menegaskan bahwa: (1) langkah pertama yang harus dilakukan oleh komite itu adalah segera mengirimkan misi pencari fakta untuk mengetahui situasi ekonomi dan sektor-sektor tertentu di Kamboja yang sangat membutuhkan bantuan; (2) Jepang siap untuk mengadakan kerjasama seerat mungkin bagi pembangunan kembali ekonomi dan kawasan Indocina (Kamboja, Laos dan Vietnam) setelah penyelesaian politik di Kamboja tercapai; (3) Jepang juga bersedia berperanserta dalam pengembalian para pengungsi Kamboja melalui kerjasama dengan negara-negara yang berkepentingan dan organisasi internasional; (4) Jepang sepenuhnya mendukung sikap ASEAN mengenai Kamboja; (5) penarikan pasukan Vietnam sebaiknya dilakukan di bawah mekanisme pengawasan internasional yang efektif. Untuk ini perlu memanfaatkan PBB yang telah berpengalaman dan ahli masalah ini (*Antara*, 6 Juli 1989).

Hanoi dan Phnom Penh menentang kehadiran PBB karena organisasi dunia ini tidak mengakui pemerintah Phnom Penh dukungan Vietnam.

Menlu AS, James Baker, menyatakan bahwa AS dan ASEAN memiliki persamaan pandangan atas tiga masalah penting Kamboja, yakni: (1) penarikan mundur pasukan Vietnam yang terawasi; (2) pencegahan kembalinya dominasi Khmer Merah di Kamboja; dan (3) penentuan nasib sendiri rakyat Kamboja (*Antara*, 6 Juli 1989).

Seusai mengadakan tukar pikiran dengan Wakil Menlu Perancis, Ny. Edwige Avice, tanggal 7 Juli 1989, Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) pertemuannya dengan Wakil Menlu Perancis itu baru pada tahap mekanisme pengaturan pertemuan pleno, menetapkan

jumlah komisi kerja dan tugas-tugasnya serta berbagai hal yang mungkin diperlukan; (2) mengenai siapa yang akan ambil bagian dalam ICK belum dicapai kesepakatan final (*Kompas*, 8 Juli 1989).

4. Tentang Situasi di RRC

AS meminta kepada negara-negara ASEAN untuk tidak mengisolasi RRC sehubungan dengan peristiwa Tiananmen bulan Mei 1989.

Dalam pertemuannya tanggal 5 Juli 1989, Menlu Jepang dan Indonesia sepakat agar RRC tidak dikucilkan dari masyarakat internasional (*Antara*, 6 Juli 1989).

5. Keamanan Asia Tenggara

Pada tanggal 6 Juli, Menlu James Baker menegaskan bahwa AS berharap dan menginginkan Filipina untuk mempertahankan pangkalan militer AS di Clark (udara) dan Subic (laut) setelah tahun 1991.

6. Masalah Pengungsi

Menlu Jepang, Hiroshi Mitsuzuko, mengatakan di Bandar Seri Begawan tanggal 5 Juli 1989 bahwa Jepang bersedia menerima 1.000 orang pengungsi Vietnam untuk dimukimkan kembali di negaranya. Negeranya juga akan memberikan bantuan US\$11 juta kepada Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) untuk pemukiman kembali para pengungsi (*Antara*, 6 Juli 1989). Sebelumnya, pada tanggal 3 Juli 1989, Menlu Malaysia, Abu Hassan bin Omar, mendesak negara-negara Barat untuk mempercepat penerimaan para pengungsi Vietnam itu. Di samping itu ditegaskan pula bahwa ASEAN tetap menolak untuk menerima para pengungsi (*Antara*, 6 Juli 1989).

Wakil MEE, Juan Abel Matutes, menjelaskan pada awal pertemuan itu bahwa MEE menyediakan bantuan US\$6,16 juta untuk membantu pengungsi Indocina yang baru datang dari Vietnam. Dana itu untuk membiayai makanan, kesehatan dan tempat bernaung mereka di Indonesia, Malaysia, Filipina, Muangthai dan Hongkong (*Antara*, 7 Juli 1989).

Menurut UNHCR, kamp-kamp pengungsi di beberapa negara Asia Tenggara dan Hongkong pada bulan April 1989 dihuni oleh 71.935 orang manusia perahu Vietnam, dan diperkirakan sekitar 300.000 pengungsi Laos dan Khmer mencari penampungan sementara di Muangthai (*Antara*, 7 Juli 1989).

7. Hasil-hasil PMC

Kesepakatan bersama mengatakan: (1) kerjasama Asia-Pasifik perlu ditingkatkan, dan mereka sepakat untuk hadir dalam Pertemuan Canberra, bulan November 1989, untuk bertukar pikiran lebih lanjut. Australia akan mengundang mereka dan Korea Selatan untuk hadir pula; (2) perlu diupayakan agar ICK di Paris berhasil (*Antara*, 9 Juli 1989), dan penyelesaian politik secara menyeluruh di Kamboja untuk menghindari perang saudara di Kamboja. Dalam kaitan ini ASEAN juga menyatakan, mempunyai kepentingan untuk menyukseskan ICK, karena ICK itu akan diselenggarakan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan pijakan-pijakan yang selama ini telah diusahakan oleh ASEAN; (3) penyelesaian politik secara menyeluruh di Kamboja itu juga meliputi pembentukan pemerintahan sementara empat faksi yang tidak didominasi oleh suatu faksi di Kamboja setelah penarikan mundur pasukan Vietnam, penghentian bantuan militer kepada kelompok-kelompok yang bertikai di Kamboja, pembentukan ICM untuk mengawasi pelaksanaan persetujuan damai serta pembentukan pasukan pemeliharaan perdamaian internasional (*Antara*, 10 Juli 1989).

Dalam suatu konperensi pers se usai PMC itu, Menlu Ali Alatas berusaha meluruskan persepsi wartawan yang selama ini berpendapat bahwa ASEAN memerlukan faktor lain yang dapat mempersatukannya, karena kesatuan langkah ASEAN selama ini disebabkan oleh munculnya masalah Kamboja. Masalah Kamboja itu hanya secara tiba-tiba memaksa ASEAN untuk memusatkan perhatiannya pada usaha penyelesaian itu. Jika masalah itu selesai, ASEAN akan kembali ke tujuan kerjasama semula secara penuh. ASEAN akan lebih berkembang dan tidak perlu khawatir ada perasaan asing di antara anggota-anggota ASEAN (*Antara*, 9 Juli 1989).

Setibanya di bandara Soekarno-Hatta tanggal 9 Juli 1989, Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa baik Indonesia maupun negara-negara ASEAN lainnya sangat berkepentingan agar ICK itu berhasil, karena konperensi itu tetap mendasarkan pada hasil-hasil yang telah dicapai oleh JIM maupun usaha-usaha lain yang telah ditempuh oleh ASEAN (*Kompas*, 10 Juli 1989). Menlu Ali Alatas juga menegaskan bahwa Indonesia selaku Ketua JIM dan Ketua Bersama dengan Perancis dalam ICK, akan terus berusaha menjembatani pihak-pihak yang berbeda pandangan atas beberapa masalah penting dan mendesak (*Antara*, 10 Juli 1989).

B. HUBUNGAN PERDAGANGAN ASEAN-AS

Asisten Menlu AS Urusan Asia Timur dan Pasifik, Richard Solomon, mengatakan kepada pers di Bangkok tanggal 29 Juni 1989 bahwa: (1) AS ingin mencapai konsensus untuk memperluas perdagangan dengan ASEAN; (2) AS akan menjaga perdagangan dunia bebas dan menghindari pembentukan blok perdagangan super; (3) Menlu AS, James Baker akan menghadiri pertemuan antara ASEAN dan mitra dialog di Brunei Darussalam untuk mengusahakan konsensus perdagangan dengan ASEAN itu (*Suara Karya*, 1 Juli 1989).

C. HUBUNGAN ASEAN-KANADA

1. *Kerjasama Telekomunikasi Angkasa Luar ASEAN-Kanada*

Di Bangkok tanggal 15 Juni 1989, Dirjen Departemen Pos dan Telekomunikasi Muangthai, Sombat Uthaisang, atas nama ASEAN dan Dubes Kanada untuk Muangthai, Lawrence A.H. Smith, menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) kerjasama ASEAN-Kanada di bidang telekomunikasi angkasa luar.

Seusai penandatanganan, Dirjen Departemen Pos dan Telekomunikasi Muangthai itu mengatakan bahwa: (1) pemerintah Kanada akan menyediakan 10,75 juta Baht dan ahli teknik bagi ASEAN sebagai dukungan atas proyek itu; (2) ASEAN khawatir iklim hujan tropis dapat menyebabkan beberapa anggota ASEAN tidak dapat menggunakan "gelombang-gelombang KU" bagi satelit komunikasinya; (3) proyek ini berusaha mengadakan penelitian bersama Kanada-ASEAN untuk menentukan dapat tidaknya gelombang-gelombang frekuensi ini digunakan dalam satelit komunikasi di wilayah ASEAN; (4) proyek ini segera dapat dilaksanakan setelah cetak birunya selesai (*Antara*, 6 Juni 1989).

2. *Peresmian Pusat ASEAN-Kanada*

Sekembalinya menghadiri pertemuan para Menlu ASEAN dengan mitra dialognya di Brunei, Menlu Kanada, Joe Clark, melakukan kunjungan ke Singapura tanggal 10 Juli 1989 untuk membuka suatu Pusat Kanada-ASEAN. Tugas pusat itu adalah menyalurkan bantuan keuangan Kanada ke negara-negara anggota ASEAN (*Antara*, 10 Juli 1989).

Menlu Joe Clark mengatakan bahwa: (1) negaranya

akan memberikan bantuan keuangan S\$16 juta atau sekitar US\$8,2 juta kepada ASEAN untuk tahun 1989; (2) badan ini merupakan salah satu dari empat buah pusat yang dibentuk Kanada untuk menangani program-program bantuan pembangunan di negara-negara berkembang; (3) pusat ini akan mengelola program-program pendidikan, urusan umum, prakarsa kebudayaan dan pembinaan sumber daya manusia; (4) kepentingan timbal-balik di bidang pendidikan dan latihan harus dilayani seperti dalam rekanan bisnis baru yang sedang dikembangkan; (5) pembukaan pusat ini menandai dimulainya tahap baru hubungan kedua pihak, sehingga negaranya lebih terlihat di kawasan ASEAN; (6) badan ini akan menjadi pusat jaringan yang menghubungkan kelompok-kelompok kepentingan kedua belah pihak untuk saling meningkatkan pemahaman tentang bangsa dan kebudayaannya; (7) Kanada telah membantu proyek-proyek kehutanan, perikanan, telekomunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN; (8) nilai perdagangan ASEAN-Kanada meningkat tiga kali lipat, pada tahun 1988 menjadi US\$2,6 milyar atau meningkat 33% dari angka perdagangan tahun 1987 (*Antara*, 10 Juli 1989).

D. HUBUNGAN ASEAN-SELANDIA BARU

1. *Kunjungan Misi Perdagangan Selandia Baru ke Indonesia*

Misi Perdagangan Selandia Baru yang dipimpin oleh Sir John Mowbray berada di Indonesia tanggal 6-8 Juni 1989 untuk mengadakan pertemuan dengan para pengusaha Indonesia dan sekaligus menghadiri Pertemuan Komite Eksekutif Dewan Pengusaha ASEAN-Selandia Baru di Bali.

Pada acara jamuan makan di Hotel Mandarin tanggal 5 Juni 1989 Sir John Mowbray mengatakan: (1) pada umumnya masyarakat Selandia Baru tidak menyadari perkembangan lingkungan ekonomi dan bisnis di Indonesia yang semakin positif; (2) para pengusaha di negaranya mulai menyadari adanya kesempatan-kesempatan penting untuk mengadakan perdagangan dan investasi di Indonesia; (3) pertemuan misinya dengan para pengusaha Indonesia telah diatur oleh Badan Pengembangan Perdagangan Selandia Baru di Jakarta; (4) misi perdagangan ASEAN yang berkunjung ke negaranya, April 1989, telah melihat teknologi penanaman tanaman dan pengolahan pangan serta pengepakan. Misi perdagangan itu menilai bahwa pendekatan langsung sangat bermanfaat dan akan lebih memperkokoh hu-

bungan Selandia Baru-ASEAN (*Angkatan Bersenjata*, 6 Juni 1989).

2. Kunjungan Ali Atlas ke Selandia Baru

Menlu Ali Atlas berada di Selandia Baru minggu ketiga Juni 1989.

Menlu Selandia Baru, Russell Marshall, mengatakan kepada pers di Wellington tanggal 20 Juni 1989 bahwa: (1) kunjungan Menlu Ali Atlas ke Selandia Baru itu akan membahas perkembangan di Kamboja dan perdagangan ASEAN dengan mitra dialognya; (2) banyak masalah internasional yang dapat didiskusikan secara lebih mendalam dalam pertemuan itu; (3) tindakan tegas militer Cina terhadap gerakan pro-demokrasi di Beijing diharapkan dapat dibahas dalam pertemuan itu; (4) kunjungan yang bertepatan waktunya dengan berlangsungnya dialog ASEAN-Selandia Baru, diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan menjelang pertemuan para Menlu ASEAN di Brunei, Juli 1989; (5) Indonesia di masa mendatang dapat memainkan peranan penting, karena Indonesia selain mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan juga sebagai negara yang dituakan di Asia Tenggara; (6) jika Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan pembangunannya secara berkesinambungan pada dekade mendatang, negara ini akan diperhitungkan bukan saja di bidang ekonomi tetapi juga di bidang politik (*Jakarta Post*, 21 Juni 1989).

E. HUBUNGAN ASEAN-AUSTRALIA

1. Pertemuan Panitia Kerja Kelautan ASEAN-Australia ke-7

Pertemuan Panitia Kerja Kelautan ASEAN-Australia ke-7 berlangsung di Yogyakarta tanggal 20-23 Juni 1989 diikuti oleh 12 orang utusan untuk membahas penelitian kelautan, khususnya hutan bakau dan karang (*Antara*, 21 Juni 1989).

Seorang utusan dari Indonesia, Dr. Otto S.R. Ongkosongo, mengatakan kepada *Antara* di Yogyakarta tanggal 23 Juni 1989 bahwa: (1) pertemuan ke-7 ini merupakan pertemuan terakhir tahap pertama untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek penelitian yang telah dilakukan, sekaligus membahas rencana kerja tahap kedua; (2) obyek penelitian ditujukan pada terumbu karang, komunitas ikan karang, rumput laut, serta komunitas *mengrove* dan *biota substrat* lunak; (3) lokasi pe-

nelitian di Indonesia meliputi kawasan Kepulauan Seribu, Grajagan di Jawa Tengah dan Ujung Kulon di Jawa Barat; (4) panitia ini berusaha meningkatkan kualitas tenaga peneliti melalui kursus latihan dan program sarjana; (5) panitia kerja ini merupakan wujud kerjasama negara-negara ASEAN-Australia untuk menangani wilayah pesisir yang makin terancam kelestarian sumber daya perairannya; (6) kemudahan-kemudahan yang ada di wilayah pesisir, menyebabkan kawasan ini dimanfaatkan secara besar-besaran untuk berbagai keperluan, seperti kawasan industri, daerah pemukiman, pertambakan ikan dan pertanian; (7) sekitar 75% kota-kota besar di Indonesia yang berpenduduk di atas 100.000 jiwa berkembang di daerah pesisir. Hal ini mengakibatkan kelestarian sumber daya perairan pantai terancam; (8) pencemaran laut dapat menyebar tanpa menghiraukan batas-batas teritorial suatu negara, oleh karena itu apa yang dirasakan sebagai ancaman Indonesia tentu juga dirasakan oleh negara-negara ASEAN tetangganya; (9) pelaksanaan proyek penelitian ini dibagi dalam dua tahap, tahap pertama tahun 1984-1989 dan tahap kedua tahun 1989-1994; (10) melalui proyek ini akan terus dikembangkan kemampuan ilmiah dan keahlian teknis di setiap negara anggota ASEAN agar dapat mengelola sumber daya wilayah pesisir (*Antara*, 24 Juni 1989).

2. Masalah Kerjasama Ekonomi Pasifik

Menlu Ali Atlas mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 29 Juni 1989 bahwa: (1) untuk sementara ini Indonesia sependapat dengan analisa Australia mengenai perkembangan perekonomian internasional, khususnya yang berdampak terhadap Cekung Pasifik. Selain itu Indonesia juga sependapat bahwa sudah waktunya bagi negara-negara di kawasan ini untuk meningkatkan analisa dan konsultasi pada tahap yang lebih formal; (2) wadah konsultasi resmi bagi ASEAN adalah *six plus five* atau lima tambah satu; (3) gagasan PM Australia Bob Hawke untuk membentuk kerjasama ekonomi di Pasifik selain akan dibicarakan para Menlu ASEAN yang belum sempat membicarakannya secara formal bersama, juga perlu dibicarakan lagi dengan Australia dan dengan para mitra dialog ASEAN lainnya; (4) usul Menlu AS James Baker untuk membicarakan mekanisme kerjasama ekonomi di Pasifik merupakan salah satu tanggapan terhadap usul Australia, karena masih ada yang mempunyai pandangan yang lebih luas (*Suara Pembaruan*, 30 Juni 1989).

Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Australia, Richard Wooleott, mengatakan kepada *Antara*

di Canberra tanggal 6 Juli 1989 bahwa: (1) negaranya tidak kecewa dengan sikap hati-hati ASEAN terhadap usul kerjasama ekonomi Asia-Pasifik; (2) Indonesia sepenuhnya setuju dengan gagasan Pertemuan Canberra, tetapi mempertanyakan negara-negara Asia-Pasifik mana yang harus menghadiri pertemuan itu; (3) Indonesia setuju untuk hadir, tetapi mengingatkan agar hasil pertemuan itu tidak ditentukan terlebih dahulu; (4) Malaysia tidak ingin kerjasama itu berkembang menjadi blok perdagangan atau suatu lembaga baru, oleh karena itu lebih baik memanfaatkan perangkat yang sudah ada yaitu ASEAN; (5) Muangthai menghendaki, segala tindakan yang akan mengeruhkan peranan ASEAN harus dihindarkan; (6) seluruh anggota ASEAN mendukung gagasan Pertemuan Tingkat Menteri Asia-Pasifik di Canberra, November 1989, untuk membahas usul PM Bob Hawke itu; (7) dukungan ASEAN memainkan peranan kunci bagi terwujudnya gagasan Bob Hawke; (8) negaranya tidak mencari posisi memimpin, melainkan hanya sebagai penyaring untuk mengembangkan dukungan bagi kerjasama kawasan yang lebih luas; (9) negaranya sangat menghargai keberhasilan ASEAN dalam kerjasama regional; (10) kini saat yang paling tepat untuk mengembangkan kerjasama yang lebih luas berdasarkan sukses ASEAN; (11) gagasan kerjasama Asia-Pasifik bukan merupakan reaksi atau sikap bermusuhan terhadap rencana pembentukan pasar tunggal Eropa tahun 1992; (12) Australia benar-benar ingin melihat hari depannya di Asia dan Pasifik Barat (*Angkatan Bersenjata*, 9 Agustus 1989).

F. HUBUNGAN ASEAN - KOREA SELATAN

1. Tawaran Korea Selatan Sebagai Mitra Dialog

Menteri Perdagangan Muangthai, Subin Pinkayan, mengatakan kepada pers di Bangkok tanggal 23 Juni 1989 bahwa: (1) Korea Selatan menawarkan diri untuk berpartisipasi dalam kegiatan ASEAN sebagai mitra dialog sektoral; (2) Komite Kebijakan Hubungan Perdagangan Internasional Muangthai pada prinsipnya setuju atas relevansi Korea Selatan sebagai mitra dialog itu; (3) tawaran itu akan dibahas secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri Ekonomi dan Luar Negeri ASEAN tanggal 3-4 Juli 1989 di Brunei Darussalam; (4) ASEAN ingin meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, penanaman modal dan industri pariwisata dengan Korea Selatan; (5) meskipun secara bilateral Korea Selatan telah meningkatkan hubungan ekonomi

dan politik dengan anggota-anggota ASEAN, tetapi negara itu tidak mempunyai hubungan resmi dengan ASEAN sebagai kelompok; (6) pencatatan Korea Selatan sebagai mitra dialog sektoral ASEAN pada saat ini tidak akan memperkuat kesempatannya untuk memperoleh status menjadi mitra dialog penuh; (7) ASEAN enggan memberikan status mitra dialog penuh kepada Korea Selatan karena alasan politik yang berkaitan dengan situasi khusus di Semenanjung Korea (*Antara*, 24 Juni 1989).

Menlu Ali Alatas mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 29 Juni 1989 bahwa: (1) para Menlu ASEAN akan mengambil keputusan penting mengenai pembukaan hubungan sektoral ASEAN-Korea Selatan pada pertemuan di Brunei mendatang, karena persiapannya telah dibahas oleh panitia tetap ASEAN; (2) pembukaan hubungan ini merupakan salah satu kebijaksanaan baru ASEAN, yang merupakan pelaksanaan keputusan KTT ASEAN di Manila 1987 (*Antara*, 29 Juni 1989).

2. Pertemuan Komite Kerjasama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan

Pertemuan Komite Kerjasama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan ke-8 berlangsung di Jakarta tanggal 7 Juli 1989 untuk membahas masalah perdagangan, investasi dan industri.

Menteri Perdagangan Arifin Siregar mengatakan pada pembukaan sidang itu bahwa: (1) membaiknya iklim investasi di Indonesia telah meningkatkan investasi asing, khususnya dari Korea Selatan; (2) ekspor Indonesia ke Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh naik turunnya ekspor migas ke negara itu, sehingga menunjukkan gerakan yang fluktuatif karena perubahannya dari tahun ke tahun cukup tajam; (3) meskipun ekspor non-migas Indonesia ke Korea Selatan selalu meningkat, tetapi nilainya belum terlalu besar (*Merdeka*, 6 Juli 1989).

Menteri Perdagangan dan Industri Korea Selatan, Seung Soo Han, mengatakan antara lain: (1) ASEAN dan Korea Selatan mempunyai kepentingan vital untuk membangun kerangka perdagangan bilateral yang lebih kuat; (2) diterimanya Korea Selatan sebagai mitra dialog ASEAN akan memperluas pandangan-pandangan untuk meningkatkan hubungan perdagangan kedua pihak; (3) Indonesia mempunyai pengaruh yang besar, baik di ASEAN maupun di Asia Tenggara; (4) setiap kerangka atau skema kerjasama regional harus mendapatkan dukungan dari Indonesia, bila konsep itu diha-

rapkan berhasil; (5) ASEAN dan Korea Selatan sama-sama negara berkembang, yang juga mempunyai kepentingan serupa pada negara maju, terutama mengenai proteksionisme (*Merdeka*, 6 Juli 1989).

3. Sistem Kerjasama ASEAN-Korea Selatan

Dalam siaran pers tanggal 8 Agustus 1989, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa suatu delegasi ASEAN yang berjumlah 12 orang dan dipimpin Dirjen Deplu Indonesia, Husni Thamrin Pane, akan berkunjung ke Seoul tanggal 20-21 Agustus 1989 untuk membahas pembentukan sistem kerjasama Korea Selatan-ASEAN yang telah disepakati oleh para Menteri ASEAN di Brunei tanggal 4 Juli 1989 (*Antara*, 9 Agustus 1989).

G. HUBUNGAN ASEAN-MEE

1. Seminar ASEAN-Eropa

Seminar ASEAN-Eropa 1992, Implikasi dan Jawabannya, berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 10-11 Juli 1989, dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah yang menangani masalah perdagangan luar negeri, para industriawan dan pengamat ekonomi dari ASEAN dan Eropa untuk membahas: (1) dampak pembentukan pasar tunggal Eropa 1992 bagi ASEAN; (2) masalah pasar tunggal Eropa dan dinamisme baru di masyarakat Eropa; (3) masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan perdagangan negara-negara ASEAN.

Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia, Rafidah Aziz, mengatakan pada pembukaan seminar itu bahwa: (1) pertemuan ASEAN-MEE di Dusseldorf, Mei 1988, menyetujui pembentukan suatu gugus kerja untuk mengidentifikasi kendala-kendala penanaman modal MEE di ASEAN; (2) jumlah penanaman modal MEE pada tahun 1984 menempati urutan ketiga setelah Jepang dan AS, yakni MEE 19%, Jepang 27% dan AS 21%; (3) penanaman modal MEE yang kian meningkat di ASEAN bukan hanya sebagai kunci strategi jangka panjang untuk meningkatkan hubungan dagang yang saling menguntungkan, tetapi juga meningkatkan alih teknologi dan memperkuat hubungan kedua pihak; (4) perundingan ASEAN-MEE selanjutnya akan diselenggarakan di Manila Desember 1989 (*Antara*, 11 Juli 1989).

Ketua delegasi MEE, Abel Matutes Juan, mengatakan bahwa: (1) masalah inflasi, pengangguran dan per-

tumbuhan ekonomi yang rendah yang dihadapi MEE pada akhir dekade 1970-an dan awal 1980-an merupakan prinsip dasar pembentukan pasar tunggal Eropa; (2) MEE ingin mengadakan pembicaraan secara terbuka mengenai gagasan pembentukan kerjasama ekonomi Asia-Pasifik; (3) pembentukan kerjasama seperti itu hendaknya terbuka bagi kegiatan perdagangan dunia (*Jakarta Post*, 11 Juli 1989).

Menteri Muda Perdagangan Indonesia, Dr. Sudradjat Djiwandono, mengatakan: (1) ASEAN harus meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi pengaruh pasar tunggal Eropa; (2) perubahan dan penyesuaian kondisi sekarang telah menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang menggairahkan bagi penanaman modal; (3) kestabilan politik, komitmen dasar fiskal dan keuangan yang bijaksana serta kemudahan persyaratan dan pengurangan birokrasi telah menjadikan ASEAN memiliki daya tarik bagi para investor dan sekaligus menjadi mitra usaha yang dapat dipercaya; (4) Eropa terlalu memandang kepentingan internnya dan menganggap peluang penanaman modal di kawasan ASEAN tidak menggairahkan, oleh sebab itu investasi Eropa di kawasan ini sulit meningkat; (5) sikap Eropa itu juga merupakan penyebab dasar timbulnya proteksionisme yang sangat ditentang oleh negara-negara berkembang; (6) ASEAN masih memerlukan kehadiran para pengusaha Eropa dan juga siap menyambut partisipasi mereka; (7) ASEAN tidak dapat membayangkan berlakunya suatu sistem perdagangan dunia yang terbuka tanpa ikutsertanya masyarakat Eropa; (8) terwujudnya sistem perdagangan seperti itu hanya akan membahayakan sistem perdagangan terbuka dunia, karena pasaran terbuka Eropa memegang peran penting dalam pelaksanaan sistem perdagangan dunia tersebut; (9) penarikan Eropa dari kawasan ASEAN tidak akan menguntungkan kedua pihak dan kawasan Pasifik pada umumnya; (10) ASEAN merupakan kawasan yang dinamis dan akan menjadi rekan yang menguntungkan bagi perdagangan masa depan Eropa serta menjadi tempat investasi yang aman (*Antara*, 11 Juli 1989).

2. Kunjungan Parlemen Eropa ke Indonesia

Ketua delegasi Parlemen Eropa, Dr. Egon Klepsch, yang sedang berkunjung ke Indonesia mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 28 Juni 1989 bahwa: (1) tidak ada alasan atau dasar bagi Indonesia untuk mengkhawatirkan rencana pembentukan pasar tunggal Eropa; (2) pada tanggal 1 Januari 1993 Masyarakat Eropa sudah tidak mengenal batas-batas negara; (3) pembed-

tukan pasar tunggal pada hakikatnya hanya untuk menghapuskan bea terhadap beberapa komoditi yang saat ini masih dikenakan; (4) pembentukan pasar tunggal Eropa akan membawa keuntungan dan manfaat yang lebih besar bagi mitra MEE; (5) MEE akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mitra mereka untuk memasuki pasaran Eropa; (6) melalui pasar tunggal Eropa diharapkan perdagangan masyarakat Eropa dengan semua mitra dagangnya, termasuk ASEAN, akan dapat berjalan lebih lancar.

Prof. Dr. Gunter Rinsche mengatakan bahwa: (1) proteksionisme bukan hanya akan menghancurkan perdagangan internasional tetapi juga perdagangan internasional Eropa dengan ASEAN serta mitra dagang lainnya; (2) pembentukan pasar tunggal Eropa diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat Eropa dan memberikan kesempatan masyarakat Eropa untuk membeli barang-barang dari ASEAN; (4) MEE sedang membicarakan bahaya yang timbul akibat tindakan beberapa industri tertentu Eropa untuk melakukan percobaan proteksi terhadap produk industri tertentu mereka. Masalah ini akan segera diselesaikan, khususnya yang berkaitan dengan ASEAN, karena MEE mempunyai hubungan yang dekat dan memiliki informasi yang cukup tentang hubungan Eropa-ASEAN; (5) pasar tunggal Eropa merupakan model untuk mengembangkan pasar dunia (*Suara Pembaruan*, 29 Juni 1989).

3. Implikasi Pasar Tunggal Eropa Terhadap ASEAN

Dr. Rolf J. Langhammer dari Lembaga Pengkajian Asia Tenggara pada Institut Ekonomi Internasional di Kiel, Jerman Barat mengatakan kepada anggota perkumpulan ekonomi Indonesia-Jerman Barat di Jakarta tanggal 10 Agustus 1989 bahwa: (1) dengan beroperasinya pasar tunggal Eropa (PTE), tahun 1992, impor barang-barang manufaktur masyarakat Eropa dari negara-negara berkembang, termasuk ASEAN, diperkirakan meningkat sampai 5% atau senilai \pm US\$2 milyar; (2) pelaksanaan pasar tunggal Eropa nanti hampir bersamaan dengan empat peristiwa besar yang akan menghasilkan keputusan-keputusan mengenai kebijaksanaan perdagangan internasional bagi negara-negara berkembang yakni: (a) penyelesaian putaran Uruguay yang dijadwalkan akan terlaksana menjelang akhir tahun 1990; (b) pembaruan sistem Preferensi Umum (GSP) setelah tahun 1990; (c) prinsip-prinsip perdagangan tekstil dan pakaian jadi setelah masa berlakunya Persetujuan Multi Serat (MFA) IV tahun 1991; (d) Konvensi Baru Lome 1990; (e) semua peristiwa itu akan ikut menentukan perubahan-perubahan dalam harga

relatif antara suplai domestik dan impor masyarakat Eropa dari negara-negara berkembang; (5) pasar tunggal Eropa dapat mendorong peningkatan pertumbuhan dan perubahan struktural dalam perspektif internasional; (6) negara-negara berkembang dapat mengambil manfaat dari kekuatan-kekuatan ekonomi baru yang menonjol, baik sebagai pemasok maupun sebagai pembeli barang, jasa dan teknologi yang kompetitif; (7) jika dilakukan deregulasi, diperkirakan akan terjadi perkembangan yang cukup di sektor perdagangan jasa. Hal ini akan berpengaruh pada elastisitas pendapatan yang dapat mendorong peningkatan jasa menjadi lebih besar daripada barang; (8) perkembangan perdagangan jasa yang cukup akan meningkatkan permintaan masyarakat Eropa pada jasa-jasa yang sudah disediakan oleh negara-negara berkembang, seperti pariwisata dan angkutan konstruksi; (9) beberapa negara berkembang yang memiliki daya saing yang kuat di sektor maritim dan angkutan udara perlu melakukan pendekatan-pendekatan bilateral agar memperoleh pangsa pasar di PTE; (10) hambatan-hambatan komoditi perlu segera dihapuskan sehingga daya saing produk pertanian dari negara berkembang dapat ditingkatkan; (11) ASEAN mempunyai kemampuan kolektif untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di PTE; (13) kemampuan ASEAN melakukan penyesuaian setelah tahun 1992 diperkirakan akan diperlancar oleh peningkatan permintaan impor dari MEE (*Merdeka*, 12 Agustus 1989).

H. HUBUNGAN ASEAN-ASIA PASIFIK

1. Posisi ASEAN dalam Percaturan Politik Asia-Pasifik

Seminar Posisi ASEAN dalam Percaturan Politik di Asia-Pasifik yang diselenggarakan oleh *International Forum Indonesia*, dan dihadiri oleh para diplomat dari dalam dan luar negeri, politisi dan peminat masalah hubungan internasional berlangsung di Jakarta tanggal 5 Juni 1989.

Dalam makalahnya yang berjudul *Perubahan Peta Politik di Asia-Pasifik*, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa: (1) masalah Kamboja telah memperkuat persatuan dan meningkatkan profil ASEAN di forum internasional; (2) ASEAN harus mencari titik-temu dan tumpuan kerjasama baru setelah masalah Kamboja berhasil diselesaikan agar momentum yang telah dicapai sekarang ini dapat dipertahankan; (3) tantangan yang dihadapi ASEAN di masa men-

datang adalah tidak lagi menggalang sikap bersama menghadapi suatu ancaman dari luar, tetapi penggalangan kebersamaan sikap politik yang mempersatukan; (4) pertemuan para Menlu ASEAN ke-22 di Brunei, Juli 1989, diharapkan mencapai persetujuan untuk mengadakan dialog dengan negara-negara Pasifik dalam bentuk baru, dan hasil pertemuan tahunan ke-17 tahun 1984 dapat diaktifkan kembali; (5) pada pertemuan tahunan ke-18, ASEAN gagal mencapai persetujuan untuk mengadakan dialog dengan negara-negara Pasifik dalam bentuk baru, karena Malaysia menolak untuk mendukung gagasan semacam itu; (6) prakarsa yang telah tertunda empat tahun itu sangat sayang bila tidak diambil kembali oleh ASEAN, karena kerjasama Asia-Pasifik itu dapat menjadi suatu hal yang sangat mendesak; (7) gagasan PM Australia, Bob Hawke, untuk membentuk forum konsultasi di antara negara-negara Asia-Pasifik dapat menjadi cambuk bagi ASEAN untuk mengatasi perbedaan-perbedaan kecil yang pernah ada dan meraih kembali kesempatan untuk mengadakan forum dialog ASEAN-Pasifik; (8) sudah waktunya dipikirkan untuk melaksanakan dialog para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dengan negara-negara Pasifik; (9) format dialog 6 + 5 + 1 sudah ketinggalan zaman dan kurang sesuai dengan prestise ASEAN yang sudah meningkat saat ini, karenanya harus diubah menjadi 6 + 5 atau enam negara ASEAN dengan lima negara mitra dialog Pasifik secara bersama-sama; (10) untuk menghadapi perkembangan Asia-Pasifik akhir-akhir ini, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara harus memilih mitra yang paling tepat di antara empat negara besar di kawasan Asia-Pasifik untuk membantu pertumbuhan ekonomi, perdagangan luar negeri dan pembangunan; (11) Jepang dan AS merupakan negara-negara yang dapat membantu perdagangan dan mendukung pembangunan ekonomi secara berlanjut di kawasan Asia-Pasifik; (12) pemilihan Jepang dan AS samasekali tidak dilatarbelakangi oleh alasan ideologi, melainkan karena parahnya keadaan ekonomi RRC dan Uni Soviet (*Kompas*, 6 Juni 1989); (13) ada tiga tahapan perubahan peta politik di Asia-Pasifik, yakni: (a) nasionalisme yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia; (b) munculnya komunisme; (c) perubahan yang mendasar dalam sistem ekonomi, politik dan sosial di negara-negara komunis; (14) kejadian-kejadian di Uni Soviet, RRC dan negara komunis lainnya sangat mengurangi kredibilitas sistem komunis, sehingga ideologi tidak lagi merupakan faktor penting dalam pereaturan politik dunia; (15) beberapa tahun mendatang, negara-negara komunis akan lebih disibukkan dengan urusan dalam ne-

gerinya, hal ini berarti akan mengurangi kegiatan mereka untuk mencampuri urusan negara lain yang non-komunis dan membawa keterbatasan senjata sebagai alat politik luar negeri mereka; (16) AS merupakan mitra perdagangan dan investasi yang sangat penting bagi negara-negara Asia Tenggara, terutama ASEAN, karena negara ini sampai sekarang masih merupakan pasaran yang paling liberal kalau dibandingkan dengan pasaran negara lain (*Suara Pembaruan*, 9 Juni 1989).

Dr. Juwono Sudarsono mengatakan: (1) kerjasama regional berdasarkan pada konvergensi politik, kedekatan geografik dan keunggulan komparatif, yang secara bersama atau sendiri-sendiri dapat saling mendukung dan mengisi serta memperkuat kerjasama; (2) kerjasama yang langgeng dan mantap mensyaratkan adanya persepsi strategik yang sama dan pemanfaatan jarak sebagai unsur penting dalam bertetangga; (3) pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membuat pudarnya konsep ideologi dalam hubungan internasional, dan memperkecil jarak bagi transaksi dagang dan usaha niaga serta mempengaruhi kerjasama intra-regional; (4) dari semula kerjasama ASEAN lebih bersifat saling bersaing daripada saling mengisi dan memperkuat, karenanya di tahun 1990-an kerjasama politik ASEAN harus lebih didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman sistem politik dan pemerintahan yang lebih mendalam di antara sesama anggotanya; (5) jika ASEAN lahir pada zaman pembendungan komunisme, maka pada 1990-an ASEAN ditantang untuk membendung kemiskinan, kerusakan lingkungan dan pecahnya perang; (6) membangun rasa percaya di antara sesama anggota dan antara bangsa merupakan tantangan ASEAN di masa mendatang; (7) Indonesia mempunyai posisi sentral dan pergantian pimpinan nasional tahun 1993 merupakan tonggak sejarah bagi kerjasama politik ASEAN; (8) Indonesia perlu memusatkan perhatian untuk mempersiapkan tenaga ahli mengenai sejarah kerjasama ASEAN, terutama yang menyangkut geo-politik; (9) makin besar peranan kerjasama ekonomi, ilmu dan pengetahuan, hakikat kerjasama regional makin dipengaruhi oleh faktor-faktor lintas benua yang sering bersifat trans-ideologi (*Suara Pembaruan*, 6 September 1989).

Mantan Wakil PM RI, Hardi SH mengatakan bahwa: (1) adanya polarisasi kekuatan komunis di Indocina dan non-komunis di ASEAN seharusnya dilenyapkan; (2) meskipun Uni Soviet melaksanakan keterbukaan dan restrukturisasi, tetapi dia tidak akan melepaskan pengaruhnya yang telah ditanamkan di Vietnam; (3) AS bertekad untuk mempertahankan keberadaannya di Fi-

lipina dan menjalin hubungan baik dengan ASEAN; (4) keamanan dan stabilitas kawasan ini sangat erat hubungannya dengan perimbangan kekuatan dan keamanan dunia (*Pelita*, 6 Juni 1989).

Berkaitan dengan masalah itu, Dr. C.P.F. Luhulima mengatakan di Gedung Merdeka Bandung tanggal 24 Juni 1989, bahwa: (1) pertarungan mengenai kepemimpinan dalam berbagai forum dunia akan sangat kuat mempengaruhi perekonomian ASEAN dan negara-negara lain di Asia-Pasifik; (2) stabilitas dan keamanan negara-negara ASEAN yang didukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan akan mengalami berbagai gangguan, sehingga akan mendestabilisasikan ketahanan nasional dan ketahanan regional ASEAN; (3) usaha AS untuk mengurangi ketegangan ekonomi dengan Jepang akan dilakukan dengan ekspansi ekspor dan pengurangan pengeluaran negara, termasuk militer; (4) ekspansi ekspor AS akan mendesak Jepang, negara-negara industri baru, ASEAN dan Australia. Usaha ini bertujuan membuka pasar mereka lebih besar lagi. Tindakan semacam ini dapat memaksa negara-negara itu untuk mencari pasar ekspor alternatif atau mengandalkan permintaan di dalam negeri; (5) dalam tahun-tahun mendatang andalan utama bagi negara anggota ASEAN masih tetap diversifikasi ekspor, tetapi pengalihan tujuan ekspor ASEAN dari AS ke Jepang, negara industri baru dan MEE hanya dapat dilakukan secara bertahap, karena masih memerlukan banyak penyesuaian; (6) AS masih tetap merupakan pasar ekspor ASEAN yang paling besar dan sumber impor kedua terbesar setelah Jepang; (7) ASEAN harus bersama-sama mengembangkan suatu strategi pemasaran yang memadai untuk memasuki pasar Eropa, apalagi setelah terbentuknya pasar tunggal Eropa yang sangat kompetitif sifatnya; (8) selain pasar Eropa, ASEAN perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada pasar-pasar Jepang dan negara industri baru, karena negara-negara itu secara geografis lebih dekat; (9) diversifikasi tujuan ekspor tidak akan menyelesaikan ketegangan ekonomi Jepang-AS dan justru dapat membuat destabilitas kawasan Asia-Pasifik; (10) ASEAN dapat memberikan sumbangannya dalam pertemuan para Menlu ASEAN dengan mitra dagangnya dalam bentuk 6 + 1 dan 6 + 5 di Brunei bulan Juli 1989 untuk mendekatkan kedua pihak yang sedang perang dagang. Pertemuan ini penting untuk mencari jalan keluar dari perselisihan perdagangan dan keuangan demi kepentingan negara-negara Asia-Pasifik; (11) pemusatan perhatian pada pola keamanan, stabilitas dan pengeluaran militer akan makin terdesak oleh pola keamanan, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan yang sejak semula mendasari

kerjasama ASEAN; (12) kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan masa depan, selain mendatangkan pertumbuhan perdagangan dan pendapatan yang cepat, juga akan menimbulkan pertentangan kepentingan, khususnya antara kedua adikuasa ekonomi di wilayah ini; (13) ketegangan yang telah mulai memuncak ialah perselisihan AS dengan Jepang dan negara industri baru, karena defisit rangkap AS di bidang perdagangan dan pembayaran (*Suara Pembaruan*, 26 Juni 1989).

2. Pertemuan Meja Bundar Asia-Pasifik ke-3

Pertemuan Meja Bundar Asia-Pasifik ke-3 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 17-18 Juni 1989, dihadiri oleh 150 orang peserta dari 23 negara untuk membahas hubungan Amerika Serikat-Uni Soviet yang sedang mereda, pemulihan hubungan RRC-Uni Soviet, perang dingin Soviet-Jepang, Sino-Vietnam, pertikaian Korea, Kampuchea dan Asia Tenggara.

PM Malaysia, Mahathir Mohammad, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu: (1) negara-negara besar tidak boleh menganggap remeh peranan negara kecil untuk memberikan sumbangannya pada perdamaian dunia, misalnya negara-negara kecil yang terbagung dalam ASEAN telah dan akan terus berusaha menciptakan keamanan sepenuhnya di kawasan Asia Tenggara; (2) ASEAN yang berasal dari sekumpulan negara yang berbeda-beda, telah berkembang menjadi sebuah masyarakat yang bersendikan pada saling pengertian, saling percaya dan kerjasama aktif yang semuanya itu belum pernah terjadi dalam sejarah Asia Tenggara; (3) negara-negara Asia Tenggara agar menghilangkan rasa saling curiga dan kesalahpahaman, karena hal itu tidak akan menguntungkan; (4) demi kepentingan Asia Tenggara, diperlukan perimbangan tenaga yang sehat dan satu sistem yang terbuka agar negara-negara di kawasan ini dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi, dinamika sosial, persatuan dan keamanan politik; (5) semua negara besar, termasuk negara-negara Eropa Barat dan Asia Timur, perlu melihat langsung ke Asia Tenggara agar mereka dapat melaksanakan peranan yang membangun dan memberikan manfaat bagi semua pihak; (6) tujuan mengubah Indocina dari medan pertempuran menjadi sebuah pasaran, mungkin tidak akan terwujud karena banyak tergantung pada penarikan tentara Vietnam dari Kamboja; (7) ASEAN harus bersedia melaksanakan peranan yang benar-benar dapat menghilangkan hambatan-hambatan dan dapat mewujudkan negara Kamboja yang merdeka, netral dan aman; (8) bila dasar penghapusan suatu bangsa kembali muncul, hal itu akan menjadi satu

tragedi bagi Kamboja, karenanya segala usaha perlu dilakukan untuk mencegah meletusnya perang saudara di negeri itu (*Antara*, 18 Juni 1989).

Sementara itu Wakil Menlu Vietnam, Tran Quang Co, mengatakan bahwa: (1) negara-negara di Asia Tenggara perlu untuk menyingkirkan rasa kurang percaya, kecurigaan dan persaingan di antara sesama mereka agar dapat menjamin perdamaian dan stabilitas kawasan ini; (2) selama rasa kurang percaya masih ada di dalam suasana politik kawasan ini, mungkin konfrontasi regional akan tetap ada; (3) negara-negara Asia Tenggara perlu menyatukan usaha-usaha untuk menjamin pertumbuhan yang kuat dan mantab serta menolak setiap pencemaran dari lingkungan politik internasional; (4) kerjasama ekonomi antar negara-negara Asia Tenggara hendaknya ditingkatkan, karena ketergantungan antar negara merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan; (5) peredaan ketegangan dan tindakan-tindakan negara adikuasa untuk mengakhiri masalah Kamboja telah menciptakan kondisi yang tepat untuk mewujudkan ZOPFAN; (6) normalisasi hubungan di antara negara-negara besar telah menciptakan rasa percaya diri yang semakin besar di negara-negara yang lebih kecil dalam penyesuaian kembali kebijaksanaan politik mereka (*Angkatan Bersenjata*, 20 Juni 1989).

3. Jepang dan Masa Depan Asia Tenggara

Seminar yang bertema Jepang dan Masa Depan Asia Tenggara: Ancaman atau Peluang, berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 26 Juni 1989 diikuti antara lain oleh Dr. Noordin Sopiee, Wakil Menlu Vietnam, Tran Quang Co, Ketua Program Yayasan Keamanan Jepang, Dr. Kazuo Takahashi dan Pimpinan Redaksi Jakarta Post, Sabam Siagian.

Dr. Noordin Sopiee mengatakan bahwa: (1) walaupun terdapat pertikaian, tetapi terdapatnya saling pengertian yang lebih baik menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara lebih banyak menganggap Jepang sebagai satu peluang daripada ancaman; (2) setiap negara dapat menjadi ancaman bila menyalahgunakan negara itu, atau karena terlalu bodoh dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh; (3) walaupun terdapat keraguan dan kecurigaan pada masa lampau, umumnya negara Asia Tenggara kini percaya bahwa Jepang bersedia membantu negara berkembang sebagai *Godfather* yang baik daripada tuan rumah yang agresif.

Wakil Menlu Vietnam, Tran Quang Co, mengatakan antara lain: (1) Jepang harus tahu bentuk hubungan

yang baru dan bermanfaat bagi kedua belah pihak; (2) munculnya Jepang sebagai raksasa ekonomi memberi manfaat terutama kepada Vietnam yang sangat memerlukan investasi asing dan alih teknologi maju; (3) saat ini Jepang merupakan sumber bantuan yang dapat menggerakkan pembangunan di negara-negara Asia Tenggara; (4) negaranya tidak setuju dengan ide *Pax Nipponica* atau Jepang sebagai negara nomor 1 di Asia Tenggara dan berharap ASEAN lebih baik menganekaragamkan hubungan dengan negara maju lainnya.

Sabam Siagian mengatakan antara lain: (1) ada keyakinan yang lebih mendalam bahwa Jepang bersedia membantu negara berkembang; (2) bagi Jepang akan lebih bermanfaat jika kawasan ASEAN makmur dan stabil, karena merupakan kawasan yang strategis; (3) Jepang agar bersedia membangun kembali Indocina setelah masalah Kamboja diselesaikan.

Sementara itu Dr. Takahashi mengatakan: (1) hubungan Jepang dengan Asia Tenggara sebagai perkawinan yang memerlukan kerjasama untuk menghadapi tantangan masa depan; (2) sudah tiba waktunya bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk lebih agresif dalam pasaran dunia dan tidak menunggu sampai Jepang berbuat sesuatu lebih dahulu; (3) 70% dari US\$10 milyar bantuan luar negeri Jepang telah diberikan kepada Asia. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak tahun 1975 (*Antara*, 18 Juni 1989).

VI. ICK BELUM BERHASIL MENYELESAIKAN KONFLIK KAMBOJA

Konperensi Internasional tentang Kamboja (*International Conference on Cambodia* atau ICC, yang juga dikenal dengan ICK) berlangsung di Paris tanggal 30 Juli - 30 Agustus 1989 untuk membantu menyelesaikan konflik Kamboja secara menyeluruh. Konperensi yang diprakarsai oleh Perancis itu diketuai oleh Perancis bersama Indonesia dan dihadiri oleh delegasi Anggota Tetap DK PBB (AS, Uni Soviet, Perancis, Inggris, dan RRC) yang dipimpin oleh Menlu masing-masing, 6 negara ASEAN yang juga dipimpin oleh Menlu masing-masing, Jepang, India, Australia, Kanada, Vietnam, Laos, Zimbabwe selaku Ketua GNB dan Sekjen PBB serta wakil-wakil faksi-faksi Kamboja yang bertikai (Republik Khmer dipimpin oleh Heng Samrin dan Hun Sen, dan CGDK yang dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk).

ICK ini didahului dengan pertemuan antara Pangeran Norodom Sihanouk dan PM Republik Khmer, Hun

Sen, di Paris tanggal 24 Juli 1989.

Konperensi ini merupakan konperensi perdamaian Indocina yang terbesar setelah Perang Dunia II.

Beberapa saat sebelum ICK dibuka, pemerintah Phnom Penh mengumumkan penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Sejak bulan Mei sampai dengan Juli 1989, pasukan yang telah ditarik dari Kamboja mencapai 24.000 orang, dan sisanya sekitar 26.000 orang akan ditarik sekitar tanggal 21-26 September 1989 (*Antara*, 31 Juli 1989).

Menlu Perancis mengatakan pada pembukaan konperensi itu bahwa: (1) Khmer Merah perlu diikutsertakan dalam pemerintahan Kamboja di masa depan agar perang yang berkelanjutan itu dapat diakhiri; (2) seandainya ICK perlu disusul dengan pertemuan tingkat menteri; (3) penarikan pasukan Vietnam merupakan salah satu syarat tercapainya perdamaian di Kamboja, di samping perlunya rekonsiliasi antar keempat faksi Kamboja yang bertikai itu, adanya mekanisme pengawasan internasional yang kuat dan dapat diandalkan untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam itu, gencatan senjata serta pemilihan umum di Kamboja; (4) Perancis memuji peranan Indonesia yang telah berhasil menyelenggarakan JIM I dan JIM II (*Antara*, 31 Juli 1989).

Pada kesempatan itu, Menlu Ali Alatas menekankan pentingnya penyelesaian politik untuk menjadikan Kamboja suatu negara yang netral, damai, bebas dan non-blok serta tidak merupakan ancaman bagi negara-negara tetangganya. Konflik Kamboja yang telah berlangsung selama 11 tahun merupakan suatu persoalan yang rumit, oleh sebab itu perlu penyelesaian yang menyeluruh. Untuk itulah ASEAN membantu mengatasinya melalui dialog-dialog, baik melalui JIM I maupun JIM II (*Antara*, 31 Juli 1989).

Seperti halnya Menlu Ali Alatas, Sekjen PBB Peres de Cuellar menekankan perlunya penyelesaian yang menyeluruh atas konflik Kamboja dan meminta keempat Kamboja untuk membantu tugas ICM. Di samping itu dia mengusulkan agar misi pencari fakta mengunjungi Kamboja untuk membantu tugas ICM (*Antara*, 21 Juli 1989).

Pada tanggal 1 Agustus 1989, konperensi tingkat Menlu ini berakhir dan berhasil mencapai kesepakatan mengenai suatu rencana kerja untuk mengusahakan penyelesaian politik di Kamboja. Sehubungan dengan hal ini, dibentuklah tiga komite kerja dan sebuah panitia ad

hoc untuk merumuskan persetujuan menyeluruh yang mencakup: (1) penarikan mundur pasukan Vietnam di bawah pengawasan internasional; (2) jaminan internasional bagi kemerdekaan dan netralitas Kamboja; (3) pembentukan pemerintahan koalisi sementara berdasarkan rekonsiliasi nasional; (4) pemilihan umum yang bebas; (5) pemulangan para pengungsi; serta (6) pembangunan kembali Kamboja. Di samping itu juga disepakati untuk segera mengirim sebuah misi pengumpul fakta ke Kamboja untuk mengumpulkan keterangan-keterangan teknis di seluruh Vietnam guna membantu komite kerja merumuskan bentuk maupun pekerjaan ICM (*Kompas*, 2 Agustus 1989).

Namun demikian Menlu Perancis, Roland Dumas, menegaskan bahwa pengiriman misi PBB itu tidak berarti bahwa mekanisme kontrol internasional itu harus berbentuk pasukan perdamaian PBB. Vietnam menghendaki mekanisme kontrol internasional itu terdiri dari sebuah komisi 6 negara (di antaranya terdiri atas India, Indonesia, Polandia, Kuba dan Australia), sementara negara-negara yang lain menghendaki pasukan penjaga perdamaian PBB (*Kompas*, 2 Agustus 1989).

Kesepakatan itu nyaris gagal karena Khmer Merah sebelumnya menyatakan keberatan.

Komite Kerja Pertama bertugas membahas landasan dasar penghentian pertempuran, mandat dan prinsip-prinsip pembentukan serta pengoperasian ICM untuk mengawasi pelaksanaan penyelesaian konflik Kamboja secara menyeluruh. Komite ini diketuai bersama oleh Kanada dan India.

Komite Kerja Kedua bertugas merumuskan komitmen mengenai langkah-langkah ICK untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, netralitas dan integritas Kamboja, serta menjamin penghentian dan tidak terjadinya campur-tangan asing lagi. Komite ini diketuai bersama oleh Malaysia dan Laos.

Sedangkan Komite Kerja Ketiga bertugas merumuskan usaha-usaha untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan para pengungsi dan orang-orang yang terusir dari Kamboja untuk kembali ke negaranya serta mempersiapkan program-program pokok internasional untuk membangun perekonomian Kamboja. Ketua bersama komite ini adalah Australia dan Jepang.

Sementara itu, Komite ad hoc bertugas membahas soal-soal yang berkaitan dengan pelaksanaan rujuk nasional dan pembentukan pemerintahan peralihan

quadripartite di bawah pimpinan Pangeran Norodom Sihanouk. Komite ini bertugas juga untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Sedangkan keanggotaan komite ini terdiri atas keempat faksi Kamboja dan Ketua Bersama ICK.

Keempat Komite ini akan bersidang sampai tanggal 24 Agustus 1989, dan pada tanggal 24-26 Agustus 1989 Komite Koordinasi akan melakukan sidangnya, sehingga pada tanggal 28 Agustus Sidang Tingkat Menteri tahap kedua dapat dimulai (*Antara*, 2 Agustus 1989).

Pada tanggal 19 Agustus 1989, dalam rangka mendobrak kemacetan mengenai pembentukan pemerintahan sementara di Kamboja, Perancis mengusulkan untuk membentuk pemerintahan dua tingkat dengan Pangeran Norodom Sihanouk sebagai Kepala Negara dan Hun Sen tetap sebagai Perdana Menteri. Dalam pemerintahan dua tingkat ini, Khmer Merah diikutsertakan di dalam Dewan Negara. Tetapi usul Perancis itu ditolak oleh keempat faksi Kamboja.

Pada tanggal 23 Agustus 1989, misi teknis PBB melaporkan hasil penjajakannya kepada konperensi. Kesimpulan yang dihasilkan adalah keadaan di Kamboja sedemikian parah, sehingga setiap tim peninjau internasional yang akan datang ke Kamboja harus dapat berdikari di bidang logistik.

Pada tanggal 25 Agustus 1989, komite-komite yang dibentuk itu menyerahkan hasil kerjanya kepada koor-

dinasi yang terdiri dari kedua Ketua Konperensi (Perancis dan Indonesia).

Pada tanggal 28 Agustus 1989, Sidang Tingkat Menteri Tahap Kedua dimulai. Tetapi AS, Uni Soviet, RRC dan Inggris tidak mengirimkan Menteri Luar Negerinya. Atas dasar pembicaraan dalam sidang ini, kedua ketua konperensi menilai adanya perbedaan pandangan yang tajam antara kelompok-kelompok Kamboja yang bertikai, khususnya mengenai masalah-masalah pokok yang sentral.

Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1989 diputuskan bahwa konperensi ini diskors sampai waktu yang belum ditentukan, karena masih belum mungkin mencapai penyelesaian konflik Kamboja secara menyeluruh, meskipun diakui adanya kemajuan untuk menjabarkan berbagai unsur yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian konflik itu.

Sehubungan dengan hal itu, konperensi menghimbau semua pihak, khususnya keempat faksi Kamboja yang bersengketa, untuk meningkatkan usaha guna mencapai penyelesaian menyeluruh. Kedua ketua konperensi juga mendapat mandat untuk mendorong usaha-usaha itu, termasuk memanggil komite-komite kerja untuk mulai bersidang lagi. Diharapkan dalam jangka waktu 6 bulan, kedua ketua konperensi itu telah mulai mengadakan konsultasi dengan semua peserta untuk menentukan waktu yang terbaik guna memulai konperensi lagi (*Kompas*, 1 September 1989).

Para Penulis

- **BANDORO, Bantarto,**
Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional Publik, Universitas Indonesia, 1978; MA dalam Hubungan Internasional dari International University of Japan, Graduate School of International Relations, 1986; sejak 1980 menjadi anggota Departemen Hubungan Internasional (HI) CSIS, peneliti dan pengamat masalah Asia Timur, khususnya Jepang dan hubungannya dengan Amerika Serikat.
- **DIPOYUDO, Kirdi,**
Gelar Doktor dari Universitas Urbaniana, Roma (1961). Spesialisasinya adalah filsafat sosial. Mulai tahun 1972 menjadi staf peneliti CSIS, anggota Departemen Hubungan Internasional CSIS, mengamati masalah-masalah internasional termasuk kawasan Afrika dan Timur Tengah serta masalah-masalah yang berhubungan dengan filsafat sosial. Editor *Analisa* (1976-1984), Editor *The Indonesian Quarterly* (1984-1988), Ketua Departemen Hubungan Internasional (1979-1983).
- **KAMALUDDIN, Rustian,**
Guru Besar dan Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
- **LUHULIMA, C.P.F.,**
Berijazah Sarjana Muda, Fakultas Sastra Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, tahun 1957. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Muenster, Westf dan berhasil meraih gelar Magister Artium (MA) dan Philosophy Doctor (Ph.D) dalam bidang filsafat. Sejak Juli 1964 menjadi Staf Peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewilayahan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Puslitbangpolwil-LIPI (sebelumnya bernama Lembaga Riset dan Kebudayaan Nasional LIPI/LRKN-LIPI). Tahun 1971-1980 menduduki jabatan Sekretaris LRKN-LIPI; kemudian tahun 1980-1984 sebagai Direktur bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Sekretariat Nasional ASEAN. Kini Staf Peneliti Utama Puslitbangpolwil-LIPI, pengamat dan peneliti kawasan Euro-Amerika.

- **SOEKITO, Wiratmo,**
Kolumnis berbagai surat kabar di bidang politik dan kebudayaan (1966 - sekarang); dosen LPKJ/IKJ (1977 - sekarang); komentator politik dalam dan luar negeri TVRI (1966-1969) dan RRI (1966-1972). Belajar pada Universitas Katolik Nijmegen, Belanda, Jurusan Studi Filsafat (1954-1955).
- **WANANDI, Jusuf,**
Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Jakarta (1960). Pada tahun 1964 menjadi dosen di fakultas dan universitas yang sama. Tahun 1977: Congressional Fellow yang disponsori oleh American Political Science Association (APSA). Kini Ketua Dewan Penyalun dan Anggota Dewan Direktur CSIS; Anggota, Board of Governors, East-West Center, Honolulu; Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Kerjasama Ekonomi Pasifik.

Catatan:

tempel
perangko
di sini

Kepada:
Biro Pemasaran
Centre for Strategic and
International Studies

Jl. Tanah Abang III/23-27
Jakarta 10160
Telepon: 356532-5

Naskah	Naskah-naskah untuk ANALISIS hendaknya diketik dengan jarak dua spasi, sepanjang 20-30 halaman kuarto, termasuk referensi dalam bentuk catatan kaki dan/atau daftar bacaan. Pengiriman naskah hendaknya disertai nama lengkap dan alamat penulis yang jelas. Untuk tulisan-tulisan yang dimuat akan disediakan honoraria yang pantas. Naskah-naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulis jika hal itu dikehendakinya. Surat menyurat yang berhubungan dengan hal tersebut harap ditujukan ke Redaksi ANALISIS CSIS.
Langganan	Harga pengganti ongkos cetak Rp 3.000,00 per eksemplar; langganan setahun (6 nomor, sudah termasuk ongkos kirim biasa) Rp 15.000,00. Surat menyurat yang berhubungan dengan langganan ditujukan ke Biro Pemasaran, CSIS.
Alamat	Jalan Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160, Telepon 356532, 356533, 356534, 356535.